

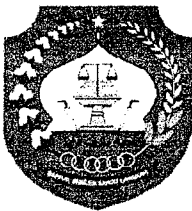
**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2012 - 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2016**



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR **11** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2
TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012-2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Aceh Barat Daya Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan;
 - c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 61/2911/sj/ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang dibentuk untuk selanjutnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan atas Qanun

Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, diantara angka 7, angka 10 dan angka 11 disisip 1 (satu) angka yakni angka 7a dan angka 10a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 7.a Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat RPJM Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2017.
- 10.a Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten adalah penyesuaian terhadap sasaran tahunan dan target pencapaian

perencanaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang tercantum dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya 2012-2017, guna menindaklanjuti ketentuan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: 61/2911/sj/ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan bagi seluruh SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
 13. Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5a, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5a

Perubahan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya 2012-2017 berkenaan dengan perubahan sasaran tahunan, target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan, sesuai dengan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional serta pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Isi beserta uraian RPJM Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6a, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6a

Perubahan sasaran tahunan, target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a harus ditindaklanjuti dengan penyusunan perubahan Renstra SKPK.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awwal 1438 H

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH
NOMOR (11 / 169 / 2016)

SINGKATAN DAN AKRONIM

ACFTA	: ASEAN-China Free Trade Agreement
ADHB	: Atas Dasar Harga Berlaku
ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKABA	: Angka Kematian Balita
AKB	: Angka Kematian Bayi
AKI	: Angka Kematian Ibu
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMI	: Annual Malaria Incidence
APBA	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
APBK	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
ASI	: Air Susu Ibu
BBLBR	: Berat Badan Lahir Rendah
BB/TB	: Berat Badan per Tinggi Badan
BKM	: Badan Kemakmuran Mesjid
BPP	: Biaya Pokok Penyediaan
BPP / BIP	: Balai Penyuluh Pertanian/Balai Informasi Pertanian
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMG	: Badan Usaha Milik Gampong
BUMIL	: Ibu Hamil
BUMK	: Badan Usaha Milik Kabupaten
CDR	: Case Detection Rate
DAS	: Daerah Aliran Sungai
DBD	: Demam Berdarah Dengue



DED	: Detail Engineering Design
DI	: Daerah Irigasi
Disbudparpora	: Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
D/S	: Cakupan Penimbangan Balita
GIS	: Geospatial Information System
Ha	: Hektar
HDI	: Human Development Index
IB	: Inseminasi Buatan
IKK	: Ibu Kota Kecamatan
IMT-GT	: The Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
ISPA	: Infeksi Saluran Pernapasan Akut
IT	: Informasi Teknologi
JICA	: Japan International Cooperation Agency
KB	: Keluarga Berencana
KEK	: Kekurangan Energi Kronis
KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
km	: Kilometer
KSP	: Koperasi Simpan Pinjam
KV.A	: Kilo Volt Ampere
KWh	: Kilo Watt hour
K3	: Ketertiban, Ketentraman, Keindahan
MDG's	: Millenium Development Goals
mdpl	: meter di atas permukaan laut
Migas	: Minyak dan Gas
mm	: millimeter
MT	: Musim Tanam
Musrenbang	: Musyawarah Perencanaan Pembangunan



MW	: Mega Watt
Nakes	: Tenaga Kesehatan
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
ODTW	: Objek Daerah Tujuan Wisata
OKP	: Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
O & P	: Operasi Dan Pemeliharaan
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PHBS	: Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
PKSN	: Pusat Kegiatan Strategis Nasional
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PLTD	: Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PLTMH	: Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PLTP	: Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PMK	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Posyandu	: Pos Pelayanan Terpadu
PT	: Perseroan Terbatas
PU	: Pekerjaan Umum
PUS	: Pasangan Usia Subur
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RAPBA	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh
RAPBK	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RDT	: Rapid Diagnostic Test
Renja KL	: Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga
Renstra	: Rencana Strategis
Riskedas	: Riset Kesehatan Dasar



RKA	: Rencana Kegiatan Anggaran
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPA	: Rencana Kerja Pemerintah Aceh
RKPK	: Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RPJP	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RSUTP	: Rumah Sakit Umum Teungku Peukan
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SAB	: Sumber Air Bersih
SDM	: Sumber Daya Manusia
SKPA	: Satuan Kerja Pemerintah Aceh
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPK	: Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
SPAM	: Sistem Penyediaan Air Minum
SPOT	: Systeme Probatoire d'Observation de la Terre
TBC	: Tuberkulosis
TBS	: Tandan Buah Segar
TB/U	: Tinggi Badan per Usia
TNGL	: Tanaman Nasional Gunung Leuser
TPAS	: Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
TPS	: Tempat Penampungan Sampah
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
TPST	: Tempat Pengolahan Sampah Terpadu
UHH	: Umur Harapan Hidup
UKM	: Usaha Kecil Menengah
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UMP	: Upah Minimum Provinsi
USP	: Unit Simpan Pinjam



WDP : Wajar Dengan Pengecualian
WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WUS : Wanita Usia Subur
3 R : Reuse, Reduce, Recycle



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	8
1.5 Maksud dan Tujuan.....	9
1.5.1 Maksud	9
1.5.2 Tujuan	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	
2.1 Aspek Geografis dan Demografi	11
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	11
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi.....	11
2.1.1.2 Topografi.....	14
2.1.1.3 Tanah dan Geologi.....	16
2.1.1.4 Hidrologi.....	19
2.1.1.5 Klimatologi	22
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	23
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	26
2.1.3 Kawasan Rawan Bencana	29
2.1.4 Demografi.....	33
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	37
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	37
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB.....	37
2.2.1.2 Pendapatan Regional Per Kapita	46
2.2.1.3 Tingkat Kemiskinan	46
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial.....	48
2.2.2.1 Pendidikan	48
2.2.2.2 Kesehatan.....	52
2.2.2.3 Sosial.....	70
2.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia.....	72
2.2.2.5 Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran	73
2.2.2.6 Gangguan Kamtibmas dan Kecelakaan	78
2.2.3 Fokus Syariat Islam, Seni Budaya dan Olahraga	79
2.3 Aspek Pelayanan Umum	86
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib	86
2.3.1.1 Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan.....	81
2.3.1.2 Pendidikan.....	91
2.3.1.3 Kesehatan.....	95
2.3.1.4 Lingkungan Hidup.....	97



2.3.1.5	Sarana dan Prasarana.....	102
2.4	Aspek Daya Saing Daerah	116
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	116
2.4.1.1	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	116
2.4.1.2	Produksi dan Produktivitas Pertanian	118
2.4.1.3	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	134
2.4.1.4	Industri dan Perdagangan	137
2.4.1.5	Pertambangan dan Energi.....	141
2.4.1.6	Pariwisata.....	143
2.4.1.7	Sumber Pendanaan.....	145
2.4.1.8	Prasarana Transportasi	148
BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH BARAT DAYA SERTA KERANGKA PENDANAAN	
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	153
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBK	153
3.1.2	Neraca Kabupaten Aceh Barat Daya	159
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	162
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran.....	163
3.2.2	Analisis Pembiayaan	164
3.3	Kerangka Pendanaan	166
3.3.1	Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	166
3.3.2	Penghitungan Kerangka Pendanaan	168
BAB IV	ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS	
4.1	Permasalahan Pembangunan.....	171
4.2	Isu Strategis	177
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	
5.1	Visi	179
5.2	Misi	180
5.3	Tujuan dan Sasaran	182
BAB VI	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan	186
6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun	202
6.2.1	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)	202
6.2.2	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)	202
6.2.3	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)	203
6.2.4	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)	204
6.2.5	Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)	204



BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	206
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN	207
BAB IX	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA ACEH BARAT DAYA	208
BAB X	PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN	
	10.1 Pedoman Transisi	214
	10.2 Kaedah Pelaksanaan	215
BAB XI	PENUTUP	218



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Luas Wilayah Administratif Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012	13
2.2 Topografi dan Kemiringan Lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya	19
2.3 Klasifikasi Tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya Menurut Sistem Taksonomi Tanah	21
2.4 Nama Lokasi Daerah Irigasi (D.I) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012	25
2.5 Jenis dan Penggunaan Luas Lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya 2008-2012.....	33
2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012.....	35
2.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008-2012	36
2.8 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012..	38
2.9 Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000	40
2.10 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Maupun Atas Dasar Harga Konstan (Hk) Tahun 2007-2012	42
2.11 Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-Sektor Terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2011 Atas Dasar Harga Berlaku.....	45
2.12 Perkembangan PDRB, PDRB per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2011	47
2.13 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya	47
2.14 Perkembangan dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2017	49
2.15 Angka Partisipasi Kasar di Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012	50
2.16 Angka Partisipasi Murni di Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012.....	50
2.17 Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke atas menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan di kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012.....	51
2.18 Angka Harapan Hidup Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012	52
2.19 Angka Kematian Balita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012	53
2.20 Angka Harapan Hidup Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012.....	56
2.21 Persentase Gizi Buruk dan Kurang (BB/U) per Kabupaten/Kota tahun 2007 (Risksedas 2007)	57
2.22 Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit	61
2.23 Kasus Malaria Klinis dan Positif per Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	64
2.24 Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil dan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2010	67
2.25 Jumlah Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	70
2.26 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2008-2012 di Kabupaten Aceh Barat Daya	72
2.27 Angkatan Kerja, TPAK dan Pengangguran (TPT) di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	73



2.28	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utamadi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	74
2.29	Penduduk Laki-laki Usia Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	75
2.30	Penduduk Perempuan Usia Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	75
2.31	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	77
2.32	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status/Kedudukan Dalam Pekerjaan Utama Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	77
2.33	Perkembangan Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011..	78
2.34	Perkembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011	79
2.35	Jumlah Petugas Agama Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012	79
2.36	Jumlah Pondok Pesantren/Dayah dan Guru di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012.	80
2.37	Jumlah Masjid dan Mushola di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012	81
2.38	Jumlah Club Olah Raga dan Sarana Olah Raga Kabupaten Aceh Barat Daya	81
2.39	Nama-Nama Club Sepak Bola Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	82
2.40	Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010	85
2.41	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	91
2.42	Rasio Ketersediaan Sekolah pada Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	92
2.43	Rasio Ketersediaan Guru pada Jenjang Pendidikan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	92
2.44	Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2011	93
2.45	Rekapitulasi Jumlah Dayah Aceh Hasil Pemuktahiran Tahun 2011 Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	94
2.46	Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2010	95
2.47	Rasio Balita terhadap POSYANDU di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011	96
2.48	Jumlah Puskesmas, PUSTU dan Poskesdes di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011 ..	96
2.49	Data Teknis SPAM Kabupaten Aceh Barat Daya	99
2.50	Sumber Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga (dalam persen) Tahun 2006-2010	100
2.51	Kondisi Jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten Tahun 2012	103
2.52	Nama Lokasi Daerah Irigasi Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012	105
2.53	Potensi Lahan Pertanian Tahun 2011	106
2.54	Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Keputusan Menteri PU No.390/KPTS/M/2007	106
2.55	Kondisi Saluran Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2011	108
2.56	Kondisi Bangunan Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2011	108
2.57	Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Aceh Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011	117



2.58	Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012	118
2.59	Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Aceh dan Aceh Barat Daya Tahun 2010-2012	121
2.60	Tanaman Perkebunan Rakyat Aceh Barat Daya, 2013	123
2.61	Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012.....	124
2.62	Produktivitas Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012.....	125
2.63	Perkembangan Populasi Ternak Menurut Jenis Tahun 2007-2011.....	126
2.64	Proyeksi Produksi Daging Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	127
2.65	Perkembangan Produksi Perikanan (Laut, Budidaya dan Perairan) di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011	128
2.66	Jumlah Penyuluh PNS, THL-TB, BPP, Gapoktan Kec, Kemukiman, Desa, Kel.Tani Per-Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2011	129
2.67	Jumlah Gabungan/Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan GP3A di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012.....	130
2.68	Perkembangan jumlah desa replikasi tahun 2010 s/d 2012	132
2.69	Jumlah Alokasi Desa Mandiri Pangan per Kabupaten Tahun 2006-2012.....	133
2.70	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2004-2011.....	135
2.71	Perkembangan Sektor Usaha UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya Posisi 30 Desember 2011	136
2.72	Perkembangan Industri Tahun 2007-2011	137
2.73	Perkembangan Pembangunan Pasar Tradisional 2009-2010.....	138
2.74	Jenis Bahan Tambang Yang di Usahakan dan Terdaftar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012.....	141
2.75	Potensi Wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	143
2.76	Perkembangan Sumber Pendanaan Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012	146
3.1	Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2012	155
3.2	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2012.....	157
3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2007-2012.....	160
3.4	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2012	163
3.5	Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2011.....	165
3.6	Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2012	167
3.7	Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah Pada Kurun Tahun 2013-2017.....	168
5.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 1	182
5.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 2	182
5.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 3	183



5.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 4	183
5.5	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 5	184
5.6	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 6	184
5.7	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 7	185
6.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 1	186
6.2	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 2	190
6.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 3	192
6.4	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 4	194
6.5	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 5	195
6.6	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 6	197
6.7	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 7	200
7.1	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya	207
8.1	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 1	208
8.2	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 2	215
8.3	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 3	218
8.4	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 4	221
8.5	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 5	222
8.6	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 6	225
8.7	Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Misi 7	228
8.8	Distribusi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2017	232



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Bagan Hubungan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	7
2.1 Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Struktur Ruang Wilayah	12
2.2 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya.....	14
2.3 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya.....	23
2.4 Peta Kawasan Strategis Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya	29
2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya.....	30
2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Yang Masuk dan Keluar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012	34
2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya 2007-2011 Atas Dasar Harga Konstan.....	43
2.8 Pendapatan Regional Perkapita Aceh Barat Daya 2008-2011 (juta Rp)	46
2.9 Perkembangan dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2017	48
2.10 Distribusi Persentase Penyebab Kematian Ibu Melahirkan	55
2.11 Prevalensi stunting (TB/U) per Puskesmas Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008	58
2.12 Prevalensi kurus dan sangat kurus per Puskesmas Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008.....	59
2.13 Prevalensi Kurang Energi Kronis(KEK) BUMIL per Puskesmas se Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 dan 2008.....	60
2.14 Persentase menderita diare kasus diamati di Puskesmas se Kabupaten Aceh Barat Daya ..	63
2.15 Cakupan ASI Eksklusif menurut Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya	68
2.16 Cakupan Penimbangan Balita (D/S) Tahun 2010 di Kabupaten Aceh Barat Daya	69
2.17 Grafik Produksi Tanaman Padi Kabupaten	119
3.1 Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada APBK Tahun 2007-2012	158



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu daerah memerlukan perencanaan yang matang dan komprehensif. Perencanaan ini harus dapat diukur dan dinilai kemajuannya dan perkembangannya berdasarkan indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa adanya indikator ini, maka pencapaian tujuan dan sasaran baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, tidak dapat diukur dan dinilai kemajuannya karena tidak memiliki arah pembangunan daerah yang jelas.

Sebagai rencana pembangunan lima tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 merupakan pejabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Aceh Barat Daya terpilih periode 2012-2017. RPJM ini akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJM ini juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Barat Daya yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk untuk periode waktu 20 tahunan.

Acuan utama yang digunakan dalam menyusun RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 ini adalah rumusan visi, misi, dan program indikatif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang telah disampaikan kepada masyarakat pemilih dalam Sidang Paripurna DPRK Aceh Barat Daya pada tahapan kampanye pemilihan pasangan Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJM ini juga berpedoman pada RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya, dan selaras dengan RPJM Nasional, RPJM Provinsi Aceh dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga. Selain itu, penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RPJMD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD;
3. Penyusunan Rancangan RPJMD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD;
6. Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Tujuan rujukan dari semua dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjaga sinkronisasi dan sinergi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan secara vertikal antar tingkat pemerintahan yang berbedasertamengacupada RPJM Nasional Tahun 2009-2014 dan 2015-2019. Di samping itu, untuk memperoleh hasil perencanaan pembangunan lima tahunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang aspiratif dan mengacu kepada kepentingan rakyat, maka penyusunan RPJM ini juga dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur pelaku pembangunan (*stakeholders*) di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Perubahan atas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 ini dilakukan karena beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Tahun ketiga terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya ditemukan adanya beberapa target capaian dan realisasi yang harus direvisi sesuai dengan capaian selama 3 (tiga) tahun periode pelaksanaan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mewajibkan daerah untuk mengalokasikan 10% dari dana perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga harus dilakukan penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, sehingga daerah harus menyesuaikan RPJMK dengan RPJMN;



5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengharuskan Pemerintah Daerah untuk melakukan penyesuaian dokumen Perencanaan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Atas dasar ini, maka rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dilakukan perubahan sertadi tuangkan dalam dokumen resmi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara



- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganDaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. PeraturanPemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat



- Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 23. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
 24. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2012-2017 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12);
 25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
 26. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
-



27. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2033;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005-2025.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Aceh Barat Daya periode 2012-2017 dan untuk menjaga sinergi, keselarasan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, provinsi dan kabupaten), RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 ini memiliki keterkaitan dan hubungan yang mengikat dengan dokumen perencanaan pembangunan yang dimaksud, yaitu:

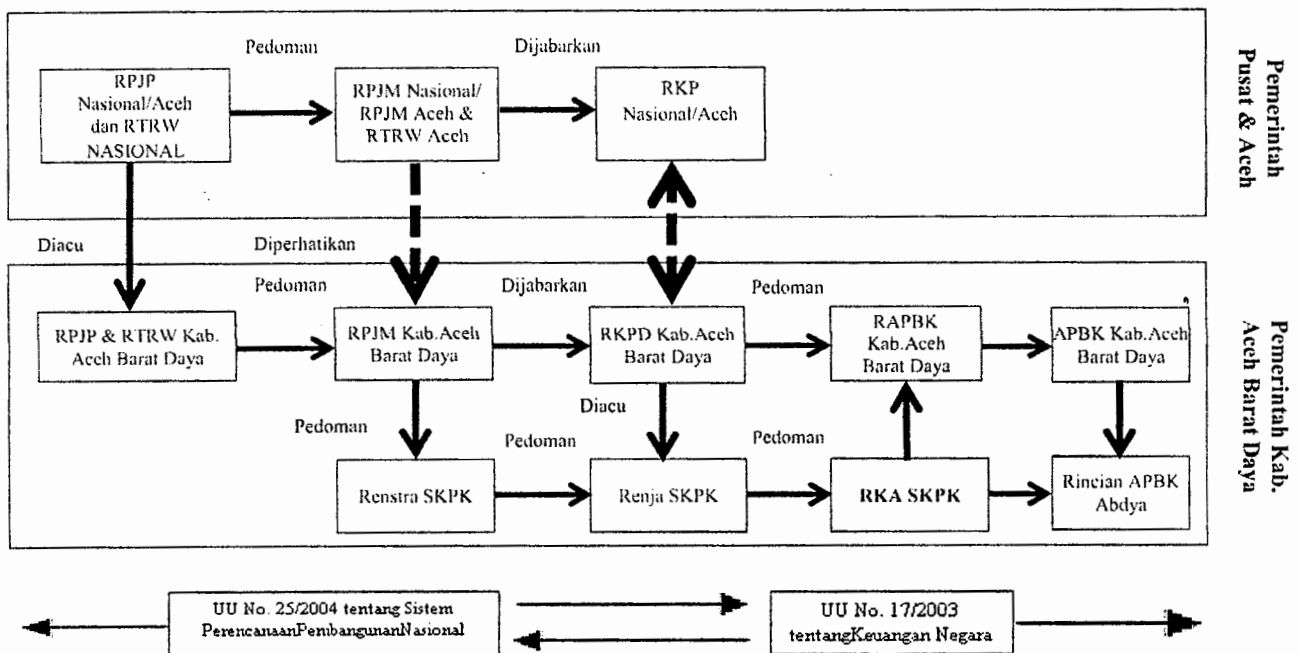
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disebut dengan RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 25 tahun;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut dengan RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh yang selanjutnya disebut dengan RPJPA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 25 tahun;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh yang selanjutnya disebut dengan RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 5 (lima) tahun;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dokumen perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan dan pengendalian ruang serta keserasian pembangunan antar sektor di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut dengan RPJP Kabupaten Aceh Barat Daya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 25 tahun;



7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPK Aceh Barat Daya adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPK Aceh Barat Daya untuk periode 5 (lima) tahunan;
8. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut dengan RKPK Aceh Barat Daya adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode satu tahun;
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPK Aceh Barat Daya adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPK untuk periode satu tahun.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 dan hubungannya dengan dokumen perencanaan lainnya, dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Bagan Hubungan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Dokumen Perencanaan lainnya



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017 ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, dan maksud dan tujuan penulisan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Bab ini menguraikan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SERTA KERANGKAPENDANAAN

Bab ini menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini berisi uraian tentang permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Bab ini menguraikan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Bab ini berisi uraian tentang kebijakan umum dan program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.



BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI KERANGKA

PENDANAAN

Bab ini menguraikan program prioritas dan pagu indikatif pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Bab ini menguraikan indikator aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah termasuk indikator kinerja masing-masing misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaedah pelaksanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB XI Penutup

Bab ini menguraikan tentang kandungan yang termuat dalam RPJM dan Pedoman pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5 Maksud dan Tujuan

1.5.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJM Perubahan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012–2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra SKPK), Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja SKPK).
2. Menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menentukan program dan kegiatan tahunan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN, APBA maupun APBK yang dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang.
3. Agar pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya lima tahun ke depan lebih terencana, terarah, efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindakan dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah.



4. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan DPRK Aceh Barat Daya khususnya dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara integral, sistematis dan akurat;
6. Menyesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan penyesuaian target dan indikator kinerja/program pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMPerubahan Kabupaten Aceh Barat DayaTahun 2012–2017 ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyediakan dokumen RPJMPerubahanKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK, Rencana Kerja PemerintahKabupaten (RKPK) dan Rencana Kerja (Renja) SKPK.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan dan lima tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJM PerubahanKabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 – 2017.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Secara geografis terletak antara 96° 34' 57" – 97° 09 '19" Bujur Timur dan 3° 34' 24" - 4° 05' 37" Lintang Utara. Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan data BPS tahun 2011 memiliki luas wilayah sebesar 2.334,01 Km² atau 233.401 Ha. Berdasarkan hasil hitungan digitasi GIS (Geographic Information System) diatas peta citra SPOT, luas Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.882,05 km² atau 188.205,02 Ha. Kabupaten ini dikelilingi bentang alam yang cukup keras dan menantang yaitu Lautan Hindia dan dataran tinggi yang terjal dan curam. Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri merupakan hamparan datar, sedangkan bagian tengah merupakan kawasan Bukit Barisan yang terdiri dari gunung dan bukit-bukit dan sebagian lagi hamparan laut. Banyak potensi kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat.

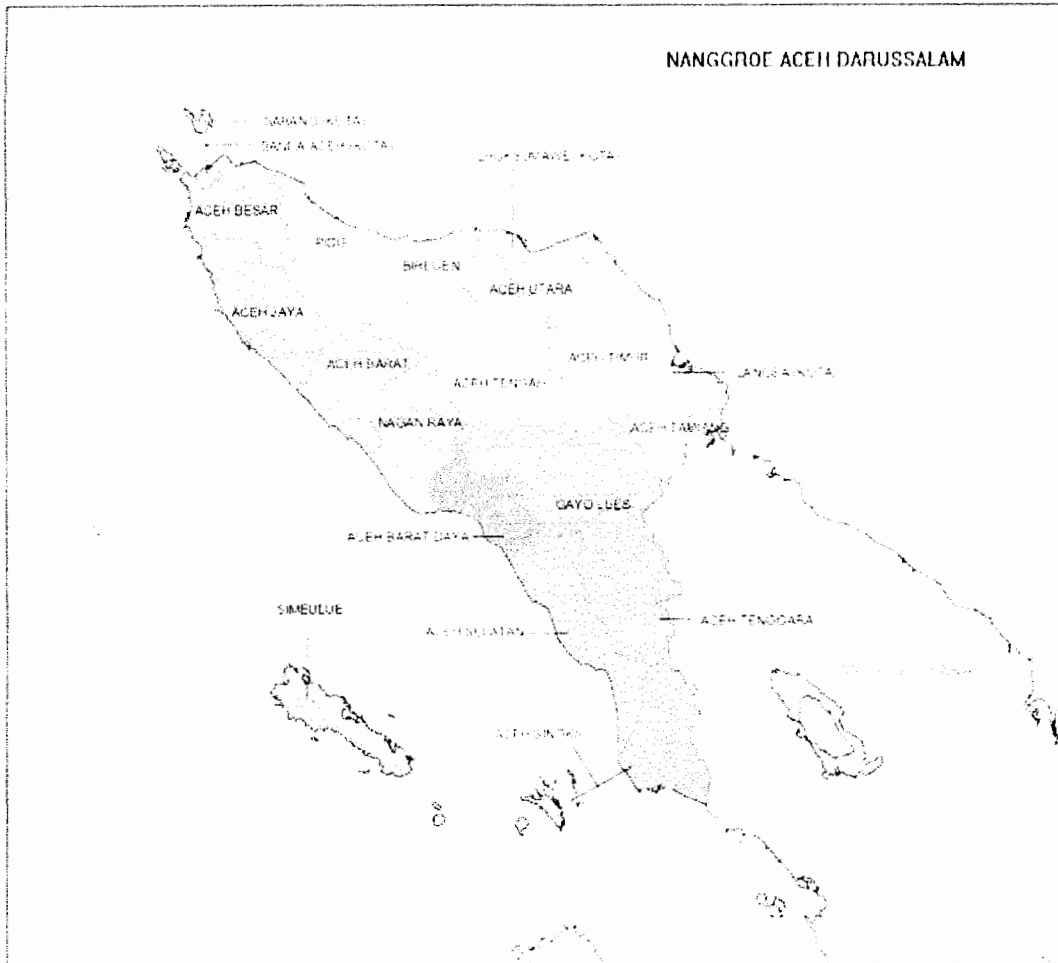
Batas-batas administratif Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Selatan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Nagan Raya.

Letak geografis Kabupaten Aceh Barat Daya dalam struktur ruang wilayah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Letak Geografis Kabupaten Aceh Barat Daya
dalam Struktur Ruang Wilayah



Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya

Pada tahun 2012 Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan, 132 (seratus tiga puluh dua) desa/gampong definitif, 20 (dua puluh) desa/gampong persiapan, 20 (dua puluh) kemukiman definitif, dan 3 (tiga) kemukiman persiapan. Secara rinci gambaran mengenai wilayah administratif beserta luas wilayah setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya tersaji pada tabel di bawah ini :

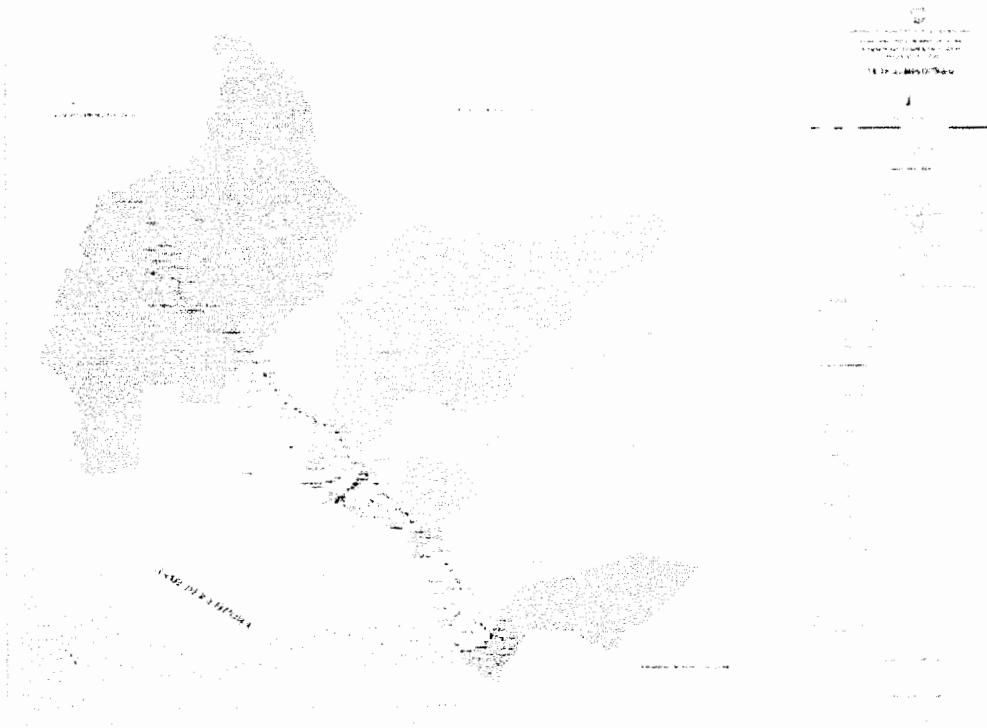
Tabel 2.1
Luas Wilayah Administratif Kecamatan
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013

No.	Kecamatan	Ibukota	Luas (Km ²)	Jarak Ibukota Kab. dgn Ibukota Kec. (Km)	Desa Definitif	Desa Persiapan
1	Babahrot	Pantee Rakyat	52.828	32	7	7
2	Kuala Batee	Psr.Kota Bahagia	17.699	19	18	3
3	Jeumpa	Alue Sungai Pinang	36.712	12	10	2
4	Susoh	Padang Baru	1.905	5	28	1
5	Blangpidie	Psr.Blangpidie	47.368	2	19	1
6	Setia	Lhang	4.392	7	6	3
7	Tangan-Tangan	Tanjung Bunga	13.291	11	15	-
8	Manggeng	Kedai Manggeng	4.094	22	17	1
9	Lembah Sabil	Cot Bak U	9.915	26	12	2
	Total		188.205	-	132	20

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya 2013-2033

Data di atas memperlihatkan bahwa Kecamatan Babahrot adalah kecamatan dengan luas wilayah yang terbesar, yakni sekitar 52.828 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah yang paling kecil adalah Susoh yakni sekitar 1.905 km². Hal ini juga menggambarkan bahwa adanya pemerataan pembagian wilayah administratif antar kecamatan. Namun demikian, masih diperlukan adanya kebutuhan untuk melakukan penataan kembali batas-batas wilayah administratif Kabupaten Aceh Barat Daya, terutama melalui kebijakan pemekaran gampong dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan umum pemerintahan dan menyimbangkan beban tugas dan tanggungjawab antar setiap pemerintah kecamatan dan gampong. Kecamatan dan gampong ini berkedudukan sebagai pusat pemerintahan terdepan sehingga program-program yang bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Untuk mengetahui peta wilayah administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.2
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya

2.1.1.2. Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan daratan yang relatif berbukit-bukit dengan tingkat kemiringan lereng yang relatif curam dan cukup beragam. Kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu :

1. 0 – 3 persen berada di bagian barat Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Susoh dan Kecamatan Babahrot;
2. 8 persen berada di bagian tengah Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Babahrot, Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan sebagian kecil di Kecamatan Kuala Batee;
3. 15 – 30 persen berada di bagian Utara Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya berada di Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Setia;

4. 30 persen berada di bagian Timur Kabupaten Aceh Barat Daya, yang membentang dari atas hingga bawah tepatnya berada di Kecamatan Manggeng, sebagian besar Kecamatan Setia, Kecamatan Jeumpa dan Kecamatan Kuala Batee.

Kondisi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan daerah dataran rendah pada umumnya memiliki ketinggian 0-25 mdpl. Dataran initersebar sepanjang jalan utama kabupaten dimana sebagian besar terletak pada Kecamatan Susoh, bagian barat Kecamatan Babahrot, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Blangpidie, Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Manggeng. Untuk wilayah dengan ketinggian di atas 500 mdpl berada di bagian tengah Kabupaten Aceh Barat Daya tepatnya berada di sebagian besar Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Setia, Kecamatan Tangan-tangan dan di Kecamatan Lembah Sabil. Sedangkan untuk wilayah dengan ketinggian diatas 1.000 mdpl sebagian besar berada di sebelah Timur Kabupaten Aceh Barat Daya, berada di Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Manggeng dan di bagian utara Kecamatan Babahrot serta di bagian timur kecamatan Lembah Sabil.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata 3.228 mm - 4.912 mm per tahun. Curah hujan turun sekitar bulan September sampai dengan awal Januari, sedangkan sisanya merupakan musim kering yang disertai curah hujan secara terbatas. Dari luas wilayah 1.882,05 km², sekitar 66,5 persen merupakan dataran rendah yang subur. Dari keseluruhan dataran yang subur itu, 62,75 persen terdiri dari tanah liat yang dipenuhi dengan hutan rakyat, hutan negara, sawah, ladang, dan kebun lainnya.

Rencana alokasi pemanfaatan ruang merupakan wujud fisik pengembangan ruang berdasarkan daya dukung masing-masing unit lahan yang secara fungsional merupakan pemberian fungsi tertentu pada suatu kawasan. Kegiatan fungsional yang diatur dalam pemanfaatan wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ini meliputi dua dominasi penggunaan utama, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2.1.1.3. Tanah dan Geologi

1. Geologi

Struktur geologi batuan di Kabupaten Aceh Barat Daya, terbagi atas:

A. Batuan Beku

Batuan ekstrusif atau endapan volkanik di daerah penelitian terjadi pada Jura akhir – awal Kapur yaitu Formasi Tapaktuan (*Muvt*) yang didominasi oleh komposisi basalt dan andesit, aglomerat, breksi dan tufa. Satuan batuan ini umumnya terdistribusi di bagian zona pantai barat. Batuan intrusi di daerah ini memiliki umur yang berbeda-beda, pengukuran umur dari tubuh intrusi ini umumnya bersifat spekulatif. Ada sepuluh tubuh intrusi granitoid yang memotong Formasi Kluet dan secara tektonik hal ini berhubungan dengan deformasi dan metamorfosa yang terjadi pada umur Perm Tengah antara lain intrusi Granit Raneuh (MPira), Intrusi Lamarayeue (MPila) dan Intrusi Merah (MPimr). Pada akhir Jura - awal kapur intrusi ini berlanjut dan diwakili oleh intrusi kecil diorit pada bagian bawah Formasi Kluet dengan disertai beberapa lapisan tipis metagabro.

Lima tubuh intrusi pluton menerobos bagian zona pantai barat pada Kapur Akhir dan beberapa diantaranya terdapat di daerah penelitian yaitu Intrusi Susoh (Tmisu), Intrusi Kila (Tmikl) dan Mikrodiorit Gani (Tmign). Beberapa umur batuan intrusi yang telah didating umurnya dengan metode K/Ar yaitu granit Samadua berumur $50,9 \pm 1$ Ma. Pada Pliosen Awal terdapat juga serpentinit pada zona-zona sesar (Tuse) dan pada Pleistosen terdapat dike-dike mikrogabro (Qpds).

B. Struktur Geologi dan Tektonik

Pola struktur busur kepulauan yang dijumpai di sepanjang Pulau Sumatera, menunjukkan bahwa Pulau Sumatera adalah perwujudan dari sebuah bentuk busur kepulauan yang menempati bagian tepi benua aktif (*active continental margin*), yang berhubungan dengan proses interaksi konvergen yang disertai penyusupan (subduksi) Lempeng Hindia Australia ke arah Utara-Timur Laut (NNE) di bawah Lempeng Eurasia (Katili, 1972; Daly, 1987). Pulau Sumatera saat ini merupakan bagian dari lempeng mikro Sunda. Kerak Samudra Hindia bersama dengan kerak Benua Australia mengalami subduksi sepanjang bagian barat dari lempeng Sundaland dan

ditandai dengan adanya Palung Sunda di pantai barat Sumatera (Curray, et.al., 1979). Pembentukan magma yang berasosiasi dengan subduksi telah meningkatkan kegiatan pembentukan jalur vulkanik dari Zaman Tersier sampai sekarang dan mendominasi pembentukan gejala-gejala geologi di Pulau Sumatera (Page, et.al., 1979).

Tiga periode tektonik besar yang membentuk Sumatera sejak Pra Tersier hingga saat ini telah membentuk fisiografi Pulau Sumatera yang dicerminkan oleh struktur menjadi sedemikian kompleks. Sesar besar Sumatera (Sumateran Fault System) menjadi elemen tektonik yang paling signifikan di Sumatera. Patahan ini memanjang berarah Barat laut-Tenggara yang mewakili arah-arrah dominan pembentukan struktur geologi di daerah Sumatera selain beberapa kelompok arah yang lain seperti arah Utara-Selatan dan Timur laut-Barat Daya.

Pulau Sumatera memiliki struktur geologi yang rumit sebagai respon dari proses tektonik yang berulang kali. Sesar-sesar mendatar berarah Barat laut-Tenggara dan Utara-Selatan dengan sedikit pergerakan naik menjadi struktur yang paling sering dijumpai disertai dengan lipatan berarah Barat laut-Tenggara serta Barat-Timur. Sesar-sesar normal seringkali hadir sebagai pembentuk cekungan-cekungan ekonomis di Sumatera sebagai hasil dari wrench faulting dari zona sesar mendatar di bagian belakang busur vulkanik.

Pada saat ini, lempeng Samudera Hindia masih menyusup ke bawah lempeng benua Eurasia dengan arah N 20° E dengan kecepatan pergerakan 6-7 cm/tahun. Hal ini mengakibatkan masih sering terjadi gempa tektonik di sepanjang pantai barat pulau Sumatera dan masih aktifnya pegunungan di daerah busur vulkanik Sumatera yang keduanya disebabkan oleh subduksi antara dua lempeng. yang disebutkan diatas hal inilah yang menyebabkan Pulau Sumatera berada dalam kondisi tektonik yang aktif.

2. Jenis Tanah

A. Klasifikasi Tanah

Secara umum kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya akan dipengaruhi oleh adanya faktor curah hujan, iklim, dan juga struktur geologi. Hal inilah yang membuat adanya perbedaan sifat antara jenis tanah yang satu dengan yang lainnya. Adapun jenis tanah yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis, yaitu histosols, entisols, inceptisols, andisols, alfisols dan ultisols.

Jenis tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya didominasi oleh jenis inceptisols yang lokasinya berada di bagian Utara dan Selatan Kabupaten Aceh Barat Daya atau tepatnya di Kecamatan Tangan-Tangan dan sebagian kecil di Kecamatan Manggeng. Untuk jenis tanah oxisols dan ultisols lokasinya berada di bagian Tengah Kabupaten Aceh Barat Daya, tepatnya di Kecamatan Blangpidie dan sebagian di Kecamatan Kuala Batee dan Kecamatan Jeumpa, sedangkan untuk jenis mollisols hanya berada di Kecamatan Babahrot.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan ditunjang dengan data hasil analisis, tanah-tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya diklasifikasikan menurut soil taxonomy (soil.survey, staff. 2003) menjadi 6 (enam) ordo yaitu: histosols, entisols, inceptisols, andisols, alfisol, dan ultisols serta menurunkan 20 sub-grup tanah. Untuk mengetahui klasifikasi tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya menurut sistem Taksonomi Tanah, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Klasifikasi Tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya
Menurut Sistem Taksonomi Tanah

Ordo	Subordo	Grup	Subgrup/Jenis Tanah (USDA, 2003)	PPT, 1983)
Histosols	Hemists	Haplohemists	Typic Haplohemists	Organoal Hemik
Entisols	Fluvaquents Aaquents Fluvents	Fluvaquents Endoaquents Udifuvents	Typic Fluvaquents Typic Endoaquents Aquic Udifuvents Typic Udifuvents Lithic Udpthents Typic Udpthents	Aluvial Kecamatan Gleisols Hidrik Aluvial Gleik Aluvial Kecamatan Litosol Litosol
	Orthents	Udpthents		
Inceptisols	Aquepts	Endoaquepts Eutrudepts	Fluvaquentic Endoaquepts Typic Eutrudepts Lithic Eutrudepts Oxyaquic Eutrudepts Aquic Eutrudepts Fluentic Eutrudepts Typic Eutrudepts Oxic Dystrudepts Typic Dystrudepts	Gleisol Fluvik Gleisol Kecamatan Kambisol Litik Kambisol Eutrik Kambisol Gleik Kambisol Eutrik Kambisol Eutrik Kambisol Oksik Kambisol Kecamatan
	Udepts	Dystrudepts		
Andisols	Udands		Lithic Hapludands Typic Hapludands	Andosol Litikik Andosol Kecamatan
Alfisols	Udalfs	Hapludalfs	Lithic Hapludalfs	Mediteran Litik
Ultisols	Udults	Kandiudults	Typic Kandiudults	Podsolik Kandik

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya 2013-2033

B. Kedalaman Efektif

Kedalaman efektif tanah di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai kedalaman lebih dari 90 cm. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya berpotensi untuk dikembangkan menjadi kawasan budidaya, baik kawasan budidaya pertanian maupun kawasan budidaya non pertanian.

2.1.1.4. Hidrologi

Sumber mata air di Kabupaten Aceh Barat Daya berasal dari pegunungan. Hal ini dapat terlihat dari morfologi wilayahnya, daerah cekungan yang merupakan rawa belakang dan didominasi oleh tanah organosol terdapat di Kuala Batee. Daerah tersebut merupakan daerah genangan permanen. Potensi dan prospek air tanah di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

- 1) Dataran rendah di Kecamatan Blangpidie, yang tersusun dari sedimen lepas atau setengah padu (kerikil, pasir, lanau dan lempung) merupakan daerah rawa gambut. Wilayah ini memiliki potensi dan prospek air tanah yang tinggi, sedangkan wilayah dengan endapan yang sama namun tersusun dari tanah mineral, mempunyai potensi dan prospek air tanah yang tergolong rendah.



- 2) Dataran tinggi yang tersusun dari batuan beku atau malihan dan sedimen padu (tak terbedakan). Wilayah ini memiliki potensi dan prospek air tanah yang sangat rendah. Penyebaran daerah ini menempati areal terluas.

Ketersediaan sumberdaya air di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya bersumber dari air permukaan, air sungai dan air tanah. Wilayah di Bagian Barat Aceh Barat Daya seperti di Kecamatan Kuala Batee, Kecamatan Blangpidie, dan Kecamatan Jeumpa mempunyai sumber air tanah dan air permukaan yang besar. Sumber air permukaan dapat diperoleh dari air yang terdapat di sungai-sungai.

Pada umumnya penduduk wilayah perencanaan dalam memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sehari-hari menggunakan air sungai dan mata air, hal ini dikarenakan bagian timur Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki kawasan hutan dengan pegunungan yang luas secara otomatis menyimpan sumber air baku yang dialirkan oleh anak sungai. Selain banyaknya sungai kecil yang mengalir sebagai konsumsi pemakaian air bersih untuk keperluan sehari-hari masyarakat, kondisi air tanah juga telah mulai dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat di perkotaan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Sebagai kabupaten yang memiliki daerah ketinggian (dataran tinggi) dan berada pada Daerah Aliran Sungai Krueng Babahrot dan Krueng Batee Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan wilayah yang banyak memiliki lokasi mata air dimana arah aliran sungainya mengalir ke bagian Utara maupun Selatan. Sumberdaya air yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya selain diperoleh dari mata air dan air tanah juga diperoleh dari sungai. Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk kedalam 6 (enam) daerah aliran sungai (DAS).

A. Perairan Terbuka

Perairan terbuka yang dapat dimanfaatkan di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sungai, yang semuanya berhulu di dataran tinggi bukit barisan dan bermuara ke Lautan Samudra Hindia. Terdapat 4 buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup besar yaitu DAS Krueng Seumanyam, DAS Krueng Babahrot, DAS Krueng Beukah dan DAS Krueng Baru sedangkan sub das lainnya, diantaranya Krueng le Mirah, Krueng Batee, Alue Sungai Pinang, Krueng Tangan-Tangan dan Krueng Manggeng. Jika dilihat bentuk pola alirannya, maka sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini berbentuk sub paralel di bagian hulu hal ini

karena wilayah yang bergunung sehingga pola aliran yang terbentuk mengikuti lereng dari suatu jalur pegunungan, sedangkan pada bagian hilir berbentuk linier. Keadaan sungai-sungai tersebut sebagian ada yang sudah terkena erosi yang mengakibatkan lingkungan rusak dan rawan bahaya banjir. Banjir ini disebabkan karena terjadinya penggundulan hutan di wilayah hulu sungai.

B. Daerah Irigasi

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah mampu dimanfaatkan secara maksimal untuk pemenuhan kebutuhan pertanian lahan basah melalui pembangunan jaringan irigasi di seluruh Lahan Sawah yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, saat ini terdapat 3 unit bendung irigasi yang melayani luasan lahan dalam kapasitas besar yaitu Irigasi Susoh dibawah kewenangan pusat, Irigasi Babahrot dan Irigasi Manggeng dibawah kewenangan propinsi, sedangkan sejumlah irigasi lainnya berada dibawah kewenangan kabupaten difungsikan untuk mengairi luasan sawah dalam kapasitas kecil.

Tabel 2.3
Nama Lokasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

No	Nama Daerah Irigasi	No	Nama Daerah Irigasi	No	Nama Daerah Irigasi
1	DI Susoh	12	DI Pusu	23	DI Alue Padee
2	DI Babahrot	13	DI Pantan Cut	24	DI Paya Riemung Mate
3	DI Manggeng	14	DI Alue Batee Leukat	25	DI Suka Damai
4	DI Cot Mane 1	15	DI Alue Sabong	26	DI Ladang Neubok
5	DI Cot Mane 2	16	DI Pantan Teungku	27	DI Putroe Ijo
6	DI Gunong Cut	17	DI Blang Dalam	28	DI Kuta Paya
7	DI Alue Thoe	18	DI Alue Drien	29	DI Panto Mue
8	DI Lh. Geulumpang	19	DI Blang Tho	30	DI Gunung Samarinda
9	DI Mukablang	20	DI Pante Cermin	31	DI Meurandeh
10	DI Alue Buluh	21	DI Alue Pisang		
11	DI Tangan-Tangan	22	DI Tuwi Kareng		

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya 2013-2033

C. Daerah Resapan Air

Daerah Resapan Air berupa Cekungan air tanah (CAT) suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. Cekungan air tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu topografi/kemiringan, curah hujan jenis tanah/topsoil, vegetasi, iklim dan media pembawa. Daerah

resapan air dapat terjadi pada tipe batuan (akuifer) yaitu : Tipe akuifer endapan gunung api terdiri dari : endapan lahar endapan gunung api muda, Tipe akuifer endapan sedimen : endapan kipas aluvial, endapan aluvial sungai, endapan aluvial delta, endapan aluvial pantai, endapan batu gamping karst, Tipe akuifer masa batuan: batuan sedimen terkekarkan, batuan beku terkekarkan. Daerah cekungan air tanah Kabupaten Aceh Barat Daya berada disepanjang recharge area pada kawasan pegunungan dengan luas 47.004,52 Ha.

Daerah Resapan Air berupa daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah resapan air di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi DAS Seumayam, DAS Babahrot, DAS Susoh, DAS Maninggeng yang berhulu di dataran tinggi bagian utara yang merupakan lembah lembah punggung pegunungan dan bukit yang berfungsi untuk menangkap air hujan, terdapat 47 (empat puluh tujuh) sungai yang mengalir wilayah ini dengan luas 1.797,21 Ha.

2.1.1.5. Klimatologi

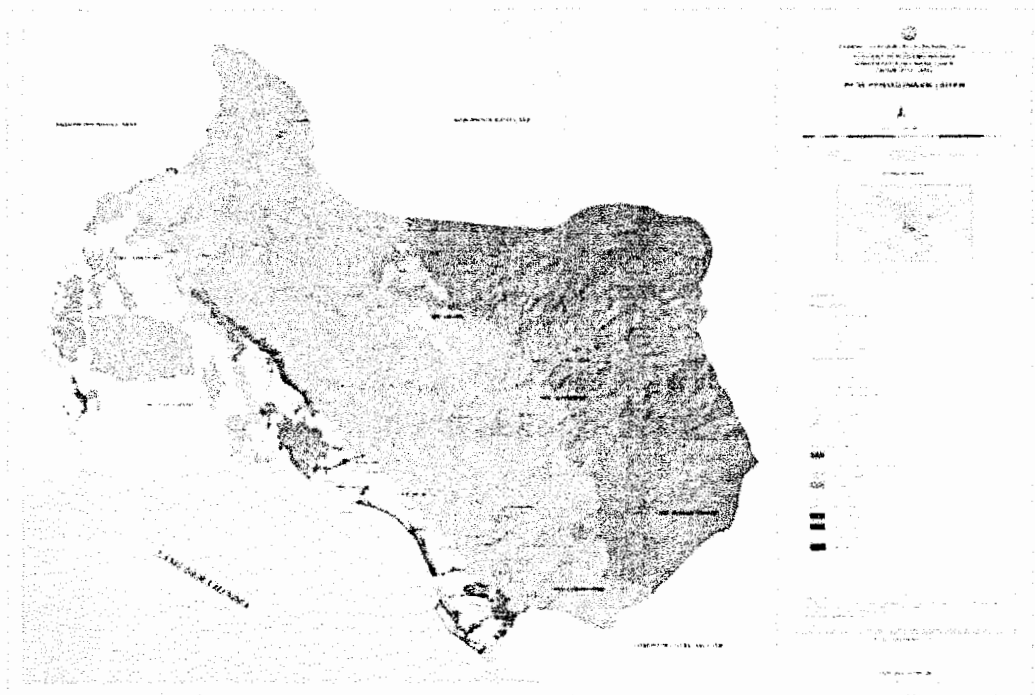
Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki curah hujan antara 3.000 – 4.000 mm per tahun. Dalam periode 2007 - 2010 Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2008 yaitu mencapai 4.709 mm dengan 147 hari hujan dan rata-rata hujan 32,04 mm/hari hujan. Sedangkan curah hujan terjadi terendah pada tahun 2009 yang berkisar 3.286 mm dengan 127 hari hujan dan rata-rata hujan 23,3 mm/hari hujan.

Suhu udara di Kabupaten Aceh Barat Daya berkisar antara 29,5 °C – 26,2°C. Pada daerah pantai, suhu udara bisa mencapai 25,6°C – 27,7°C, sedangkan di daerah pegunungan dengan ketinggian 400-1.350 m suhu dapat mencapai hingga 22°C-26°C dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 87-90 %.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil hitungan digitasi GIS (Geographic Information System) diatas peta citra SPOT luas Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1.882,05 Km² atau 188.205,02 Ha yang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. Berdasarkan digitasi citra satelit luas kawasan lindung sebesar 115.039,38 Ha atau 61.12%, terdiri dari kawasan hutan lindung 48.775,72 Ha, Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) 63.074,24 Ha, wilayah sempadan sungai seluas 2.900,24 Ha dan sempadan pantai seluas 295,22 Ha. Sedangkan kawasan budidaya sebesar 16.475,16 Ha. Jika berdasarkan perbandingan data tersebut maka luas yang dapat dibudidayakan di Kabupaten Aceh Barat Daya relatif kecil bila dibandingkan dengan luas wilayahnya.

Gambar 2.3
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya 2013-2033

Penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya di dominasi oleh lahan Persawahan/pertanian, kehutanan dan perkebunan. Luas persawahan pada tahun 2007 sebesar 11,902 hektar yang terdiri dari persawahan teknis, setengah teknis, irigasi desa, tadah hujan dan irigasi sederhana. Luas persawahan teknis sebesar 5,415 Ha / BPS &



RTRW, luas persawahan setengah teknis sebesar 1,000 Ha, luas persawahan irigasi desa sebesar 120 Ha, luas persawahan tadah hujan sebesar 1,239 Ha dan luas persawahan irigasi sederhana sebesar 4,128 Ha. Pada tahun 2011 terjadi peningkatan total luas areal persawahan, yaitu sebesar 23,050 Ha yang terdiri dari persawahan teknis 5,487 Ha, persawahan setengah teknis 5,156 Ha, persawahan irigasi desa 3,739 Ha; persawahan tadah hujan 5,105 Ha dan persawahan irigasi sederhana 3,563 Ha (DISTANNAK, 2011). Berdasarkan Qanun RTRWK Aceh Barat Daya menyatakan Luas lahan Basah 8.905,19 Ha.

Lahan kehutanan di Kabupaten Aceh Barat Daya menurut fungsinya terdiri kawasan lindung, Hutan Tanaman Nasional Gunung Leuser (TNGL), sempadan sungai dan sempadan pantai. Pada tahun 2007 total luas areal hutan di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 233,402 Ha. Pada tahun 2011 total kondisi luas areal hutan masih sama pada tahun 2007 yaitu 233,402 Ha, yang terdiri dari areal hutan luas hutan lindung sebesar 65,510 Ha, luas Hutan TNGL sebesar 64,610 Ha dan luas hutan APL sebesar 103,282 Ha. Sementara itu berdasarkan Qanun RTRWK Aceh Barat Daya Pola Ruang Darat yang terdiri dari Kawasan Lindung seluas 115.039,38 Ha dan Kawasan Budidaya 73.165,64 Ha.

Sementara luas areal perkebunan besar khusus untuk tanaman sawit sebesar 7,516 Ha (PT.Cemerlang Abadi) dan luas areal perkebunan Hak Guna Usaha (HGU) sebesar 2.697 Ha (PT. Watu Gede Utama). Sedangkan luas areal untuk perkebunan rakyat dari berbagai komoditi pada tahun 2011 sebesar 31,407 Ha. Untuk lebih jelasnya gambaran penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Jenis dan Penggunaan Luas Lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya,
2008 – 2014

Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Persawahan Teknis	5,540	5,487	5,487	5,487	4.665	4.665	4.200
Setengah Teknis	1,606	5,156	5,156	5,156	3.699	4.155	4.053
Irigasi Desa	120	3,739	3,739	3,739	742	668	3.739
Tadah Hujan	749	5,105	5,105	5,105	70	70	70
Irigasi Sederhana	3,482	3,563	3,563	3,563	2.631	1.620	3.563
Tanaman Sayuran	320	341	294	622	515	160	412
Tanaman Buah-buahan	5,820	13,282	32,297	120	64	920	210
Hutan Lindung	65,510	65,510	65,510	65,510	65.510	66.101	48.776,29
Hutan TNGL	64,610	64,610	64,610	64,610	64.610	63.071	63.074,24
Areal Penggunaan Lain (APL)	103,282	103,282	103,282	103,282	103.282	59.033	805,04
Perkebunan Besar (sawit)	3,252	3,252	4.280	2,000	4.280	4.455	7.182
Perkebunan Rakyat	13,476	28,041	30,446	31,407	17.886	24.377	27.243
Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	1,411	5,759	17,045	17,045	17.000	17.100	17.100
Pengembangan Kakao	952	1,049	4,642	4,812	4.075	3.721	3.700
Pengembangan Karet Rakyat	-	163	591	1,163	1.133	1.027	727
Tambak	41,350	107,101	156,230	150,190	169.170	174.630	141.400
Kolam	147,816	167,049	218,681	214,210	214.920	214.920	136.490
Perikanan Perairan Umum (sungai)	345	372	273	261	290,90	290,90	280,90
Jumlah	459,707	582,925	721,231	678,282	674.543	640.984	463.025

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Barat Daya, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2007-2014 masih di dominasi oleh hutan (baik hutan lindung maupun TNGL), lahan perkebunan, dan lahan pertanian. Luasnya areal hutan yang mencapai 61,56 % (115.851,03 Ha) dari luas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, di satu sisi merupakan salah satu kendala yang secara langsung dan tidak langsung menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam proses pemerataan dan pengembangan pembangunan, namun disisi lain, dengan terbatasnya areal produktif akan memudahkan Pemerintah Daerah di dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat karena, dengan terbatasnya jumlah anggaran pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya bisa lebih memprioritaskan program-program yang langsung mengarah ke masyarakat terutama dalam sektor pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.



2.1.2. Potensi dan Pengembangan Wilayah

a. Kawasan Lindung

Strategi pengembangan kawasan lindung berupa peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlingkungannya meliputi :

1. Meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan suaka alam dan perlindungan alam, taman wisata alam, serta kawasan hutan lindung;
2. Mengeluarkan secara bertahap bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan kawasan lindung. Strategi pengembangan kawasan lindung berupa pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi:
3. Melindungi kemampuan daya dukung lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
4. Melindungi kemampuan daya tampung lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komposisi lainnya yang dibuang ke dalamnya;
5. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan, terhadap sifat fisik maupun non fisik terhadap lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang kegiatan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.

b. Kawasan Budidaya

Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa peningkatan produktivitas kawasan budidaya meliputi:

1. Memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar kawasan lindung menjadi kawasan budidaya sesuai dengan sifat dan kondisi lahannya;
2. Meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi tanaman. Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi:



3. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan untuk mendorong pengembangan perekonomian wilayah;
4. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional. Strategi pengembangan kawasan budidaya berupa pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
5. Membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun pada kawasan yang rawan bencana;
6. Mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk kegiatan-kegiatan dengan fungsi komersial atau bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan memberikan ruang terbuka pada kawasan tersebut.

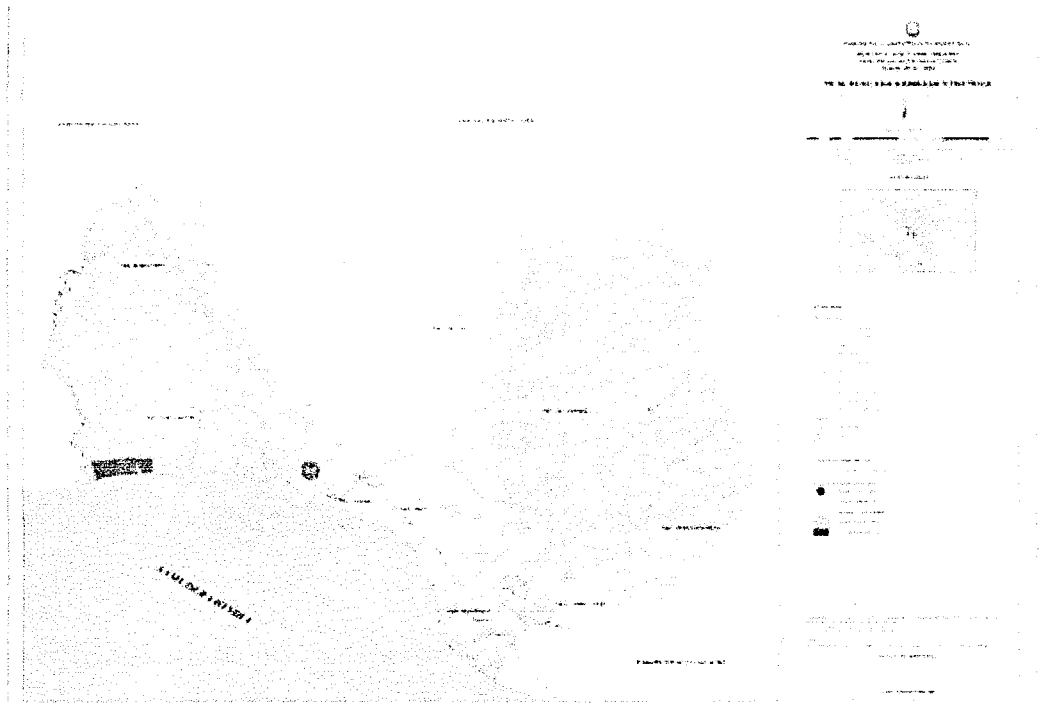
c. Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis Aceh Barat Daya didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, pendayagunaan teknologi dan pendayagunaan sumber daya alam yang bertujuan untuk:

- a. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
 1. **Kawasan Agropolitan** mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, Kuala Batee, Manggeng dan Lembah sabil yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung dan mengembangkan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 2. **Kawasan Perkotaan Blangpidie** ditetapkan untuk mendukung kebutuhan pengembangan perkotaan dan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi di kawasan tersebut. Kawasan ini diarahkan pengembangannya untuk mendukung kegiatan perkotaan seperti kegiatan perdagangan, jasa dan permukiman;
 3. **Kawasan Minapolitan** Kabupaten Aceh Barat Daya ditetapkan di kawasan pesisir. Pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor kegiatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil laut, konservasi kelautan dan pariwisata. Adapun wilayah yang termasuk kawasan minapolitan adalah Kecamatan Kuala Batee, Susoh, Setia, Tangan-Tangan, Manggeng dan Lembah Sabil;

4. **Kawasan Pertambangan**, Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi pertambangan yang cukup besar terutama potensi bijih besi dan emas. Kawasan yang memiliki potensi pertambangan bijih besi mencakup wilayah Kecamatan Babahrot dan yang memiliki potensi pertambangan emas mencakup wilayah Kecamatan Babahrot, dan Lembah Sabil;
 5. **Kawasan Koridor Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin dan kawasan industri Kuala Batee**, pengembangan akses jalan lingkar direncanakan dibangun untuk mendukung kegiatan ekonomi yaitu mengintegrasikan kawasan industri dengan Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin.
- b. Sudut kepentingan sosial, berupa pengembangan kawasan pendidikan mencakup wilayah Kecamatan Susoh yang ditetapkan pemanfaatan ruangnya untuk mendukung sektor pendidikan dan ditetapkan sebagai kawasan pendidikan bagi wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - c. Sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam, berupa Kawasan DAS Manggeng dan Tangan-Tangan, serta memiliki sumber daya air yang dapat digunakan untuk mendukung pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Gambar 2.4
Peta Kawasan Strategis Lahan Kabupaten Aceh Barat Daya

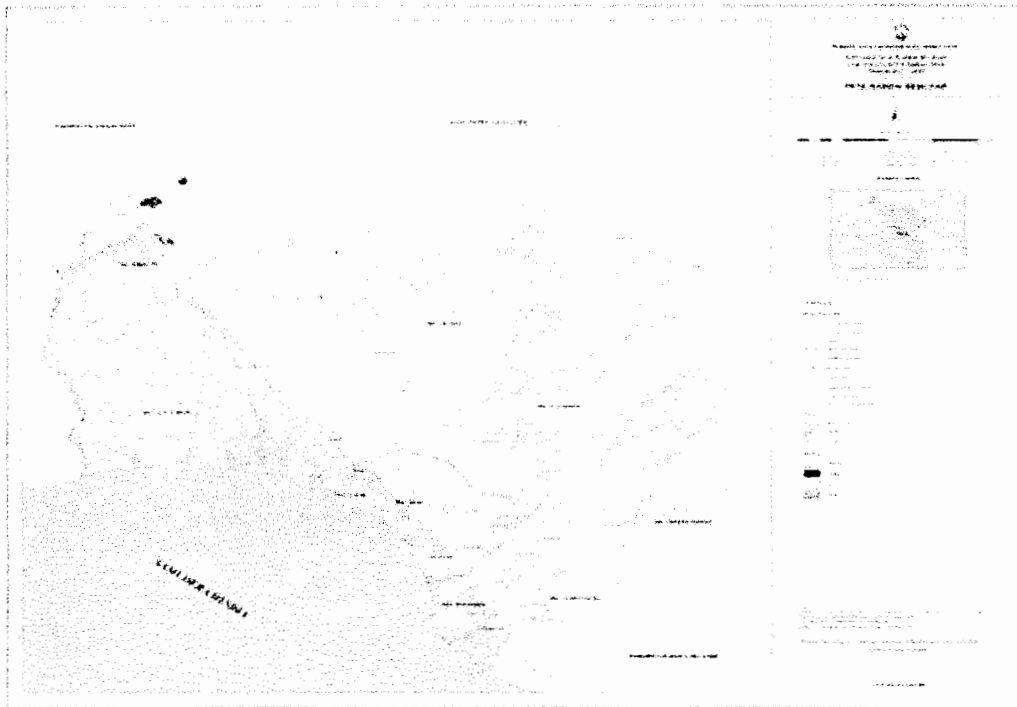


Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya 2013-2033

2.1.3. Kawasan Rawan Bencana

Kondisi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum mengikuti kondisi di Indonesia. Bagian ini membahas potensi kebencanaan yang sifatnya berasal dari kondisi geologi Kabupaten Aceh Barat Daya, seperti gerakan tanah, gempa bumi dan kawasan rawan banjir.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya

A. Daerah Rawan Gempa

Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai intensitas kegempaan yang tinggi, sehingga termasuk sebagai daerah rawan gempa bumi. Data sebaran gempa bumi antara tahun 1900–2002 menunjukkan pusat-pusat aktifitas tektonik berada di wilayah Sabuk Lipatan dan Patahan Samudera Hindia, di sepanjang bagian barat Nanggroe Aceh Darussalam, dan sisi timur dan sisi barat Central Range.

Di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya pusat-pusat gempa berada di bagian utara dan di bagian tengah. Pusat-pusat gempa bagian utara berada di sekitar perbatasan Kabupaten Gayo Lues dan bagian timur berada di selatan Kecamatan Jeumpa. Kedalaman gempa adalah menengah hingga dalam dengan magnitudo rata-rata 4-5 skala Richter. Gempa dengan kekuatan besar (>6) sangat jarang terjadi

B. Daerah Rawan Tsunami

Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk yang terkena dampak dari hantaman gelombang tsunami yang terjadi tanggal 26 Desember 2004 meski dampak kerusakannya tidak terlalu parah. Gempa tersebut disebabkan dari adanya tumbukan (Subduction) dari tiga rangkaian lempeng tektonik dunia. Wilayah pesisir adalah daerah yang terkena dampak tsunami yang merupakan wilayah desa tambak atau desa pantai dan disebabkan pula oleh topografi dasar laut perairan Aceh Barat Daya yang cukup dalam. Faktor lain yang memperparah kerusakan adalah tidak adanya kawasan penyangga alamiah (Buffer Zone) yang dapat menahan laju gelombang tsunami ke arah darat. Sebagian wilayah pesisir Lembah Sabil sampai Susoh terkena dampak dari gelombang tsunami dengan ketinggian 2 meter. Sebaran terkena gelombang tsunami juga tersebar di beberapa Kecamatan lain yang mempunyai wilayah pantai, namun dianggap tidak terlalu berdampak, karena sebagian besar wilayah pantai seperti di Kuala Batee dan Babahrot bukan merupakan wilayah permukiman.

C. Kawasan Rawan Gelombang Pasang dan Abrasi

Merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung. Lokasi kawasan abrasi di kabupaten Aceh Barat Daya berada pada kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke samudera hindia. Abrasi yang diakibatkan oleh pengikisan lapisan pantai terutama terjadi pada kawasan yang tidak di tumbuhi oleh tanaman bakau. Lokasi rawan abrasi di kabupaten Aceh Barat Daya meliputi garis pantai Gampong Ujung Tanoh Kecamatan Lembah Sabil sampai Lama Tuha Kecamatan Kuala Batee

D. Daerah Rawan Banjir

Merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan sungai (catchment area). Untuk kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Barat Daya biasanya terjadi pada musim hujan, dimana naiknya debit air sungai serta kondisi tanah yang relatif datar.



Adapun lokasi kawasan rawan banjir tersebar di berbagai kecamatan, meliputi:

- 1) Kecamatan Babahrot, berada di Gampong le Mirah, dan Pante Rakyat;
- 2) Kecamatan Kuala Batee, berada di Gampong le Mameh, dan Kuta Kuala;
- 3) Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Cot Manee, Ikue Lhung, dan Kuta Makmu;
- 4) Kecamatan Susoh, berada di Gampong Ujong Padang, Padang Baru, Pawoh, Pulau Kayu, Cot Mancang, Padang Panjang, Rubek Meupayong, Gadang, Palak Hulu, Rumah Dua Lapis, Pinang, Rumah Panjang, Kedai Susoh, Ladang dan Blang Dalam, dan Gampong Persiapan Geulima Jaya;
- 5) Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Cot Jirat, Lhung Tarok, Kuta Bahagia, Keude Paya, dan Alue Manggota;
- 6) Kecamatan Setia, berada di Gampong, Tangan-Tangan Cut, Mon mameh, dan Ujong Tanoh;
- 7) Kecamatan Tangan-Tangan, berada di Gampong Suak Labu, Gunong Cut, Adan, Blang Padang, Padang Kawa, Padang Bak Jok, Drien Jalo, dan Suak Nibong;
- 8) Kecamatan Manggeng, berada di Gampong Seuneulop, Pantan Makmur, Pante Perak, Tokoh, Sejahtera, Kedai, Lhueng Baro, dan Blang Manggeng;
- 9) Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Ujong Tanoh, Kuta Paya, Geulanggang Batee, Ladang Tuha I, Ladang Tuha II, dan Alue Rambot.

E. Daerah Rawan Longsor

Kawasan rawan longsor, adalah kawasan yang diidentifikasi sering tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan, untuk kawasan rawan longsor di kabupaten Aceh Barat Daya biasanya terjadi pada daerah dengan tingkat kemiringan < 25 % dimana kondisi tanah yang tidak tertanami oleh tumbuhan sebagai pengikat.

Adapun lokasi kawasan rawan longsor di Kabupaten Aceh Barat Daya meliputi:

- 1) Kecamatan Babahrot, berada di Gampong Gunung Samarinda, le Mirah, dan Pante Rakyat;
- 2) Kecamatan Jeumpa, berada di Gampong Alue Rambot, Alue Seulaseh Cot Mane, dan Ladang Neubok;



- 3) Kecamatan Blangpidie, berada di Gampong Guhang, Seunaloh, Kedai Paya, Panton Raya, Mata le dan Babah Lhok, dan Gampong Persiapan Babah Lhung;
- 4) Kecamatan Setia; dan
- 5) Kecamatan Lembah Sabil, berada di Gampong Cot Bak U dan Meunasah Sukon.

2.1.4 Demografi

Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya sampai Tahun 2014 sebanyak 154.049 jiwa, terdiri atas 77,939 laki-laki (50,59 persen) dan 76,110 perempuan (49,41 persen). Angka peningkatan jumlah penduduk cenderung meningkat dan bertambah setiap tahunnya dari tahun 2007-2014 dimana pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya berjumlah 125,223 jiwa dan meningkat pada tahun 2009 sebesar 130,421 jiwa dan terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 154.049. Sebanyak 16,26 persen dari total penduduk Aceh Barat Daya berdomisili di Kecamatan Susoh. Hal ini menjadikan Kecamatan Susoh menjadi kecamatan yang terbanyak penduduknya. Sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Setia dengan 5,99 persen dari total penduduk. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya selama 7 (tujuh) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2014

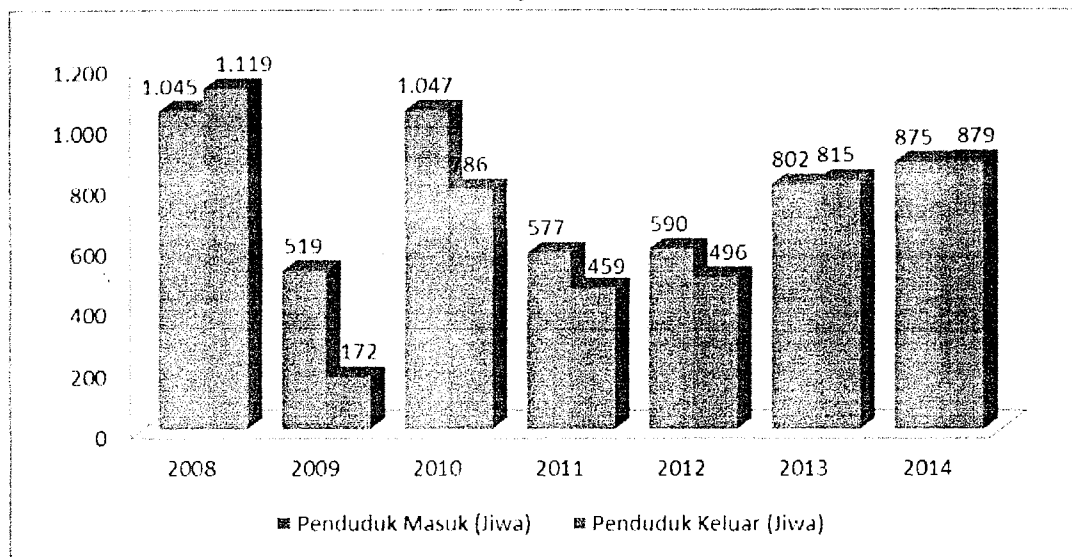
No	Kecamatan	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)						
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Manggeng	13,453	13,603	14,344	14,916	15.133	15.449	15.708
2	Lembah Sabil	10,327	9,136	10,040	11,129	11.324	11.441	11.653
3	Tangan-Tangan	11,996	12,088	12,487	13,114	13.353	13.568	13.832
4	Setia	7,631	7,751	8,096	8,604	8.795	9.007	9.231
5	Blangpidie	20,376	21,503	22,259	23,157	23.770	24.192	24.600
6	Jeumpa	9,657	9,724	10,356	10,706	10.937	11.203	11.487
7	Susoh	20,460	22,572	23,173	23,973	24.441	24.707	25.055
8	Kuala Batee	18,191	18,537	19,657	20,369	20.949	21.466	21.932
9	Babahrot	17,584	15,507	17,249	18,819	19.222	19.877	20.551
	Total	129,675	130,421	137,661	144,787	147.924	150.910	154.049

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Barat Daya, 2015



Selama periode 2008-2014 tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tersebar di 9 (sembilan) kecamatan terus mengalami kenaikan. Kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir lebih dikarenakan pendatang dari luar (migrasi masuk) yang mencari nafkah/berusaha sekaligus memilih bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Barat Daya meskipun kenaikannya masih fluktuatif. Tercatat penduduk yang masuk ke Kabupaten Aceh Barat Daya pada periode akhir 2014 sebanyak 875 jiwa dan keluar sebanyak 879 jiwa, jauh meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 802 jiwa untuk penduduk yang masuk dan keluar 815 jiwa. Banyaknya jumlah penduduk yang masuk dan keluar di Kabupaten Aceh Barat Daya terlihat seperti gambar berikut:

Gambar 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Yang Masuk dan Keluar di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2014



Sumber : Profil Pembangunan Aceh Barat Daya, 2015

Selain itu, meningkatnya angka jumlah kelahiran juga turut menambah jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pada tahun 2013 angka kelahiran meningkat tajam menjadi 2.511 jiwa dan yang meninggal sebanyak 27 jiwa. Namun pada tahun 2012 angka kelahiran di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 1.410 jiwa dan yang meninggal sebanyak 626 jiwa dan pada tahun 2011 angka kelahiran menurun tajam menjadi 271 jiwa dan yang meninggal sebanyak 386 jiwa. Sementara pada Fakta ini menandakan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk namun disisi lain pengurangan jumlah angka kematian masih belum maksimal.

Dari sisi jenis kelamin, terlihat bahwa penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya lebih didominasi kaum laki-laki pada tahun 2009 - 2014, sedangkan pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya lebih di dominasi oleh kaum perempuan. Pada tahun 2014 hampir 50,59 persen penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya atau sekitar 77.939 jiwa adalah laki-laki, dan selebihnya 49,41 persen atau sekitar 76.110 jiwa adalah perempuan. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan jenis kelamin selama periode 2008-2014 dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten
Aceh Barat Daya Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2008-2014

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Laki-laki	64,026	66,030	69,661	73,221	74,874	76,349	77,939
Perempuan	65,649	64,391	68,000	71,566	73,050	74,561	76,110
Jumlah	129,675	130,421	137,661	144,787	147,924	150,910	154,049
Sex Ratio	98	103	102	102	102	102	102

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Barat Daya, 2015

Sementara sepanjang tahun 2008 – 2014 cenderung meningkat kendati fluktuatif. Sex Ratio Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014 sebesar 102, hal ini berarti dari rata-rata 100 perempuan terdapat 102 laki-laki atau dari 202 penduduk. Kecamatan Lembah Sabil menempati Sex Ratio terendah yaitu 99. Hal ini berarti dari 197 penduduk, rata-rata terdiri atas 97 laki-laki dan 100 perempuan. Angka tertinggi ditempati oleh Kecamatan Setia dan Babahrot dengan nilai 106. Dari 208 jiwa warga Kecamatan Setia, rata-rata terdiri dari 100 perempuan dan 108 laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya pada akhir 2014 sebesar 66 jiwa/km². Namun penduduk yang menyebar di 9 (sembilan) kecamatan berbeda kepadatannya, ada yang jauh berada diatas rata-rata dan ada juga yang di bawah rata-rata. Kecamatan Blangpidie menempati posisi pertama dalam hal kepadatan penduduk dimana sebanyak rata-rata 652 jiwa menempati areal 1 km². Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan penduduk Kecamatan Setia yang hanya rata-rata 32 jiwa yang mendiami wilayah seluas 1 km². Hal ini menjadikan kecamatan tersebut sebagai daerah

yang paling jarang penduduknya. Tingkat rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2014

Kecamatan	Rata-rata Penduduk Per (Jiwa)			
	Km ²	Mukim	Desa/ Gampong	Rumah Tangga
Manggeng	56	5.236	873	4
Lembah Sabil	63	11.628	830	4
Tangan-Tangan	581	6.916	922	4
Setia	32	9.231	1.025	3
Blangpidie	652	6.150	1.230	4
Jeumpa	548	11.487	957	4
Susoh	49	5.011	869	4
Kuala Batee	41	7.310	1.044	4
Babahrot	312	10.275	1.467	4
Jumlah	66	7.000	1.020	4

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya, 2015

Dari tabel diatas memperlihatkan penyebaran penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya masih terlihat timpang dan belum merata. Kepadatan penduduk biasanya lebih terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk, sehingga mengundang penduduk di wilayah pedesaan untuk pindah ke daerah perkotaan. Selain itu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan penyebaran penduduk juga dapat berupa sarana dan prasarana pendukung kehidupan dan faktor keamanan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.2. Pertumbuhan PDRB

Dalam perkembangannya, perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan mengalami tren yang fluktuatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2010-2014). Keadaan ini dapat diamati dari pergerakan beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Aceh Barat Daya, salah satunya, adalah laju pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya selama 3 tahun secara berturut-turut (2010-2012) memperlihatkan perlambatan yang tidak begitu signifikan, yaitu 4,57 persen (2010), 4,52 persen (2011) dan 4,44 persen (2012) atau mengalami tren peningkatan yang positif kendati relatif rendah yaitu 58,17 milyar rupiah (2007), 60,80 milyar rupiah (2008) dan 63,50 milyar rupiah (2009). Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh terjadinya kecenderungan penurunan kontribusi terhadap PDRB dari sektor-sektor yang dalam 5 (lima) tahun terakhir memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya, utamanya seperti pada sektor pertanian dari 44,00 persen di tahun 2007 menjadi 40,04 persen pada tahun 2011.

Namun disisi lain pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan harga konstan juga memperlihatkan tren peningkatan yang positif di beberapa sektor dalam 5 (lima) tahun terakhir, seperti pada sektor konstruksi yaitu dari 10,56 persen (6,14 milyar rupiah) pada tahun 2007 meningkat menjadi 11,13 persen (7,79 milyar rupiah) pada tahun 2011. Selain itu sektor perdagangan, hotel dan restoran juga memperlihatkan tren peningkatan yang cukup baik yaitu dari 20,44 persen (11,89 milyar rupiah) pada tahun 2007 meningkat menjadi 23,08 persen (16,16 milyar rupiah) pada tahun 2011

Tabel 2.8
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 – 2011 Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan 2010

Sektor	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013*		2014**	
	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%
1. Pertanian	25,44	43,73	25,89	42,58	26,4	41,57	27,11	40,69	28,04	40,05	61,41		66,45		64,65	
2. Pertambangan & Penggalian	0,38	0,65	0,39	0,64	0,4	0,63	0,42	0,63	0,43	0,61	16,76		13,65		10,84	
3. Industri Pengolahan	2,48	4,26	2,54	4,18	2,61	4,11	2,7	4,05	2,79	3,99	6,20		6,46		6,59	
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,11	0,19	0,12	0,2	0,14	0,22	0,15	0,23	0,15	0,21	0,26		0,27		0,28	
5. Konstruksi	6,14	10,56	6,33	10,41	6,8	10,71	7,27	10,91	7,79	11,13	30,55		32,29		34,43	
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	11,89	20,44	12,92	21,25	13,95	21,97	15,09	22,65	16,16	23,08	1,54		1,62		1,70	
7. Pengangkutan & Komunikasi	2,43	4,18	2,53	4,16	2,62	4,13	2,74	4,11	2,86	4,09	5,68		5,97		6,37	
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	0,83	1,43	0,85	1,4	0,88	1,39	0,92	1,38	0,97	1,39	4,53		4,73		4,94	
9. Jasa-jasa	8,47	14,56	9,23	15,18	9,69	15,26	10,23	15,36	10,82	15,45	7,22		7,36		7,59	
PDRB	58,17	100	60,8	100	63,5	100	66,62	100	70,01	100	22,94	100	23,86	100	24,17	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat Daya, 2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Tanpa memperhitungkan migas, PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya selama periode tahun 2007-2011 terus mengalami pertumbuhan positif, namun selama periode tersebut laju pertumbuhannya sempat mengalami perlambatan di tahun 2007-2009 yang tumbuh sebesar 4,57 persen, 4,52 persen dan 4,44 persen. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh masih belum optimalnya pengelolaan di sektor – sektor lain yang bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, namun masih sangat bergantung kepada sektor primer seperti sektor pertanian yang selama periode tersebut menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya. Kendatipun demikian, sejak tahun 2010 hingga 2011 pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya kembali mengalami pertumbuhan positif pada yang cukup signifikan, peningkatan tersebut terutama dari sisi produksi yang didorong oleh meningkatnya secara signifikan sumbangan sektor pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Selama tahun 2007-2011 secara berturut-turut pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 4,57 persen (2007), 4,52 persen (2008), 4,44 persen (2009), 4,92 persen (2010), dan 5,08 persen (2011). Sedangkan perkembangan nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar harga konstan, secara berturut-turut adalah 58,17 milyar rupiah (2007), 60,80 milyar rupiah (2008), 63,50 milyar rupiah (2009), 66,62 milyar rupiah (2010), dan 70,01 milyar rupiah (2011).

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar Harga Berlaku (Hb) maupun atas dasar Harga Konstan (Hk)
Tahun 2007-2014

No.	Sektor	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013*		2014**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1.	Pertanian	3,93	1,34	4,27	1,79	4,79	1,95	7,08	2,72	6,49	4,42	6,63	4,66	10,81	8,21	1,14	-2,71
2.	Pertambangan & Penggalian	11,85	5,81	6,64	3,25	7,71	3,21	4,32	3,59	-20,52	-20,73	-28,93	-29,45	-17,24	-18,53		
3.	Industri Pengolahan	2,94	6,44	2,86	2,45	7,16	2,96	10,96	3,58	6,58	3,33	7,12	3,62	6,95	4,11	4,40	2,12
4.	Listrik, Gas & Air Bersih	30,57	7,00	18,33	7,10	22,16	12,31	10,52	5,83	-1,31	5,26	-2,09	6,29	-2,68	3,58	-0,29	3,32
5.	Konstruksi	12,10	8,90	49,69	3,15	20,94	7,32	21,91	6,91	10,39	5,11	7,47	5,91	6,22	5,69	11,95	6,63
6.	Perdagangan, Hotel & Restoran	8,55	13,70	17,24	8,69	24,69	8,01	14,90	8,11	7,37	4,70	9,29	5,22	5,32	5,48	7,68	4,62
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12,66	3,87	24,73	3,78	22,73	3,85	9,67	4,32	6,21	4,95	6,22	6,37	4,72	5,21	4,83	5,70
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	-15,55	-25,16	31,40	2,29	44,32	3,72	23,30	4,11	5,32	4,66	6,70	3,76	6,41	4,53	5,60	4,34
9.	Jasa-jasa	79,28	3,49	24,16	8,91	14,54	5,04	15,36	5,53	2,91	1,96	2,98	2,20	3,08	1,97	3,24	3,12
	PDRB	14,14	4,57	16,81	4,52	14,67	4,44	13,23	4,92	2,73	1,27	2,27	1,25	5,34	4,02	3,76	1,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat Daya, 2015

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar harga berlaku secara berturut-turut adalah 14,14 persen (2007), 16,81 persen (2008), 14,67 persen (2009), 13,23 persen (2010) dan 12,80 persen (2011) dengan nilai PDRB secara berturut-turut adalah 98,12 milyar rupiah (2007), 114,61 milyar rupiah (2008), 129,42 milyar rupiah (2009), 146,51 milyar rupiah dan 167,85 milyar rupiah.

Sedangkan bila dihitung atas dasar harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya selama tahun 2007-2011 mengalami pertumbuhan positif. Dalam periode nilai PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami peningkatan mencapai 69,74 milyar rupiah, yaitu dari 98,12 milyar rupiah pada tahun 2007 meningkat menjadi 167,85 milyar rupiah pada tahun 2011, atau rata-rata meningkat 1,3 milyar rupiah setiap tahunnya.



Tabel 2.10
Perkembangan Nilai dan Kontribusi Sektor-sektor Terhadap PDRB
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 – 2014 Atas Dasar Harga Berlaku

Sektor	2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013*		2014**	
	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%	Rp (milyar)	%
1. Pertanian	39,93	40,70	41,64	36,33	43,63	33,71	56,19	25,11	61,26	26,03	66,78	27,14	7,55	28,55	7,79	27,83
2. Pertambangan & Penggalian	0,60	0,61	0,64	0,56	0,68	0,53	2,99	13,39	2,43	10,36	1,77	7,20	1,49	5,66	1,24	4,44
3. Industri Pengolahan	3,83	3,90	3,94	3,44	4,22	3,26	5,79	2,59	6,32	2,69	6,92	2,82	7,56	2,86	8,05	2,88
4. Listrik, Gas & Air Bersih	0,34	0,35	0,41	0,36	0,50	0,39	0,23	0,11	0,24	0,10	0,24	0,10	0,23	0,09	0,24	0,09
5. Konstruksi	11,07	11,28	16,57	14,46	20,04	15,48	27,44	12,27	31,01	13,18	34,08	13,85	36,95	13,97	42,21	15,07
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	19,03	19,39	22,31	19,46	25,82	19,95	1,40	0,63	1,54	0,65	1,72	0,70	1,85	0,70	2,03	0,73
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,29	4,37	5,35	4,67	6,57	5,08	5,08	2,27	5,53	2,35	6,00	2,44	6,42	2,43	6,87	2,45
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,91	1,95	2,51	2,19	3,62	2,80	4,17	1,87	4,50	1,91	4,90	2,00	5,33	2,02	5,74	2,05
9. Jasa-jasa	17,12	17,45	21,25	18,54	24,34	18,81	6,93	3,10	7,30	3,10	7,68	3,12	8,09	3,06	8,52	3,04
PDRB	98,12	100	114,62	100	129,42	100	223,75	100	235,31	100	246,05	100	264,60	100	280,13	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat Daya, 2015

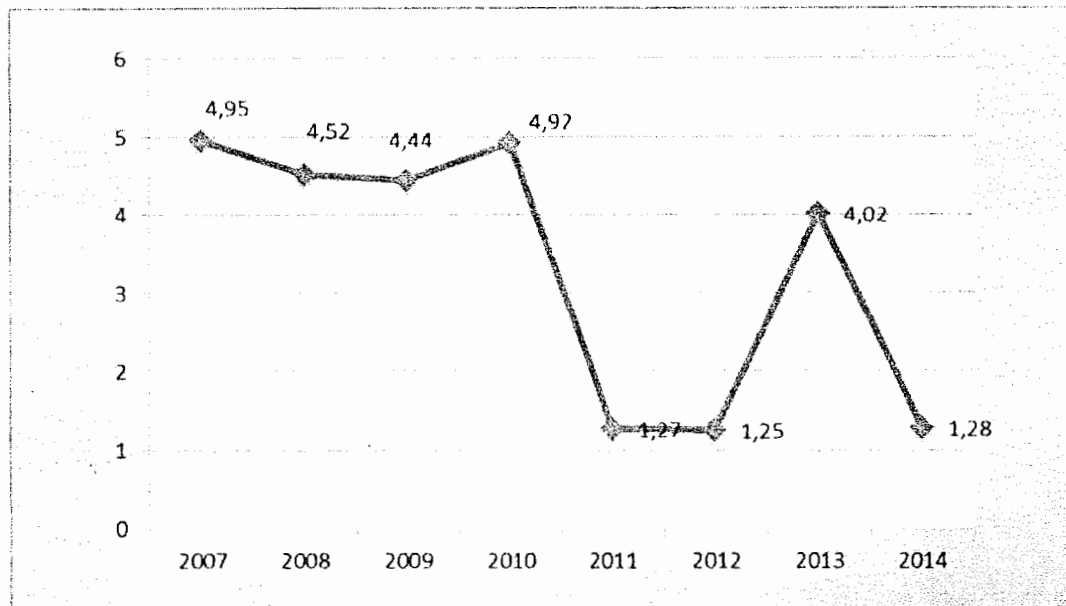
* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya menunjukkan trend positif dalam 5 (lima) tahun terakhir, walaupun masih terlihat fluktuatif. Laju pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 yang mencapai 5,08 persen, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 4,44 persen. Tinggi rendahnya pertumbuhan tersebut lebih disebabkan karena kontribusi sektor yang dominan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sektor primer yang pada umumnya menghasilkan nilai tambah yang sedikit atau dengan kata lain harga jualnya masih relatif rendah dibanding sektor yang lain. Oleh karena itu kontribusi ekonomi diharapkan bergeser pada sektor industri olahan (agroindustri dan pertambangan). Apabila dilihat dari masing-masing sektor dalam PDRB pada periode 2007-2010 didominasi oleh sektor pertanian, sektor ini memberikan kontribusi berkisar antara 30-40 persen dengan kecenderungan menurun tiap tahunnya. Kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan kontribusi antara 12-21 persen dan sektor jasa-jasa dengan kontribusi sekitar 17-19 persen pada periode 2007-2010. Pada gambar berikut terlihat perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 2007-2011.

Gambar 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya 2007 – 2014
Atas Dasar Harga Konstan



Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012



Secara umum aktifitas ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami trend kenaikan yang positif hal ini dicerminkan dari pertumbuhan PDRB baik Atas Dasar Harga Konstan maupun Atas Dasar Harga Berlaku. Seiring dengan hal tersebut PDRB per kapita ADHB dan PDRB per kapita ADHK juga meningkat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pada tahun 2007 PDRB ADHB sebesar Rp. 8.178.129,-, meningkat pada tahun 2011 menjadi Rp. 13.019.863,-. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2007 sebesar Rp. 4.848.602,-, meningkat menjadi Rp. 5.430.076. perkembangan aktifitas ekonomi dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel berikut.



Tabel 2.11
Perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 – 2014

Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014**
PDRB ADHB	Juta Rp	981.195,58	1.146.120,81	1.294.210,59	2.237.560,6	2.353.140,2	2.460.508,3	2.646.059,6	2.801.309,2
PDRB ADHK	Juta Rp	581.725,56	608.008,44	635.002,93	2.237.560,6	2.266.072,2	2.294.414,9	2.386.624,0	2.417.217,5
PDRB/KAPITA ADHB	Rp	8.178.129	9.391.046	10.427.007	11.624.313	13.019.863	-	-	-
PDRB/KAPITA ADHK	Rp	4.848.602	4.981.879	5.115.999	5.285.911	5.430.076	-	-	-
Pertumb.Ekonomi	%	4,95	4,52	4,44	4,92	5,08			

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat Daya, 2012

* Angka Sementara

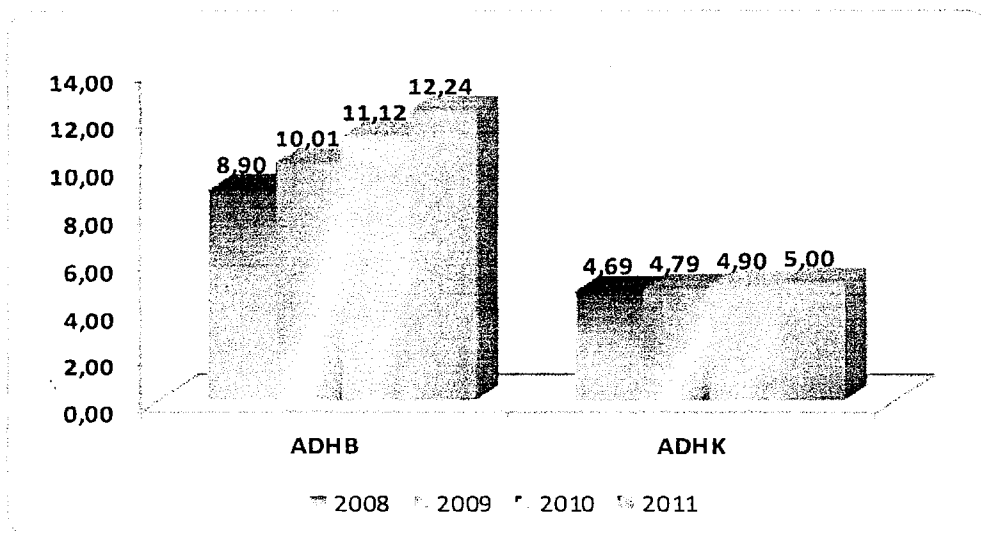
** Angka Sangat Sementara



2.2.1.2. Pendapatan Regional Perkapita

Selama tahun 2008-2011, PDRB Aceh Barat Daya telah mengalami kenaikan tingkat pendapatan regional per kapita yang disebabkan oleh pertumbuhan PDRB Aceh Barat Daya lebih tinggi dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Hal ini ditunjukkan oleh capaian pendapatan regional per kapita Aceh Barat Daya ADHB pada tahun 2011 sebesar Rp 12,24 juta, tumbuh sebesar 10,07 persen dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp 11,12 juta. Sedangkan tinjauan pendapatan regional per kapita Aceh Barat Daya ADHK 2000, untuk melihat pendapatan regional per kapita secara riil, menunjukkan capaian Rp 5,00 juta atau tumbuh sebesar 2,09 persen dibanding tahun 2010. Secara rata-rata, pertumbuhan pendapatan regional per kapita ADHB selama periode 2008-2011 mencapai 12,13 persen dan ADHK 2000 mencapai 2,19 persen.

Gambar 2.8
PENDAPATAN REGIONAL PERKAPITA ACEH BARAT DAYA, 2008-2011 (juta Rp)



2.2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat tercermin juga dalam angka kemiskinan yang merupakan salah satu persoalan serius dan tidak diharapkan oleh semua orang. Ukuran kemiskinan dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin/angka garis kemiskinan. Sesuai data BPS Kabupaten Aceh

Barat Daya tahun 2012, Selama kurun waktu tahun 2006 – 2010 persentase penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 persentase penduduk miskin sebesar 28,63 persen dan pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 19,94 persen atau secara persentase berkurang sebesar 8,69 persen, angka tersebut masih di bawah persentase angka kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2010 yaitu sebesar 20,98 persen.

Namun apabila dibandingkan dengan persentase angka kemiskinan tingkat nasional, persentase angka kemiskinan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Provinsi Aceh tergolong masih sangat tinggi, dimana persentase angka kemiskinan nasional pada periode September 2011 sebesar 12,36 persen. Untuk lebih jelasnya gambaran umum mengenai angka kemiskinan di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat terlihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.12
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Uraian	Tahun							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Jumlah Penduduk	125.223	129.675	130.421	137.661	144.787	147.924	150.910	154.049
2.	Angka Kemiskinan (%)	28,63	23,42	21,33	19,93	19,49	18,51	18,92	17,99

Sumber : Disdukcapil BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, 2016

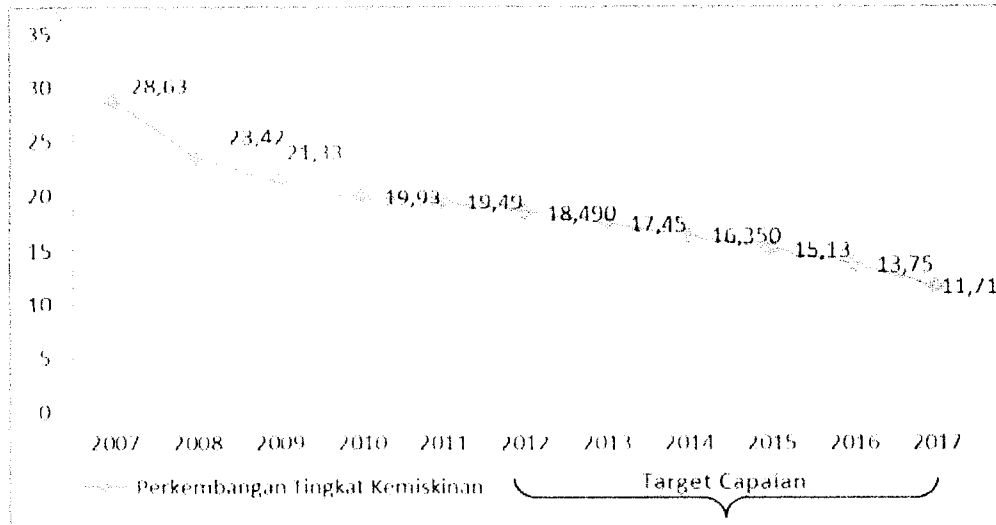
Tabel 2.13
Perkembangan dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2017

Uraian	Tahun										
	2007	2008	2009	2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Kemiskinan (%)*	28,63	23,42	21,33	19,93	19,49	18,49	17,45	16,35	15,13	13,75	11,71

Sumber : Bappeda Aceh Barat Daya, 2012 (Diolah)



Gambar. 2.9
Perkembangan dan Proyeksi Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2017



2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

A. Angka Melek Huruf

Yang dimaksud dengan Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis **huruf** latin dan **huruf** lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka melek huruf di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu tahun 2008-2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 tercatat sebesar 94,850 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf kemudian meningkat menjadi 98,490 persen pada tahun 2015.

Untuk mengetahui secara rinci angka melek huruf di Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.14
Angka Melek Huruf di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2008 - 2015

No.	Uraian	Tahun							
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Angka Melek Huruf	94,850	94,950	95,090	95,220	95,400	96,640	96,900	98,490
2	Buta Aksara	5,15	5,05	4,91	4,78	4,6	3,36	3,10	1,51

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2016

B. Angka Rata – Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu tahun 2008-2014 cenderung mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,5 pada tahun 2008 menjadi 7,86 pada tahun 2014.

C. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Pembangunan pendidikan Aceh Barat Daya telah menghasilkan beberapa kemajuan terutama dalam hal pemerataan akses terhadap pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Saat ini secara umum indikator APK sering digunakan untuk mengukur capaian akses penduduk usia, penduduk usia 13-15 tahun di SMP/MTs/Paket B/, penduduk usia 16-18 tahun di SMA/MA/SMK/Paket C. Khusus untuk mengukur capaian akses penduduk usia 7-12 tahun di SD/MI/SDLB/Paket A digunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM) karena secara nasional capaian APK usia 7-12 tahun belum mencapai 100 persen.

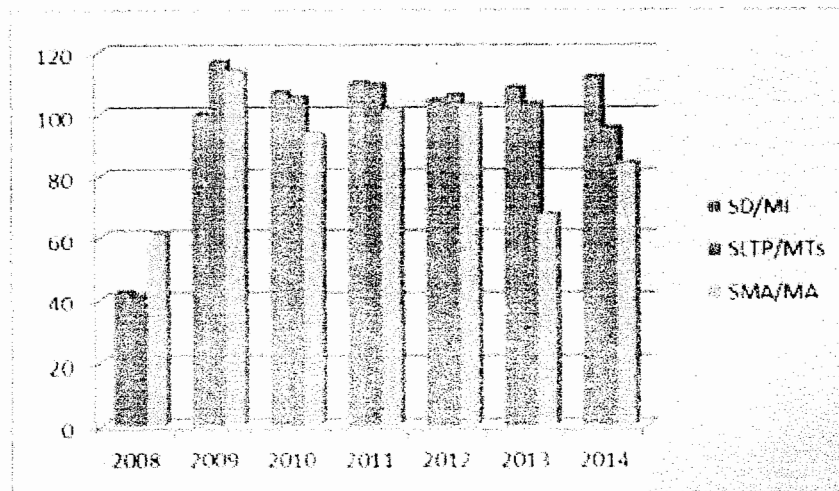
Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MIN mencapai 94.32%. Sedangkan pada tingkat SLTP mencapai 99.51 % dan pada tingkat SLTA mencapai 94.64 %. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada tingkat SLTA masih perlu ditingkatkan.

Angka Partisipasi Murni dalam lima tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat Daya mengalami fluktuasi dalam pencapaiannya. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun 2012 APM pada masing-masing jenjang pendidikan, hanya APM pada semua tingkat mengalami kenaikan. Berikut adalah APM di Kabupaten Aceh Barat Daya selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.16
Angka Partisipasi Kasar di Aceh Barat Daya
Tahun 2009 – 2014

No	Angka Partisipasi Kasar	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	102,20	110,16	108,03	110,00	104,35	94,32
2	SLTP/MTs	98,81	108,22	105,14	109,27	105,93	99,51
3	SMA/MA	91,84	73,05	93,73	101,24	102,90	94,64

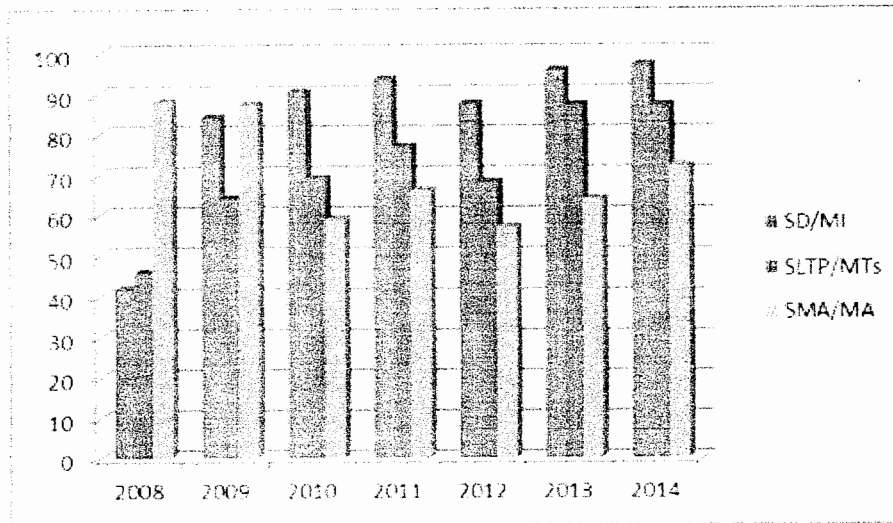
Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya



Tabel 2.17
Angka Partisipasi Murni di Aceh Barat Daya
Tahun 2008 – 2014

No	Angka Partisipasi Murni	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	SD/MI	95,76	91,67	90,40	93,64	87,51	76,67
2	SLTP/MTs	88,62	70,76	68,96	76,83	68,16	70,36
3	SMA/MA	80,66	46,10	58,87	66,14	56,88	61,04

Sumber : Profil Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya 2015



D. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Data Laporan Individu (LI) Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012 menggambarkan komposisi penduduk berusia 10 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, masing-masing : sebesar 100 persen menamatkan SD/ sederajat, sebesar 97,90 persen menamatkan SMP/ sederajat, sebesar 794,2 persen menamatkan SMA/ sederajat.

Tabel 2.18
Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas
Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

No	Kecamatan	SD	SMP	SMA
1	Lembah Sabil	100	100	100
2	Manggeng	100	97,14	100
3	Tangan-Tangan	100	89,5	99,23
4	Setia	100	100	47,62
5	Blangpidie	100	98,86	95,68
6	Susoh	100	93,86	100
7	Jeumpa	100	100	88,69
8	Kuala Batee	100	98,67	91,86
9	Babahrot	100	100	71,15
	Rata-rata	100	97,90	794,2

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya 2013

2.2.2.2. Kesehatan

Status kesehatan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dapat digambarkan dalam beberapa indikator yaitu mencakup angka kematian, umur harapan hidup, status gizi dan angka kesakitan.

A. Angka Kematian

Angka kematian difokuskan pada tiga indikator kematian utama, yaitu: Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

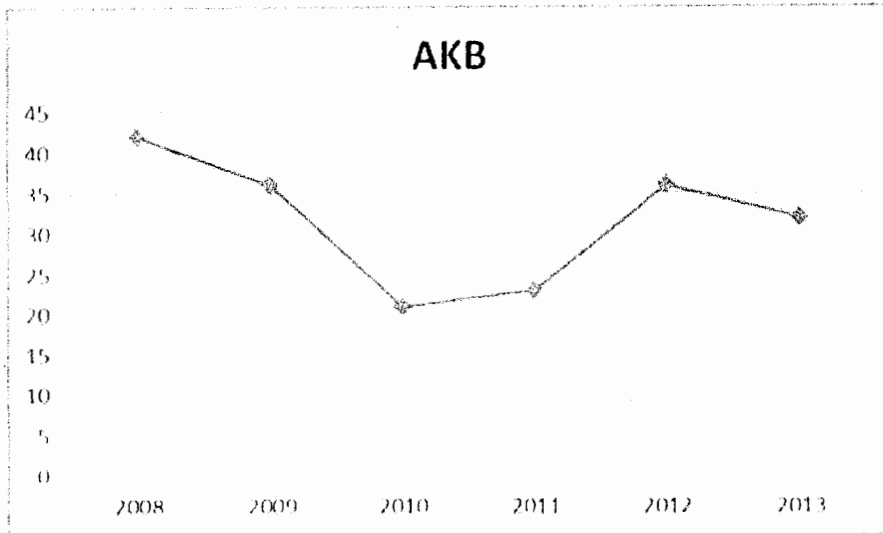
1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* adalah kematian bayi di bawah usia 1 tahun tiap 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator terhadap persediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan prenatal. Tahun 2008 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 9,21 / 1.000 Kelahiran Hidup dan mengalami penurunan pada tahun 2008 menjadi 7,75 / 1.000 Kelahiran Hidup. Peningkatan pada tahun 2009 menjadi 10,62 / 1.000 Kelahiran Hidup dan pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 9,56 / 1.000 Kelahiran Hidup tapi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 14,08 / 1.000 Kelahiran Hidup. Data Angka Kematian Bayi Tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.19
AKB Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2014**

AKB	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh Barat Daya	42	36	21	23	36	32	-

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya 2015



2. Angka Kematian Balita.

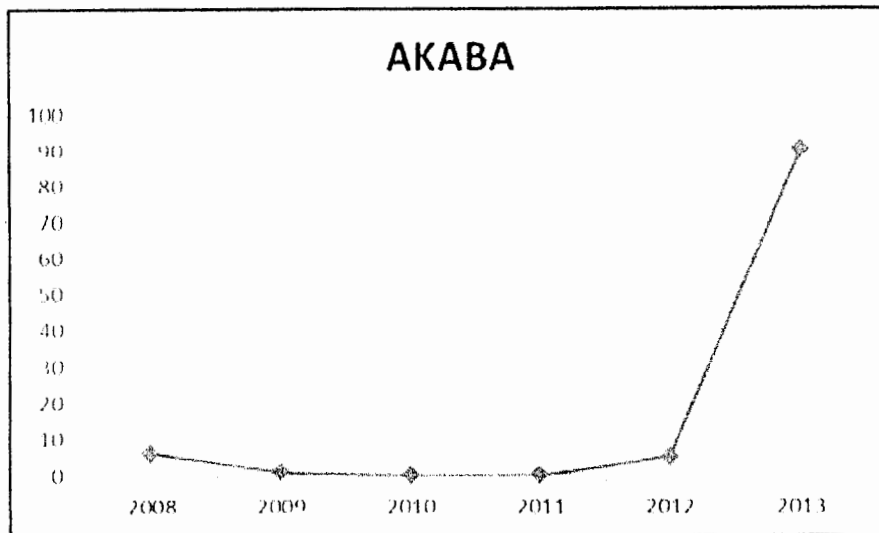
Angka Kematian Balita (> 1-5 tahun) adalah jumlah anak (termasuk bayi) yang meninggal sebelum mencapai umur 5 tahun / 1.000 Kelahiran Hidup.

Angka Kematian Balita Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2007 adalah sebesar 11,23 / 1.000 KH dan mengalami penurunan tahun 2008 menjadi sebesar 8,64 / 1.000 KH dan tahun 2009 meningkat menjadi 11,75 / 1.000 KH pada tahun, menurun menjadi 10,6 / 1.000 KH pada tahun 2010, selanjutnya meningkat menjadi 14,52 / 1.000 KH pada tahun 2011.

Tabel 2.20
AKABA Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 – 2014

AKABA	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Aceh Barat Daya	6	1	-	-	5	90	-

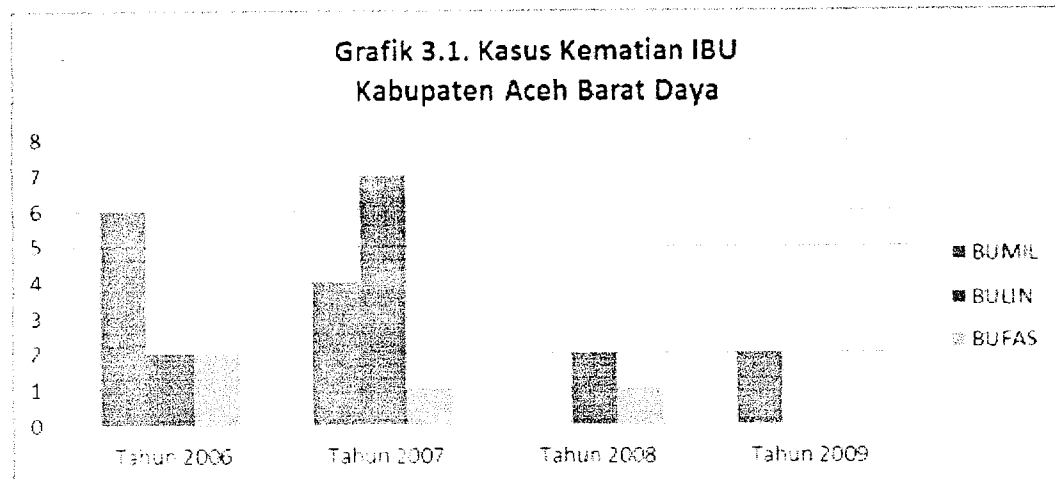
Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya 2015



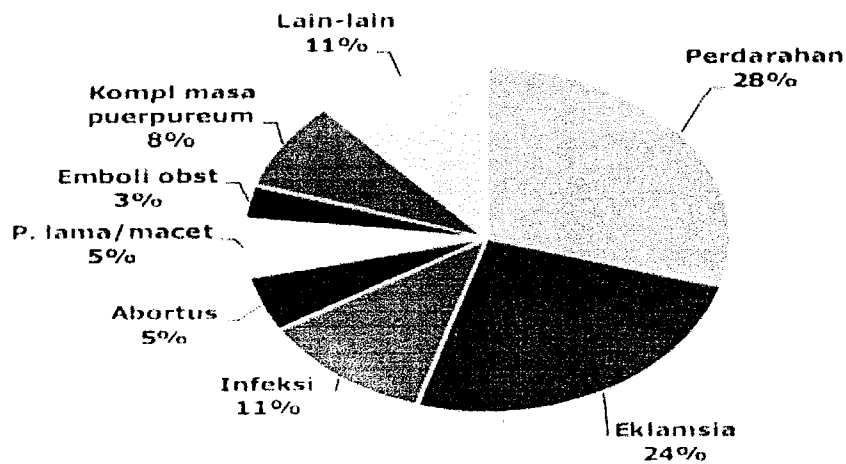
3. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) juga merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Apabila dilihat secara Provinsi Aceh, jumlah ibu yang meninggal disebabkan kehamilan, persalinan dan nifas di Kabupaten Aceh Barat Daya masih relative baik jika dibandingkan dengan daerah kabupaten lain (Gambar 2.9. Kasus Kematian Ibu). SDKI 2007 melaporkan bahwa AKI di Provinsi Aceh masih sebesar 238 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan rata-rata AKI nasional sudah mencapai 228 per 100,000 kelahiran hidup, dan target MGDs 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Tantangan utama adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil dan kurang berfungsinya sistem deteksi dini ibu hamil yang beresiko tinggi dan sistem rujukan persalinan belum efektif disamping faktor medis seperti pendarahan, hipertensi saat hamil atau pre eklamsi dan infeksi (Kementerian Kesehatan, 2010). Selain itu, ketidaksetaraan gender, nilai budaya, serta rendahnya perhatian laki-laki terhadap ibu hamil dan melahirkan juga diperkirakan berkontribusi terhadap kematian ibu.

Gambar 2.10
Distribusi Persentase Penyebab Kematian Ibu Melahirkan



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012 (Profil Kesehatan)



sumber : Profil Kesehatan Indonesia 2012

B. Angka Umur Harapan Hidup

Umur harapan hidup (UHH) merupakan indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan dan juga salah satu indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum, UHH masyarakat Kabupaten Aceh Barat

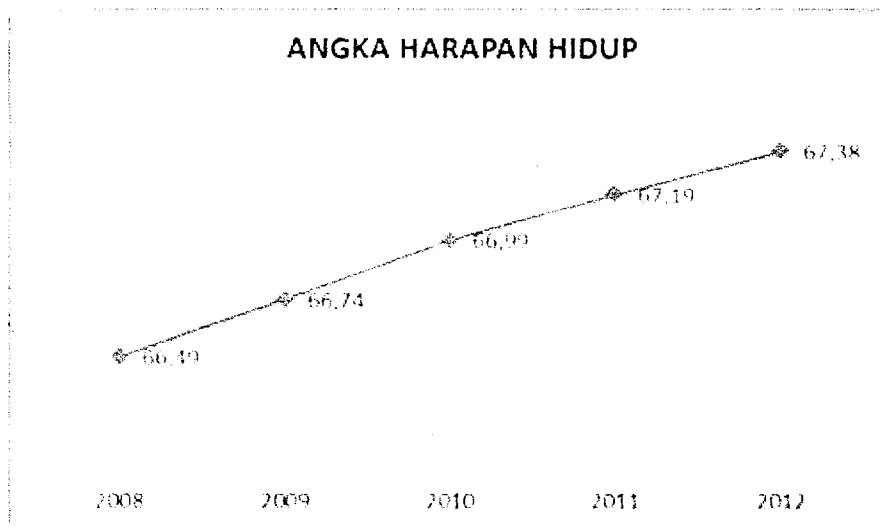
Daya sangat bervariasi setiap tahunnya berkisar pada angka 66-67 tahun. Hal ini dapat dilihat pada periode 2008-2012, Pada tahun 2008 Angka Harapan Hidup adalah sebesar 66,49 dan setiap tahun semakin meningkat sehingga pada tahun 2012 Angka Harapan hidup menjadi 67,38.

Tabel 2.21
Angka Harapan Hidup Aceh Barat Daya
Tahun 2008 – 2012

Keterangan	Tahun						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angka Harapan Hidup (Tahun)	66,49	66,74	66,99	67,19	67,38	-	-

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya 2013

Berikut disajikan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2008 s/d 2012



C. Persentase Balita Gizi Buruk

Status gizi difokuskan pada status gizi balita yang diukur dari tiga indikator utama: Berat Badan per Usia (BB/U), Tinggi Badan per Usia (TB/U), dan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB).



1. Prevalensi Gizi Buruk

Secara umum status gizi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat dikatakan memuaskan atau baik. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang di Kabupaten Aceh Barat Daya menurun dengan gizi buruk 12 jiwa dan gizi kurang 585 jiwa pada tahun 2007 menjadi 459 jiwa (9.47%) untuk gizi kurang sementara gizi buruk 0 jiwa pada tahun 2010 (data profil kesehatan tahun 2007 dan 2010). Disparitas status gizi buruk dan kurang antar kecamatan/puskesmas dalam kabupaten masih relatif tinggi. Dari hasil survey pada Riskesdas (2007), Kabupaten Aceh Barat Daya masih dalam katagori belum tercapai target pencapaian status gizi buruk dan kurang untuk Provinsi Aceh.

Tabel 2.22
Persentase Gizi Buruk dan Kurang (BB/U) per Kabupaten/Kota tahun 2007
(Riskesdas 2007)

No	Kabupaten / Kota	Kurang gizi		Gizi t Buruk		Gizi Kurang	
		%	Status	%	Status	%	Status
1	Kota Sabang	14.6	Tercapai	3,0	Tercapai	11,6	Tercapai
2	Kota Banda Aceh	15.5	Tercapai	5,5	Hampir	10,0	Tercapai
3	Aceh Tengah	15.1	Tercapai	6,2	Tidak	8,9	Tercapai
4	Kota Langsa	27.1	Tidak	9,4	Tidak	17,7	Tidak
5	Kota lhokseumawe	24.0	Tidak	9,8	Tidak	14,2	Tercapai
6	Aceh Tamiang	21.4	Tidak	6,6	Tidak	14,8	Tercapai
7	Aceh Besar *	20.0	Tidak	7,6	Tidak	12,5	Tercapai
8	Aceh Barat Daya	39.1	Tidak	15,7	Tidak	23,4	Tidak
9	Bireun	32.8	Tidak	9,0	Tidak	13,8	Tercapai
10	Pidie	23.6	Tidak	6,4	Tidak	17,3	Tidak
11	Bener Meriah	13.7	Tercapai	4,8	Tercapai	8,9	Tercapai
12	Aceh Singkil	21.0	Tidak	7,9	Tidak	13,1	Tercapai
13	Simeulue	39.7	Tidak	20,5	Tidak	19,1	Tidak
14	Aceh Timur	21.7	Tidak	10,7	Tidak	11,1	Tercapai
15	Aceh Utara	35.5	Tidak	16,0	Tidak	19,5	Tidak
16	Aceh Tenggara	48.7	Tidak	29,6	Tidak	19,2	Tidak
17	Aceh Selatan	24.9	Tidak	8,0	Tidak	16,9	Hampir
18	Nagan Raya	36.1	Tidak	20,3	Tidak	15,7	Hampir
19	Aceh Barat	29.9	Tidak	14,5	Tidak	15,4	Hampir
20	Aceh Jaya	29.0	Tidak	9,9	Tidak	19,1	Tidak
21	Gayo Lues	19.5	Hampir	11,9	Tidak	7,6	Tercapai
22	Pidie Jaya						
23	Subulussalam						
Aceh, RISKESDA 2007		26,5	Tidak	10,7	Tidak	15,8	Tercapai
Aceh, RISKESDA 2010		23,7	Tidak	7,1	Tidak	16,60	Tercapai
Indonesia		17,9	Tercapai	4,96	Tercapai	13	Tercapai
Target MDG's		15		3,36		11,9	

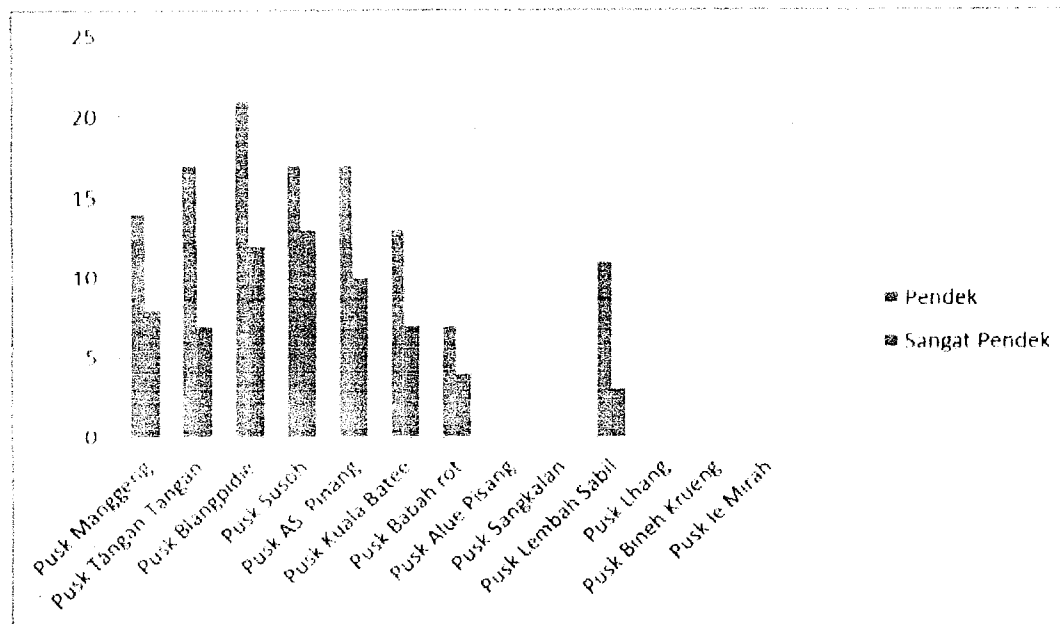
Sumber : Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya, 2012



2. Prevalensi Balita Stunting

Jumlah anak pendek (*stunting*) di Kabupaten Aceh Barat Daya untuk perbandingan per tahun secara kecamatan belum dapat digambarkan mengingat keterbatasan data pelaporan yang ada saat ini. Angka stunting merupakan komponen penting dalam pencapaian status gizi pada balita maupun target MDGs 2015 dalam rangka memberikan gambaran terhadap tumbuh kembang anak sehingga tidak menjadi generasi lost di masa-masa datang. Menurut hasil survey Rikesdas 2010, keadaan stunting Kabupaten Aceh Barat Daya masih sangat tinggi dan prevalensi Aceh Barat Daya mencapai 60,9% dan merupakan peringkat kedua tertinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain se Provinsi Aceh. Gambaran terhadap keadaan balita stunting per puskesmas di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana gambar berikut .

Gambar 2.11
Prevalensi stunting (TB/U) per Puskesmas
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008

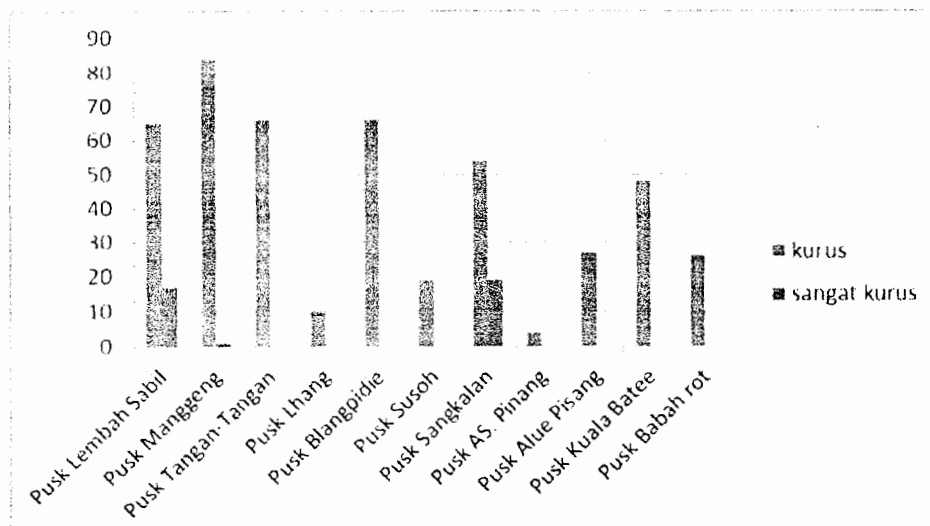


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, (data laporan 2008)

3. Prevalensi Balita Kurus

Angka balita kurus dan sangat kurus se kabupaten belum dapat digambarkan keadaannya dari tahun ke tahun/belum dapat dibandingkan mengingat keterbatasan laporan tahunan tidak ada. Hasil survey rikesdas Aceh pada tahun 2007 prevalensi anak kurus menurut Kabupaten di Aceh sangat bervariasi sebagaimana gambar 3.4, dimana Kabupaten Aceh Barat Daya masih dianggap kabupaten dalam katagori bermasaaal dengan status balita kurus dan sangat kurus. Sementara pada tahun 2008, prevalensi balita kurus dan sangat kurus per puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya adalah seperti gambar berikut :

Gambar 2.12
Prevalensi kurus dan sangat kurus per Puskesmas Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008



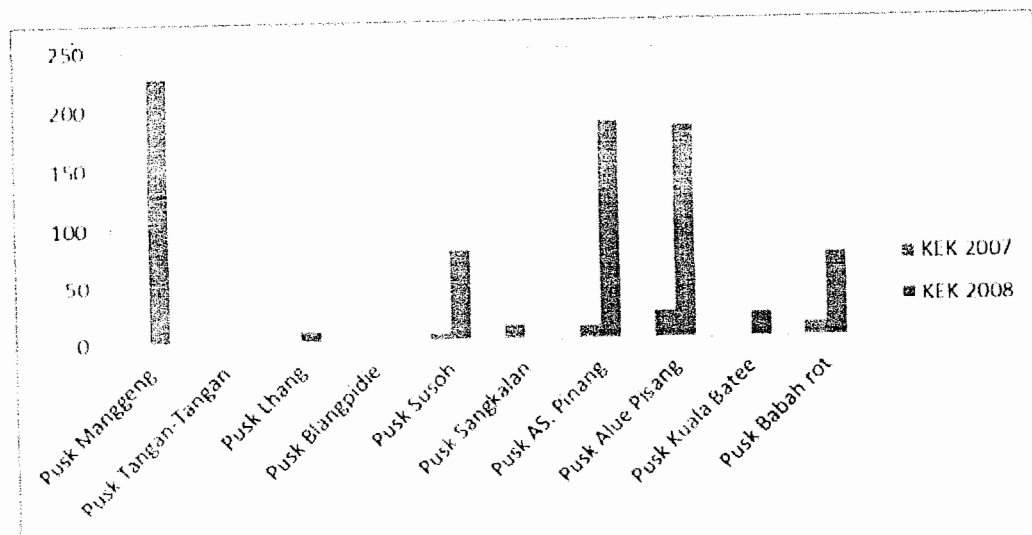
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, (data laporan 2008)

4. Masalah Gizi Lain

Permasalahan gizi lainnya adalah Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada wanita. Berdasarkan data Riskesdas 2007, prevalensi KEK pada wanita usia 15-45 tahun di Aceh adalah 12,3 persen sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka KEK rata-rata Nasional (13,6 persen), sementara Kabupaten Aceh Barat Daya sedikit lebih rendah dari Prevalensi rata-rata provinsi Aceh. Keadaan gizi lain se Kabupaten Aceh Barat Daya (BUMIL KEK) per puskesmas dalam tahun 2007 dan tahun 2008 terdapat beberapa unit puskesmas yang tahun sebelumnya tidak terjadi kasus akan

tetapi pada tahun berikut kasusnya memuncak serta sebagian puskesmas naik lebih tinggi.

Gambar 2.13
Prevalensi Kurang Energi Kronis (KEK) BUMIL per Puskesmas se Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007 dan 2008



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Pada umumnya di provinsi Aceh (Riskesdas, 2007), seperempat (25 persen) Wanita Usia Subur (WUS) terlalu kurus atau dua kali lipat dari pada kondisi nasional (13.6 persen). Kondisi WUS yang kurus berdampak pada resiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

D. Angka Kesakitan

Angka kesakitan disajikan disini berdasarkan data dari *facility based data* berdasarkan pencatatan dan pelaporan puskesmas dan rumah sakit (terutama fasilitas kesehatan milik pemerintah).

Angka keluhan kesehatan (sakit) pada tahun 2009 dan 2010 dari 20 kasus penyakit sekitar 32,3 % dan 37% dari penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya, pernah mengeluh menderita salah satu penyakit selama dua tahun tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan angka tahun sebelumnya (kasus sakit tahun 2008) yaitu 44

persen. Namun demikian angka kesakitan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Dayasedikit lebih tinggi dari rata-rata angka kesakitan estimasi Provinsi Aceh yaitu sebesar 35 persen. Disparitas antar kecamatan terhadap kasus yang ada dan dilayani pada puskesmas-puskesmas dan RSUD Kabupaten Aceh Barat Dayajuga relatif tinggi. Pada tahun 2010, persentase kasus tertinggi keluhan yang pernah menderita penyakit di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan kasus ISPA yaitu sebesar 20,79 persen sedangkan kasus dengan persentase terendah yaitu Infeksi Usus (0,55 persen).

Pola pencarian penyakit; sebagian masyarakat yang mengeluh menderita salah satu penyakit mencari pertolongan kesehatan ke pusat pelayanan kesehatan dan sebagian yang lain mengobati sendiri atau tidak mencari pengobatan sama sekali. Sepuluh jenis penyakit terbanyak yang tercatat di puskesmas dan rumah sakit terlihat pada tabel 3.2. Disamping penyakit Infeksi yang didominasi dan diderita oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya juga penyakit kronik sudah menjadi ancaman baru bagi kesehatan penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya seperti Hypertensi dan Stroke.

Tabel 2.23
Sepuluh Jenis Penyakit Terbanyak Berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan Rumah Sakit

NO	Jenis Penyakit (Berbasis Puskesmas)	Jumlah Kasus	NO	Jenis Penyakit (Berbasis Rumah Sakit)	Jumlah Kasus
1	Ispa	10.355	1	Ispa	834
2	Penyakit Sistem Otot dan Jaringan Penyakit Lain	6.714	2	Penyakit Kehamilan dan Persalinan Lainnya	740
3	Commond Cold	6.568	3	Dyspepsia	486
4	Penyakit Kulit Alergi	3.541	4	Hypertensi	387
5	Hypertensi	3.052	5	Penyakit Sistem Kemih Lainnya	374
6	Penyakit Kulit karna Infeksi	3.718	6	Demam Typoid	347
7	Diare	2.604	7	DBD/DHF	135
8	Scabies	789	8	Penyakit Appendiks	104
9	Penyakit Kulit karna Jamur	2.308	9	TB Paru Lainnya	87
10	Penyakit Infeksi Pada Usus	276	10	Diare/GE	65
	Jumlah	39.925		Jumlah	3.559

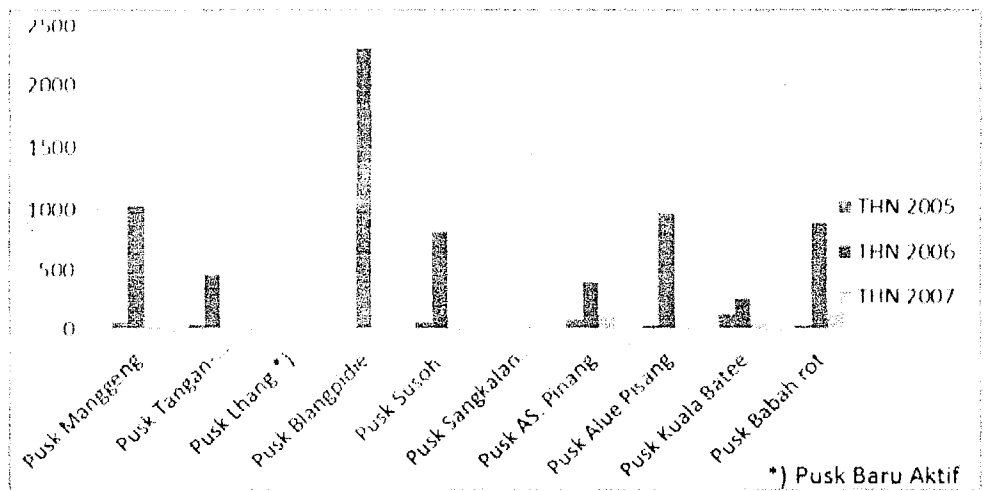
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012



Penyakit infeksi masih didominasi oleh penyakit ISPA dan Diare Penyakit ini umumnya menyerang anak balita. Penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) masih merupakan penyebab kesakitan tertinggi anak balita di Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil survey SDKI tahun 2007, rata-rata prevalensi ISPA di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 28,6 persen. Namun disparitas masih terjadi terhadap kasus ISPA yang dilaporkan Puskesmas. Misalnya, total kasus ISPA tahun 2008 sebanyak 15.076 dan tahun 2009 penyakit ISPA menurun menjadi 7.760 kasus. Pneumonia sering menyertai ISPA, terutama bila pengobatan ISPA tidak dilakukan secara adekuat. Prevalensi Pneumonia di Kabupaten Aceh Barat Daya masih belum dapat dipastikan kisarannya mengingat data laporan yang belum lengkap. Namun hal ini bukan berarti tidak ada kasus, diperkirakan 35-40 persen kasus ISPA disertai pneumonia. Data dari tahun 2004-2006, adanya peningkatan kasus pneumonia setiap tahunnya dan hampir merata disetiap pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (profil kesehatan; Kasus yang diamati).

Prevalensi Diare di Kabupaten Aceh Barat Daya masih dianggap tinggi yang menyerang usia anak balita, hasil survey rikesdas Aceh tahun 2007 sekitar 26.8 persen prevalensi diare di Aceh disumbang oleh Kabupaten Aceh Barat Daya dua kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional (9 persen). Tingginya kasus ISPA dan Diare pada anak balita di beberapa kecamatan atau layanan kesehatan baik puskesmas dan rumah sakit dapat dijadikan sebagai indikator proxy disparitas angka kematian anak antar kecamatan atau setiap puskesmas yang ada secara kewilayahan se Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini dapat dilihat pada keadaan pelaporan data kasus yang diamati pada diare per puskesmas dalam tahun 2005-2007 pada gambar berikut ini.

Gambar 2.14
Persentase menderit diare kasus diamati di Puskesmas se Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Malaria; walaupun penyakit Malaria bukan merupakan endemis di Kabupaten Aceh Barat Daya, merupakan Penyakit Impor dimana sebagian masyarakat yang bermobilisasi/bekerja ke daerah tetangga dalam periode waktu lama dengan pulang membawa bibit penyakit/keadaan sakit (menjadi resevoir). Berbagai program malaria dilakukan belakangan ini, termasuk program Gebrak Malaria. Hasil survey Riskesdas 2007 melaporkan bahwa prevalensi malaria di Aceh lebih tinggi (3,7 persen) dibandingkan dengan angka nasional yang hanya sebesar 2.85 persen dan persentase penggunaan kelambu yang berinsektisida (*insectisida treated net*) juga masih rendah (35 persen).

AMI (*Annual Malaria Incidence*/Angka kejadian malaria) di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan diagnose klinis dan RDT (Rapid Diagnostic Test), dari tahun 2006-2009 masih terjadi fluktuasi terhadap kasus penyakit malaria yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya baik kasus klinis maupun kasus yang positif. Pada tahun 2009, masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tangan-Tangan merupakan penyumbang kasus malaria terbanyak yaitu 62 jiwa kasus klinis dengan kasus positif 18 jiwa sementara kasus positif yang terendah adalah wilayahan kerja Puskesmas Lhang, Puskesmas Blangpidie dan Puskesmas Susoh masing-masing kasus 2 jiwa seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.24
Kasus Malaria Klinis dan Positif per Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya

NO	Unit Kerja	Tahun 2006		Tahun 2007		Tahun 2008		Tahun 2009	
		Klinis	Positif	Klinis	Positif	Klinis	Positif	Klinis	Positif
1	Pusk Lembah Sabil	0	0	0	0	24	0	76	11
2	Pusk Manggeng	51	17	81	17	2	1	2	0
3	Pusk Tangan-Tangan	22	0	22	15	16	9	62	18
4	Pusk Lhang	0	0	2	0	0	0	30	2
5	Pusk Blangpidie	2	0	8	3	1	1	10	2
6	Pusk Susoh	1	0	8	3	0	0	17	8
7	Pusk Sangkalan	0	0	26	4	0	0	22	0
8	Pusk AS. Pinang	1	1	10	5	0	5	17	2
9	Pusk Alue Pisang	129	15	129	43	22	2	35	6
10	Pusk Kuala Batee	10	0	37	21	6	2	42	15
11	Pusk Babah rot	51	21	87	12	9	7	11	10
12	Pusk le Mirah	0	0	0	0	0	0	19	13
	Jumlah	267	54	410	123	80	27	343	87

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular dan salah satu ancaman kesehatan bagi sebagian masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya. Case Detection Rate (CDR) TB Paru Kabupaten Aceh Barat Daya sudah baik namun jumlah kasus terhadap rasio penduduk merupakan yang terbanyak se provinsi Aceh. Prevalensi TB Kabupaten Aceh Barat Daya diperkirakan 239 persen (profil Kesehatan Aceh Barat Daya, 2010). Namun insiden TB di Kabupaten Aceh Barat Daya secara umum menurun dari sejumlah kasus 321 tahun 2010 dan tahun 2011 menjadi 255 kasus. Angka konversi dari penderita TBC dengan BTA positif menjadi BTA negatif juga terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Tahun 2010 angka konversi 89,1 persen dan meningkat ke angka 90,7 persen pada tahun 2011 dimana angka ini sudah melebihi target nasional-minimal 85 persen. Begitupun dengan kemampuan untuk melakukan *Case Detection Rate* (CDR) secara rata-rata sudah baik yaitu 99,5 persen sementara untuk target nasional sekurang-kurangnya 70 persen.

Penyakit demam berdarah dengue (DBD) masih menjadi masalah kesehatan utama. Terjadi peningkatan kasus yaitu 43 kasus tahun 2008 menjadi 55 kasus pada tahun 2009. Kasus DBD tertinggi dilaporkan di Kecamatan Blangpidie disusul Kecamatan Susoh dan Kecamatan Manggeng. Peningkatan kasus ini sangat terkait

dengan keadaan Kebersihan lingkungan di daerah tersebut yang diakibatkan oleh perilaku masyarakatnya dengan intensitas pengelolaan/penanganan sampah atau pengurasan tempat tertampungnya air yang tidak baik.

Penyakit kronis (*non-communicable disease*) sudah menjadi ancaman baru kesehatan penduduk Aceh termasuk Kabupaten Aceh Barat Daya. Hasil survey Riskesda tahun 2007, Aceh berada di urutan teratas untuk beberapa jenis penyakit kronis, terutama penyakit Jantung, Stroke, Hipertensi dan Diabetes Mellitus. Prevalensi Hipertensi (hasil pemeriksaan tenaga kesehatan) yang merupakan faktor resiko untuk terjadi jantung Iskemik dan Stroke juga sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dimana untuk kasus hipertensi rawat jalan mencapai 6,13 persen dan rawat inap di RSUD sebesar 10,87 persen.

E. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang dimaksud disini adalah keadaan kebersihan rumah dan lingkungan sekitarnya serta ketersediaannya sarana sanitasi dasar. Rumah dapat dikatakan sehat apabila bangunan rumah tersebut memiliki sumber air bersih, jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, kepadatan penghuni dan lantai rumah.

Proporsi rumah tangga yang memiliki akses yang baik terhadap jamban pribadi dengan septic tank sebesar 23,10 persen dan tempat sampah yang sehat sebesar 22,8 persen, serta pengelolaan air limbah sehat sebesar 19,1 persen (Profil Kesehatan Aceh Barat Daya, 2010). Walaupun belum adanya data yang akurat, namun sebagian besar penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pengelolaannya dilakukan sendiri dengan membakar ditempat terbuka, sementara proporsi tertinggi dalam penggunaan lantai tanah terdapat di pedesaan. Semakin rendah tingkat ekonomi, semakin tinggi jenis lantai tanahnya.

Tempat-tempat yang perlu diawasi kualitas kesehatannya adalah fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah fasilitas yang menjadi tempat masyarakat melakukan aktivitas seperti tempat jajanan, pasar, hotel, warung/restoran, dan lain-lain. Dari 11 pasar yang dilakukan pemeriksaan terhadap syarat kesehatan lebih kurang 70 persen diantaranya sehat sedangkan hotel 84,64 persen sehat dan merupakan yang paling tinggi memenuhi persyaratan kesehatan (Profil Kesehatan Aceh Barat Daya, 2010).

F. Prilaku

Personal Higiene erat kaitannya dalam pencapaian derajat kesehatan itu sendiri, tingginya penyakit terkait gizi saat ini berkaitan dengan faktor sosial dan budaya, antara lain kesadaran individu dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri pribadi dan atau keluarga serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat sehingga melahirkan pembangunan kesehatan yang optimal.

PHBS meliputi 5 (lima) tatanan, yaitu tatanan rumah tangga, tatanan sekolah, tatanan tempat-tempat umum, tatanan institusi dan tatanan tempat kerja. Dari kelima tatanan tersebut saat ini yang diprioritaskan adalah PHBS pada tatanan rumah tangga dan sekolah.

Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga adalah 1). Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 2). Pemberian ASI eksklusif 3). Menimbang anak balita setiap bulan, 4). Menggunakan air bersih, 5). Mencuci tangan pakai sabun, 6). Menggunakan jamban sehat 7). Mengonsumsi sayuran dan buah setiap hari 8). Memberantas jentik di rumah sekali seminggu 9). Melakukan aktivitas fisik setiap hari, 10). Tidak merokok dalam rumah.

Penerapan PHBS di tatanan sekolah meliputi 8 indikator, yaitu: 1). Mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun, 2). Mengonsumsi jajanan sehat di kantin sekolah 3). Menggunakan jamban yang bersih dan sehat 4). Olah raga yang teratur dan terukur 5). Memberantas jentik nyamuk 6). Tidak merokok disekolah 7). Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan setiap bulan 8). Membuang sampah pada tempatnya.

Berdasarkan data Profil Kesehatan Aceh Barat Daya tahun 2010, persentase dari pada persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebesar 71,84 persen dimana masih jauh dari harapan cakupan target nasional yaitu 90 persen. Sementara kecamatan yang persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan tertinggi adalah Kecamatan Kuala Batee (97,2 persen) dan terendah adalah Kecamatan Blangpidie (50,2 persen). Hal ini dapat dipahami mengingat Kecamatan Blangpidie merupakan Ibu kotanya kabupaten yang mana dalam mencari pelayanan kesehatan tergantung pada kemauan sendiri dan atau banyak praktek-praktek pelayanan kebidanan pribadi di ibu kota kabupaten yang belum dapat dijangkau oleh sarkes dalam pencapaian pelaporannya. Untuk Capaian pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang didapat dari pelaporan Puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana pada tabel berikut.



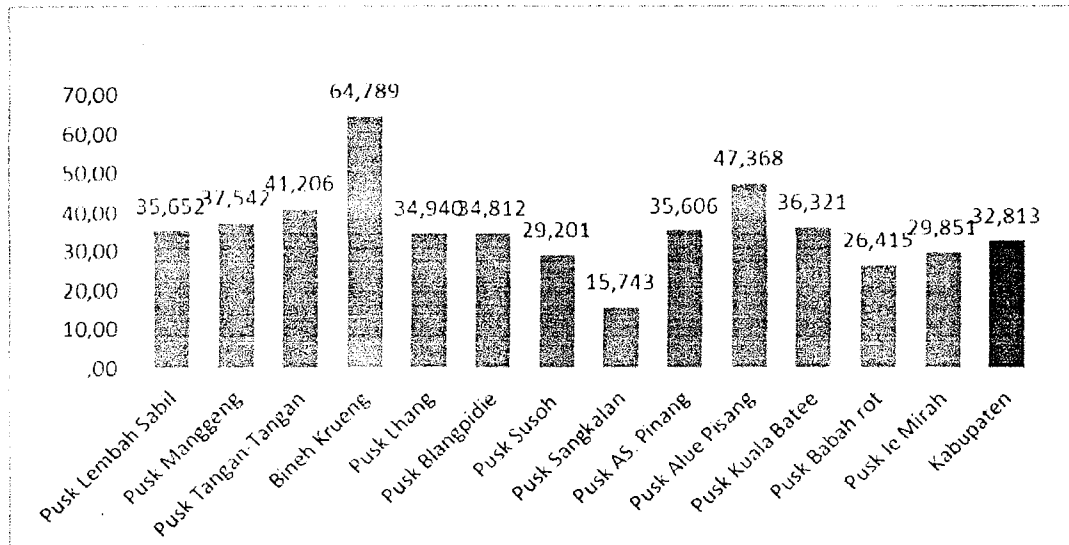
Tabel 2.25
Persentase Cakupan Kunjungan Ibu Hamil dan Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan Tahun 2011

NO	Nama Puskesmas	IBU HAMIL					IBU BERSALIN		
		JLH	K1	%	K4	%	JLH	Ditolong nakes	%
1	Lembah Sabil	253	180	71,1	149	58,9	242	176	72,7
2	Manggeng	332	252	75,9	229	69	316	227	71,8
3	Tangan-Tangan	217	191	88,0	189	87,1	209	175	83,7
4	Bineh Krueng	88	88	100,0	70	79,5	76	65	85,5
5	Lhang	183	152	83,1	146	79,8	174	152	87,4
6	Blangpidie	496	282	56,9	184	37,1	474	238	50,2
7	Susoh	380	303	79,7	243	63,9	363	216	59,5
8	Sangkalan	170	125	73,5	106	62,4	105	99	94,3
9	AS. Pinang	270	263	97,4	218	80,7	264	209	79,2
10	Alue Pisang	188	163	86,7	102	54,3	179	143	79,9
11	Kuala Batee	250	250	100,0	215	86	218	212	97,2
12	Babah rot	352	336	95,5	302	85,8	335	214	63,9
13	le Mirah	78	78	100,0	71	91	71	48	67,6
Jumlah		3.257	2.663	81,8	2.224	61,3	3.026	2.174	71,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif (hanya air susu ibu sebagai makanan bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan) hanya 32,8 persen (Profil Kesehatan Aceh Barat Daya, 2010) masih jauh dari harapan target cakupan nasional sebesar 70 persen, sementara 100 persen anak umur 6-23 bulan sudah mendapatkan pemberian makanan pendamping ASI. Walaupun tidak ada data akurat terhadap sebagian masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memberikan ASI eksklusif saja bagi bayi dibawah 6 bulan (tidak boleh diberikan makanan lain selain ASI) dengan alasan bahwa bayi masih rewel dikarenakan masih belum kenyang dan adanya sebagian bayi yang tidak mau ASI serta berbagai faktor lainnya sehingga diganti dengan memberikan susu formula. Pada tahun 2011 cakupan pemberian ASI Eksklusif di Kabupaten Aceh Barat Daya menurun menjadi 4,3 persen. Jika dilihat menurut laporan kecamatan/puskesmas hampir semua kecamatan/puskesmas mempunyai cakupan yang sangat rendah seperti disajikan pada gambar berikut.

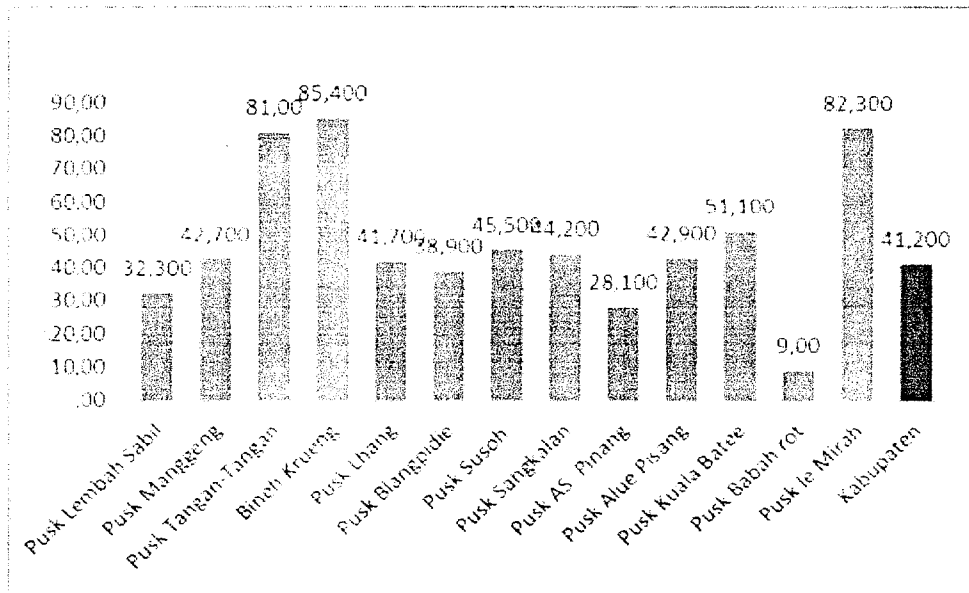
Gambar 2.15
Cakupan ASI Eksklusif menurut Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya



Sumber : Profil Kesehatan Aceh Barat Daya, 2010

Perilaku menimbang anak balita setiap bulan dari persentase cakupan indikator penimbangan, yaitu jumlah balita yang ditimbang dibandingkan dengan jumlah balita sasaran penimbangan (D/S) yang menggambarkan partisipasi masyarakat dalam menimbang balita. Hasil laporan Pencapaian Indikator Pembinaan Gizi Masyarakat menunjukkan rata-rata cakupan D/S di Aceh Barat Daya tahun 2007 adalah 75,1 persen dan menurun menjadi 41,2 persen pada tahun 2010, angka ini jauh dari target Provinsi Aceh yaitu 70 persen. Jika dilihat menurut kecamatan/puskesmas maka terdapat hanya 3 puskesmas dimana capaian penimbangan balita diatas rata-rata (data profil kesehatan Aceh Barat Daya, 2010) sementara sebagian besar puskesmas yang lainnya sangat rendah. Hal ini akan berakibat terhadap pengawasan tumbuh kembang balita oleh petugas kesehatan serta pengawasan keadaan sakit pada balita yang dilaksanakan melalui posyandu setiap bulannya yang pada akhirnya terjadi lost generation. Cakupan balita ditimbang di setiap puskesmas yang dilakukan di posyandu-posyandu dalam wilayahnya sebagaimana gambar berikut :

Gambar 2.16
Cakupan Penimbangan Balita (D/S) Tahun 2010 di
Kabupaten Aceh Barat daya



Sumber : Profil Kesehatan Aceh Barat Daya, 2010

Berdasarkan perilaku merokok dari hasil survey rikesdas pada tahun 2007 (se provinsi Aceh), persentase perokok tiap hari di Kabupaten Aceh Barat Daya (31,0 persen). Namun secara kecamatan belum dapat dilihat mengingat data yang ada masih sangat kurang dan belum akurat.

Selain itu perilaku konsumsi sayuran dan buah-buahan masih sangat rendah. Data Riskesdas 2007 menunjukkan 94,0 persen masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya kurang mengkonsumsi sayur dan buah sementara angka kecukupan sayur dan buah cukup memadai dan dapat dijangkau.

Selanjutnya akses terhadap sumber air bersih (SAB) baik dari jarak maupun waktu yang diperlukan 88,0 persen masyarakat sudah memanfaatkan sumber air bersih yang ada dan layak diantaranya 36,5 persen dengan sumur terlindung. Namun dalam hal menggunakan sabun cuci untuk mencuci tangan baik sebelum maupun sesudah makan atau buang hajat dengan benar masih sangat rendah (9,5 persen). Perilaku benar dalam hal Buang Air Besar (BAB) dengan jamban memenuhi syarat yaitu sebesar 23,10 persen.

2.2.2.3. Sosial

Pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Aceh Barat Daya telah menunjukkan kemajuan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan atau dalam istilah konsep pelayanan Sosial dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Kemajuan kondisi masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin serta cermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik jadi diri bangsa dan daerah.

Sekarang ini Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya masih dihadapkan pada kompleksitas permasalahan kesejahteraan sosial seperti kemiskinan, Kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, diskriminasi, korban tindak kekerasan dan eksploitasi. Jumlah Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008-2012 dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.26
Jumlah Penyandang Masalah Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS)
di Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Jenis Permasalahan Kesejahteraan Sosial	Tahun 2008	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
1.	Anak Telantar (Anak, Yatim, piatu dan Yatim Piatu)		195		2800	3100		
2.	Anak Jalanan		-					
3.	Anak Nakal		13			13		
4.	Anak Korban Tindakan Kekerasan		85			85		
5.	Lanjut Usia Terlantar		1128			2		
6.	Orang dengan Kecacatan		998					
7.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi		2389					
8.	Korban Penyalahgunaan Napza		6					
10.	Gelandangan dan Pengemis		15					
11.	Eks Penyakit Kronis		183			183		
12.	Komunitas Adat Terpencil		169			169		
13.	Mantan Warga Binaan Eks Narapidana							
14.	Korban Bencana dan Musibah lainnya							



15	Tuna Susila		10				
16.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni		3180				
17	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		31			31	
18.	Masyarakat Tinggal di Daerah Rawan Bencana					1379	
19	Perintis, Pahlawan, Pejuang Kemerdekaan		33			2	
20.	Korban Tindakan Kekerasan					33	

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, 2012

Berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya seperti pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial. Kesejahteraan sosial sangat dibutuhkan dan perlu perhatian oleh instansi terkait dengan berbagai program kegiatan untuk kemajuan kondisi masyarakat miskin, kemandirian dan tumbuh yang akan dilaksanakan diantaranya:

- a. Program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan ;
 - Kegiatan penanggulangan kemiskinan Pedesaan dan Perkotaan dengan Indikator Pemberdayaan Fakir Miskin, Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penumbuhan dan Pengembangan.
 - Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
 - Bantuan Lanjutan KUBE Lembaga Keuangan Masyarakat .
 - Kegiatan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - Kegiatan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial ;
 - Kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
 - Bantuan Lanjutan KUBE Lembaga Keuangan Masyarakat .

- b. Program Rehabilitasi Sosial dengan berbagai kegiatan ;
 - Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza
 - Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan
 - Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
 - Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak
 - Pelayanan Sosial Lanjut Usia

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Perlindungan sosial Korban Bencana Alam pra bencana, tanggap darurat serta pasca bencana
- perlindungan sosial korban bencana sosial pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
- Perlindungan sosial Korban Tindak Kekerasan dan migrant bermasalah
- Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber dana Sosial
- Jaminan Sosial berupa asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan tunai bersyarat (program keluarga harapan)

2.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index (IPM/HDI) merupakan satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah, yang diperoleh dari keberhasilan pembangunan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*). IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan sector kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi masyarakat, dan sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan pada salah satu atau semua sektor tersebut. Berikut ini adalah perkembangan IPM Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2008 - 2015
di Kabupaten Aceh Barat Daya

Keterangan	Tahun							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IPM	69,38	69,81	70,29	70,95	71,53	62,62	63,08	63,77

Sumber Data : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

Dari data tabel diatas memperlihatkan bahwa IPM Kabupaten Aceh Barat Daya memperlihatkan Penurunan, yaitu dari 69,38 pada pada tahun 2008 menjadi 63,77 pada tahun 2013. Sedangkan dari setiap indikator juga memperlihatkan peningkatan setiap tahunnya, baik dari indikator harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah maupun pengeluaran per kapita disesuaikan.

2.2.2.5. Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi umum perekonomian suatu wilayah, dan sekaligus memberikan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. TPT diukur berdasarkan persentase jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja yang dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi lingkungan, serta kondisi internal angkatan kerja itu sendiri.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Barat Daya mulai tahun 2007 sebesar 5,24 persen dari 129.748 jumlah penduduk, dan terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2008 yaitu 5,54 persen dari 130.116 jumlah penduduk. Pada tahun 2009 terjadi lonjakan persentase tingkat pengangguran yaitu sebesar 7,21 persen dan terjadi penurunan tingkat pengangguran pada tahun 2010 sebesar 6,14 persen, hal ini disebabkan salah satunya akibat dari peningkatan dari jumlah penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebesar 137.661 pada tahun 2010. Pada tahun 2011 tingkat pengangguran kembali meningkat sebesar 6,83 persen dari tahun 2010 menjadi 6,83 persen, peningkatan TPT ini dikarenakan bertambahnya jumlah angkatan kerja disamping pertambahan jumlah penduduk sementara kebutuhan akan lapangan kerja masih terbatas. Kenaikan dan penurunan tingkat pengangguran Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 2.28
Angkatan Kerja, TPAK dan Pengangguran (TPT) di
Kabupaten Aceh Barat Daya

Uraian	Tahun							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Angkatan Kerja (orang)	49.380	51.188	51.352	51.191	53.664	50.014	54.851	
TPAK (%)	58,8	60,23	59,41	58,9	64,25	54,25	58,14	
Pengangguran (TPT) (%)	5,24	5,54	7,21	6,14	6,83	11,97	10,30	

Sumber : BPS Aceh Barat Daya (Sakernas), 2014

A. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran

Berdasarkan data BPS Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Agustus 2011 mencapai 57.600 orang, bertambah sekitar 5.409 orang dibanding jumlah angkatan kerja pada

Agustus 2010 sebesar 52.191 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Agustus 2011 mencapai 53.664 orang, bertambah sekitar 4.675 orang jika dibandingkan dengan keadaan pada Agustus 2010 sebesar 48.989 orang, atau bertambah sekitar 1.340 orang jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2009 sebesar 47.649 orang. Jumlah penduduk yang tidak bekerja atau belum terserap pada lapangan kerja di bulan Agustus 2011 sebesar 3.936 orang, mengalami peningkatan dibandingkan pada bulan Agustus 2010 sebesar 3.202 atau bertambah sekitar 734 orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Agustus 2011 mencapai 6,83 persen, lebih tinggi 0,69 persen dari TPT bulan Agustus 2010 sebesar 6,14 persen, dan lebih rendah 1,07 persen dari TPT bulan Agustus 2009 sebesar 7,21 persen. Situasi ketenagakerjaan pada bulan Agustus 2011 ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja di beberapa sektor. Sektor yang mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan keadaan Agustus 2010 adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, serta sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja tertinggi adalah sektor pertambangan, perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi serta industri.

Tabel 2.29
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

No.	Indikator	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013	Agustus 2014
1.	Penduduk 15+	86.433	88.612	89.649	-	-	-
2.	Angkatan Kerja	51.352	52.191	57.600	-	-	-
	-Bekerja	47.649	48.989	53.664	-	-	-
	-Pengangguran	3.703	3.202	3.936	-	-	-
3.	Bukan Angkatan Kerja	35.081	36.421	32.049	-	-	-
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	59,41	58,90	64,25	-	-	-
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,21	6,14	6,83	-	-	-

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012

Tabel 2.30
Penduduk Laki-laki Usia Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

No	Indikator	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013	Agustus 2014
1.	Penduduk 15+	41.743	43.264	44.116	-	-	-
2.	Angkatan Kerja	34.429	34.999	36.078	-	-	-
	- Bekerja	32.900	33.098	33.832	-	-	-
	- Pengangguran	1.529	1.901	2.246	-	-	-
3.	Bukan Angkatan Kerja	7.314	8.265	8.038	-	-	-
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	82,48	80,90	64,25	-	-	-
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44	5,43	6,22	-	-	-

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012

Tabel 2.31
Penduduk Perempuan Usia Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan Utama
Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

No.	Indikator	Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013	Agustus 2014
1.	Penduduk 15+	44.690	45.348	45.533	-	-	-
2.	Angkatan Kerja	16.923	17.192	21.522	-	-	-
	- Bekerja	14.749	15.891	19.832	-	-	-
	- Pengangguran	2.174	1.301	1.690	-	-	-
3.	Bukan Angkatan Kerja	27.767	28.156	24.011	-	-	-
4.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	37,87	37,91	47,27	-	-	-
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	12,85	7,57	7,85	-	-	-

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012

Dari tabel diatas penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut jenis kegiatan utama lebih di dominasi oleh penduduk laki-laki dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada bulan Agustus 2011 penduduk laki-laki yang bekerja berjumlah 33.832 orang, lebih banyak 14.000 orang dibandingkan penduduk



perempuan yang hanya sebesar 19.832 orang. Sementara terhadap perbandingan terhadap jumlah penduduk yang belum terserap lapangan kerja, penduduk laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 2.246 orang sedangkan penduduk perempuan sebesar 1.690 orang.

Untuk tingkat pengangguran terbuka penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan penduduk perempuan. Pada bulan Agustus 2011 tingkat pengangguran terbuka untuk penduduk laki-laki sebesar 6,22 persen meningkat 0,79 persen dari tahun 2010 sebesar 5,43 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka untuk penduduk perempuan pada bulan Agustus 2011 sebesar 7,85 persen, meningkat 0,28 persen dari bulan Agustus tahun 2010 sebesar 7,57 persen.

B. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2010, jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2011 mengalami kenaikan tertinggi terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 6.408 orang, yaitu 20.151 orang pada tahun 2010 menjadi 26.559 orang pada tahun 2011 (31,80 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebesar 649 orang, yaitu 10.373 orang pada tahun 2010 menjadi 11.022 (6,26 persen).

Pada Agustus 2011 sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan adalah sektor yang menampung tenaga kerja paling banyak yaitu sebesar 49,49 persen. Secara berurutan sektor lain yang menampung tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perseorangan sebesar 20,54 persen, sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 4,53 persen dan sektor lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan sebesar 0,45 persen.

Tabel 2.32
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan
Utama Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

No.	Kegiatan Utama	BULAN/TAHUN					
		Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013	Agustus 2014
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	20.257	20.151	26.559			
2	Pertambangan dan Penggalian	442	446	393			
3	Industri	2.933	2.379	1.916			
4	Listrik, Gas dan Air Minum	232	518	-			
5	Konstruksi	4.879	4.017	3.730			
6	Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	7.320	8.788	7.368			
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	2.541	2.231	2.433			
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	136	86	243			
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	8.909	10.373	11.022			
	Total	47.649	48.989	53.664			

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012

C. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Secara sederhana, pendekatan kegiatan formal dan informal dari penduduk yang bekerja dapat diidentifikasi berdasarkan status pekerjaan. Dari tujuh katagori status pekerjaan utama, pendekatan pekerja formal mencakup katagori berusaha dibantu buruh tetap dan katagori buruh/ karyawan, sisanya termasuk pekerja informal.

Tabel 2.33
Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status/Kedudukan Dalam
Pekerjaan Utama Di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

No.	Kegiatan Utama	BULAN/TAHUN					
		Agustus 2009	Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013	Agustus 2014
1	Berusaha Sendiri	8.400	10.609	7.439			
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	8.525	8.559	9.439			
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.327	3.768	2.407			
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	17.176	13.563	12.838			
5	Pekerja bebas di pertanian	1.093	2.010	7.256			
6	Pekerja bebas di non pertanian	1.626	2.576	4.027			
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	8.502	7.904	10.258			
	Total	47.649	48.989	53.664			

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012



2.2.2.6. Gangguan Kamtibmas dan Kecelakaan

Kejaksanaan Negeri Blangpidie sepanjang tahun 2014, mencatat dari 195 kasus gangguan kamtibmas, 67 kasus yang diproses dan semuanya telah diselesaikan. Dari 67 kasus tersebut terdiri dari 21 kasus berhubungan dengan KUHP, 31 kasus berhubungan dengan narkoba/narkotika, 7 kasus pidana korupsi dan 8 kasus lainnya. Perkembangan gangguan kamtibmas di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Perkembangan Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2009-2014

Kecamatan	Jumlah Kasus Per Tahun					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Manggeng	4	15	19	5	7	12
Lembah Sabil		-	4			
Tangan-Tangan	1	3	6	3	4	11
Setia		-	2			
Blangpidie	2	15	48	6	8	16
Jeumpa		-	6			
Susoh	1	6	22	7	8	22
Kuala Batee	3	19	20	3	2	12
Babahrot	2	16	18	2	5	11
Jumlah	13	74	145	102	91	195

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2015

Dari tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah kasus gangguan kamtibmas yang banyak terjadi di Kecamatan Susoh pada tahun 2014 dan paling sedikit terjadi di Kecamatan Tangan-Tangan dan Setia. Data yang tercatat di Kepolisian Resort Aceh Barat Daya, kasus yang terbanyak terjadi adalah kasus pencurian 41 kasus, curanmor 33 kasus, penganiayaan ringan 16 kasusu dan narkoba 14 kasus.

Sementara itu pada tahun 2014, data jumlah kecelakaan lalu lintas yang tercatat meningkat dari sisi jumlah, korban meninggal, korban luka berat dan korban luka ringan dibandingkan tahun 2013. Peningkatan jumlah kecelakaan lebih dikarenakan faktor kelalaian manusia dalam berkendara tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan. Perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 dapat dilihat seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.35
Perkembangan Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

Kecamatan	Korban			
	Jumlah	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan
Manggeng	2	1	1	1
Lembah Sabil	0	0	0	0
Tangan-Tangan	6	2	4	5
Setia	2	1	0	6
Blangpidie	3	3	1	2
Jeumpa	5	3	9	6
Susoh	3	2	0	3
Kuala Batee	9	6	7	4
Babahrot	8	6	8	4
Jumlah	38	24	30	31

Sumber : Profil Pembangunan Aceh Barat Daya, 2015

2.2.3. Fokus Syariat Islam, Pemuda dan Olah Raga

A. Pemberdayaan Petugas Agama

Peranan Tokoh agama gampong merupakan ujung tombak keberhasilan dan kekuatan pelaksanaan syariat islam ditengan masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh barat daya dan Provinsi Aceh serta masyarakat yang memeluk Islam di daerah –daerah lain pada umumnya karena merekalah yang selalu berhadapan langsung dengan masyarakat banyak. Untuk itu petugas agama gampong perlu diperkuat dengan memberikan insentif bulanan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap mereka .Jumlah petugas agama gampong se-Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai berikut :

Tabel 2.36
Jumlah Petugas Agama Gampong di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

No	Uraian	Jumlah Petugas (Orang)	Jumlah Petugas yang Diberdayakan (Orang)	Petugas yang diberdayakan (%)
1	Tgk.Sagoe	150	150	100
2	Imam Mesjid	151	151	100
3	Khatib	151	151	100
4	Bilal Mesjid	151	151	100
5	Khadam Mesjid	151	151	100
6	Petugas Fardhu kifayah	528	300	58
7	Guru Seumeubeut	817	400	48

Sumber: Dinas Syariat Islam Tahun 2012

Dari data tersebut Nampak bahwa ada sebahagian petugas agama tidak mendapat insentif bulanan dari Pemerintah Daerah, 42 persen petugas fardhu kifayah dan 52 persen Guru seumeubeut dalam Kabupaten Aceh Barat Daya tidak mendapat insentif dari pemerintah.

B. Pemberdayaan Pimpinan Pondok Pasantrendan Guru

Berdasarkan hasil pendataan Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2012 jumlah pondok pesantren / dayah dan guru sebagai berikut:

Tabel 2.37
Jumlah Pondok Pesantren/Dayah dan Guru di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

No	Jlh Ponpes (unit)	Jlh Guru (orang)	Jlh Guru Yang Berinsentif (Orang)	Guru Berinsentif (%)
1	60	395	120	30

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2012

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa baru 30 persen guru pasantren diberi insentif dan 70 persen lagi tidak mendapat insentif. dengan demikian masih banyak guru pasantren yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena mereka sangat banyak jasa dalam mencetak generasi yang beragama dalam masyarakat.

C. Pemberdayaan Badan Kemakmuran Masjid.

Sejak tahun 2012 meluncurkan salah satu program pencerdasan umat dalam bentuk pengajian majelis taklim sekaligus untuk memakmurkan masjid yang di pusatkan di masjid-mesjid dibawah kendali Badan Kemakmuran Masjid (BKM) pada 151 Masjid Se-Kabupaten Aceh Barat Daya, di setiap masjid yang dibagi pada dua kelompok yaitu Majelis Ta'lim orang tua/dewasa dan majelis Ta'lim Remaja yang setiap bulan mendapat batuan setiap masjid Rp. 1.000.000,- untuk bantuan guru mejelis ta'lim.

D. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Rumah ibadah di Kabupaten Aceh Barat daya saat ini berjumlah 156 Masjid dan 196 Mushola yang tersebar di 9 (Sembilan) Kecamatan sebagai mana tabel berikut ini :



Tabel 2.38
Jumlah Mesjid dan Mushola di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

No	Kecamatan	Mesjid	Mushola
1	Manggeng	21	18
2	Lembah Sabil	19	25
3	Tangan - Tangan	15	26
4	Setia	8	11
5	Blangpidie	13	17
6	Susoh	12	14
7	Jeumpa	15	32
8	Kuala Batee	23	27
9	Babah Rot	30	26
JUMLAH		156	196

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

E. Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten Aceh Barat daya memiliki berbagai club olah raga sesuai dengan jenis olah raga yang digemari oleh masyarakat seperti club sepak bola, badminton, anggar, tenis meja, tenis lapangan, anggar, futsal, voly, silat, karate, panjat tebing, atletik dan perbakin.

Tabel 2.39
Jumlah Club olah Raga dan Sarana Olah Raga
Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Nama Cabang Olah Raga	Jumlah Club Olah Raga	Jumlah Lapangan Olah Raga
1	Sepak Bola	91	79
2	Atletik	1	-
3	Badminton	23	23
4	Anggar	1	-
5	Volly	60	83
6	Tenis Meja	2	39
7	Tenis Lapangan	1	1
8	Karate	1	-
9	Silat	1	1
10	Takraw	2	0
11	Perbakin	1	-
12	Futsal	1	-
13	Panjat Tebing	1	-

Sumber : Bagian BUDPORA Setdakab Aceh Barat Daya, 2016



Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa cabang olah raga yang paling diminati oleh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya adalah Sepak Bola. Cabang olah raga Sepak Bola masih menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah sebanyak 91 club dan jumlah lapangan Sepak Bola sebanyak 79 lapangan. Kemudian disusul oleh cabang olah raga Volly dengan jumlah club sebanyak 60 club dan lapangan sebanyak 83 lapangan. Cabang olah raga Badminton menduduki urutan ketiga dengan jumlah club sebanyak 23 club dan jumlah lapangan sebanyak 23 lapangan. Untuk cabang olah raga Tenis Meja menduduki urutan keempat dengan jumlah club sebanyak 2 club dan jumlah lapangan sebanyak 39 lapangan.

Selain cabang olah raga diatas, di Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya di beberapa kecamatan yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa club sepakbola yang merupakan salah satu olah raga kegemaran di masyarakat.

Tabel 2.40
Nama-nama Club Sepak Bola Dalam
Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Nama Club	Alamat Club
1	Blangpidie	PSK PERSEBA BOM-H PERSIKUTA PS.RAS PUMA LASER GAJAH PUTIH POT-B GARUDA KUTA SABI FC GP SPORT PERSIGAS FC JEPARA FC	KEDAI SIBLAH KEDAI SIBLAH MEUDANG ARA KUTA TUHA KUTA TINGGI MATA IE LUENG ASAN SEUNALOH GUHANG BABAHLOK KEUDE SIBLAH GEULUMPANG PAYONG MATA IE PANTON RAYA
2	SUSOH	PSP STAR PAJAR RAWA BAJA FC PERSEPA MARINIR	PANTAI PERAK PADANG HILIR TENGAH RAWA KEPALA BANDAR PAWOH PADANG BARU

		BARONA COBRA PSPK G.U PSUJP ARSENAL SAMUDRA FC PERUMNAS FC	RUBEK MEUPAYONG PALAK KERAMBIL PULAU KAYU GP.PINANG/BAHARU UJUNG PADANG LIMA DESA PDG.PANYANG SKLN BAHARU BABAHLAK
3	JEUMPA	PERSEKO TM. PERKASA PS.PINEUNG PSAD POSKA SPORT KUMA	COT MANE AS.PINANG LADANG NEUBOK COT JEURAT GP. BARU KUTA MAKMUR
4.	KUALA BATEE	PSKB PAJAR BARU PSBM PS2G PERSIKAT PSA PSM ACEH DAMAI PSAP GTSB PS.MECHANIC PS.GAS PSGL PERSIRUPA	PS.KUTA BAHAGIA PS.KUTA BAHAGIA BLANG MAKMUR PATO CUT KUALA TERUBU ALUE PADEE MUKA BLANG LAM TUHA ALUE PISANG SIKABU BLANG MAKMUR BLANG MAKMUR LHOK GAJAH RUMAH PANYANG
5.	SETIA	KUTA RAJA OBOR PERSENA LANG FC METRO ALDA KOMPI E	GP. PISANG RAMBONG UJUNG TANAH GP. LANG TANGAN CUT ALUE DAMA GP. SUAK
6.	TANGAN-TANGAN	BOMBAL DONGKRAK 2000 PERSIWA BORDA P XI GEULUMPANG UNTED PS GUNUNG CUT PSPB	BLANGPADANG KUTA BAK DRIEN PADANG KAWA ADAN BINEH KRUENG GEULUMPANG GUNONG CUT PADANG BAK JOK

		PSPJ PERSIT	PADANG BAK JEUMPA IE LHOB
7.	BABAHROT	PANSER PSA GENJA FC SAIBA FC PSCS PSGS PSBR	PANTE CERMIN RUKUN DAMAI GEUNANG JAYA BLANG RAJA COT SEUMANTOK GUNUNG SAMARINDA PANTE RAKYAT
8	MANGGENG	AWAK KAMOE ANDESPARA BENTO PERSEPA PSPM PETRO PEUNAYONG PORTUPA ANDELBA PERSIPAL GARLOP GT SPOT ANDESLA COMBET PSPJ PSKM PERSITI	PANTE PIRAK PANTE RAJA PANTAI CERMIN PADANG BARU PADANG MEURANDE SEUNEULOP UJONG PADANG LUNG BARU BLANG MANGGENG LOK PUNTOI GAMPONG TANGAH LADANG PANAH TOKOH SATU PUSU JAYA KEDAI MANGGENG PANTON MAKMUR
9	LEMBAH SABIL	PS UTP PSG PSAP PERSEMA PSSD COMBET CAMAR LAUT PUTRA ARONA PERSICOPA RMS	UJUNG TANAH GELANGGANG BATEE PADANG KELELE MEUNASAH SUKON SUKA DAMAI TOKOH DUA LADANG TUHA SATU LADANG TUHA DUA COT BAK'U MEURANDEH

Sumber : Disbudparpora Aceh Barat Daya, 2015

Menurut data Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Barat Daya, terdapat beberapa Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)

merupakan bagian dari organisasi keagamaan, partai politik, organisasi kemahasiswaan dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa organisasi kemasyarakatan pemuda di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 2.41
Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP)
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2010

No.	Nama OKP	Alamat
1	Pemuda Muhammadiyah	Mesjid At-Taqwa Blangpidie
2	NA (Nasyatul Aisyah)	Mesjid At-Taqwa Blangpidie
3	IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)	Mesjid At-Taqwa Blangpidie
4	IPM (Ikatan Pelajar Muhammadiyah)	Mesjid At-Taqwa Blangpidie
5	GP-Ansor (Gerakan Pemuda Ansor)	Ponpes Babul Istiqamah Susoh
6	Fatayat NU (Fatayat Nahdatul Ulama)	Ponpes Babul Istiqamah Susoh
7	IPNU (Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama)	Padang Baru - Susoh
8	PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)	Padang Baru - Susoh
9	IPPNU (Ikatan Putra Putri Nahdatul Ulama)	Padang Baru - Susoh
10	PI PERTI (Pemuda Islam Tarbiyah Islamiyah)	Ponpes Bustanul Huda Blangpidie
11	OPI (Organisasi Pelajar Islam)	Ponpes Bustanul Huda Blangpidie
12	KMI (Kesatuan Masa Islam)	Ponpes Bustanul Huda Blangpidie
13	AMPG (Angkatan Muda Partai Golkar)	Kantor Partai Golkar
14	WKI (Wira Karya Indonesia)	
15	Pemuda Bulan Bintang	Jln. Persada Lr.Jeumpa Kesib
16	BMI (Benteng Muda Indonesia)	Kantor Partai PDIP
17	BM PAN (Barisan Muda Partai Amanat Nasional)	Kantor Partai PAN
18	Pemuda Reformasi Indonesia	
19	GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah)	Kantor Partai PPP
20	AMK (Angkatan Muda Ka'bah)	Kantor Partai PPP
21	KNPD (Komite Nasional Pemuda Demokrat)	Kantor Partai Demokrat
22	GM Parmusi (Gerakan Pemuda Parmusi)	
23	BKPRMI	
24	Satma PP (Satuan Mahasiswa Pemuda Pancasila)	
25	GM FKPPI	Radio Fatali FM
26	GPI (Gerakan Pemuda Islam)	Jin. Haji Ilyas
27	AMPI (Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia)	Kantor Partai Golkar
28	KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golkar)	Kantor Partai Golkar
29	PPM (Pemuda Panca Marga)	Kantor Partai Golkar
30	PPMI	
31	HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)	
32	KAMMI	
33	GPI (Gerakan Pemuda Indonesia)	

33	KBP3	Jalan TVRI Kuta Tuha
35	GM Kosgoro	
36	GAKARI	
37	PKKNPI Kecamatan Babahrot	
38	PKKNPI Kecamatan Kuala Batee	

Sumber : Disbudparpora Aceh Barat Daya, 2016

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1. Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan

A. Reformasi Birokrasi

Birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat merupakan tiga pilar utama dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good Governance*). Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan public, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal. Oleh karena itu, birokrasi yang konsisten seperti itu, dan dapat bekerja dengan baik dan bersih dalam mengemban perjuangan mewujudkan keseluruhan cita-cita dan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan harapan seluruh bangsa Indonesia.

Dalam konteks pemahaman seperti ini, maka eksistensi birokrasi yang dapat diandalkan memiliki implikasi pada peluang yang lebih besar dalam mengemban misi perjuangan bangsa mencapai tujuan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu "memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial". Pengertian ini dimaksudkan bahwa birokrasi harus dipahami dalam konteks peran dan kemampuannya dalam menunjang tugas tugas pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Dalam reformasi birokrasi khususnya reformasi kepegawaian harus dipusatkan pada 3 aspek yaitu penataan sistem penggajian dan jaminan sosial PNS, pendistribusian mutu PNS yang lebih merata antardaerah perkotaan dan

pedesaan, serta mengatasi ketimpangan dalam kompetensi perumusan kebijakan.

B. Kualitas Pelayanan Publik

Perbaikan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi, sepatutnya menjadi prioritas pertama sekaligus menjadi lokomotif bagi pembenahan di area perubahan lainnya. Lokus utama perbaikan kualitas pelayanan publik adalah pada unit pelayanan, seperti Rumah Sakit Umum Daerah, puskesmas, polindes, sekolah, kantor camat, Badan/Kantor Pelayanan Terpadu satu pintu, Dinas/Badan Kependudukan dan Catatan Sipil serta unit pelayanan lainnya yang langsung menyelenggarakan pelayanan publik.

Untuk kualitas pelayanan publik dapat mencapai hasil yang optimal, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini: *Pertama*, digunakannya sejumlah target kinerja sebagai basis penyelenggaraan pelayanan. Target kinerja yang dimaksud adalah standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi acuan bagi Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dalam mengalokasikan sumber daya keuangan, manusia dan infrastruktur. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah, belum semua kabupaten/kota dan juga Pemerintah Aceh memiliki baseline dan target pencapaian SPM baik untuk bidang-bidang prioritas seperti pendidikan dan kesehatan atau lainnya. Target pencapaian SPM perlu juga memuat rencana alokasi pembiayaannya, agar diketahui berapa jumlah dana yang dibutuhkan setiap tahunnya untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. *Kedua*, dilakukan pembenahan dalam tata kelola (manajemen) penyelenggaraan pelayanan terutama di unit-unit pelayanan. Baik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik telah mengatur elemen-elemen apa saja yang perlu dibenahi dalam tata kelola penyelenggaraan pelayanan publik. Perbaikan tata kelola ini harus dapat menghasilkan pelayanan yang terjangkau, cepat, mudah, pasti dan tidak diskriminatif. Untuk itu seluruh unit pelayanan perlu memiliki dan menjalankan standar pelayanan publik (SPP), *standard operating procedure* (SOP), standar penyampaian informasi, Maklumat/Janji Pelayanan, Pelaporan Kinerja serta Mekanisme Penanganan Pengaduan. Agar pelayanan dapat mudah dan terjangkau, maka perlu dilakukan penyederhanaan prosedur

secara berkala yang nantinya juga berimplikasi pada perbaikan biaya/tarif pelayanan. *Ketiga*, dilibatkannya masyarakat dalam setiap tahap perbaikan kualitas pelayanan publik, termasuk dalam penentuan target pencapaian SPM dan juga pembenahan tata kelola penyelenggaraan pelayanan. Unit pelayanan perlu diberikan kewenangan untuk memperbaiki kualitas pelayanannya sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang mereka layani. Bisa jadi, ekpektasi masyarakat di daerah urban terhadap pelayanan puskesmas lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Melalui cara seperti ini, perbaikan kualitas pelayanan bisa lebih realistis dan menyesuaikan dengan kapasitas unit pelayanan itu sendiri serta tuntutan masyarakat. Tugas pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil adalah meningkatkan ekspektasi masyarakat dari waktu ke waktu. Dan, *keempat*, dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan perbaikan kualitas pelayanan publik. Alat ukur yang sering digunakan oleh banyak daerah termasuk Pemerintah untuk menilai keberhasilan perbaikan kualitas pelayanan publik adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM).

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah belum profesional, hal ini tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Aceh masih dalam kategori Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum pernah menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penyebab utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum menerima predikat WTP tersebut disebabkan oleh: (1) belum profesionalnya pengelolaan aset, (2) kapasitas sumber daya manusia (SDM) belum profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset publik, (3) belum transparansinya pengelolaan keuangan dan aset, (4) belum optimalnya pemanfaatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan aset dan keuangan; (5) pengesahan APBD setiap tahun belum sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Hasil rekapitulasi belanja langsung dan belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya untuk setiap tahunnya berkisar sebesar 21,61 persen untuk belanja langsung dan 25,50 persen belanja tidak langsung. Belanja langsung ini pada hakikatnya ditujukan untuk membiayai

pembangunan daerah yang manfaatnya diterima secara langsung oleh masyarakat. Namun, dalam belanja langsung masih terdapat untuk belanja aparatur. Dengan demikian, belanja langsung ini secara riil lebih kecil dari 15,73 persen yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah agar menjadi efisien dan efektif dilakukan dengan peningkatan pengalokasian belanja langsung pemerintah dan menggefisenkan belanja pegawai pada belanja langsung. Hal ini dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi belanja pemerintah.

D. Penataan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Penataan Kelembagaan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), struktur organisasi dan eselonering. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran serta percepatan pembangunan daerah, maka tupoksi beberapa Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) perlu dipertegas untuk menghindari tumpang tindihnya kewenangan dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu, untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu menerapkan pengembangan sistem elektronik pemerintahan (e-government), yang meliputi; kebijakan e-office (pengembangan website, e-administrasi umum/manajemen dokumen elektronik (e-arsip), administrasi keuangan elektronik/sistem keuangan elektronik, dan administrasi kepegawaian elektronik/simpeg), kebijakan e-planning, monitoring and evaluation, kebijakan e-budgeting, kebijakan e-procurement, kebijakan e-performance (SAKIP).

Dalam rangka memaksimalkan fungsi organisasi pemerintahan perlu dilakukan penataan kembali terhadap struktur organisasi masing-masing SKPK yang selama ini diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dilakukan reorganisasi beberapa SKPK sesuai dengan beban kerja yang diembannya. Dalam hal ini, reorganisasi lembaga pemerintahan dengan cara penggabungan dan pemisahan beberapa SKPK yang didahului dengan suatu kajian perlu dilakukan.

Manajemen Aparatur berkaitan erat dengan rekrutmen, distribusi dan penegakan disiplin (*reward and punishment*). Proses rekrutmen aparatur pemerintah harus berdasarkan pada kebutuhan riil dan profesionalismenya yang didahului dengan suatu kajian kebutuhan riil masing-masing SKPK. Latar belakang pendidikan, keahlian yang dimiliki dan pengalaman kerja menjadi salah satu indikator penilaian dalam proses rekrutmen. Demikian juga penempatan aparatur perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPK.

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur, perlu diatur suatu mekanisme pemberian penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya.

E. Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Upaya pemberantasan KKN merupakan salah satu tuntutan penting pada awal reformasi. Namun prevalensi KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Tuntutan akan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur yang berdaya guna, produktif dan bebas KKN serta sistem yang transparan, akuntabel dan partisipatif masih memerlukan solusi tersendiri. Selain aspek transparan dan akuntabilitas, kekuatan kepemimpinan memiliki faktor penting dalam konteks tumbuh atau malah meredupnya korupsi dalam kelembagaan tertentu. Dalam aspek organisasi umumnya disebabkan oleh keteladanan kepemimpinan yang lemah, kultur organisasi kurang benar, akuntabilitas kurang memadai, kelemahan manajemen, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.

Selain itu praktek KKN mengakibatkan tidak efisien dan tidak efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan dapat memicu biaya ekonomi tinggi. Disamping itu, praktik KKN juga menyebabkan tidak tepatnya sasaran pembangunan, menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas masyarakat dan hasil pembangunan akan berpihak

pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat umum. Hal ini mengakibatkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.

Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut di atas, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu melakukan peningkatan pengawasan secara internal dan eksternal terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*). Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.

2.3.1.2. Pendidikan

A. Pendidikan Dasar

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Untuk mengetahui perkembangan APS Kabupaten Aceh Barat Daya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

Kelompok Usia & Jenis Kelamin	Tahun						Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
SD/MI (7-12 Tahun)	84.00	104.75	105.38	99,10	99,50	99,30	49,65
SMP/MTS (13-15 Tahun)	64.01	94.48	97.77	96,90	95,20	96,30	48,07
SMA/MA/SMK (16-18 Tahun)	87.28	69.55	77.28	70,60	74,20	81,70	37,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2009-2014, rata-rata APS SD/MI Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 49,65; APS SMP/MTs sebesar 48,07; sedangkan APS SMA/MA/SMK sebesar 37,75.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk setiap 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Untuk mengetahui secara rinci rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.43
Rasio Ketersediaan Sekolah pada Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2009-2014

Rasio Siswa/Sekolah	Tahun						Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
SD/MI (7-12 TAHUN)	121.79	119.19	115.01				
SMP/MTS (13-15 TAHUN)	131.88	169.29	168.37				
SMK/SMA/MA (16-18 TAHUN)	257.05	207.23	221.59				
SD/MI	146.90	143.06	136.91				
SMP/MTS	259.53	256.41	247.54				
SMK/SMA/MA	362.73	332.18	345.14				

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya, 2015

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Yang dimaksud dengan rasio antara guru dengan murid adalah perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu. Untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Untuk mengetahui secara rinci tentang rasio ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.44
Rasio Ketersediaan Guru pada Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2007-2014

Guru	Rasio Guru Terhadap Siswa								Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
a. SD/MI	18.77	9.22	9.10	8.50	8.15				25.42
b. SMP/MTS	15.94	12.82	14.37	12.60	12.34				13.61
C. SMK/SMA/MA	20.12	15.48	11.62	12.71	12.57				14.50

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya, 2015

B. Pendidikan Menengah**1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Pada jenjang pendidikan menengah, perkembangan APS periode tahun 2009-2014 telah menunjukkan penurunan. APS kelompok usia 16 - 18 tahun (jenjang pendidikan menengah) pada tahun 2009 sebesar 87,28 persen menurun menjadi 81,70 persen pada tahun 2011.

Tabel 2.45
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Usia Sekolah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2009-2014

Kelompok Usia & Jenis Kelamin	Tahun						Rata-rata
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
SMA/MA/SMK (16-18 Tahun)	87.28	69.55	77.28	70.60	74,20	81,70	37,75

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2009-2014, rata-rata Angka Partisipasi Murni terhadap murid SMA/MA/SMK di kabupaten Aceh Barat Daya adalah 37,75.

2. Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 16-18 tahun juga terus membaik dari tahun ke tahun. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2011 adalah sebesar 221.59. Hal ini bermakna bahwa untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun di Aceh tersedia 22 unit SMA/MA/SMK.

3. Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio siswa-guru pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun 2011 di Aceh Barat Daya sebesar 12,57.

C. Bidang Pendidikan Dayah

1. Rasio Ketersediaan Dayah dan Santri

Pendidikan dayah memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat dan berakhlakul karimah yang berlandaskan nilai-nilai dinul Islam. Berdasarkan akreditasi dayah pada tahun 2011, jumlah lembaga dayah di Aceh Barat Daya sebanyak 47 dayah. Dari jumlah tersebut, dayah yang jumlah terbanyak di Kecamatan Kuala Batee sebanyak 9 dayah. Sedangkan untuk Kecamatan dengan Jumlah dayah terkecil adalah Kecamatan Setia dengan jumlah 2 dayah dengan santri tetap sejumlah 60 santri. Rasio ketersediaan dayah dan santri adalah 1:66.

2. Rasio Ketersediaan Tengku/Guru dan Santri

Dari hasil kegiatan pemutakhiran data yang dilakukan tahun 2011 menunjukkan bahwa jumlah teungku/Ustadzah Sebanyak 451 orang. Dengan jumlah teungku/Ustadz terbanyak adalah Kecamatan Manggeng dengan Jumlah 73 orang. Sedangkan untuk Kecamatan dengan Jumlah Teungku/Ustadz terkecil Adalah Kecamatan Susoh dengan jumlah 26 orang. Pada kegiatan pemuktahiran data tahun 2011, juga didapat jumlah santri dayah di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sebanyak 3.123 orang. Kecamatan Tangan-Tangan memiliki jumlah santri tertinggi yaitu 534 santri, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki jumlah Santri paling sedikit adalah Kecamatan Susoh dengan santri sebanyak 150 santri. Dengan demikian, rasio ketersediaan tgk/guru dan santri 1:7.

Tabel 2.46
Rekapitulasi Jumlah Dayah Aceh Hasil Pemuktahiran Tahun 2011
Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kecamatan	Jlh dayah	Status santri		Jlh santri	Status guru/tgk		Jumlah guru/tgk
			Menetap	Tidak menetap		Menetap	Tidak menetap	
1	Lembah Sabil	3	248	112	360	38	7	45
2	Manggeng	7	63	159	222	13	60	73
3	Tangan-Tangan	4	178	356	534	37	18	55
4	Setia	2	60	188	248	20	7	27
5	Blangpidie	7	364	150	514	30	20	58
6	Susoh	4	100	50	150	16	10	26
7	Jeumpa	4	90	70	160	20	25	45
8	Kuala Batee	9	200	300	500	22	40	62
9	Babahrot	7	220	215	435	25	35	60
	JUMLAH	47	1523	1600	3123	221	222	451

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat Daya, 2012

2.3.1.3. Kesehatan

Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan (dokter dan paramedis) di Kabupaten Aceh Barat Daya ditampilkan pada tabel berikut. Selanjutnya rasio masing indikator sarana kesehatan dan tenaga medis diuraikan berikut ini.

Tabel 2.47
Jumlah Sarana Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 – 2013

NO	URAIAN		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Rasio Posyandu dengan Balita	%	18,20	19,97	17,51	16,59	16,60	17,01
	a. Jumlah Balita	Orang	11.536	10.363	11.764	12.412	12.409	11.751
	b. Jumlah Posyandu	Unit	210	207	206	206	206	200
2	Jumlah Sarana Kesehatan							
	a. Rumah Sakit	Unit	1	1	1	1	1	1
	b. Puskesmas	Unit	12	13	13	13	13	13
	c. Pustu	Unit	28	24	24	24	24	24
	d. Poskesdes	Unit	17	22	26			
3	Jumlah Dokter							
	a. Dokter Umum	Orang	33	18	28	35	29	37
	b. Dokter Spesialis	Orang	0	0	4	8	11	10
	c. Dokter Gigi	Orang	1	1	5	1	1	1
4	Jumlah Tenaga Paramedis							
	a. Perawat	Orang	251	130	133	274	312	321
	b. Bidan	Orang	190	129	146	203	225	334

Sumber Data : Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Aceh Barat Daya, 2014

A. Rasio Posyandu Per satuan Balita

Jumlah balita yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya tahun 2013 sebanyak 11.751 dan jumlah posyandu yang tercatat 200 unit sehingga rasio posyandu per 1.000 balita adalah 17,01. Hal ini bermakna bahwa 18 posyandu melayani 1.000 balita (1 posyandu berbanding 57 balita).

Tabel 2.48
Rasio Balita terhadap POSYANDU di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2014

No	Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah penduduk	Jumlah posyandu
1	Lembah Sabil	14	10.713	15
2	Manggeng	18	13.890	22
3	Tangan-Tangan	15	12.592	17
4	Setia	8	8.159	12
5	Blangpidie	20	22.039	25
6	Susoh	29	22.944	22
7	Jeumpa	12	10.395	16
8	Kuala Batee	21	19.467	37
9	Babahrot	14	17.941	35

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 jumlah Posyandu di kabupaten Aceh Barat Daya yang terbanyak terdapat di Kecamatan Kuala Batee dan yang paling sedikit terdapat di kecamatan jeumpa.

B.Rasio Puskesmas, Pustu dan Poskesdes Per Satuan Penduduk

Jumlah puskesmas, pustu dan poskesdes yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya tahun 2010 sebanyak 72 unit dengan total penduduk 134.56 sehingga rasio puskesmas, pustu dan polindes per 1.000 penduduk adalah 0,53. Hal ini bermakna bahwa 1 (satu) puskesmas, pustu dan poskesdes melayani 1.000 penduduk (1 puskesmas, pustu dan poskesdes 1.859 penduduk).

Tabel 2.49
Jumlah Puskesmas, PUSTU dan Poskesdes di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2014

No	Kecamatan	Jlh desa	Jumlah penduduk	Jumlah puskesmas	Jumlah pustu	Jumlah poskesdes
1	Lembah Sabil	14	10.713	1	1	7
2	Manggeng	18	13.890	1	2	5
3	Tangan-Tangan	15	12.592	2	3	5
4	Setia	8	8.159	1	1	6
5	Blangpidie	20	22.039	1	2	3
6	Susoh	29	22.944	2	4	3



7	Jeumpa	12	10.395	1	1	3
8	Kuala Batee	21	19.467	2	5	8
9	Babahrot	13	17.941	2	5	4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015

C.Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Jumlah rumah sakit yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya tahun 2010 sebanyak 1 unit dengan total penduduk 134.561 jiwa sehingga rasio rumah sakit per 10.000 penduduk adalah 0,07. Hal ini bermakna bahwa 0,07 rumah sakit melayani 10.000 penduduk (1 rumah sakit berbanding 134.561 penduduk).

D.Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Jumlah dokter yang terdata di Dinas Kesehatan Aceh Barat Daya tahun 2010 sebanyak 28 orang dengan total penduduk 134.561 jiwa sehingga rasio dokter per 1.000 penduduk adalah 0,21. Hal ini bermakna bahwa 0,21 dokter melayani 1.000 penduduk (1 dokter berbanding 4.806 penduduk).

E.Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Jumlah tenaga medis yang terdata di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2010 sebanyak 133 orang dengan total penduduk 134.561 jiwa sehingga rasio tenaga medis per 1.000 penduduk adalah 0,99. Hal ini bermakna bahwa 1(satu) tenaga medis melayani 1.000 penduduk (1 tenaga medis berbanding 1.012 penduduk).

2.3.1.4. Lingkungan Hidup

A. Persentase Penanganan Sampah

Penanganan persampahan masih terbatas dalam kawasan komersil, tingkat pelayanan di tempat fasilitas umum di perkotaan masih sangat minim. Sesuai dengan target MDG's untuk Aceh pada sektor persampahan ditargetkan akses pelayanan persampahan perkotaan sebesar 80 persen dan pedesaan 75 persen.

Permasalahan pengembangan persampahan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah :



- Keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan sampah,
- Sistem pengangkutan masih terfokus di wilayah Kota Blangpidie
- Masih sering warga masyarakat membuang sampah ke sungai dan saluran drainase

Dalam usaha mencapai target akses pelayanan tersebut dibutuhkan percepatan pembangunan pelayanan persampahan. Adapun upaya yang akan dijalankan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :

- Tempat Penampungan Sampah (TPS) akan ditempatkan pada pusat kegiatan masyarakat seperti : pasar, permukiman, perkantoran dan fasilitas sosial lainnya.
- Rencana tempat pemrosesan akhir sampah (TPAS) dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), terletak di Kecamatan Jeumpa berada di Gampong Ikhu Lhung seluas 4,5 ha, melayani semua permukiman dalam wilayah kabupaten;
- Pengelolaan sampah dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (Reuse, Reduce, Recycle);
- Rencana peningkatan tempat penampungan sampah (TPS) berupa Arm Roll Container akan di tempatkan pada setiap permukiman perkotaan, pasar dan fasilitas sosial;
- Pengangkutan sampah dilakukan dari depo wadah komunal (TPS) ketempat pembuangan akhir regional atau untuk pengumpulan sampah langsung dari sumber –sumber sampah besar langsung ke TPAS; dan
- Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terpadu dalam pengelolaan sampah.

B. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Air minum mengandung pengertian air bersih yang dapat dikonsumsi dengan aman bagi masyarakat untuk aktivitas sehari-hari antara lain untuk memasak, mencuci dan kebutuhan personal lainnya.

Secara umum penduduk di Aceh Barat Daya memperoleh air minum dari air sumur dan air permukaan seperti air sungai, kolam/rawa serta air tanah. Persentase penduduk berakses air minum di Aceh Barat Daya masih rendah walaupun sumber baku untuk air bersih sebenarnya melimpah, tetapi belum optimal pemanfaatannya.

Pada tahun 2012 kapasitas produksi air minum dari 13 sumber Intake (bak penangkap), 11 sumber Intake yang masih beroperasi dan 2 sumber Intake yang tidak beroperasi lagi karena debit airnya sudah berkurang, jumlah kapasitas produksi air minum di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 50 liter/detik pada musim hujan dan 29 liter/detik pada musim kemarau, dengan jumlah total pemakai air sebanyak 1.472 sambungan rumah, sedangkan kapasitas produksi air minum ideal untuk tahun 2012 sebesar 135 liter/detik dengan jumlah penduduk 137.661 jiwa.

Tabel 2.50
Data Teknis SPAM Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Sumber Intake	Kecamatan	Jumlah Sambungan	Sistem Pengaliran	Keterangan
1	AS. Pinang	Jeumpa	111	Gravitasi	Sudah Mempunyai Water Meter
		Blangpidie	366	Gravitasi	
		Susoh	688	Gravitasi	
2	Babahlhok	Blangpidie	314	Gravitasi	Belum Mempunyai Water Meter
3	Alue Peunawa	Babahrot	91	Gravitasi	
4	Panton Cut	Kuala Batee	47	Gravitasi	
5	Panton Mue	Kuala Batee	323	Gravitasi	
6	Krueng Batee	Kuala Batee	325	Gravitasi	
7	Desa Lhang	Setia	23	Gravitasi	
8	Gunung Cut	Tangan-Tangan	440	Gravitasi	
9	Suka Damai	Manggeng	62	Gravitasi	

Sumber : Dinas PU Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Disamping data di atas terdapat juga 2 (dua) intake yang tidak berfungsi lagi yaitu intake Pante Cermin Kecamatan Babahrot dan Intake Kampung Baru Kecamatan Jeumpa sedangkan untuk SPAM IKK Lembah Sabil dan IKK Babahrot dengan Sistem Pompalisasi yang sudah selesai dikerjakan pada tahun 2011 dan 2012 belum di Operasionalkan.

Permasalahan penyediaan air bersih untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, antara lain:

- Belum meratanya pelayanan air bersih keseluruhan Kabupaten Aceh Barat Daya, dan masih sedikitnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air bersih.

- Kualitas air bersih yang masih terbatas,
- Kapasitas produksi belum mencukupi kebutuhan
- Sumber air baku belum dikembangkan dan relatif jauh dari instalasi pengolahan air
- Pompa di intake berjalan terus-menerus tanpa cadangan.
- Banyaknya kebocoran pipa dikarenakan kualitas pipa sudah menurun akibat lamanya masa operasi (jaringan lama).
- Adanya kendala dalam perbaikan sistem perpipaan disebabkan minimnya alat dan tenaga kerja yang berkompeten di bidang tersebut.
- Belum adanya qanun yang mengatur tentang sistem pengelolaan air bersih.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta menjaga sarana prasarana air bersih yang sudah ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan beberapa upaya sebagai berikut :

- Kemampuan *intake* harus ditambah dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada dan masih dapat diandalkan tetapi harus disertai dengan pengelolaan daerah hulu yang benar agar beban dan biaya pengolahan air menjadi kecil.
- Kapasitas produksi pengolahan air perlu dikembangkan sesuai dan bersamaan dengan penambahan kemampuan sistem transmisi
- Pembuatan instalasi pengolahan air regional yang akan dimanfaatkan bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan memanfaatkan sumber mata air yang ada.

Selain sumber air diatas, masyarakat juga memanfaatkan air kemasan sebagai air Minum. Pada periode tahun 2010-2012 rumah tangga yang memanfaatkan air kemasan sebagai sumber air minum mengalami peningkatan dan pada periode yang sama rumah tangga yang memanfaatkan sumber air selain air kemasan mengalami penurunan seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Sumber Air Minum untuk Kebutuhan Rumah Tangga (dalam persen)
Tahun 2006– 2014

No	Uraian	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Air Kemasan	4,42	6,73	14,43	18,93	25,49				
2	Leding Meteran	10,93	8,76	7,04	8,55	8,48				
3	Leding Eceran		3,42	1,85	1,32					
4	Sumur Bor/Pompa	3,17	4,92	5,25	5,75	4,19				
5	Mata Air Terlindung	4,68	3,55	4,15	5,81	4,7				
6	Mata Air Tak Terlindung	3,07	3,16	3,2	1,95	2,81				
7	Air Sungai	5,55	4,76	3,31	4,09	3				
8	Air Hujan	1,61	1,14	1,22	0,78	0,63				
9	Sumur Tak Terlindung	22,74	21,41	17,99	12,94	13,22				
10	Sumur Terlindung	43,24	41,58	41,19	40,69	37,35				
11	Lainnya	0,58	0,58	0,33	0,18	0,13				

C. Persentase Luas Permukiman Yang Tertata

Mulai pesatnya perkembangan di wilayah perkotaan atau permukiman di Kabupaten Aceh Barat Daya cenderung menyebabkan tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh, hal ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lingkungan permukiman menjadi tidak sehat. Keadaan ini semakin diperburuk dengan belum tersedianya sarana dan prasarana dasar yang memadai sesuai dengan standar yang diharapkan untuk melayani kebutuhan primer maupun sekunder serta masih kurangnya jaringan infrastruktur yang mendukung pengembangan perekonomian pada kawasan desa potensial, kawasan agropolitan dan minapolitan.

Berdasarkan data survey, kawasan permukiman kumuh terdapat di Kecamatan Babahrot sebanyak 1 (satu) Gampong, Kecamatan Kuala Batee 1 (satu) Gampong, Susoh 27 (dua puluh tujuh) Gampong, Jeumpa 2 (dua)

Gampong, Blangpidie 6 (enam) Gampong, Setia 3 (tiga) Gampong, Tangan-Tangan 3 (tiga) Gampong, Lembah Sabil 4 (empat) Gampong dan Manggeng 5 (lima) Gampong (Sumber data Dinas PU).

Upaya yang dilakukan guna meningkatkan persentase luas permukiman yang tertata di kawasan perkotaan dan perdesaan adalah dengan meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman baik didalam permukiman itu sendiri ataupun jaringan infrastruktur yang menghubungkan permukiman tersebut dengan pusat-pusat kegiatan. Pada kawasan perkotaan upaya peningkatan kualitas infrastruktur permukiman kumuh dilakukan dengan cara mengembalikan fungsi kawasan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dan atau peremajaan kawasan bagi kawasan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, menyediakan prasarana jalan akses atau jalan poros yang menghubungkan setiap kawasan perumahan penduduk yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan sistem jaringan jalan kota atau infrastruktur jaringan permukiman lainnya. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan perikanan bagi kawasan agropolitan dan minapolitan.

D. Penyehatan Lingkungan dan Air Minum

Pembangunan penyehatan lingkungan dan air minum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi memiliki dampak secara langsung terhadap peningkatan status kesehatan dan secara langsung berdampak pada produktifitas, penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup.

2.3.1.5. Sarana dan Prasarana

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan di Aceh Barat Daya belum mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan jasa yang memadai. Hal tersebut dikarenakan oleh masih terdapat jaringan jalan yang belum dapat menghubungkan kawasan dengan kawasan di Kabupaten Aceh Barat Daya.



Secara keseluruhan panjang jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu 1.706,65 km yang terdiri dari jalan nasional (61,22 km), provinsi (72,00 km) dan kabupaten (1.573,43 km). Kondisi masing-masing jalan tersebut dikategorikan kedalam kondisi baik, sedang dan rusak berat yang secara rinci disajikan padatable di bawah ini.

Tabel 2.52
Kondisi Jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten
Tahun 2012

No	Keterangan	Panjang Jalan (km)
1	Nasional	61,22
2	Provinsi	72,00
3	Kabupaten	
	a. Aspal	363,12
	b. Kerikil	321,07
	c. Tanah	888,24
	d. Tidak dirinci	0
JUMLAH		1.706,65

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya, 2013

Dari tabel dapat disimpulkan bahwasanya panjang jalan yang dibangun setiap tahun mengalami peningkatan, begitu pula dengan kondisi jalan yang mengalami perbaikan.

Bila ditinjau dari luas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya dan bentang alam lintas Barat-Selatan dan menembus lintas Tengah, maka proporsi dan panjang jaringan jalan belum mencukupi aksesibilitas pergerakan orang dan barang. Proporsi jalan Nasional dalam wilayah kabupaten adalah kewenangan Pemerintah Pusat dan merupakan jalan arteri primer yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional, maka keberadaan dari segi panjang sudah mencukupi, hanya saja dari segi kondisi perlu peningkatan sesuai kebutuhan lalu lintas dan diperlukan penuntasan beberapa ruas jalan yang belum tembus (batas Kabupaten Nagan Raya – simpul jalan kota Blangpidie sepanjang 41,5 km dan simpul jalan kota Blangpidie – batas Kabupaten Aceh Selatan sepanjang 22,63 km) untuk saat ini dan prediksi ke depan. Demikian juga dengan kebutuhan jalan Propinsi dalam wilayah kabupaten yang secara administrasi kewenangan di

bawah pemerintah Aceh. Untuk rencana jaringan jalan propinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer yang akan dibangun/ditingkatkan adalah batas Simpang Trangon – batas Kabupaten Gayo Lues sepanjang 27,51 km.

Berbeda halnya dengan jalan kabupaten yang secara administrasi kewenangan dari masing-masing kabupaten/kota, sehingga setiap kabupaten/kota dapat memenuhi kebutuhan pelayanan minimal dari prediksi pergerakan yang terjadi antar kecamatan dan kecamatan/desa menuju ke kota/kabupaten.

Agar aksesibilitas antar kecamatan dan kecamatan/desa menuju ke kota/kabupaten terakomodir dengan pengurangan biaya operasi kendaraan dan penghematan waktu perjalanan, maka kondisi dan keberadaan jalan kabupaten tersebut di atas perlu ditingkatkan.

Total penanganan jalan kabupaten yang harus dibangun/ditingkatkan adalah 290,5 km dengan rincian yaitu Jalan Lokal Primer sepanjang 141,3 km, Jalan Lokal Sekunder sepanjang 149,2 km. Selain itu terdapat pula rencana pembangunan/peningkatan jaringan Jalan kota sepanjang 227,5 km, Jalan khusus sepanjang 148,6 km, Jalan Lingkungan sepanjang 108,2 km dan Jalan Lingkar sepanjang 96,17 km. Prioritas penanganan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya akan lebih difokuskan pada tingkatan jalan lokal primer yang terdiri dari :

1. Ruas jalan Alue Dawah sepanjang 6 Km;
2. Ruas jalan Blang Makmur – Krueng Teukuh sepanjang 10,5 Km;
3. Ruas jalan Cot Bak U – Sejahtra sepanjang 5 Km;
4. Ruas jalan Kedai Manggeng – Lhok Pawoh sepanjang 6,3 Km;
5. Ruas jalan Krueng Batee – Lama Muda sepanjang 5,1 Km;
6. Ruas jalan Lahan 1000 sepanjang 6,6 Km;
7. Ruas jalan Muka Blang – Lhok Gajah II sepanjang 8,8 Km;
8. Ruas jalan Pante Rakyat – IDT sepanjang 16,2 Km;
9. Ruas jalan Seuneubok – IDT I sepanjang 6,4 Km;
10. Ruas jalan Seuneubok – IDT II sepanjang 5,7 Km;
11. Ruas jalan Simpang le Mierah – Surien sepanjang 24,4 Km;
12. Ruas jalan Simpang le Mirah – Gunung sepanjang 7,4 Km;
13. Ruas jalan Surien – Lama Muda sepanjang 16,6 Km;
14. Ruas jalan Susoh – Setia sepanjang 7,9 Km; dan

15. Ruas jalan Lhok Pawoh – Tangan Tangan Cut sepanjang 9 Km

Total panjang jembatan untuk Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 2.880 meter sebanyak 590 unit yang tersebar di 9 kecamatan. Umumnya kondisi jembatan masih baik tetapi beberapa jembatan memerlukan peningkatan dan pemeliharaan agar dicapai kondisi mantap jembatan.

Pembangunan jembatan di Kabupaten Aceh Barat Daya direncanakan pada setiap simpul pertemuan antara jaringan jalan dan jaringan sungai di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Untuk mendukung sistem jaringan jalan dan jembatan yang mampu memberikan pelayanan bagi pergerakan arus barang dan jasa maka juga diperlukan perencanaan umum program jalan jembatan provinsi dan kabupaten, perencanaan teknis jalan dan jembatan dan pendataan kondisi jalan dan jembatan.

B. Jaringan Irigasi

Pada tahun 2012, Kabupaten Aceh Barat Daya telah memiliki jaringan irigasi yang berada pada 31 daerah irigasi.

Tabel 2.53
Nama Lokasi Daerah Irigasi (DI) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

No	Nama Daerah Irigasi	No	Nama Daerah Irigasi	No	Nama Daerah Irigasi
1	DI Susoh	12	DI Pusu	23	DI Alue Padee
2	DI Babahrot	13	DI Panton Cut	24	DI Paya Riemung Mate
3	DI Manggeng	14	DI Alue Batee Leukat	25	DI Suka Damai
4	DI Cot Mane 1	15	DI Alue Sabong	26	DI Ladang Neubok
5	DI Cot Mane 2	16	DI Panton Teungku	27	DI Putroe Ijo
6	DI Gunong Cut	17	DI Blang Dalam	28	DI Kuta Paya
7	DI Alue Thoe	18	DI Alue Drien	29	DI Panto Mue
8	DI Lh. Geulumpang	19	DI Blang Tho	30	DI Gunung Samarinda
9	DI Mukablang	20	DI Pante Cermin	31	DI Meurandeh
10	DI Alue Buluh	21	DI Alue Pisang		
11	DI Tangan-Tangan	22	DI Tuwi Kareng		

Sumber : Qanun RTRWK Aceh Barat Daya 2013-2033

Bila dilihat dari tingkatan jaringan irigasi terdiri dari : (1) Jaringan Irigasi Teknis seluas 11.477,60 Ha, (2) Jaringan Irigasi Semi Teknis seluas 1.638 Ha dan (3) Jaringan Irigasi Sederhana seluas 5.993 Ha. Sedangkan dari segi luas pemanfaatan terdiri dari : (1) Luas Baku seluas 10.325,58 Ha (2) Luas Potensial seluas 10.325,58 Ha dan (3) Luas Fungsional seluas 10.325,58 Ha, seperti pada Tabel 2.35 dibawah ini.

Tabel 2.54
Potensi Lahan Pertanian Tahun 2011

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Irigasi	19.108,60
	Irigasi Teknis	11.477,60
	Irigasi Semi Teknis	1.638,00
	Irigasi Sederhana	5.993,00
2	Sawah Tadah Hujan	14,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Pada tabel diatas ditunjukkan penetapan D.I berdasarkan RTRW di Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah 33 (tiga puluh tiga) D.I, yang 1 (satu) D.I di antaranya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, 2 (dua) D.I kewenangan Pemerintah Provinsi dan 30 (tiga puluh) D.I kewenangan Kabupaten Aceh Barat Daya. Penetapan D.I Kabupaten Aceh Barat Daya ini berbeda dengan Keputusan Menteri PU No. 390/KPTS/M/2007 yaitu sebanyak 49 (empat puluh sembilan), karena berdasarkan hasil hitungan digitasi GIS (Geographic Information System) diatas peta citra SPOT banyak daerah irigasi yang tidak ada lagi.

Tabel 2.55
Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Aceh Barat Daya Berdasarkan Keputusan Menteri PU No.390/KPTS/M/2007

No	Kode DI	Nama DI	Kabupaten	Provinsi	Luas (Ha)
1	311120001	Alue Bate Leukat	ACEH BARAT DAYA	NAD	100
2	311120002	Alue Jeurejak	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
3	311120003	Alue Pede	ACEH BARAT DAYA	NAD	300
4	311120004	Alue Pisang	ACEH BARAT DAYA	NAD	120
5	311120005	Alue Rambong	ACEH BARAT DAYA	NAD	95
6	311120006	Alue Rambut	ACEH BARAT DAYA	NAD	97
7	311120007	Alue Sabong	ACEH BARAT DAYA	NAD	120



8	311120008	Alue Sungai Pinang	ACEH BARAT DAYA	NAD	300
9	311120009	Alue Tho	ACEH BARAT DAYA	NAD	150
10	311120010	Alue Trieng Gadeng	ACEH BARAT DAYA	NAD	250
11	311120011	Blang Dalam	ACEH BARAT DAYA	NAD	196
12	311120012	Blang Rambut	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
13	311120013	Blang Tho	ACEH BARAT DAYA	NAD	178
14	311120014	Cot Beurehoi	ACEH BARAT DAYA	NAD	155
15	311120015	Cot Mane I	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
16	311120016	Cot Mane II	ACEH BARAT DAYA	NAD	78
17	311120017	Cot Mane III	ACEH BARAT DAYA	NAD	161
18	311120018	Geulanggang Gajah	ACEH BARAT DAYA	NAD	110
19	311120019	Guhang I	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
20	311120020	Guhang II	ACEH BARAT DAYA	NAD	300
21	311120021	Gunung Cut I	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
22	311120022	Gunung Cut II	ACEH BARAT DAYA	NAD	64
23	311120023	Gunung Samarinda	ACEH BARAT DAYA	NAD	278
24	311120024	Ie Mameh	ACEH BARAT DAYA	NAD	100
25	311120025	Kuta Bak Drien	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
26	311120026	Kuta Jeumpa	ACEH BARAT DAYA	NAD	196
27	311120027	Kuta Paya	ACEH BARAT DAYA	NAD	75
28	311120028	Lhok Gajah	ACEH BARAT DAYA	NAD	205
29	311120029	Lhung Lintang	ACEH BARAT DAYA	NAD	75
30	311120030	Mesjid	ACEH BARAT DAYA	NAD	125
31	311120031	Meunasah Bak Ara	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
32	311120032	Meurandeh	ACEH BARAT DAYA	NAD	125
33	311120033	Muka Blang	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
34	311120034	Pante Cermin	ACEH BARAT DAYA	NAD	206
35	311120035	Panton Cut	ACEH BARAT DAYA	NAD	600
36	311120036	Panton Mu	ACEH BARAT DAYA	NAD	130
37	311120037	Panton Tungku	ACEH BARAT DAYA	NAD	400
38	311120038	Pusu	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
39	311120039	Putroe Ijoe	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
40	311120040	Seunaloh	ACEH BARAT DAYA	NAD	60
41	311120041	Simpang Barat	ACEH BARAT DAYA	NAD	75
42	311120042	Suak Labu	ACEH BARAT DAYA	NAD	200
43	311120043	Tangan Tangan	ACEH BARAT DAYA	NAD	710
44	311120044	Tui Kareng	ACEH BARAT DAYA	NAD	500
45	311120045	Ujung Gunung	ACEH BARAT DAYA	NAD	100
46	311120046	Rumoh Panjang	ACEH BARAT DAYA	NAD	40
47	311120047	Alud Drien	ACEH BARAT DAYA	NAD	40
48	311120048	Alue Buloh	ACEH BARAT DAYA	NAD	50
49	311120049	Ladang Neubok	ACEH BARAT DAYA	NAD	45



Sumber : KepMen PU No. 390/KPTS/M/2007

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya. Pada beberapa daerah irigasi, kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah menurun, disebabkan kondisi saluran, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi dan bangunan pada daerah irigasi seperti di bawah ini.

Tabel 2.56
Kondisi Saluran Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2011

No	Daerah Irigasi Kewenangan	Luas fungsional (Ha)	Saluran	Panjang (m)	Kondisi Saluran					
					Baik		Rusak Sedang		Rusak Berat	
					(m)	(%)	(m)	(%)	(m)	(%)
1	Kewenangan Pusat	1.958,00	Saluran Primer	195,17	78,00	39,97	117,17	60,03	-	-
			Saluran Sekunder	28.859,99	11.543,90	40,00	14.316,09	49,61	3.000	10,40
2	Kewenangan Provinsi	2.623,00	Saluran Primer	2.024,07	809,60	40,00	1.214,47	60,00	-	-
			Saluran Sekunder	54.334,99	21.733,90	40,00	27.101,09	49,88	5.500	10,12
3	Kewenangan Kabupaten	5.744,58	Saluran Primer	8.208,10	3.643,20	44,39	4.373,90	53,29	191	2,33
			Saluran Sekunder	46.101,27	20.236,10	43,89	20.865,17	45,26	5.000	10,85

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012



Tabel 2.57
Kondisi Bangunan Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2011

No	Daerah Irigasi Kewenangan	Luas fungsional (Ha)	Bangunan	Jumlah (buah)	Kondisi Saluran			
					Baik		Rusak	
					(bh)	(%)	(bh)	(%)
1	Kewenangan Pusat	1.958,00	Saluran Primer	21 Buah	18	85,71	3	14,29
			Saluran Sekunder	169 Buah	164	97,04	5	2,96
2	Kewenangan Provinsi	2.623,00	Saluran Primer	12 Buah	9	75,00	3	25,00
			Saluran Sekunder	158 Buah	152	96,20	6	3,80
3	Kewenangan Kabupaten	5.744,58	Saluran Primer	69 Buah	24	34,78	45	65,22
			Saluran Sekunder	146 Buah	95	65,07	51	34,93

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Menurunnya fungsi beberapa daerah irigasi pada saat ini disebabkan kurang terpeliharanya jaringan irigasi, baik saluran primer maupun sekunder serta bangunan yang ada didalamnya. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar saluran, pintu-pintu air dan bangunan-bangunan ukur tidak berfungsi dengan baik. Permasalahan lainnya belum adanya sistem drainase yang teratur sehingga menimbulkan genangan setempat pada musim hujan.

Menurunnya luas areal persawahan beririgasi yang potensial diakibatkan adanya alih fungsi lahan dari sawah beririgasi menjadi areal pemukiman, perkebunan dan areal budidaya lainnya. Kendala lain yang dihadapi dalam pengelolaan irigasi adalah belum efektifnya kinerja kelembagaan manajemen irigasi, kemampuan dan pengetahuan petugas O&P kurang memadai, Perkumpulan Petani Pemakai Air (Keujreun Blang) sebagai pemanfaat air belum bekerja sebagai mana mestinya dan ketersediaan dana dan sarana pendukung kegiatan O&P masih kurang memadai.

Bentuk pengembangan yang dapat direkomendasikan untuk penyediaan dan peningkatan pengairan irigasi teknis di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

- Peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya air pada kawasan irigasi yang telah ada saat ini
- Pengembangan dan pembangunan sumber-sumber pengairan yang dapat dimanfaatkan bagi kegiatan produksi, misalnya pembangunan dam dan jaringan irigasi pada wilayah yang sangat membutuhkan akan pelayanan tersebut.

Selain bentuk pengembangan diatas, pembangunan pengairan juga diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan meningkatkan fungsi jaringan irigasi untuk dapat melayani ketersediaan air areal persawahan. Kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Irigasi

a. Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi

Untuk menggantikan alih fungsi lahan beririgasi perlu dilakukan pembangunan jaringan irigasi baru. Makna peningkatan jaringan irigasi sebagaimana tertera dalam Qanun Aceh nomor 4 tahun 2011 tentang Irigasi adalah meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada.

Dari makna di atas, sebagaimana diketahui bahwa luas potensial irigasi di Kabupaten Aceh Barat Daya 19.108,60 Ha yang terdiri dari irigasi teknis 11.477,60 Ha, irigasi semi teknis 1.638 Ha dan Irigasi Sederhana 5.993 Ha. Daerah-daerah irigasi semi teknis dan sederhana merupakan pusat-pusat produksi beras dimana intensitas tanamnya sekitar 50 – 60 % sehingga diperlukan peningkatan fungsinya. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan peningkatan jaringan irigasi tersebut menuju tingkat irigasi teknis agar mampu menjamin ketersediaan air, sehingga mampu pula meningkatkan intensitas tanamnya bisa mencapai 100 %.

Disamping itu juga pada daerah-daerah irigasi teknis dan semi teknis yang masih memiliki lahan yang dapat dikembangkan atau lahan potensial menjadi sawah beririgasi perlu juga ditingkatkan melalui penambahan saluran dan bangunan, sehingga areal sawah beririgasi semakin luas. Prioritas penanganan/peningkatan daerah irigasi di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari 3 Daerah Irigasi seluas 8.125,55 Ha, meliputi:

- Daerah Irigasi Kewenangan Nasional, berupa Daerah Irigasi Susoh seluas 3.081,53 Ha;
- Daerah irigasi kewenangan provinsi, seluas 2.453,77 Ha;
- Daerah irigasi kewenangan kabupaten, seluas 2.531,90 Ha

b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Rehabilitasi merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. Hampir semua daerah irigasi Teknis dan Semi Teknis fungsinya menurun, hal ini dikarenakan banyak saluran dan bangunan yang rusak.

c. Penyediaan Dana O&P sesuai Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI)

Penyediaan dana O&P didasarkan pada kewenangan masing-masing seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi dan Qanun Nomor 4 tahun 2011 tentang Irigasi. Dari amanah Qanun tersebut memberi makna bahwa penyediaan O&P harus berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi di lapangan bukan berdasarkan harga satuan yang dihitung berdasarkan luas areal seperti yang dilakukan selama ini. Disamping itu diamanahkan juga bahwa biaya O&P jaringan irigasi merupakan Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) yang ketersediaannya lebih diutamakan.

Disamping jaringan irigasi, jaringan sungai juga membutuhkan kegiatan O&P. Disamping dilakukan kegiatan O&P juga perlu dilakukan penertiban pada bantaran sungai untuk mengamankan asset pemerintah.

d. Perbaiki Manajemen Operasi & Pemeliharaan

Peraturan perundang-undangan telah membagi kewenangan dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan O&P jaringan irigasi. Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada jaringan utama yang menjadi tanggungjawab Pemerintah, sedangkan pada jaringan tersier merupakan kewenangan dan tanggungjawab petani pemakai air (Keujreun Blang). Meskipun kedua kegiatan dilakukan institusi yang berbeda, namun substansi yang diatur saling terkait, saling ketergantungan, maka kedua-duanya diperlukan kelembagaan yang mantap. Sebagaimana dinyatakan dalam Qanun Irigasi, bahwa Kelembagaan Pengelolaan Irigasi meliputi; Lembaga Adat, SKPA yang membidangi irigasi, Keujruen Blang dan Komisi Irigasi.

Sebagaimana diamanahkan dalam Qanun Irigasi pada pasal 11 ayat 2, pengelolaan irigasi di lapangan dilaksanakan oleh Pengamat Irigasi, Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB). Mengingat sangat pentingnya ketertiban dalam kegiatan O&P jaringan irigasi perlu segera ditunjuk dan ditetapkan petugas tersebut. Demikian juga halnya bagi lembaga pengelola irigasi pada jaringan tersier yaitu Keujreun Blang, perlu kiranya segera dibentuk bagi petak tersier yang belum ada Keujruen Blang.

Pelaksanaan O&P baik yang dilakukan pemerintah maupun petani pemakai air (Keujruen Blang) diperlukan adanya kelembagaan yang cukup mampu dilihat dari 3 aspek yaitu; Personil, Peralatan dan Pembiayaan. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan personil melalui kegiatan pelatihan, sedangkan peralatan yang merupakan sarana pendukung dalam kegiatan O&P seperti; alat transportasi, komunikasi dan peralatan kerja juga perlu disediakan, demikian juga halnya dengan pembiayaan seperti; honor Juru Irigasi, Petugas Pintu Air (PPA) dan Petugas Pintu Bendung (PPB) serta biaya operasional kelembagaan.

Untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan irigasi perlu dibentuk Komisi Irigasi, keanggotaan Komisi Irigasi terdiri dari; Lembaga Adat, SKPA terkait, dan Wakil Keujreun Blang.

2. Bendung (yang menjadi kewenangan Kabupaten Aceh Barat Daya)

Pembangunan Bendung, meliputi:

- a. Bendung manggeng memiliki debit air sejumlah 100 liter/detik/ha dengan lebar bendungan 40 meter berada di Gampong Suka Damai dan Gampong Lhok Puntoy terletak di Kecamatan Manggeng; dan
- b. Bendung tangan-tangan memiliki debit air 25,69 liter/detik/ha dengan Lebar bendung 38 meter berada di Gampong Adan terletak di Kecamatan Tangan-tangan.

a. Rawa

Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah lahan rawa yang telah dikembangkan belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan karena belum tersedianya prasarana jaringan rawa yang dibutuhkan. Disamping itu juga seringnya terjadi banjir maupun pengaruh pasang surut dan abrasi pantai yang mengakibatkan rusaknya jaringan rawa. Disamping itu tidak seluruh jaringan rawa pada saat ini dapat dipelihara dengan sempurna, dikarenakan belum tersedia biaya O&P sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pengembangan Rawa di Kabupaten Aceh Barat Daya diprioritaskan untuk lahan pertanian.

b. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan, baik di daerah perdesaan maupun daerah perkotaan. Pada tahun 2009 tercatat sekitar 20 persen rumah tangga yang memiliki jamban sendiri, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 27 persen. Rumah tangga yang memiliki jamban sendiri sebahagian besar adalah rumah tangga di daerah perkotaan yaitu sekitar 58 persen, sedangkan di perdesaan 20 persen.

Kondisi sanitasi saat ini sebagian besar tidak memenuhi syarat dengan utilitas yang buruk sehingga mengakibatkan tata kehidupan kurang sehat dan tidak nyaman.

Diperlukan penanganan segera sebagai salah satu pencapaian target MDG's berupa pembangunan infrastruktur air limbah/sanitasi. Sistem pembuangan limbah domestik Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai

sampah, daerah aliran sungai yang mulai rusak akibat eksploitasi lahan dan minimnya saluran drainase terencana dengan baik yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya sehingga apabila hujan turun mengakibatkan air menjadi tergenang di badan-badan jalan dan bisa mengakibatkan banjir. Kondisi ini menegaskan bahwa kapasitas prasarana drainase dan pengendalian banjir yang ada saat ini belum memadai. Untuk kawasan rawan banjir di Kabupaten Aceh Barat Daya biasanya terjadi pada musim hujan, dimana naiknya debit air sungai serta kondisi tanah yang relatif datar. Lokasi kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Kuala Batee dan sebagian kecil di Kecamatan Lembah Sabil, Kecamatan Manggeng, Kecamatan Tangan-Tangan, Kecamatan Setia, Kecamatan Susoh serta Kecamatan Babahrot.

Sebagai upaya penanggulangan banjir yaitu dengan pembangunan dan peningkatan saluran drainase/gorong-gorong di setiap kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya. Saluran drainase perlu direncanakan sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi pengendapan sedimentasi namun tidak terjadi gerusan. Selain itu diperlukan penetapan batas dataran banjir agar tidak dimanfaatkan untuk kegiatan permukiman, fasilitas umum, dan bangunan penting lainnya melainkan untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah.

d. Rasio Tempat Pembuangan Sampah TPS Per Satuan Penduduk

Menurut final MDGs Aceh, Bina Marga dan Cipta Karya (2010) jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di Aceh sebanyak 2,115 unit dan memiliki daya tampung sebanyak 3,095.2 m³/hari. Pada tahun 2011, untuk Kabupaten Aceh Barat Daya, rasio daya tampung TPS terhadap total penduduk (137.661 jiwa) sebesar 0,8 m³/hari per 1,000 penduduk dengan daya tampung sebanyak 122,43 m³/hari, tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang sudah ada di Gampong Gelima Jaya Kecamatan Susoh.

e. Persentase Rumah Layak Huni/Rumah Sehat

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) salah satu parameter rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Luas lantai rumah/tempat tinggal selain digunakan sebagai

indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga menunjukkan kondisi sistem kesehatan lingkungan keluarga atau rumah/tempat tinggal. Luas lantai juga menggambarkan tingkat kepadatan hunian atau luas ruang untuk tiap anggota keluarga. Pada tahun 2010 persentase rumah tangga yang menempati rumah/tempat tinggal layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 31 persen. Pada tahun 2011 persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 39 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa persentase rumah tangga layak huni di Aceh Barat Daya semakin meningkat. Namun, jumlah rumah yang belum layak huni di Kabupaten Aceh Barat Daya masih cukup banyak yaitu sejumlah \pm 2.315 unit. Sejak tahun 2009-2011, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui dana Otsus telah membangun rumah dhuafa untuk masyarakat yang tergolong fakir dan miskin sebanyak 210 unit dan rumah korban gempa/tsunami dari BRR sebanyak \pm 900 unit.

Sebagai bagian dari usaha penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga sedang menjalankan langkah Pembangunan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan bantuan dana dari Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Program ini direncanakan dilakukan di setiap kecamatan sebanyak \pm 3.000 unit berupa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru. Program ini dilaksanakan secara bertahap sehingga di masa depan, seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya diharapkan bisa memiliki rumah layak huni.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita dapat menggambarkan pendapatan sebuah rumah tangga. Meningkatnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan meningkatnya pendapatannya. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar harga berlaku tahun 2007-2011 mengalami peningkatan walaupun kenaikannya tidak signifikan dan cenderung fluktuatif. Dari 46,16 persen pada

tahun 2007 menjadi 46,30 persen pada tahun 2011. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran rumah tangga pada kurun waktu tersebut terutama pengeluaran untuk konsumsi makanan. Ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pendapatan masyarakat yang berpengaruh pada jumlah pengeluarannya. Tingginya komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB menunjukkan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya saat ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya atas dasar harga berlaku dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.58
Peranan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Terhadap PDRB Aceh
Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2007-2011

NO	PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA	TAHUN							
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Makanan	27,01	25,98	27,47	29,13	29,77			
2	Bukan Makanan	19,15	18,18	17,26	16,18	16,53			
	JUMLAH	46,16	44,16	44,73	45,31	46,30			

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012 (diolah)

Pola konsumsi rumah tangga di Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2009 sampai tahun 2010 belum dapat memperlihatkan perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat semakin meningkat bila porsi pendapatannya yang dibelanjakan untuk non makanan meningkat. Sebaliknya, apabila sebagian besar pendapatan masyarakat dihabiskan untuk pengeluaran makanan maka dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat relatif menurun. Perkembangan Pengeluaran konsumsi rumah tangga masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2009 – 2010 menunjukkan pengeluaran yang digunakan untuk makanan cenderung meningkat dari 63,10 persen pada tahun 2009 menjadi 64,79 persen di tahun 2010. Ini dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat pada tahun 2009 lebih baik dibandingkan pada tahun 2010. Begitu pula untuk konsumsi non makanan memperlihatkan angka penurunan, dari 36,90 persen pada tahun 2009 menjadi 35,21 pada tahun 2010.

2.4.1.2. Produksi dan Produktivitas Pertanian

A. Sub Sektor Tanaman Pangan

Tanaman Bahan Pangan merupakan salah satu andalan sektor pertanian. Subsektor ini mencakup tanaman padi (sawah dan ladang), jagung, kacang kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produksi komoditas pangan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam beberapa tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan perkembangan yang positif. Perkembangan produksi untuk komoditas tanaman pangan dapat dilihat seperti pada tabel berikut.



Tabel. 2.59
Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2008-2014

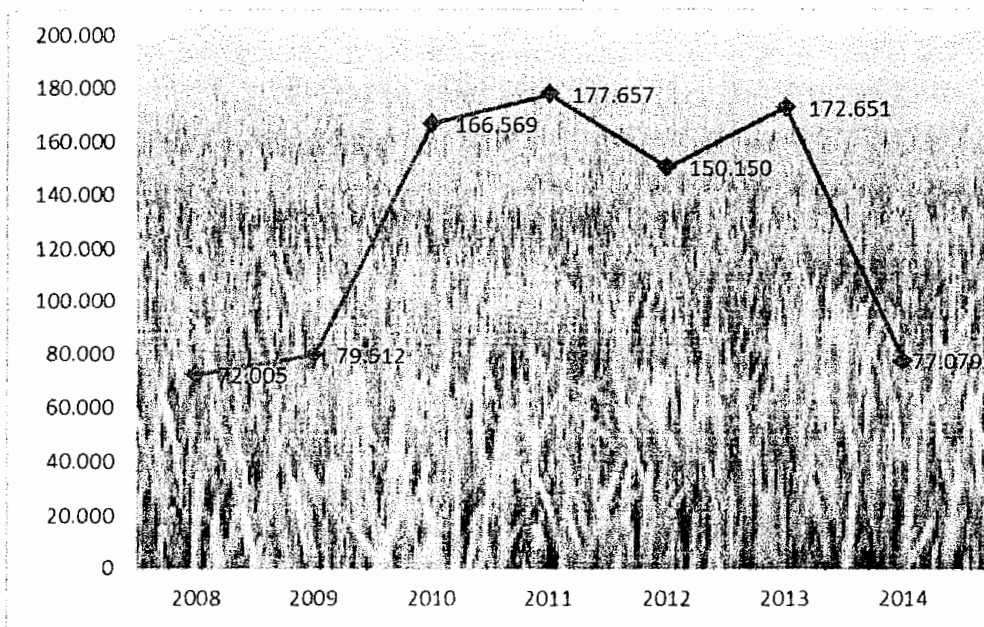
No	KOMO-DITI	TAHUN																				
		2008			2009			2010			2011			2012			2013			2014		
		TANAM	PANEN	PRO-DUKSI	TANAM	PANEN	PRO-DUKSI	TANAM	PANEN	PRO-DUKSI	TANAM	PANEN	PRODUKSI	TANAM	PANEN	PRODUKSI	TANAM	PANEN	PRODUKSI	TANAM	PANEN	PRODUKSI
1	Padi	9.856	11.981	72.005	13.558	13.208	79.512	27.306	26.46	166.569	26.888	27.735	177.657,04	29.866	23.095	150.150,25	11.341	25.521	172.651	22.038	11.368	77.079
2	Jagung	398	208	568	171	139	409	162	155	432	211	59	148	213	95	244,20	276	26	85,74	385	415	1.344,28
3	Kedelai	187	116	214	106	80	147	51	41	72	116	32	51	4.372	3.703	7.103,77	10	9	13,83	67	49	82,84
4	Kacang Tanah	728	505	1.123	631	463	1.020	1.099	595	1.312	1.323	638	1.049	2.866	1.517	3.276,48	125	106	233,88	179	167	364,47
5	Kacang Hijau	53	64	97	37	27	37	44	43	65	155	86	132	17	20	20,90	10	9	14	34	32	49,07
6	Ubi Kayu	51	43	467	71	39	409	67	45	473	499	260	442	49	58	609,72	47	29	304,44	65	56	586,92
7	Ubi Jalar	31	35	285	27	24	194	64	48	389	258	167	551	54	60	486,40	55	46	267,50	71	54	437,88

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Aceh Barat Daya, 2015



Pada tahun 2012, luas lahan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditanami padi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 yaitu dari 26,888 Ha menjadi 29,886 Ha. Namun seiring dengan berkurangnya luas lahan yang ditanami, produksi padi justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan diantaranya karena adanya program tanam padi serentak yang per tahunnya dilakukan sebanyak 2 (dua) kali musim tanam (MT) dan adanya bantuan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berupa benih, pupuk dan sarana serta prasarana lainnya dalam rangka peningkatan produksi padi setiap tahun. Penurunan produksi pada tahun 2012 sebesar 2,60 persen. Pada tahun 2011 produksinya sebesar 177.657,04 ton dan pada tahun 2012 menurun menjadi 150.150,25 ton. Produktivitas lahannya juga meningkat dari 6,40 ton/Ha menjadi 6,50ton/Ha. Kecamatan Babahrot merupakan kecamatan yang produksi padinya paling tinggi, yaitu 26.607,90 ton dan memberi kontribusi 17,72 persen dari total produksi padi kabupaten. Sedangkan kecamatan yang produksi padinya paling rendah adalah Kecamatan Jeumpa, dengan produksi sebesar 5.418,00 ton atau 3,61 persen dari total produksi padi kabupaten. Produksi tanaman padi di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat seperti gambar berikut.

Gambar 2.17
Grafik Produksi Tanaman Padi Kabupaten



Sumber : Profil Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015



Peningkatan produksi tanaman pangan untuk tanaman padi rupanya tidak diikuti oleh berapa komoditas tanaman pangan lainnya yang cenderung mengalami penurunan produksi. Untuk kacang kedelai produksinya mengalami penurunan sebesar 29,16 persen. Komoditas yang peningkatan produksinya adalah ubi jalar, yaitu dari 389,14 ton pada tahun 2010 menjadi 551,25 ton pada tahun 2011. Produksi kacang tanah mengalami penurunan sebesar - persen yaitu dari 1.311,70 ton pada tahun 2010 menjadi 1.049,48 ton pada tahun 2011. Sementara produksi kacang hijau mengalami peningkatan sebesar 131,74 ton dari 66,17 ton pada tahun 2010. Adapun untuk tanaman jagung pada tahun 2011, terjadi penurunan produksi 65,50 persen, yaitu dari 432,92 ton pada tahun 2010 menjadi 148,64 ton pada tahun 2011. Kecamatan yang paling banyak memproduksi jagung pada tahun 2011 adalah Kecamatan Lembah Sabil yaitu mencapai 60,90 ton. Sedangkan kecamatan yang paling banyak memproduksi kacang kedele, kacang hijau, dan kacang tanah adalah Kecamatan Babahrot. Adapun kecamatan yang paling banyak memproduksi ubi jalar adalah Kecamatan Lembah Sabil dan yang paling banyak memproduksi ketela pohon adalah Kecamatan Setia.

Produksi pertanian pangan khususnya tanaman padi Kabupaten Aceh Barat Daya produktivitasnya sudah mencapai diatas rata-rata nasional pada tahun 2012 produktivitas padi adalah sebesar 6.5 ton/ha, Secara nasional produktivitas padi masih 5,1 ton/ha, produksi jagung pada tahun 2012 sebesar 2,5 ton/ha yang masih dibawah rata-rata nasional yang sudah mencapai 4.4 ton/Ha, sedangkan produktivitas kedele 1,9 ton/ha, sedangkan untuk tanaman kedele produktivitasnya sudah melampaui rata-rata nasional yaitu 1,4 ton perhektar. Rendahnya produktivitas komoditi pangan antara lain disebabkan oleh belum memadai infrastruktur pertanian seperti irigasi, lining, jalan usaha tani, sumberdaya petani dan penyuluh masih rendah, sentuhan inovasi teknologi (pupuk, benih, penggunaan alat mesin pertanian yang tepat guna dan pengendalian hama penyakit) serta pasar yang belum berpihak kepada petani. Perbandingan produktivitas tanaman pangan utama Nasional, Aceh dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.60
Perbandingan Produktivitas Tanaman Pangan Utama Aceh dan Aceh Barat Daya Tahun 2010-2015

NO	KOMODITAS	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)																	
		Nasional						Aceh						Aceh Barat Daya					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi	5,0	4,9	5,1	-	-	-	4,4	4,6	4,6	4,7	4,8	5,05	6,3	6,4	6,5	6,79	6,80	7,41
2	Jagung	4,4	4,4	4,8	-	-	-	3,8	4,0	3,8	4,03	4,3	4,27	2,8	2,5	2,5	3,89	4,3	4,27
3	Kedele	1,3	1,3	1,4	-	-	-	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,46	1,7	1,6	1,9	1,34	1,5	1,46

Sumber : Profil Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015



B. Sub Sektor Perkebunan

Sub sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian nasional dan daerah, karena memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat, penyokong agroindustri nasional, serta ikut menambah cadangan devisa negara. Areal perkebunan di Aceh Barat Daya berdasarkan RTRWK, sampai dengan tahun 2013 adalah seluas 27.682,23 Ha, dengan jumlah komoditas yang diusahakan sebanyak 9 jenis. Berdasarkan jenis komoditas, kelapa sawit masih mendominasi luas areal perkebunan, yaitu 125,177 Ha, sedangkan komoditas yang terkecil diusahakan adalah tanaman nilam hanya seluas 8 ha.

Berdasarkan kondisi tanaman, seluas 20.640 ha (73,52 persen) dari total luas areal tersebut merupakan tanaman menghasilkan yang terdiri dari perkebunan rakyat (13.124 ha) dan perkebunan besar (7.516 ha). Sedangkan sisanya seluas 7.151 ha merupakan tanaman belum menghasilkan yang terdiri dari perkebunan rakyat (7.052 ha) dan perkebunan besar (99 ha), serta seluas 283 ha merupakan tanaman tua dan telah rusak.

Secara umum untuk perkebunan rakyat jumlah luas lahan masing-masing komoditas mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan keadaan pada tahun 2011. Kelapa sawit merupakan komoditas yang mengalami peningkatan luas area paling tinggi yaitu sebesar 10.785 ha (2011) menjadi 17.000 ha (2012), sedangkan kakao mengalami penambahan sebanyak 3.618 ha (2011) menjadi 4.075 ha (2012). Pertumbuhan luas areal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan *tren* tanaman dikalangan petani akibat dari tingginya harga maupun permintaan pasar terhadap dua jenis komoditi ini.

Tabel 2.61
Tanaman Perkebunan Rakyat Aceh Barat Daya, 2014

KOMODITAS	LUAS AREAL (HA)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kelapa Sawit	8.689	9.280	10.776	10.785	17.000	17.100	17.100
Karet	256	432	486	601	1.133	1.027	727
Kopi	562	474	298	223	583	151	425
Kakao	1.268	3.028	3.485	3.618	4.075	3.721	3.700
Kelapa	2.122	2.135	2.135	2.162	2.155	510	2.085
Cengkeh	389	356	247	113	216	122	200
Pala	4.063	4.063	4.175	2.268	3.429	1.655	2.589
Pinang	782	591	463	384	740	44	370
Nilam	138	138	149	61	128	42	42

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat Daya, 2015

Kondisi ini disebabkan karena nilam merupakan tanaman yang sifatnya musiman dimana pada saat harga pasar tinggi barulah petani menanam komoditas ini selain itu konversi lahan perkebunan dari tanaman tersebut menjadi perkebunan dengan jenis komoditi yang lebih menguntungkan (misal: kelapa sawit dan karet) diperkirakan juga menjadi penyebab turunnya luas areal tanam beberapa komoditas.

Pengembangan sektor perkebunan memberikan kontribusi cukup penting bagi nilai tambah petani, hal ini terlihat dari jumlah produksi yang dihasilkan pada sektor tersebut semakin meningkat. Komoditas yang banyak permintaan pasar, harga ditingkat pasar tinggi dan potensi wilayah sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi dari suatu komoditas. Secara umum dapat dilihat komoditi kelapa sawit yang paling tinggi tingkat pertumbuhan produksinya dalam kurun lima tahun terakhir yaitu sebesar 5.888 ton (TBS) pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 188.604 ton ditahun 2014, dan komoditi karet menempati urutan kedua dimana produksinya sebesar 95 ton pada tahun 2008 menjadi 152.000 ton atau meningkat sebesar 1.395 persen pada tahun 2014. Selanjutnya komoditas kakao juga mengalami kenaikan sebesar 38 persen yaitu dari 177 ton pada tahun 2008 menjadi 2.040 ton pada tahun 2014.



Pada kurun waktu tujuh tahun terakhir ini 2008-2012 komoditas perkebunan yang mengalami peningkatan drastis dalam produksi, hal ini dapat dilihat dari data bahwa komoditas cengkeh sebesar 8 ton atau meningkat sebanyak 60 persen ditahun 2012 jika dibandingkan dengan hasil produksi tahun 2008 yaitu sebesar 8 Ton.

Tabel 2.62
Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008- 2014

KOMODITI	PRODUKSI (TON)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kelapa Sawit	5.888	8.832	15.840	126.357	125.177	188.325	188.604
Karet	95	102	125	135	169	130	152.000
Kopi	232	189	175	135	450	75	128
Kakao	177	430	1.147	2.392	1.980	1.450	2.040
Kelapa	1.310	1.318	1.318	1.344	1.244	301	1.080
Cengkeh	8	7	5	4	55	90	33
Pala	550	480	425	360	1.077	350	653
Pinang	404	404	431	595	424	25	155
Nilam	4	5	8	18	8	9	10

Sumber :Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat Daya, 2015

Salah satu permasalahan dalam upaya pengembangan tanaman perkebunan rakyat adalah rendahnya produktifitas, terutama jika dibandingkan dengan produktifitas perkebunan besar. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain yaitu, rendahnya tingkat aplikasi tanam oleh petani, kurangnya pemeliharaan, dan penggunaan bibit yang tidak direkomendasikan (bersertifikat).

Tabel 2.63
Produktivitas Perkebunan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

KOMODITI	PRODUKTIVITAS (TON/HA)						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kelapa Sawit	14,50	15,00	10,12	15,40	9,31	18,60	18,60
Karet	0,48	0,51	0,63	0,68	0,47	0,97	0,66
Kopi	0,62	0,50	0,47	0,29	0,81	1,97	0,66
Kakao	0,32	0,78	1,88	0,65	0,77	0,56	0,74
Kelapa	0,70	0,71	0,71	0,72	0,66	0,97	0,71
Cengkeh	0,12	0,11	0,08	0,06	0,90	3,33	0,39
Pala	0,35	0,34	0,33	0,32	0,64	1,13	0,46
Pinang	0,70	0,70	0,71	0,98	0,78	0,83	0,70
Nilam	0,09	0,11	0,17	0,38	0,18	0,33	0,29

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Barat Daya, 2015

C. Sub Sektor Peternakan

Jumlah populasi ternak di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2011 sangat bervariasi jika dibandingkan tahun 2010. Hewan ternak yang mengalami penurunan populasi yang cukup signifikan yaitu kerbau, kambing, ayam dan itik, dengan penurunan masing-masing sebesar 1,68 persen; 21,69 persen; 25 persen; dan 48 persen. Adapun ternak yang mengalami peningkatan populasi adalah sapi dan domba dengan peningkatan masing-masing sebesar 16,15 persen dan 7 persen dari tahun 2010. Dari 367.467 jumlah ayam, sekitar 84 persen merupakan jenis ayam buras, sisanya ayam petelur.

Produksi daging dari ternak yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2010 yang tertinggi adalah daging kerbau, yaitu sebesar 128.970 kilogram. Produksi daging yang cukup tinggi lainnya adalah ayam petelur dan ayam pedaging yaitu masing-masing sebesar 97.259 dan 75.365 kilogram.



Tabel 2.64
Perkembangan Populasi Ternak Menurut
Jenis Tahun 2007-2014

NO	JENIS TERNAK	TAHUN								Persen Populasi
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sapi Perah	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2	Sapi Potong	1.756	1.892	2.038	1.498	1.740	2010	2186	1967	0,25
3	Kerbau	721	603	663	601	473	6375	5143	4522	0,32
4	Kambing	27.675	30.554	23.266	9.972	8.828	12.913	13.723	14.100	2,33
5	Domba	8.214	7.102	3.886	1.964	2.102	4470	4848	3804	0,60
6	Ayam Buras	456.324	434.106	460.773	433.194	309.484	243.590	217.767	233.470	46,04
7	Ayam Ras Petelur	0	0	0	61.451	57.983	1.800	1.800	4.200	2,10
8	Ayam Ras Pedaging	14.452	18.100	15.000	20.231	22.435	69.995	13.150	28.418	3,33
9	Itik	76.653	75.456	46.869	66.855	34.615	71.170	123.072	89.342	9,64
Total		585.795	567.813	552.492	437.660	2.739.529	412.323	381.689	379.823	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Aceh Barat Daya tahun 2015

Permasalahan utama di bidang peternakan antara lain masih rendahnya populasi, produksi dan produktivitas ternak yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal terutama pada hari-hari besar islam yang menyebabkan peningkatan harga daging di atas harga normal. Rendahnya populasi, produksi dan produktivitas ternak berkaitan erat dengan terbatasnya ketersediaan dan rendah nya mutu bibit ternak serta pola pengembangan yang belum berorientasi pada bisnis. Terbatasnya ketersediaan bibit ternak disebabkan oleh belum optimalnya system reproduksi yang menggunakan Inseminasi Buatan (IB) dan jumlah serta kualitas sumber daya petugas pelaksanaan IB yang masih terbatas. Disamping itu, jumlah populasi induk betina produktif yang terbatas menjadi hambatan dalam pelaksanaan IB.

Permasalahan lainnya dalam pemenuhan kebutuhan telur untuk konsumsi lokal masih sangat tergantung dari produksi luar Aceh. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya populasi ayam petelur, sulitnya memperoleh bibit ayam petelur dan mahal nya pakan ternak yang disebabkan oleh belum adanya industri pakan ternak lokal. Demikian juga dengan system pengelolaan usaha ayam petelur masih dilakukan dalam skala kecil dan tidak berorientasi bisnis. Berikut ini memperlihatkan proyeksi produksi daging tahun 2013-2017 di Kabupaten Aceh Barat Daya.



Tabel 2.65
Proyeksi Produksi Daging Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2013-2017

No.	KOMODITI	TAHUN						TOTAL
		2012 (Kg)	2013 (Kg)	2014 (Kg)	2015 (Kg)	2016 (Kg)	2017 (Kg)	
1	Sapi	11.154	12.046	13.130	14.180	15.173	16.538	82.221
2	Kerbau	41.995	45.355	48.076	49.999	52.499	56.174	294.098
3	Kambing	27.614	29.546	32.205	34.781	37.563	40.569	202.278
4	Domba	1.840	1.968	1.987	2.863	2.949	3.126	14.733
5	Ayam Buras	104.557	110.830	116.371	119.862	123.458	127.162	702.240
6	Ayam Ras Petelur							
7	Ayam RasPedaging	84.690	89.771	95.157	99.914	103.911	108.067	581.510
8	Itik	164.115	173.961	184.398	189.929	195.627	201.496	1.109.526
	JUMLAH	435.965	463.477	491.324	511.528	531.180	553.132	
	PRODUKSI TELUR							
1	Ayam Buras	2.414	2.511	2.636	2.749	2.990	3.229	16.529
2	Ayam Ras Petelur	16.200	16.848	17.690	18.752	20.252	22.075	111.817
3	Itik	1.152	1.198	1.258	1.333	1.427	1.541	7.909
	JUMLAH	19.766	20.557	21.584	22.834	24.669	26.845	

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2012

D. Sub Sektor Perikanan

Produksi perikanan Kabupaten Aceh Barat Daya sepanjang tahun 2011 sebesar 12.742,35 ton. Sebanyak 47,39 persen dari jumlah tersebut dihasilkan dari Kecamatan Susoh dan diikuti oleh Kecamatan Manggeng dan Tangantangan sebesar 30,83 dan 9 persen. Kecamatan Susoh dan Manggeng juga unggul dari segi jumlah nelayan, baik yang bersifat tetap maupun sambilan. Jumlah nelayan di kedua kecamatan tersebut masing-masing sebanyak 2.935 dan 502 orang atau sekitar 64,52 persen dan 9,21 persen dari keseluruhan nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Produksi perikanan di kabupaten ini masih didominasi perikanan laut dengan produksi 12.426,82 ton atau 97,52 persen dari keseluruhan produksi perikanan. Sedangkan produksi perikanan budidaya dan perairan masing-masing hanya 206,53 dan 109 ton atau 1,62 dan 0,86 persen dari total produksi perikanan.



Tabel 2.66
Perkembangan Produksi Perikanan (Laut, Budidaya dan Perairan) di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015

Kecamatan	Produksi (Ton)			Jumlah
	Laut	Budidaya	Perairan	
Manggeng	3.838,88	35,33	11,16	3.885,37
Lembah Sabil	564,32	28,45	4,45	597,22
Tangan-Tangan	1.107,54	27,41	5,44	1.140,39
Setia	526,61	23,56	6,86	557,03
Blangpidie	0	14,84	15,49	30,33
Jeumpa	0	17,00	3,30	20,30
Susoh	6.175,39	26,20	9,62	6.211,21
Kuala Batee	383,74	38,45	10,52	432,71
Babahrot	0	18,09	21,51	39,60
Total	12.596,48	229,34	88,36	12.914,16

Sumber : BPS Aceh Barat Daya, 2012

Dari sekitar 4.549 nelayan yang beroperasi, armada yang digunakan nelayan sebagian besar adalah Kapal Motor yang mencapai 45,42 persen dari seluruh total armada yang digunakan, kemudian Perahu Motor dengan 43,91 persen dan terakhir dengan Perahu Tanpa Motor dengan 10,67 persen.

E. Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Kondisi jumlah Tenaga Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di Aceh Barat Daya saat ini sebanyak 2.888 orang yang terdiri dari 1.024 orang PNS dan 1.864 orang Tenaga Harian Lepas Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TB) yang tersebar di 9 Kecamatan. Jumlah kelompok tani sebanyak 10.508 kelompok dan 522 Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN). Sementara itu jumlah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebanyak 254 buah yang kondisinya sebagian besar sangat kekurangan sarana dan prasarana dalam mendukung program pemberdayaan petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67

Jumlah Penyuluh PNS, THL-TB, BPP, Gapoktan Kec, Kemukiman, Desa, Kel.Tani Per-Kecamatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014

No	Kecamatan	Penyuluh PNS	THL-TB	BPP	Gapoktan	Desa	Kelompok Tani
1	Babahrot	4	10	1	7	14	58
2	Kuala Bate	4	10	1	16	18	75
3	Jeumpa	2	6	1	4	10	74
4	Susoh	3	7	1	14	19	55
5	Blangpidie	2	9	1	14	17	45
6	Setia	5	4	1	4	9	52
7	Tangan-Tangan	3	9	1	6	15	109
8	Manggeng	5	3	1	6	16	57
9	Lembah Sabil	3	3	1	3	14	50
10.	Kabupaten	7	0	0	0	0	0
Jumlah		38	61	9	74	132	575

Sumber : Kantor Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2015

Jumlah Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) yang sudah terbentuk 1.230 kelompok, yang sudah berbadan hukum 114 kelompok dan yang belum berbadan hukum 1.116 kelompok.

Tabel 2.68

Jumlah Gabungan/Perkumpulan Petani Pengguna Air (P3A) dan GP3A di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

Daerah Irigasi (DI)	Luas Areal (Ha)	Kecamatan	P3A Keujruen Blang			GP3A Keujruen Blang			Keterangan
			Berbadan Hukum	Belum Berbadan Hukum	Jih	Berbadan Hukum	Belum Berbadan Hukum	Jih	
Babahrot	1550	Babahrot	19	-	19	4	-	4	Provinsi
Manggeng	1882	L.Sabil/Manggeng	10	-	10	1	1	2	Provinsi
Krueng Susoh	2100	Bl.Pidie/Susoh	33	-	33	3	-	3	Provinsi
Tangan-Tangan	710	Tangan-Tangan	11	1	12	2	-	2	Kabupaten
Ui Kareung	500	Kuala Batee	4	-	4	-	1	1	Kabupaten
Panto Teungku	400	Kuala Batee	4	-	4	-	1	1	Kabupaten
Panto Cut	600	Kuala Batee	4	-	4	-	1	1	Kabupaten
Alue Sungai Pinang	300	Jeumpa	2	-	2	1	-	1	Kabupaten
Alue Batee Leukat	100	Babahrot	2	-	2	1	-	1	Kabupaten
Alue Pisang	120	Kuala Batee	2	-	2	1	-	1	Kabupaten
Alue Rambot	97	Jeumpa	2	-	2	1	-	1	Kabupaten
Lhung Pacut	196	Babahrot	1	-	1	-	-	-	Kabupaten
Cot Beurehoi	155	Setia	3	-	3	1	-	1	Kabupaten
Alue Badek	200	Jeumpa	2	-	2	1	-	1	Kabupaten
Meunasah Bak Ara	200	Kuala Batee	2	-	2	1	-	1	Kabupaten
Meurandeh	125	Lembah Sabil	3	-	3	1	-	1	Kabupaten
Panton Mu	130	Kuala Batee	1	1	2	-	1	1	Kabupaten
Alue Rambong	95	Kuala Batee	-	1	1	-	-	-	Kabupaten
Ujung Gunong	100	Kuala Batee	-	2	2	-	1	1	Kabupaten
ie Mameh	100	Kuala Batee	-	2	2	-	1	1	Kabupaten
Alue Padee	300	Kuala Batee	-	2	2	-	1	1	Kabupaten
Rumah Panjang	40	Kuala Batee	-	2	2	-	1	1	Kabupaten
Jumlah			105	11	116	18	9	27	

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

Potensi Lahan sawah yang cukup luas belum diusahakan secara maksimal mengakibatkan produksi dan produktivitasnya masih rendah yang diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan penyuluh dan petani terhadap teknik budidaya tanaman.

Kondisi penyuluh pertanian setelah otonomi sangat memprihatinkan, banyaknya tenaga penyuluh senior dan ahli telah beralih status dari fungsional ke struktural dan memasuki masa pensiun, hal ini mengakibatkan kekurangan

tenaga penyuluh lapangan baik kuantitas maupun kualitas sehingga tidak optimalnya proses pendampingan dan pembinaan di kelompok-kelompok tani ataupun GAPOKTAN.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu ditingkatkan SDM petani maupun penyuluh melalui pelatihan dasar maupun teknis penyuluhan, agar teknis budidaya pertanian dapat dilaksanakan dilapangan secara lebih optimal sertaperlu penerapan teknologi seperti halnya DEMPLOT, DEMFARM, Sekolah Lapang (SL) dan didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan di masing – masing BPP.

Dari aspek konsumsi energitelah mendekati angka kecukupan energi yang dianjurkan secara nasional, yaitu 1.962,62 kkal/kap/hari untuk tahun 2011dimana angka kecukupan energi yang dibutuhkan yaitu sebesar 2.000 kkal/kap/hari. Sedangkan angka konsumsi Protein padatahun 2011 sebesar 55,58 gr/kap/hari, dimana angka ini menunjukkan bahwa konsumsi protein masyarakat Aceh Barat Daya lebih tinggi dari angka kecukupan protein yang dianjurkan sebesar 52 gr/kap/hari.

Keterjangkauan pangan yang masih rendah akibat tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya ketersediaan infrastruktur (jalan, listrik dan air bersih) untuk mencapai rumah tangga terutama untuk daerah rawan pangan dan daerah kepulauan. Dari segi konsumsi pangan, sangat kurang pengetahuan terutama tentang pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman. Secara umum permasalahan utama tidak pada kuantitas pangan yang dikonsumsi, tapi lebih pada kualitas pangannya yaitu kurang beragam dan berimbangnyakelompok pangan yang dikonsumsi. Konsumsi protein masih didominasi oleh protein nabati dan sangat rendah protein hewani.

Di sisilain, produktivitas lahan masih rendah akibat keterbatasan modal usaha, dan perilaku/budaya masyarakat yang kurang produktif. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian dan lahan pekarangan menjadi penyebab kemiskinan dan ketidakmampuan mengakses pangansertaperan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi dan Kabupaten masih belum optimal dalam menghasilkan suatu kebijakan yang fokus.

Penanganan rawan pangan yang terlambat akan memicu terjadinya kerawanan pangan yang berkepanjangan dalam periode yang lama menjadi *kerawanan pangan kronis*, dandapat menyebabkan *rawan pangan transien*.

Rawan pangan yang bersifat kronis memerlukan intervensi jangka menengah dan panjang, yaitu melalui intervensi kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan), sedangkan untuk rawan pangan transien diperlukan intervensi jangka pendek tanggap darurat yang bersifat segera yaitu melalui kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) transient.

Program desa mandiri pangan lebih diutamakan agar terjadinya pembelajaran bagi masyarakat desa sehingga pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan adanya perubahan perilaku tersebut diharapkan masyarakat desa mempunyai kapasitas untuk menangkap beberapa peluang untuk peningkatan pendapatan bagi masyarakat, serta sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015.

Demapan telah dilaksanakan di 20 Kabupaten/Kota pada 187 desa reguler. Gampong-gampong yang telah dibina selama 4 tahun dan telah menjadi gampong yang mandiri akan dijadikan desa inti, yang selanjutnya akan membina 3 gampong di sekitarnya (gampong replikasi). Jumlah gampong replikasi sejak tahun 2010 s/d 2012 sebanyak 69 gampong, sehingga total jumlah gampong yang telah dibina sebanyak 256 desa. Tabel dibawah ini menunjukkan perkembangan jumlah desa replikasi dan alokasi desa mapan per kabupaten sejak tahun 2006 s/d 2012.

Tabel 2.69
Perkembangan jumlah desa replikasi tahun 2010 s/d 2014

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelompok
1	2010	8	24	24
2	2011	8	24	24
3	2012	7	21	21
4	2013	2	2	2
5	2014	-	-	-
Total		25	71	71

Sumber : BP4K Aceh Barat Daya tahun 2015

Tabel 2.70
Jumlah Alokasi Desa Mandiri Pangan per Kabupaten Tahun 2006-2014

No	Kecamatan	Jumlah Alokasi Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)							Total
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Babahrot	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Kuala Bate	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Jeumpa	-	1	-	-	-	-	1	2
4	Susoh	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Blangpidie	-	-	-	1	-	-	-	1
6	Setia	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Tangan-Tangan	1	-	-	-	-	-	-	1
8	Manggeng	1	-	-	-	1	-	1	3
9	Lembah Sabil	-	-	-	-	-	-	-	-
Total		2	2	-	1	1	-	2	8

Sumber : BP4K Aceh Barat Daya tahun 2015

2.4.1.3. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Sektor Koperasi merupakan sektor yang cukup strategis dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi mengingat bahwa penyebaran jumlah koperasi di Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2011 adalah sebanyak 226 unit dengan jumlah koperasi aktif sebanyak 124 unit dan koperasi tidak aktif sebanyak 102 unit yang tersebar di 9 Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan jumlah koperasi tersebut maka dapat dilihat bahwa pertumbuhan koperasi tahun 2011 adalah sebanyak 1,80% dan bergerak pada sektor perdagangan/ jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan, sektor transportasi serta sektor riil lainnya. Namun secara umum koperasi Kabupaten Aceh Barat Daya adalah merupakan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam (KSP/USP) yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan modal usaha bagi usaha kecil menengah dan pemenuhan kebutuhan konsumtif.

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 berbagai upaya pemerintah telah dilakukan dalam penguatan kelembagaan, perluasan usaha serta membuka akses permodalan bagi sumber daya -sumber daya yang produktif. Namun demikian dalam pelaksanaannya dihadapi berbagai permasalahan diantaranya adalah masih kurangnya pemahaman anggota koperasi akan manfaat koperasi dan lemahnya SDM pengelola koperasi mengakibatkan kurang berkembangnya koperasi di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Guna mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut diperlukan berbagai kebijakan serta kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan dan pemberdayaan



koperasi yang bergerak pada sektor pertanian, industri kecil, dan perikanan serta mengedepankan pembukaan lapangan kerja, penciptaan nilai tambah, serta pengentasan kemiskinan di daerah tanpa mengurangi dukungan terhadap eksistensi sektor ril lainnya. Disamping itu untuk peningkatan kompetensi SDM pengelola koperasi dibutuhkan pendidikan dan pelatihan perkoperasian dalam mengelola sumber daya secara optimal dalam peningkatan kualitas koperasi.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga merupakan salah satu sektor yang cukup strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha-usaha produktif bagi masyarakat. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif masih akan dihadapi UMKM, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian dan persaingan pasar yang tinggi, terbatasnya akses kepada sumberdaya produktif terutama terhadap bahan baku dan permodalan, sarana prasarana serta informasi pasar. Terkait dengan permasalahan-permasalahan tersebut, tantangan utama ke depan adalah masih rendahnya produktivitas UMKM yang dapat mengakibatkan produk dihasilkan kurang memiliki daya saing dan kualitas yang baik dalam memenuhi permintaan pasar domestik dan pasar regional bahkan internasional. Masalah daya saing dan produktivitas ini disebabkan antara lain oleh rendahnya kualitas dan kompetensi kewirausahaan sumber daya manusia. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana menumbuhkan wirausaha yang berbasis agro industri, industri kreatif, dan inovasi.

A. *Persentase Koperasi Aktif*

Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Barat Daya (2011) jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya (2011) 239 unit, sejumlah 100 (41,84%) unit merupakan koperasi aktif dan 139 (58,15%) unit tidak aktif. Pada tahun 2014 jumlah Koperasi mengalami peningkatan dengan jumlah 251 dengan rincian 112 atau 44,62% adalah Koperasi aktif dan Koperasi tidak aktif masih sama seperti tahun 2011 yaitu 139 atau 55,38%. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2014 meningkat.

Tabel 2.71
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Barat Daya
Tahun 2004 – 2014

No	Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	Persentase Koperasi Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6	7
1	2004	147	66	44,90	81	55,10
2	2005	156	70	44,87	86	55,13
3	2006	173	75	43,35	98	56,65
4	2007	204	80	39,22	124	60,78
5	2008	216	82	37,96	134	62,04
6	2009	224	87	38,84	137	61,16
7	2010	234	92	39,32	142	60,68
8	2011	239	100	41,84	139	58,16
9	2012	250	118	47,20	132	52,8
10	2013	249	109	43,78	140	56,22
11	2014	251	112	44,62	139	55,38

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Barat Daya Tahun 2015

B. Jumlah UMKM Aktif

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Aceh Barat Daya yang tersebar di 9 kecamatan posisi 30 Desember 2014 sejumlah 2.134 unit. UMKM tersebut bergerak pada berbagai sektor seperti perdagangan/jasa, pertanian, pertambangan, industri, perikanan dan kelautan dan transportasi. Sektor perdagangan/jasa memiliki usaha mikro 1158 unit, usaha kecil 531 unit, usaha menengah 129 unit; sektor pertanian memiliki usaha mikro 2 unit, usaha kecil 9 unit, usaha menengah 0 unit; sektor pertambangan memiliki usaha mikro 3 unit, usaha kecil 1 unit dan usaha menengah 1 unit; sektor industri memiliki usaha mikro 112 unit, usaha kecil 156 unit dan usaha menengah 1 unit; sektor perikanan dan kelautan memiliki usaha mikro 7 unit, usaha kecil 2 unit, usaha menengah 0 unit; sektor



transportasi memiliki usaha mikro 7 unit, usaha kecil 5 unit dan 1 unit usaha menengah dan pada sektor Peternakan memiliki usaha mikro 5 unit, usaha kecil 9 unit dan tidak ada usaha menengah.

Tabel 2.72
Perkembangan Sektor Usaha UMKM di Kabupaten Aceh Barat Daya
Posisi 30 Desember 2014

NO	KABUPATEN / KOTA	SEKTOR															Jumlah			
		Perdagangan / Jasa			Pertanian			Pertambangan			Industri			Perikanan dan Kelautan				Transportasi		
		Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M	Mikro	Usaha Kecil	Usaha M		Mikro	Usaha Kecil	Usaha M
1	Aceh Barat Daya	1159	531	129	2	9	0	3	1	1	112	156	1	7	2	0	7	5	9	2.134
	Total	1159	531	129	2	9	0	3	1	1	112	156	1	7	2	0	7	5	9	2134

Sumber : Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Barat Daya Tahun 2015

2.4.1.4. Industri dan Perdagangan

A. Industri

Sektor industri belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja serta pembentukan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Industri Kabupaten Aceh Barat Daya hanya mengandalkan kepada industri pengolahan dari migas, namun terus mengalami penurunan seiring dengan menurunnya produksi migas Aceh.

Berdasarkan kontribusi nilai tambah PDRB selama lima tahun terakhir, harapan besar tertumpu pada pengembangan industri non migas sedangkan industri migas dalam jangka panjang tidak dapat diandalkan. Dari jenis industri, jumlah usaha industri kecil menengah sampai tahun 2008 adalah 702 unit atau meningkat sekitar 21,66 persen dari tahun 2007 atau sejumlah 577 unit. Demikian pula untuk tahun 2009 populasi industri kecil menengah mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 27,20 persen atau 734 unit. Demikian pula untuk tahun 2010 Juga mengalami kenaikan sebesar 28,59 persen (742 Unit), dan untuk tahun 2011 kembali mengalami kenaikan hanya 30,15 persen (751 Unit) sebagaimana dapat dilihat pada di bawah ini.



Tabel 2.73
Perkembangan Industri Tahun 2007 – 2014

Uraian	Satuan	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Usaha	Unit	577	702	734	742	751	774	799	780
Industri Kecil & Meneng	Unit	577	702	734	742	751	774	799	780
Industri Besar	Unit								
tenaga Kerja	Orang	1.800	2.333	2.477	2.493	2.513	2.640	2.730	7.812
Industri Kecil & Meneng	Orang	1.800	2.333	2.477	2.493	2.513	2.640	2.730	7.812
Industri Besar	Orang								
Investasi	Rp/ Juta	17.538.158	43.533.050	47.455.050	50.824.280	56.431.275	59.731.112	65.801.543	79.119.500
Industri Kecil & Meneng	Rupiah/ Juta	17.538.158	43.533.050	47.455.050	50.824.280	56.431.275	59.731.112	65.801.543	79.119.500
Industri Besar	Rupiah/ Juta								
Produksi	Rp/ Juta	159.521.988	371.166.991	#####	482.390.231	501.421.310	528.123.441	644.211.519	836.991.641
Industri Kecil & Meneng	Rupiah/ Juta	159.521.988	371.166.991	#####	482.390.231	501.421.310	528.123.441	644.211.519	836.991.641
Industri Besar	Rupiah/ Juta								
BP	Rp/ Juta	#####	19.104.881	#####	#####	#####	401.102.111	401.102.111	#####
Industri Kecil & Meneng	Rupiah/ Juta	#####	19.104.881	#####	272.521.010	310.250.332	401.102.111	401.102.111	674.812.803
Industri Besar	Rupiah/ Juta	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Daya 2015

Tabel diatas menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja dibidang industri pada tahun 2007 sejumlah 1.800 orang meningkat menjadi 2.477 orang (2009), pada tahun 2010 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.493 seiring dengan perubahan penetapan kriteria terhadap pengelompokan jenis industri. Sedangkan untuk tahun 2014 kembali terjadi peningkatan cukup besar yaitu 7812 orang.

Selanjutnya, investasi mengalami peningkatan dari 17.538.158milyar rupiah (2007) menjadi 47.455.050 milyar rupiah (2009). Kemudian terjadi peningkatan di tahun 2010 menjadi 50.824.280 milyar rupiah dan tahun 2014 juga terjadi kenaikan menjadi 79.119.500 milyar rupiah.

B. Perdagangan

Salah satu sarana untuk mendukung sektor perdagangan di tengah-tengah masyarakat adalah ketersediaanya pasar tradisional dalam mendukung jual beli baik antar desa, kecamatan maupun kabupaten/ kota.



Sampai dengan tahun 2010 jumlah pasar yang telah dibangun melalui dana APBN dan APBA sebanyak 6 Unit.

Tabel 2.74
Perkembangan Pembangunan Pasar Tradisional 2009 – 2014

Kecamatan	Jumlah Pasar (Unit)									
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lembah Sabil									1	
Manggeng		1	1			1	1		2	
Tangan-Tangan		1								
Setia							1			1
Blang Pidie	1						1			
Susoh	1	1	2	1	1	1	1		2	
Jeumpa								2		1
Kuala Batee			1			1	1			
Babahrot				2		2	1		1	
JUMLAH	2	3	4	3	1	5	6	2	6	2

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Barat Daya tahun 2015.

Dari tabel di atas di ketahui bahwa pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan terarah dan proposional dalam hal pembangunan dilakukan dengan melihat kebutuhan dan pemerataan antar diwilayah. Hal ini dapat di lihat dari pembangunan pasar pada tahun 2012 -2014 dilakukan pada wilayah yang belum pernah dibangun pada tahun 2005-2011 yaitu 3 (tiga) unit di kecamatan jeumpa pada tahun 2012 dan 2014 sedangkan untuk kecamatan lembah sabil dibangun sebanyak 1 (satu) unit pada tahun 2012.

Masalah dan tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh sektor perdagangan adalah semakin melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia sebagai dampak lanjutan dari krisis global, yang akan berakibat pada melemahnya permintaan dunia dan aktivitas produksi global. Akibatnya, tingkat persaingan produk ekspor di pasar global akan semakin ketat dan harga komoditas belum menggembirakan.

Pembentukan IMT-GT dapat dikatakan merupakan tindak lanjut dan pengembangan kerja sama di antara pengusaha-pengusaha swasta dan Indonesia, Malaysia, Thailand yang telah mempunyai hubungan historis karena posisi wilayahnya yang berdekatan. Kerjasama IMT-GT sendiri sudah

bermula sejak tahun 1991 dan diresmikan dalam pertemuan di Langkawi pada bulan Juli 1993. Kerja sama IMT-GT dilakukan untuk mengusahakan kompleksitas sumberdaya yang dimiliki ketiga negara sub-wilayah ini.

Tantangan lain adalah adanya kemungkinan serbuan produk impor dari negara lain seperti pemberlakuan ACFTA. Negara-negara ASEAN telah setuju mewujudkan kawasan perdagangan bebas dimana akan membuat pasar kita jadi sasaran empuk bagi negara lain. Disisi lain, daya saing produk luar sangat mendominasi beberapa tahun ini terutama China. Akibatnya, kita pun mengkhawatirkan dominasi produk luar negeri di pasar domestik. Tingginya daya saing produk luar negeri harus diantisipasi dengan peningkatan daya saing produk lokal.

Untuk mendukung ekspor/impor Indonesia wilayah barat, Sabang ditetapkan sebagai pelabuhan bebas dengan undang-undang nomor 27 tahun 2000 tentang Badan pengelolaan Kawasan Sabang, undang-undang nomor 26 tahun 2006 tentang penataan ruang menetapkan Sabang sebagai PKSN, demikian juga dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh bahwa Sabang sebagai hubport internasional. Namun sampai saat ini pelabuhan bebas Sabang belum berkembang secara optimal.

Sejak tahun 1999 sumber daya fiskal Aceh mengalami peningkatan yang signifikan. Aceh merupakan salah satu daerah penerima manfaat desentralisasi. Selama beberapa tahun terakhir Aceh telah menerima arus masuk pendapatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tingkat sumber daya keuangan Aceh diperkirakan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Pendapatan tersebut terutama karena adanya UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2008. Melalui UU tersebut Aceh mendapat hak berupa dana tambahan bagi hasil Migas dan dana otonomi khusus. Akan tetapi hak tersebut terbatas pada masa waktu 20 tahun. Penerimaan Aceh dari dana otonomi khusus yang dimulai sejak tahun 2008 terus meningkat.

Mendorong investasi swasta merupakan salah satu prioritas utama dalam penciptaan lapangan pekerjaan. Dimana melalui investasi swasta lapangan pekerjaan baru dapat tercipta, demikian juga peningkatan produktivitas serta terjadinya proses "*transfer of knowledge*". Penanganan yang

menyeluruh terhadap isu keamanan dan solusi yang kreatif terhadap keterbatasan terhadap pasokan sumber daya listrik di Aceh adalah faktor penting yang dapat mendorong investasi. Akan tetapi rendahnya produktivitas tenaga kerja, minim tenaga kerja terampil dan relatif tingginya UMP masih menjadi masalah yang harus segera diatasi. Penetapan UMP Aceh 1,2 juta rupiah per bulan lebih tinggi dari nasional berdampak terhadap tingkat daya saing Aceh dalam menarik investasi di sektor formal.

2.4.1.5. Pertambangan dan Energi

A. Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Aceh Barat Daya terdiri dari potensi bahan galian batuan, mineral bukan logam dan potensi bahan galian logam. Potensi tersebut relatif besar dan menyebarkan di seluruh wilayah kabupaten, adapun jenis potensi tambang tersebut adalah:

1. Potensi Bahan Galian Batuan, Mineral Bukan Logam:

- a. Bahan Galian Sirtu
- b. Bahan Galian Granit
- c. Bahan Galian Andesit dan Basalt
- d. Bahan Galian Marmar
- e. Bahan Galian Batulempung (Tanah Liat)
- f. Bahan Galian Pasir Pantai
- g. Bahan Galian Tanah Urug (Tanah Timbun)
- h. Bahan Galian Batu Gamping
- i. Bahan Galian Batubara

2. Potensi Bahan Galian Logam

- a. Bahan Galian Emas dan Mineral Pengikutnya
- b. Bahan Galian Bijih Besi
- c. Bahan Galian Nikel



Tabel 2.75
Jenis Bahan Tambang Yang di Usahakan dan Terdaftar
di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012

No	Pertambangan	Luas	Jumlah Perusahaan	Lokasi
1.	Bijih Besi	1.149	5	Babahrot dan Jeumpa
2.	Pasir dan Batuan	16	5	Babahrot, Kuala Batee dan Lembah Sabil
3.	Batu Gamping (Batu Gajah)	14	6	Kuala Batee, Babahrot, Setia, dan Blangpidie
4.	Emas	10	1	Lembah Sabil

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012

3. Sebaran Penggunaan Air Bawah Tanah

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya air maka kebijakan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Barat Daya. Usaha penggunaan air minum dalam kemasan telah dilakukan pada beberapa tempat yaitu:

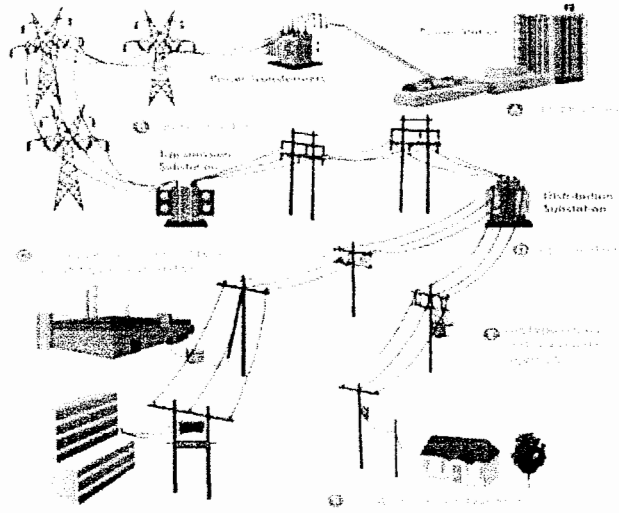
- a. Kecamatan Blangpidie
 - CV. Hidup Baru dengan alamat Cot Setui Dusun II Desa Keudai Siblah
 - CV. Tirta Aceh Barat Daya Lestari dengan alamat : Jalan Pendidikan No. 88 Kuta Tinggi
 - PT. Dua Perkasa Lestari dengan Alamat Jln Raya Blangpidie-Banda Aceh Desa Pulo Kayu
 - CV. Ukhra Jaya dengan Alamat Jalan Gampong Seunaloh
 - CV. Sumber Baru Jaya dengan alamat Jalan Pendidikan Kuta Tinggi
- b. Kecamatan Lembah Sabil CV. Bustan Daya Manyang dengan alamat Gampong Meunasah Sukon.

B. Listrik

Tenaga Listrik pada umumnya menjadi kewenangan dari PT. PLN (Persero) sebagai pembangkit hingga pendistribusian listrik ke konsumen. Tercatat sebesar 51.092.237 KWh sepanjang tahun 2011 telah disalurkan ke konsumen, baik pihak pemerintah maupun swasta/rumah tangga. Dari 9

kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya, seluruhnya sudah dapat memanfaatkan listrik untuk kehidupan sehari-hari. Akan tetapi tidak seluruh Rumah Tangga atau Keluarga yang dapat menikmatinya. Persentase pemakaian listrik tiap kecamatan berbeda-beda.

Sumber energi listrik di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah PLTD Suak Setia dengan Kapasitas Daya 10.950 Kw namun saat ini sedang direncanakan untuk dibangun Transmisi Tegangan Tinggi dari PLTU Nagan



Raya dengan Kapasitas daya 2 x 100 Mw dengan gardu hubung berada di Kecamatan Susoh. Kondisi faktual saat ini adalah suplai listrik untuk Kabupaten Aceh Barat Daya berada dalam kondisi yang terbatas karena kecilnya pembangkit

listrik dan penyaluran (jaringan) listrik hanya berupa jaringan tersier yang langsung berhubungan dengan konsumen.

Perkembangan pembangkit listrik Blangpidie tahun 2011 berdasarkan data dari PLN Ranting Blangpidie adalah : gardu travo sebanyak 1 buah berada di Blangpidie, travo tiang sebanyak 58 unit di Blangpidie, 37 unit di Manggeng dan 37 unit di Kuala Batee. Sementara untuk daya travo di Blangpidie sebesar 4.715 KV.A, di Manggeng sebesar 1.850 KV.A dan di Kuala Batee sebesar 1.675 KV.A.

2.4.1.6. Pariwisata

Kabupaten Aceh Barat daya saat ini memiliki beberapa Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya seperti wisata alam, wisata cagar budaya dan situs sejarah sampai wisata minat khusus seperti haiking dan arung jeram. Sampai tahun 2012 belum tercatat wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung keberbagai pelosok Aceh Barat Daya. Diantara jenis wisata



yang menonjol adalah wisata minat khusus *hiking*. Untuk mendukung kegiatan wisata tersebut terdapat pula 7 hotel/losmen yang tersebar di Kabupaten Aceh Barat Daya khususnya di Kota Blangpidie. Berikut ini adalah tabel yang memperlihatkan objek wisata yang terdapat di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Tabel 2.76
Potensi Wisata di Kabupaten Aceh Barat Daya

No.	Lokasi / Kecamatan	Nama Tempat Wisata	Objek Wisata	Jenis Wisata
1.	Lembah Sabil	- Pemandian Krueng Baru	- Pemandian Krueng Baru - Pantai Ujung Tanah dan Alue Rambot - Pemandangan Puncak Batee lee	Wisata Alam
2.	Manggeng	- Pantai Wisata Ujong Ketapang	- Teupin Batee - Taman Laut Ujung Manggeng - Pantai Ujung Manggeng - Pasir Butiran Lhok Pawoh	Wisata Alam
3.	Tangan-Tangan	- Pantai Wisata Aron Tumpang	- Pantai Wisata Blang Padang - Kuburan Batee Meuculek - Air Terjun Alue Kareng - Mon Jeue - Panorama alam	Wisata Alam dan Sejarah
4.	Setia	- Pantai	- Pantai Mon Mameh - Pantai Wisata Kuta Meurandeh - Pantai Ujong Kuala - Jerat Teuku Gunong Jerat	Wisata Alam dan Sejarah
5.	Blangpidie	- Pemandian Krueng Susoh	- Kolam Tgk.Malem - Batee Permata - Pemandian Kolam Putroe Hijau - Gunong Cot Keummeunyan - Panorama Gunong dan Irigasi - Mata le - Makam T.Awee Geutah - Makam T.Peukan - Makam Tgk.Dilubuk - Makam Tgk. Sirah Panyang - Makam T.Ben Mahmud - Makam Syeh Mahmud	Wisata Alam dan Sejarah



6.	Susoh	- Pasir Putih Pantai Cemara Indah	- Kuala Katung - Pantai Wisata Nelayan - Pasir Ujong Keutapang - Pulau Gosong - Taman Laut Ujong Serangga	Wisata Alam
7.	Kuala Batee	- Pantai Wisata Lama Tuha - Situs Kerajaan Kuala Batee	- Taman Laut Lama Tuha - Pemandian Air Terjun - Pantan Cut - Pantai Lama Muda - Situs Peninggalan Bersejarah Portugis - Makam Tgk.Djakfar Lailon	Wisata Alam, Budaya dan Sejarah
8.	Babahrot	- Krueng Babahrot - Wisata Perkebunan	- Raja Malaka - Krueng Seumayam - Perkebunan Sawit	Wisata Alam dan Sejarah

Sumber : Draf RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012 (diolah)

Dari tabel potensi wisata di atas terlihat bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki daya tarik dan objek wisata yang unik dan beragam. Pembangunan pariwisata tidak hanya turut andil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi lebih dari itu, pariwisata merupakan spektrum fundamental pembangunan yang luas bagi suatu daerah. Pembangunan pariwisata ditunjukkan, antara lain a) pembukaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan; b) pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*); c) pelestarian budaya (*culture preservation*); d) peningkatan ekonomi dan industri; dan e) pengembangan teknologi. Sebagai kegiatan ekonomi, di harapkan pengembangan dan pemanfaatan objek wisata tersebut dapat bermanfaat bagi daerah dan masyarakat di sekitar objek wisata. Penataan dan pengelolaan objek-objek wisata dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan adat istiadat (kearifan lokal) yang berlaku dalam masyarakat, serta yang lebih penting adalah pengembangan dan pengelolaan objek wisata yang memperhatikan nilai-nilai syariat Islam.

2.4.1.7. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus yang sesuai dengan UUPA, dan lain-lain pendapatan yang sah harus dimanfaatkan



secara optimal dengan menerapkan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Secara khusus Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya harus memanfaatkan ketersediaan dana pembangunan yang berasal dari TDBH Migas dan dana otsus secara optimal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh Kabupaten Aceh Barat Daya mendapatkan pengalokasian TDBH Migas dan Otsus sebesar 60 persen yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh yang sesuai amanah Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Kedua sumber dana tersebut digunakan untuk membiayai program pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Secara rinci berbagai sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya ditampilkan pada tabel berikut.



Tabel 2.77
Perkembangan Sumber Pendanaan Pembangunan di
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 – 2014

SUMBER DANA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dana Alokasi Khusus	40.199.000.000	38.035.000.000	29.083.100.000	42.593.700.000	46.517.310.000	65.504.540.000	67.440.970.000
Dana Alokasi Umum	226.924.281.000	231.876.760.000	233.168.314.000	282.299.103.400	327.572.527.000	362.624.746.000	406.138.315.000
Dana Bagi hasil	64.802.476.824	48.944.670.827	32.604.403.111	32.434.438.685	28.524.192.275	28.095.877.931	23.887.383.821
Pendapatan Asli Aceh Barat Daya	15.000.000.000	15.000.000.000	16.125.000.000	25.000.000.000	30.250.000.000	32.534.985.971	58.384.755.218
APBN	339.743.674.607	335.697.204.696	335.657.038.210	437.524.355.753	-	-	-
Dana Otsus	78.300.000.000	78.300.000.000	85.673.554.517	94.471.359.985	107.873.209.046	158.455.579.115	111.022.420.534
TDBH Migas	42.901.328.412	13.965.684.827	6.209.074.305	7.360.514.052	5.091.530.000	8.256.359.000	6.986.956.697
Total	807.870.760.843	761.819.320.350	738.520.484.143	921.683.471.875	545.828.768.321	510.884.340.424	667.395.196.889

Sumber : DPKKD Kabupaten Aceh Barat Daya, 2015



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah sumber pendanaan untuk Pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2008-2014 paling banyak dari sumber Dana Alokasi Umum yaitu sebesar Rp. 2.070.604.046.400 atau 42,04% dan sumber terendah adalah TDBH Migas sebesar Rp. 90.771.447.293 atau 1,84% dimana angka tersebut terus menurun dari 42.901.328.412 pada tahun 2008 menjadi 6.986.956.697.

2.4.1.8. Prasarana Transportasi

1. Transportasi Darat

Kabupaten Aceh Barat Daya sangat mengandalkan transportasi darat untuk menunjang berbagai macam kegiatan ekonomi dalam wilayahnya. Sehingga apabila terjadi kendala pada transportasi darat, maka dipastikan daerah akan mengalami kesulitan mengembangkan daerahnya. Menurut statusnya, jalan dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : Jalan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Departemen PU, Jalan Provinsi yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kotamadya yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota. Adapun menurut kondisi jalan terbagi menjadi 4, yaitu : Jalan Baik, Sedang, Rusak dan Rusak Berat. Dikatakan Baik adalah Jalan yang dapat dilalui kendaraan 60km/jam dan selama 2 tahun mendatang tanpa pemeliharaan jalan. Jalan Sedang adalah Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan 40-60km/jam dan selama setahun mendatang tanpa ada rehabilitasi, sedangkan jalan rusak adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan hanya 20-40 km/jam dan perlu segera direnovasi.

a. Kondisi Jaringan Jalan

Kondisi umum sistem transportasi jalan berdasarkan pengamatan dan data-data mengenai sistem jaringan jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah jaringan jalan regional di Propinsi Aceh yang menunjukkan ruas-ruas jalan utama yang menghubungkan Kabupaten Aceh Barat Daya dengan kota-kota regional ke Utara, Barat dan Selatan.

Dengan melihat pola jaringan jalan tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya tidak hanya melayani arus lalu lintas internal, tetapi juga melayani arus lalu lintas eksternal. Lalu lintas eksternal yang dimaksud adalah lalu lintas yang masuk/keluar Kabupaten Aceh Barat Daya



dan lalu lintas yang hanya melintas Kabupaten Aceh Barat Daya. Sedangkan lalu lintas internal adalah lalu lintas yang terjadi dalam Kabupaten Aceh Barat Daya itu sendiri. Bangkitan lalu lintas sebagian besar disebabkan oleh aktivitas guna lahan yang ada serta keterkaitan dengan jumlah penduduk yang menempati aktivitas-aktivitas pada guna lahan tersebut.

b. Status dan Fungsi Jalan

Menurut fungsinya jalan dibedakan atas jaringan jalan primer dan sekunder, yang masing-masing dibedakan menjadi arteri, kolektor, dan lokal. Jaringan jalan di Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan fungsinya dapat diklasifikasikan menjadi :

- Jalan Arteri, yaitu jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jauh. Jalan arteri ini dapat dibagi menjadi arteri primer dan arteri sekunder. Sedangkan Jalan arteri sekunder pada prinsipnya adalah jalan-jalan yang membentuk struktur utama kota (selain fungsi primer), yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota, khususnya dari pusat utama (*CBD/Central Bussines District*) dengan pusat-pusat kegiatan kota.
- Jalan Kolektor, yaitu jalan yang berfungsi sebagai pengumpul atau penyalur jalan-jalan lokal ke jalan arteri dengan ciri-ciri perjalanan sedang. Sementara itu jalan kolektor adalah pendukung terhadap jalan-jalan arteri primer yang ada. Jalan kolektor primer menghubungkan pusat-pusat bagian kota dengan pusat-pusat bawahnya (sub pusat kota).
- Jalan Lokal, yaitu jalan yang melayani angkutan setempat, dengan mempunyai ciri-ciri perjalanan pendek.

Jaringan arteri primer di Kabupaten Aceh Barat Daya terhubung dengan jaringan arteri sekunder. Dari sebagian arteri sekunder ini terletak juga diluar wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga terdapat sebagian jalan arteri sekunder ini yang menyambung ke luar wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk jaringan jalan kolektor sekunder pada prinsipnya terletak di dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya, tapi mengingat konfigurasi disekitar wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya maka terbuka kemungkinan jaringan jalan tersebut keluar wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya (seperti halnya

jalan arteri sekunder).

c. Pola Pergerakan

Secara garis besar pola pergerakan orang dan atau barang menggambarkan kekuatan/potensi disuatu wilayah, dimana kekuatan atau potensi itu dapat berupa jumlah penduduk yang tinggi, perekonomian yang kuat, pelayanan transportasi yang prima dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar suatu daerah melayani pergerakan orang dan atau barang, maka daerah tersebut merupakan daerah yang mempunyai potensi untuk membangkitkan dan atau menarik aktivitas masyarakat dalam segala bidang.

Untuk pemerataan pergerakan orang dan atau barang, maka daerah-daerah yang merupakan simpul-simpul bangkitan dan tarikan perjalanan membutuhkan prasarana transportasi untuk menghubungkan satu sama lain dalam membuka wilayah-wilayah potensial yang masih terisolasi sehingga tercapai pemerataan pembangunan.

d. Kinerja Angkutan Umum

Menurut lokasi pelayanan, trayek angkutan kota di Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu trayek dalam kota dan trayek pinggir kota dan trayek antar kota. Untuk jenis angkutan kota, kebutuhan yang ada masih dapat dipenuhi dengan penyediaan yang ada saat ini. Hal ini dapat dilihat dari belum ditemuinya kelebihan muatan penumpang dalam pelayanannya. Secara garis besar, permasalahan angkutan umum di Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya disiplin pengemudi angkutan umum
2. Orientasi pengemudi angkutan umum untuk mengejar keuntungan
3. Terkonsentrasinya rute angkutan umum pada ruas-ruas jalan tertentu
4. Sistem manajemen angkutan umum yang belum optimal
5. Tingginya harga suku cadang

e. Modal Angkutan Dan Aksesibilitas

Adapun trayek angkutan umum yang ada secara umum telah dapat menjangkau kecamatan-kecamatan yang ada, armada angkutan umum yang beroperasi di Kabupaten Aceh Barat Daya berupa minibus dan armada bus besar yang merupakan milik perusahaan swasta dan armada yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah. Armada minibus angkutan perdesaan merupakan armada terbanyak yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah mampu menjangkau hampir seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya dan jalur aksesnya terpusat di terminal induk Kota Blangpidie. Armada umum yang saat ini disediakan oleh Pemerintah daerah berupa bus sekolah yang juga telah mampu menjangkau hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2. Transportasi Laut

Selain transportasi darat, transportasi laut juga memiliki andil dalam kelancaran pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pelabuhan yang ada saat ini di Kabupaten Aceh Barat Daya berada di Kecamatan Susoh pelabuhan ini masih bersifat sebagai pelabuhan laut khusus bongkar muat barang. Tercatat sebanyak 159 kapal pernah berlabuh di pelabuhan tersebut sepanjang tahun 2006. Jika dibandingkan dengan tahun 2005 maka terjadi kenaikan yang cukup besar, dimana pada tahun 2005 tercatat 78 kapal yang berlabuh di kecamatan Susoh.

Transportasi Laut memiliki potensi untuk pengembangan dimasa yang akan datang. Pengembangan dapat dilakukan dengan penanganan yang sebaik mungkin untuk tidak lagi menjadi moda alternatif melainkan sudah menjadi moda simultan yang tumbuh dan berkembang disamping transportasi jalan yang relatif sudah cukup padat.

Selama ini Pelabuhan Susoh banyak mengambil peran. Tercatat sebanyak 79 kapal pernah berlabuh di pelabuhan tersebut sepanjang tahun 2011. Bila dibandingkan dengan tahun 2010 maka terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 51,92 persen. Kegiatan bongkar muat tidak dapat dipisahkan dari dunia pelayaran. Sepanjang tahun 2011, Pelabuhan Susoh mencatat sebanyak 114.772 ton barang yang dimuat, meningkat hampir tiga kali



lipat bila dibandingkan tahun 2010 di mana barang yang dimuat tercatat 39.065 ton. Sedangkan kegiatan bongkar tercatat oleh pelabuhan sebesar 200 ton. Nilai ini turun 84,65 persen dibandingkan kegiatan bongkar tahun 2010 yang tercatat sebesar 1.303 ton.

3. Transportasi Udara

Pergerakan orang dan barang dengan menggunakan angkutan udara di Kabupaten Aceh Barat Daya, saat ini masih memanfaatkan prasarana perhubungan udara yang berada di Kota Banda Aceh (Bandara Sultan Iskandar Muda) dan di Kota Medan (Bandara Kualanamu), sehingga pusat perhubungan udara masih berada di kedua kota tersebut. Sedangkan bandar udara yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya masih berupa lapangan perintis dan terdapat di Kecamatan Susoh.

Jenis lapangan ini kebanyakan landasannya berupa pengerasan dan telah dimanfaatkan secara komersil dengan pelayanan dan unit terbatas. Sepanjang tahun 2011 tercatat 194 pesawat yang tiba dan berangkat di Bandar Udara Kuala Batu, dengan rincian masing-masing 97 pesawat yang tiba dan berangkat. Angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya dimana selama tahun 2010 ada 430 pesawat yang tiba dan berangkat di Bandar Udara Kuala Batu. Adanya penurunan jumlah pesawat yang tiba dan berangkat ini juga diiringi dengan penurunan jumlah penumpang. Selama tahun 2011 jumlah penumpang tercatat sebanyak 1.031 orang, atau berkurang sebanyak 60,99 persen dari tahun 2010. Adapun untuk jumlah pesawat yang tiba dan berangkat paling tinggi pada bulan Desember yaitu masing-masing sebanyak 34 pesawat. Namun, jumlah penumpang yang tertinggi tercatat pada bulan Mei yaitu sebanyak 152 orang. Sedangkan jumlah terendah pada bulan Januari dan Oktober di mana tidak ada pesawat yang tiba dan berangkat.

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYASERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya diselenggarakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Barat Daya dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Barat Daya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut maka ruang lingkup pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah meliputi:

- a. Hak Daerah untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah, melaksanakan pembangunan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Pengelolaan pembiayaan yang meliputi aspek kekayaan yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.
- g. Kewajiban mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan selain Dana Alokasi Khusus (DAK)

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto



Tabel 3.1

Pertumbuhan Rata-rata Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	449.885.617.005,36	571.977.416.767,00	744.867.468.198,00	912.121.050.647,68	15,53
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	29.507.145.193,14	50.112.476.698,00	64.702.128.000,00	61.190.085.186,56	41,14
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	3.558.636.749,00	5.870.600.000,00	6.870.600.000,00	4.556.358.448,00	319,39
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	5.682.324.131,00	13.220.645.200,00	9.050.000.000,00	3.391.593.542,00	46,10
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	743.924.584,14	850.000.000,00	1.000.000.000,00	1426824.415,00	22,94
1.1.4	Zakat		3.321.231.498,00	2.159.071.500,00	2.920.979.133,14	0,14
1.1.5	Lain-lain PAD yang Sah	19.522.259.729,00	26.850.000.000,00	45.622.456.500,00	48.894.329.648,42	68,54
1.2.	Dana Perimbangan	405.591.010.367,00	452.515.504.726,00	494.683.691.658,00	622.329.754.490,00	10,54
1.2.1	Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Bukan Pajak	31.501.173.367,00	24.386.218.726,00	21.104.406.658,00	16.349.842.490,00	-10,18
1.2.2	Dana Alokasi Umum	327.572.527.000,00	362.624.746.000,00	406.138.315.000,00	416.171.312.000,00	9,70
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	46.517.310.000,00	65.504.540.000,00	67.440.970.000,00	189.808.600.000,00	33,67
1.2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	38.566.150.000,00	56.857.128.000,00	79.727.947.000,00	-22,30



Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017 _____

1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	64.787.461.445,22	69.349.435.343,00	185.481.648.540,00	228.601.210.971,12	74,75
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.148.427.415,00	5.877.000.000,00	3.454.200.000,00	20.139.746.950,00	170,51
1.3.2	Dana Darurat					0
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)	9.627.899.030,22	9.906.285.343,00	13.877.900.006,00	17.294.418.091,12	14,07
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus***)	27.372.335.000,00				-61,68
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	25.602.800.000,00	15.000.000.000,00	111.292.420.534,00	111.439.098.930,00	29826,70
1.3.6	Lain-lain Penerimaan					

Sumber : DPKKK Aceh Barat Daya, 2016 (Diolah)

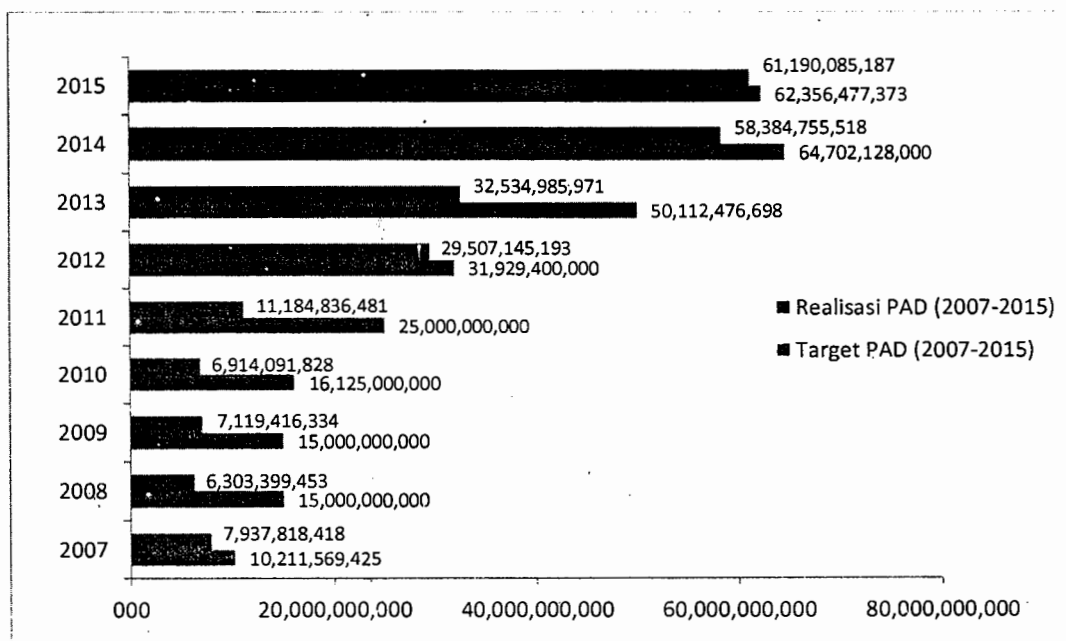


Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2015

Tahun	Target		Realisasi	
	PAD	Pertumbuhan	PAD	Pertumbuhan
2012	31.929.400.000,00	27,72	29.507.145.193,14	163,81
2013	50.112.476.698,00	56,95	32.534.985.970,94	10,26
2014	64.702.128.000,00	29,11	58.384.755.518,41	79,45
2015	62.356.477.373,00	-3,63	61.190.085.186,68	4,80
Rata-rata Per Tahun		31,37		38,69

Sumber : DPKKK Aceh Barat Daya, 2016 (Diolah).

Gambar 3.1
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBK Tahun 2007-2015



Sumber : DPKKK Aceh Barat Daya , 2016 (Diolah)



Setelah melihat kinerja pengelolaan pendapatan, aspek berikutnya untuk melihat kinerja pelaksanaan APBK masa lalu adalah pengelolaan belanja Aceh Barat Daya. Pengelolaan belanja Kabupaten Aceh Barat Daya dalam periode tahun 2007-2015 tercermin pada realisasi belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang menunjukkan kenaikan setiap tahun dengan realisasi belanja rata-rata 38,69 persen.

3.1.2. Neraca Kabupaten Aceh Barat Daya

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Aceh Barat Daya selama kurun waktu 2007-2015 seperti terlihat pada **Tabel 3.3** dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut:

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam Rupiah. Selama kurun waktu 2007-2015, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 1.065,11 persen yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Aceh Barat Daya meningkat sebesar 1.065,11 persen setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk akses pelayananke masyarakat Aceh Barat Daya dan juga menunjang kelancaran tugas pemerintahan.



Kenaikan rata-rata aset lancar 136,99 persen, sedangkan piutang dan persediaan naik masing-masing sebesar 32,00 persen dan 57,67 persen. Hal ini disebabkan karena komponen aset lancar, yaitu kas mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 47,32 persen. Penurunan aset lancar sebesar -1,382 persen yang menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya berada pada kondisi kurang baik.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Dalam kurun waktusembilan tahun terakhir (2007-2015) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai kewajiban baik kepada pihak ketiga utang pajak dan utang jangka pendek lainnya dengan pertumbuhan rata-rata kewajiban sebesar 275,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu tersebut, mempunyai utang perhitungan pihak ketiga jangka pendek dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 275,41 persen. Hal ini disebabkan karena belum bisa mengotimalkan pendapatan asli daerah dan pendapatan lainnya yang ada. Hal ini dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah
Kabupaten Tahun 2012-2015

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.	ASET	
1.1.	ASET LANCAR	
1.1.1.	Kas	47,32
1.1.2.	Piutang	32,00
1.1.3.	Persediaan	57,67
1.2	INVESTASI	
1.2.1	Non Permanen	-31,53
1.2.2	Permanen	-1,35
1.2.3	Investasi Jangka Panjang	0
1.3.	ASET TETAP	
1.3.1.	Tanah	5,35



No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1.3.2.	Peralatan dan mesin	16,12
1.3.3.	Gedung dan bangunan	16,56
1.3.4.	Jalan, irigasi, dan jaringan	18,18
1.3.5.	Aset tetap lainnya	12,12
1.3.6.	Konstruksi dalam pengerjaan	888,86
1.4.	ASET LAINNYA	
1.4.1.	Tagihan penjualan angsuran	0
1.4.2.	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	-5,64
1.4.3.	Kemitraan dengan pihak kedua	0
1.4.4.	Aset tak berwujud	0
1.4.5.	Aset Lain-Lain	100
	JUMLAH ASET DAERAH	
2.	KEWAJIBAN	
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	996,05
2.1.1.	Utang perhitungan pihak ketiga	275,41
2.1.2.	Utang Pajak	0
2.1.3.	Utang Bunga	0
2.1.4.	Bagian lancar Utang Dalam Negeri/Pemerintah Pusat	124,33
2.1.5.	Uang muka dari kas daerah	0
2.1.6.	Pendapatan diterima dimuka	0
2.1.7.	Utang Belanja	0
2.1.8.	Utang Kepada Pemerintah Pusat	100
2.1.9.	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Pokok Pinjaman	0
2.1.10.	Bagian Lancar Utang Jangka Pendek Bunga Pinjaman	0
2.1.11.	Utang Bagi Hasil Pajak-Retribusi kepada PEMKAB/PEMKOT	0
2.1.12.	Utang Jangka Pendek lainnya	-29,46
2.1.13.	Jumlah Kewajiban	0
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
2.2.1	Kewajiban Jangka Panjang	0
2.2.2	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0
3.	EKUITAS DANA	
3.1.	EKUITAS DANA LANCAR	
3.1.1.	SILPA	37,69
3.1.2.	Cadangan piutang	1,07
3.1.3.	Cadangan persediaan	52,60
3.1.4.	Pendapatan yang Ditangguhkan	462,28
3.1.5.	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	976,19
3.2.	EKUITAS DANA INVESTASI	
3.2.1.	Diinvestasikan dalam aset tetap	-1,84
3.2.2.	Diinvestasikan dalam aset lainnya (Tidak termasuk Dana Cadangan	-20,30
3.2.3.	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	-18,88

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	JUMLAH ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.549,96

Sumber : DPKKKAceh Barat Daya, 2016 (Diolah)

Ekuitas Dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun 2012-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 148.88persen. yang berarti bahwa ekuitas dananya masih kecil.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan Kabupaten Aceh Barat Daya, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBK. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai dengan aspek legalitas dan karakteristik daerah, peningkatan keterampilan aparat pengelola pendapatan daerah agar mendukung tingkat produktivitas yang tinggi, meningkatkan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi, otonomi khusus dan pemerataan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya kepada daerah dengan berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah.

Arah dan strategi terhadap upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama sembilan tahun terakhir didasarkan pada beberapa faktor yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.



3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, serta instansi terkait.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah.
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tabel 3.4
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2015

No.	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja+Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	%
1	Tahun Anggaran 2012	294.876.797.412,00	519.954.860.428,00	55,245
2	Tahun Anggaran 2013	271.970.422.053,23	598.835.610.571,23	45,417
3	Tahun Anggaran 2014	312.830.975.095,82	802.617.055.900,82	38,976
4	Tahun Anggaran 2015	309.395.063.216,00	871.309.775.607,00	35,509
5	Tahun Anggaran 2016*	517.607.294.776,32	706.821.512.126,00	42,273
	Rata-rata			50,59

Sumber : DPKKK Aceh Barat Daya, 2016 (Diolah)

Dari tabel diatas terlihat selama periode tahun 2007-2015, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 50,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih besar persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja langsung), sedangkan untuk tahun 2013-2015 rata-rata rasio belanja pegawai lebih kecil terhadap belanja langsung



yaitu sebesar 39,344. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah semestinya memangharusdifokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan dan pada tahun 2013-2015 Aceh Barat Daya telah melakukan hal tersebut.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah dalam kurun tahun 2007-2011 dapat digambarkan seperti terlihat pada **Tabel 3.5** di bawah ini. Daritabel tersebut, terlihat bahwa defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh BaratDaya meningkat dari tahun 2007sampai tahun 2011. Hal ini disebabkan meningkatnya belanja dan pengeluaran daerah secara signifikan yang tidak diimbangi oleh meningkatnya pendapatan daerah yang sebanding. Untuk menutup defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama, hanya mengandalkan penerimaan dari Silpa tahun sebelumnya. Apabila belanja dan pengeluaran daerah terus meningkat disertai dengan tingginya serapan anggaran sementara sumber pendapatan daerah tidak mengalami peningkatan yang signifikan maka tahun-tahun kedepan dikawatirkan keuangan daerah akan mengalami defisit. Keadaan ini mencerminkan pengolaan keuangan daerah yang belum memuaskan.



Tabel 3.5
Defisit Riil Anggaran Pemerintah
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2015

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016* (Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	499.885.617.005,36	554.548.911.506,59	737.256.154.421,27	912.121.050.647,68	-
	Dikurangi realisasi:					
2.	Belanja Daerah	519.954.860.428,00	523.657.517.608,00	689.042.032.197,00	871.309.775.607,00	1.224.428.806.902,2
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	26.858.193.804,23	57.514.129.271,82	100.991.216.552,09	-
	Defisit riil	-	-	-	-	-

Sumber : DPKKK Aceh Barat daya, 2016



3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan pengeluaran keuangan yang harus dilakukan pemerintah daerah, baik terkait dengan pembelanjaan pada kategori kewajiban maupun pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran keuangan pemerintah daerah sepenuhnya mengacu pada pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan normatifnya telah disampaikan dalam uraian sebelumnya.

3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Pengeluaran periodik pemerintah kabupaten yang dibebankan pada keuangan daerah saat RPJMK tahun 2012-2017 dibuat, memperlihatkan kondisi Pengeluaran periodik, wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2007-2015 dengan pertumbuhan rata-rata belanja tidak langsung dan belanja langsung sebesar 21,855 dan 29,727 Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.6
Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2007-2012

No	Uraian	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Pertum- buhan Rata-rata
A	Belanja Tidak Langsung	269.531.317.433,00	295.725.271.877,23	345.587.709.495,82	411.397.094.789,51	517.607.294.776,32	21,855
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	234.381.852.892	271.970.422.052,23	312.830.975.095,82	330.984.595.957,51	341.499.451.373,32	14,650
2	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	13.159.800.000,00	11.633.421.300,00	14.003.850.000,00	50.189.498.832,00	128.270.483.403,00	0,963
B	Belanja Langsung	294.876.797.412,00	303.110.338.694,00	457.029.346.405,00	627.245.445.858,00	706.821.512.126,00	29,727
1	Belanja Pegawai	41.237.123.664,00	45.411.138.963,00	66.680.810.664,00	76.847.090.293,00	68.506.723.271,00	6,234
2	Belanja Barang dan Jasa	106.546.102.360,00	126.154.301.210,00	212.377.157.472,00	196.545.971.259,00	187.937.768.510,00	9,368
C	Pembiayaan Pengeluaran	49.179.102.700,00	26.858.193.804,23	57.749.587.702,82	105.728.251.496,09	141.706.091.592,77	-178,109
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	(96.400.000,00)	0,00	-178,109
	TOTAL (A+B+C)	564.531.317.433	598.835.610.571,23	802.617.055.900,82	1.038.642.540.647,5 1	1.224.428.806.902, 32	41,550

Sumber : DPPKK Aceh Barat Daya, 2013 (Diolah)



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Tabel 3.7

Proyeksi tentang Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Untuk Pendanaan Pembangunan Daerah
Pada Kurun Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		Tahun 2013* (Rp)	Tahun 2014* (Rp)	Tahun 2015* (Rp)	Tahun 2016** (Rp)
1.	Pendapatan	554.548.911.506,59	737.256.154.421,27	912.121.050.647,68	1.082.722.715.309,55
2.	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	26.858.193.804,23	48.214.122.224,27	100.991.216.552,09	141.706.091.592,77
	Total penerimaan	581.407.105.310,82	785.470.276.645,54	1.013.112.267.199,77	1.224.428.806.902,32
	Dikurangi:				
4.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	598.835.610.571,23	802.617.055.900,82	1.038.642.540.647,51	1.224.428.806.902,32
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	581.407.105.310,82	785.470.276.645,54	1.013.112.267.199,77	1.224.428.806.902,32

Sumber :DPKKB Aceh Barat Daya (Diolah)



Dari tabel di atas dapat diproyeksikan bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan Aceh Barat Daya untuk 5 (lima) tahun ke depan hingga berakhirnya masa berlaku RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya 2013-2016, yaitu :

1. Proyeksi Tahun 2013 sebesar Rp. 581.407.105.310,82 atau sebesar 47,93 persen dari total penerimaan.
2. Proyeksi Tahun 2014 sebesar Rp. 785.470.276.645,54 atau sebesar 49,00 persen dari total penerimaan.
3. Proyeksi Tahun 2015 sebesar Rp. 1.013.112.267.199,77 atau sebesar 50,05 persen dari total penerimaan.
4. Proyeksi Tahun 2016 sebesar Rp. 1.224.428.806.902,32 atau sebesar 51,08 persen dari total penerimaan.

Peningkatan persentase kapasitas riil terhadap total pendapatan terjadi karena persentase penambahan pendapatan lebih besar dari peningkatan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta persentase prioritas utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan pola positif pertumbuhan pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya, oleh sebab itu perlu terus dilakukan peningkatan penerimaan pendapatan dari PAD dan sumber-sumber pendapatan yang lain untuk keberlanjutan peningkatan pendapatan Kabupaten Aceh Barat Daya 5 (lima) tahun ke depan.

Untuk meningkatkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dapat terus meningkat dari tahun ke tahun sampai tahun 2017 mendatang dapat dilakukan :

1. Dengan meningkatkan PAD dengan cara peningkatan intensitas pemungutan PAD dan membuat qanun tentang PAD.
2. Dengan memperkecil Belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
3. Perlu efisiensi dalam menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan urutan prioritas.
4. Perlu peningkatan kontribusi Baitul Mall (khusus dalam pengentasan kemiskinan) dan sektor swasta, baik melalui kemitraan pemerintah dan sektor swasta (*public private partnership*) maupun potensi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari pelaku usaha daerah, yang tersebar diberbagai lapangan usaha di Kabupaten Aceh Barat Daya.



5. Reorganisasi Struktur organisasi pemerintah daerah yang semakin relevan dan efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, dengan reorganisasi ini diperlukan besaran organisasi yang lebih efisien serta gugus penugasan yang profesional.



BAB IV

ANALISIS ISU – ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini akan terwujud apabila pemerintahan daerah memiliki kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah kepada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan daerah yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran dari tiga pilar utama yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain, dunia usaha swasta berperan untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan dan masyarakat memiliki peran dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.

Seperti daerah lainnya, dalam membangun daerah yang lebih baik, Kabupaten Aceh Barat Daya juga dihadapkan kepada permasalahan dan tantangan baik yang bersifat sektoral, regional maupun yang bersifat global. Atas dasar ini, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan melalui pendekatan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) dengan mengetahui faktor internal dan faktor eksternal Kabupaten Aceh Barat, yaitu:

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Tingginya komitmen pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Barat Daya dalam pembangunan daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;



4. Letak geografis yang berada di tengah-tengah lintas perdagangan dan pusat jalur distribusi barang dan jasa di wilayah dataran tinggi Gayo dan pantai Barat Selatan Aceh menuju wilayah Sumatera Utara;
5. Besarnya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan dan kelautan;
6. Ketersediaan dana Otsus dan TDBH Migas sebagai sumber dana pembangunan;
7. Tersedianya sumber daya manusia (SDM) untuk dikembangkan;
8. Tersedianya ruang wilayah untuk dikembangkan;
9. Topografi wilayah yang terdiri dari laut, gunung dan daratan.
10. Adanya penetapan kawasan minapolitan;
11. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
12. Dinamika kehidupan, karakter dan budaya masyarakat Aceh Barat Daya yang Islami;

b. Kelemahan (Weakness)

1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi yang *good governance* dan *clean governance*;
2. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai Syariat Islam;
3. Tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia;
5. Belum optimalnya kualitas dan pelayanan kesehatan;
6. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam terutama di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan serta pertambangan;
7. Masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dalam pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
8. Masih rendahnya minat dan peranan investor dalam pembangunan;
9. Belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah;
10. Masih terbatasnya infrastruktur dasar penunjang perekonomian (darat, laut dan udara);
11. Masih adanya daerah rawan pangan, rendahnya mutu dan keamanan pangan serta kurangnya diversifikasi makanan;



12. Terbatasnya lahan potensial;
13. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian;
14. Belum optimalnya pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
15. Adanya potensi wilayah rawan bencana yang tersebar di setiap kecamatan;
16. Terbatasnya lahan potensial;
17. Masih lemahnya ketersediaan dan pengelolaan data base;
18. Belum optimalnya pengembangan dan pelestarian budaya lokal.

2. Faktor Eksternal

a. *Peluang (Opportunity)*

1. Tingginya permintaan terhadap komoditas pertanian, perikanan dan perkebunan;
2. Adanya program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
3. Adanya kerjasama pemerintah daerah dengan NGO berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM dan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat;
4. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam peningkatan sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dan infrastruktur;
5. Tersedianya regulasi dalam rangka efektivitas reformasi birokrasi dan peningkatan sumber daya manusia;
6. Adanya minat investor di bidang industri, pertambangan, perkebunan, perikanan dan kelautan;

b. *Ancaman (Treat)*

1. Beredarnya produk luar (impor) dengan harga bersaing;
2. Masuknya tenaga kerja terampil dari luar daerah;
3. Sumber daya alam yang semakin terdegradasi;
4. Masuknya pengaruh budaya asing;
5. Pelanggaran batas teritorial;
6. Potensi wilayah rawan bencana;
7. Terjadinya pendangkalan aqidah.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan pokok dalam membangun Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu :



1. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi dan tata kelola tidak bisa lepas dari kekuatan dan kelemahan sumber daya aparatur pemerintahan dan strukturisasi kelembagaan. Hal ini dapat dilihat dari aspek yang sangat fundamental seperti rendahnya kualitas dan kredibilitas sumber daya aparatur pemerintahan terutama dalam proses administrasi birokrasi dan penguasaan teknologi. Selain itu, pemerintahan diindikasikan belum terbebas dari KKN dan kinerja pemerintahan masih belum aspiratif dan visioner dalam proses perencanaan pembangunan di tengah-tengah tuntutan masyarakat yang dinamis terhadap pemerataan pelaksanaan pembangunan.
2. Masih kurangnya penguatan terhadap pelaksanaan Syariat Islam. Meskipun pelaksanaan Syariat Islam telah berjalan, akan tetapi penguatan terhadap pelaksanaannya masih memerlukan penguatan. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam juga masih lemah mengakibatkan meningkatnya pelanggaran syariat yang terjadi.
3. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Sistem pengelolaan pendidikan dan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung lainnya yang masih terbatas, menyebabkan kualitas SDM daerah untuk berbagai jenjang pendidikan (formal dan informal) masih relatif rendah.
4. Rendahnya kualitas dan pelayanan kesehatan. Keterbatasan prasarana dan sarana kesehatan dan masih belum optimalnya upaya pelayanan kesehatan, menyebabkan rendahnya kualitas dan pelayanan kesehatan.
5. Tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Penduduk miskin di Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun 2010 tercatat sebesar 19,94 persen dimana angka ini lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,36 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2011 sebesar 6,83 persen, tidak jauh berbeda dengan



angka pengangguran terbuka nasional sebesar 6,80 persen. Hal ini terjadi karena minim dan terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan akibat belum maksimalnya upaya untuk mengundang investor menanamkan modalnya di daerah.

6. Belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan sektor UMKM.

UMKM menempati posisi strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen maupun konsumen, UMKM berperan dalam meningkatkan posisi tawar dan efisiensi ekonomi rakyat. Namun permasalahan utama yang dihadapi adalah masih terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas. Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing.

7. Belum optimalnya pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur.

Pembangunan prasarana dan sarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antar wilayah. Masih kurangnya prasarana dan sarana dalam mendukung perekonomian daerah seperti infrastuktur dasar, prasarana dan sarana transportasi (darat, laut dan udara), perumahan layak, infrastruktur energi, komunikasi dan informatika.

8. Kurangnya keterlibatan sektor swasta dan dunia usaha.

Permasalahan utama yang dihadapi daerah pada umumnya di dalam perekonomian adalah masih terbatasnya peran swasta dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Rendahnya iklim investasi menyebabkan daerah masih sangat tergantung kepada alokasi anggaran pemerintah (APBN, APBA dan APBK).



9. Rendahnya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Potensi sumber daya alam yang utama adalah potensi pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata serta pertambangan yang bisa menjadi modal dan pemicu pembangunan wilayah. Namun demikian, pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya alam tersebut masih belum maksimal.

10. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis.

Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali daerah kawasan pedalaman dan permukiman terpencil. Belum optimalnya pengembangan kawasan strategis ini merupakan kendala bagi daerah di tengah tuntutan masyarakat terhadap pemerataan kesejahteraan.

11. Kota Blangpidie sebagai ibukota Kabupaten yang belum tertata dengan baik.

Sebagai ibukota Kabupaten, kawasan Kota Blangpidie selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat daya juga sebagai pusat kegiatan perdagangan/perekonomian dan pendidikan. Hal ini merupakan potensi dalam pertumbuhan dan perkembangan pada masa yang akan datang. Namun demikian, dalam perkembangannya selama ini, Kota Blangpidie belum mencerminkan sebagai ibukota Kabupaten yang layak dan modern. Prasarana dan sarana perkotaan masih minim, belum adanya ruang hijau di pusat kota, dan belum tertatanya pusat pemerintahan dan perdagangan masyarakat secara terpadu.

12. Suasana sosial dan politik kemasyarakatan masih belum stabil.

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan di daerah merupakan modal awal dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengertian politik yang baik dengan mengedepankan toleransi politik antar masyarakat dan stakeholder dalam pemerintahan.



4.2. Isu Strategis

Isu strategis pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Isu strategis internasional;
2. Isu strategis nasional;
3. Isu strategis daerah.

A. Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional yang dihadapi oleh Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut :

1. Besarnya pengaruh pemanasan global terhadap lingkungan;
2. Besarnya pengaruh dan ketergantungan terhadap IPTEK dalam perekonomian dan pembangunan daerah.
3. Besarnya pengaruh budaya asing terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat.
4. Adanya pengaruh krisis keuangan internasional terhadap perekonomian daerah.
5. Terbentuknya perdagangan bebas di antara negara-negara ASEAN yang lebih dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

B. Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM baik masyarakat maupun aparatur pemerintah.
2. Rendahnya kualitas dan pelayanan kesehatan.
3. Rendahnya kualitas dan pelayanan pendidikan.
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan.
6. Fluktuasi harga komoditas sektor ekonomi.
7. Terbatasnya energi listrik dan sumber daya lainnya.
8. Terbatasnya keuangan negara.
9. Besarnya hutang luar negeri pemerintah.



10. Penarikan beberapa kewenangan Pemerintah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

C. Isu Strategis Daerah

Isu strategis Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu kepada analisis SWOT daerah adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang *good governance* dan *clean government* belum optimal.
2. Pelaksanaan nilai-nilai Syariat Islam yang belum optimal.
3. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
4. Lapangan pekerjaan masih terbatas.
5. Kualitas sumber daya manusia masih rendah.
6. Kualitas dan pelayanan kesehatan masih rendah.
7. Kualitas dan pelayanan pendidikan masih rendah.
8. Sumber penerimaan daerah khususnya PAD masih terbatas.
9. Pembangunan prasarana dan sarana perekonomian (darat, laut dan udara) masih terbatas.
10. Pemanfaatan potensi sumber daya alam belum optimal.
11. Faktor penunjang produksi dan pemasaran hasil produksi sektor ekonomi belum memadai.
12. Harga komoditas hasil produksi sektor ekonomi berfluktuasi terutama pada saat musim panen raya.
13. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) belum optimal.
14. Pengembangan kawasan strategis dan tata ruang wilayah belum optimal.
15. Ketersediaan data perencanaan pembangunan daerah masih terbatas.
16. Iklim investasi masih belum kondusif.
17. Kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan dengan *stakeholders* masih terbatas.
18. Penanganan resiko bencana yang masih rendah dan menurunnya kualitas lingkungan.



BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. VISI

Berdasarkan kondisi yang dihadapi Kabupaten Aceh Barat Daya serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhitungkan potensi dan keunggulan daerah yang dimiliki, maka visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 - 2017 adalah :

**“KABUPATEN ACEH BARAT DAYAYANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI
MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH
YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL”**

Penjelasan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah sebagai berikut :

1. **Islami** : adalah akhlaq/perilaku masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya di seluruh tatanan kehidupan yang senantiasa dijiwai oleh nilai moralitas, etika dan budi pekerti yang luhur berlandaskan Syariat Islam.
2. **Sejahtera** : adalah kondisi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spritual dan emosional) dalam berbagai aspek kehidupan, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
3. **Mandiri** : adalah kondisi Kabupaten Aceh Barat Daya yang mampu memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri di berbagai bidang dengan mengurangi ketergantungan kepada daerah lainnya.
4. **Potensi Daerah** : adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Barat Daya yang dapat digali dan dikembangkan, baik yang bersumber dari alam, manusia, dan sosial budaya.



5. **Kearifan Lokal** : gagasan-gagasan/nilai-nilai/pandangan-pandangan yang bersifat lokal yang bijaksana, penuh kearifan, dan bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.

5.2. MISI

Misi yang ingin dicapai berdasarkan Visi di atas adalah sebagai berikut:

1. **Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), bersih dan berwibawa (*clean government*) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)**

Maksud dari Misi ini adalah untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam ruang lingkup tatanan birokrasi pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*), tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga perubahan pada tingkat; struktur, sistem administrasi dan tingkah laku (*the ethics being*) melalui reformasi birokrasi secara total, diantaranya pelurusan orientasi, memperkuat komitmen, membangun kultur baru, rasionalisasi, memperkuat payung hukum dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Selain itu diperlukan langkah eksternal berupa komitmen dan keteladanan elit politik di daerah dan pengawasan masyarakat sehingga akan memunculkan sistem pemerintah yang amanah, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. **Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam**

Maksud dari Misi ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang mengedepankan nilai-nilai moral dan etika berlandaskan syariat Islam di seluruh aspek kehidupan untuk menciptakan rasa aman dan damai dalam hubungan interaksi sosial dan budaya.

3. **Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan**

Maksud dari Misi ini untuk mengembangkan sektor usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui pemberdayaan sumberdaya lokal sehingga



memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah.

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Maksud dari Misi ini adalah membangun birokrasi yang kokoh, utamanyakepada profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas tinggi melalui sinergisitas yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Birokrasi sebagai salah satu aktor dalam pembangunan harus mampu dan dapat dipercaya, sehingga dapat menjalankan kewajibannya dalam melayani masyarakat secara prima.

5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan

Maksud dari Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia dalam lingkup perspektif kurikulum, sistim, struktur dan proses pendidikan serta kemudahan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

6. Menggalidandembangkanpotensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan

Maksud dari Misi ini adalah untuk menumbuhkembangkan potensi- potensi daerah yang bernilai ekonomis dan mempunyai keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan serta pemanfaatan sumber daya manusia setempat.

7. Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif

Maksud dari Misi ini adalah meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur untuk menumbuhkan dan mengembangkan kawasan terpadu maupun kawasan strategis, sehingga dapat memunculkan peluang investasi kondusif di pasar regional dan global serta mendatangkan sumber pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.



5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 berdasarkan misi pembangunan di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tujuan dan sasaran Misi 1:

**Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 1**

Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), bersih dan berwibawa (<i>clean government</i>) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).	
Tujuan	Sasaran
1. Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien 2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat 3. Terciptanya pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), bersih dan berwibawa (<i>clean government</i>) berdasarkan UUPA

Tujuan dan sasaran Misi 2 :

**Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 2**

Misi 2: Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam.	
Tujuan	Sasaran
1. Menerapkan nilai-nilai keagamaan berdasarkan Syariat Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam 2. Meningkatnya ketaqwaan dalam beragama 3. Meningkatnya kesadaran dan nilai-nilai keagamaan masyarakat sesuai dengan Syariat Islam

Tujuan dan sasaran Misi 3:

Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 3

Misi 3:	
Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.	
Tujuan	Sasaran
1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat 2. Tersedianya lapangan kerja baru 3. Menurunnya tingkat pengangguran 4. Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin 5. Meningkatnya pendapatan masyarakat

Tujuan dan sasaran Misi 4:

Tabel 5.4
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 4

Misi 4:	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat 2. Tersedianya prasarana pendukung peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintah dan masyarakat 3. Meningkatnya kinerja SDM aparatur pemerintah 4. Meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat



Tujuan dan sasaran Misi 5:

Tabel 5.5
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 5

Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan 2. Terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan 3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan 4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat

Tujuan dan sasaran Misi 6:

Tabel 5.6
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 6

Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan	
Tujuan	Sasaran
1. Menumbuhkembangkan potensi daerah yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggali potensi daerah yang berdaya saing secara optimal 2. Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah 3. Mampu bersaing dengan daerah lain 4. Terpeliharanya kualitas lingkungan 5. Meningkatnya pendapatan daerah



Tujuan dan sasaran Misi 7:

Tabel 5.7
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Misi 7

Misi 7: Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif.	
Tujuan	Sasaran
1. Mengembangkan kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya kawasan strategi untuk mempercepat pertumbuhan investasi di daerah 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi 3. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan (<i>growth center</i>) ekonomi 4. Meningkatnya jumlah investor dan investasi di daerah



BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya 2012-2017, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan strategi dan arah kebijakan pembangunan ini sangat penting karena akan digunakan sebagai pedoman dan acuan oleh seluruh SKPK di Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menentukan program prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Hal ini diperlukan dalam upaya untuk mencapai dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017.

Disamping itu, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun keempat dan kelima juga dipengaruhi oleh tujuan dan arah pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 terutama pada sembilan program prioritas Nasional (*NawaCita*).

Untuk mengetahui secara rinci arah dan kebijakan pembangunan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan masing-masing misi Pemerintah Aceh Barat Daya, 2012-2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 1:

Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Misi 1: Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), bersih dan berwibawa (<i>clean government</i>) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Melakukan reformasi birokrasi pemerintahan	1. Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1. Peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Kabupaten	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah 2. Peningkatan kapasitas Lembaga legislatif



			<p>3. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah lainnya</p> <p>4. Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government, e-procurement dan e-development</p>
		<p>2. Penyediaan regulasi / produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan</p>	<p>1. Penyempurnaan data base kelembagaan dan aparatur</p> <p>2. Peningkatan peran Ulama dalam penyusunan rencana pembangunan</p>
		<p>3. Peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian pembangunan</p>	<p>1. Sinergi dan koordinasi perencanaan daerah</p> <p>2. Pembentukan Forum Koordinasi Program Pembangunan lintas sektoral (Forum Koordinasi Aceh Barat Daya) terhadap usulan masyarakat</p> <p>3. Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif</p> <p>4. Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah</p> <p>5. Mengembangkan data dan statistik pembangunan</p> <p>6. Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan</p>



		4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	1. Intensifikasi pembinaan dalam rangka pengendalian internal
		5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah	1. Pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja 2. Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran
		6. Peningkatan pendapatan daerah	1. Peningkatan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah 2. Pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah
		7. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1. Penyusunan analisis jabatan dan kebutuhan aparatur
		8. Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	1. Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan pengembangan olahraga
	2. Meningkatnya kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik	1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan prinsip pelayanan prima
		2. Peningkatan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	1. Peningkatan cakupan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian bencana dan bahaya



			kebakaran
		3. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat (Linmas) 2. Peningkatan penyelesaian pelanggaran (ketertiban, ketentraman, keindahan) K3
		4. Peningkatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1. Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	3. Terciptanya pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), bersih dan berwibawa (<i>clean government</i>) berdasarkan UUPA	1. Perwujudan kepastian hukum dan dipercayadalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik	2. Optimalisasi pengkajian produk hukum daerah dan data hukum 3. Penyebarluasan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah 4. Optimalisasi penyelesaian persoalan hukum
		2. Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara	1. Pemantapan kebijakan pengawasan 2. Peningkatan efektivitas sistem pengawasa 3. Peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan Kabupaten 4. Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman dan peningkatan kapasitas auditor 5. Pengembangan



			kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik, pakta integritas; dan pembatasan konflik kepentingan. 6. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
		3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	1. Peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi dan mengadukan penyalahgunaan dan malpraktik kewenangan 2. Perbantuan pemerintah dalam membenahan tata kelola pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 2:

Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Misi 2: Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menerapkan nilai-nilai keagamaan berdasarkan Syariat Islam	1. Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam	1. Peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat rawan sosial dan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama	1. Implementasi Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya 2. Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan



			<p>kebangsaan</p> <p>3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar</p>
		1. Peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis Dayah/Pesantren	1. Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha di Dayah/Pesantren
	2. Meningkatnya ketaqwaan dalam beragama	1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan serta kesadaran kehidupan beragama	1. Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan
		2. Peningkatan pemahaman tentang ajaran agama	<p>1. Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan</p> <p>2. Penataan Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji</p> <p>3. Pengikutsertaan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional</p>
		4. Pemerataan Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan	
	3. Meningkatnya kesadaran dan nilai-nilai keagamaan masyarakat sesuai dengan Syariat Islam	1. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah	1. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam seperti Mahkamah Syar'iah, Baitul



			Maal, dan Wilayatul Hisbah
		2. Penataan lembaga keuangan syariah	
		2. Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariat Islam	
		3. Penegakan syariat Islam secara kaffah	

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 3:

Tabel 6.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Misi 3: Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Memberdayakan ekonomi kerakyatan	1. Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	1. Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan, perkebunan dan kehutanan dan perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil produksi 2. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam
		2. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1. Peningkatan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama usaha dan informasi usaha 2. Penumbuhan kewirausahaan dan enterpreunership di masyarakat 3. Peningkatan pembinaan koperasi dan

			lembaga keuangan mikro
	2. Tersedianya lapangan kerja baru	1. Penciptaan tumbuhnya investasi, khususnya investasi padat karya agar tercipta kesempatan kerja	1. Perluasan kesempatan kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru 2. Pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktifitas
		2. Pengembangan potensi industri kecil dan kerajinan rakyat	1. Optimalisasi sektor UMKM
		3. Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis	
	3. Menurunnya tingkat pengangguran	1. Pembukaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada pengembangan UMKM	1. Peningkatan angkatan kerja yang produktif dan terampil dalam berwirausaha
		2. Penyelenggaraan diklat dalam usaha meningkatkan kreatifitas masyarakat	
	4. Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin	1. Pemberian modal usaha dan santunan kepada masyarakat miskin	1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 2. Peningkatan jumlah penduduk dalam cluster menengah
		2. Penyelenggaraan diklat keterampilan kerja	
		3. Pemberian beasiswa pendidikan bagi	



		penduduk miskin	
	5. Meningkatnya pendapatan masyarakat	1. Pemberdayaan sektor usaha masyarakat yang berbasis industri rumah tangga	1. Penciptaan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
		2. Pengelolaan komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi	

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 4:

Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1. Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1. Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah daerah	1. Peningkatankualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dengan mengefektifkan penyelenggaraan diklat dan pemberian tugas belajar
		2. Pemberian Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi aparatur daerah	
	2. Tersedianya prasarana pendukung peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	1. Peningkatankualitas pengelolaan kelembagaan SKPK yang menyangkut administrasi, kinerja, SDM, sarana dan prasarana serta keuangan
	3. Meningkatnya kinerja SDM aparatur pemerintah	1. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur	1. Peningkatankesejahteraan pegawai 2. Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan



			elayanan dan pemberdayaan masyarakat khususnya wilayah terpencil
	4. Meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat	1. Pengelolaan manajemen kepegawaian yang pada kebutuhan pelayanan prima	1. Peningkatan pelayanan adminitrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 5:

Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Misi 5: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan	1. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan mutudan pemerataan akses kesempatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan menengahsertapendidikankejuruanterutama di daerah-daerahterpencil yang didukungoleh saranadan prasarana pendidikan yang memenuhstandar	1. PeningkatanKualit as Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah 2. PeningkatanKom petensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan 3. Peningkatankem ampunan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah
		1. Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya	1. Peningkatankualit as ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian 2. Pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan



			<p>kesehatan</p> <p>3. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan</p>
	2. Terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan	1. Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun Informal	
		2. Penurunan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada instalasi atau puskesmas	<p>1. Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak</p> <p>2. Peningkatan Keluarga Sadar Gizi</p>
		3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	<p>1. Pengembangan sistem kesehatan</p> <p>2. Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular</p> <p>3. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>4. Pengembangan pelayanan puskesmas 24 jam</p>
	3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Penataan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta mewujudkan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)	<p>1. Peningkatan kualitas siswa dalam persaingan global</p> <p>2. Penerapan penggunaan sistim teknologi dalam proses belajar mengajar</p> <p>3. Peningkatan jumlah sarana dan prasaran yang layak dalam kegiatan pembelajaran</p>
		2. Peningkatan jumlah daya tampung	



		SMP/MTs dan SMA/SMK	
	4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat	1. Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit	1. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan 2. Peningkatan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan
		2. Peningkatan upaya preventif dan promosi kesehatan	1. Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju Desa Siaga Aktif dan keluarga siaga

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 6:

Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 6

Misi 6: Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menumbuhkembangkan potensi daerah yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.	1. Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang berdaya saing secara optimal	1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian	1. Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis
		2. Fasilitasi Pelaksanaan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ramah lingkungan	
	2. Meningkatnya produktivitas sekt	1. Peningkatan nilai tambah, sarana	1. Peningkatan produktivitas



	or unggulan daerah	serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.	lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya intensifikasi, diversifikasi, optimalisasi, dan rehabilitasi lahan-lahan yang terlantar 2. Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan perikanan, termasuk motorisasi armada perikanan dalam upaya meningkatkan daya jelajah dan produktivitas nelayan
	3. Mampu bersaing dengan daerah lain	1. Pengembangan potensi ekonomi daerah	1. Pengembangan industri kreatif 2. Peningkatan revitalisasi pasar tradisional 3. Peningkatanfasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal
		2. Pengembangan pariwisata berbasis budaya	1. Peningkatankeunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat 2. Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata 3. Pengembangan gerakan sadar wisata 4. Pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya
	4. Terpeliharanya kualitas	1. Peningkatan kualitas	1. Peningkatan pelestarian



	lingkungan	lingkungan hidup	lingkungan hidup 2. Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan 3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
		2. Peningkatan kinerja pengelolaan Persampahan	1. Peningkatan penanganan persampahan
	5. Meningkatnya pendapatan daerah	1. Penuntasan Qanun PAD	
		2. Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	1. Optimalisasi jenis-jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada
		3. Pembentukan BUMD sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah	1. Pendayagunaan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat 2. Pembinaan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan yang bersih, transparan dan professional

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan tujuan dan sasaran pada Misi 7:

Tabel 6.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran pada Misi 7

Misi 7: Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Mengembangkan kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi	1. Berkembangnya kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di daerah	1. Penyusunan master plan kawasan strategis	1. Penetapan wilayah strategis berdasarkan pada struktur ruang untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah. 2. Pengembangan wilayah pegunungan dan pesisir 3. Sosialisasi RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya
		2. Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1. Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan perumahan
	2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi (darat, laut dan udara)	1. Pembangunan jaringan jalan dan Jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat	2. Peningkatan jaringan transportasi 3. Peningkatan infrastruktur dasar dalam pelayanan publik 4. Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
		2. Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1. Penyediaan Energi Listrik di Daerah Terpencil
		3. Kerjasama pembangunan infrastruktur dasar dengan pihak swasta	



		4. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi
	3. Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan (<i>growth center</i>) ekonomi	1. Penyusunan master plan Pusat Pertumbuhan Ekonomi 2. Pembangunan sarana dan prasarana kawasan cepat tumbuh	1. Pengembangan mutu dan Produksi Pertanian di kawasan baru 2. Pengembangan kawasan permukiman di wilayah yang memiliki potensi keunggulan daerah
	4. Meningkatnya jumlah investor dan investasi di daerah	1. Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	1. Peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi 2. Penciptaan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif 3. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mendukung investasi
		2. Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal
		3. Pengembangan pengolahan hasil-hasil komoditi unggulan daerah	2. Peningkatan nilai tambah dari komoditi unggulan daerah



6.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya periode 2012-2017 berdasarkan tahunan adalah sebagai berikut:

6.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Pertama (2013)

Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun pertama (2013) ditujukan untuk mengatasi permasalahan utama dalam pembangunan dan dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pemantapan struktur birokrasi, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dan sumber daya energi, peningkatan nilai tambah produk pertanian/perkebunan dalam usaha pemantapan ketahanan pangan.

Dalam upaya perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di pedesaan, daerah tertinggal dan pesisir. Di samping itu, pada tahun pertama ini dilakukan peningkatan penerapan Syariat Islam dan pembangunan sosial dan budaya serta penguatan keberlanjutan perdamaian sebagai mana yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

6.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kedua (2014)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun kedua (2014) merupakan lanjutan dari tahun pertama, terutama yang belum terselesaikan. Permasalahan pembangunan yang bersifat mendesak dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat merupakan prioritas di tahun kedua ini. Permasalahan pembangunan tersebut seperti peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penurunan angka pengangguran, sosial dan budaya serta syariat Islam. Di samping itu, peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana infrastruktur juga menjadi prioritas yang harus diselesaikan, terutama pekerjaan ataupun kegiatan di kawasan yang bersifat strategis dan mempunyai dampak jangka panjang dalam peningkatan akses perekonomian, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Sementara itu, untuk bidang pemerintahan, ditahun kedua ini juga dilakukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur pemerintah/PNS. Hal ini sebagai upaya dalam peningkatan ketrampilan dan jenjang keilmuan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk bidang pertanian, perkebunan, kelautan dan pariwisata, di tahun kedua lebih diarahkan kepada upaya



intensifikasi dan ekstenfikasi terhadap potensi ataupun komoditi unggulan daerah serta peningkatan nilai tambah produk dengan mensinergikan peran perintah dan swasta melalui iklim investasi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan sumber pendapatan daerah serta dalam mendukung Aceh Barat Daya sebagai daerah agroindustri. Di tahun kedua ini, penanganan resiko bencana juga dilaksanakan mengingat di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya terdapat beberapa titik rawan bencana seperti bencana banjir yang tersebar di beberapa kecamatan.

6.2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Ketiga (2015)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun ketiga (2015) dilaksanakan untuk memastikan bahwa pembangunan tahun pertama dan tahun kedua sudah berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi. Hal tersebut dilaksanakan dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan ini terutama masyarakat kecil dan menengah serta kegiatan yang bersifat skala besar yang tidak bisa dilaksanakan dalam tahun sebelumnya seperti jalan, irigasi, pelabuhan laut, bandar udara.

Di samping itu, pembangunan tahun ketiga tetap akan diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanganan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang merupakan permasalahan fundamental dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pengembangan kawasan strategis yang dapat menjadi sumber peningkatan perekonomian juga akan dilakukan melalui pengelolaan dan pengembangan potensi daerah dan komoditi unggulan di sekitar kawasan tersebut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan akan tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya karena kedua bidang tersebut sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya masyarakat juga menjadi sorotan pemerintah, terutama dalam menjaga kelestarian adat istiadat daerah, karena adat istiadat merupakan cerminan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi peran pemuda dan pembangunan bidang keolahragaan yang melibatkan unsur masyarakat juga akan menjadi fokus di tahun ketiga ini.



6.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Keempat (2016)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun keempat (2016) ditekankan pada pemantapan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan di tahun keempat ini juga diarahkan pada evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sebagai upaya mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya pada tahun keempat ini lebih memfokuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan iklim investasi melalui badan usaha milik daerah yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam peningkatan pendapatan daerah. Pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan kerja, merupakan prioritas yang utama dengan mengedepankan kepada usaha skala kecil dan menengah. Di samping itu, penataan kawasan strategis yang bernilai ekonomis juga akan terus dilakukan terutama kawasan yang sudah memperlihatkan kemajuan dan perkembangan di lintas sektoral dan regional.

Pada tahap pembangunan tahun keempat ini, kemiskinan dan pengangguran di Aceh Barat Daya diharapkan sudah mengalami penurunan, pembangunan di desa dan kecamatan sudah memperlihatkan pertumbuhan dan pemerataan yang cukup signifikan. Akses jalan sebagai alur distribusi barang dan jasa terutama yang menjangkau di daerah pedalaman ataupun terisolir sudah dapat diselesaikan dengan baik. Wilayah yang dikategorikan rawan bencana sudah dapat teratasi, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan sudah menjadi lebih baik sesuai dengan target standar pelayanan minimal (SPM), serta peningkatan nilai tambah produk komoditas unggulan sebagai aset potensi daerah sudah menunjukkan hasil nyata sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

6.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Kelima (2017)

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya tahun kelima (2017) yang merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 merupakan tahap evaluasi dan konsolidasi terhadap pelaksanaan pembangunan di empat tahun pembangunan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa telah terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta target per prioritas pembangunan yang sudah ditetapkan sebelumnya.



Arah kebijakan pembangun tahun kelima ini juga difokuskan pada bidang/sector yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama empat tahun sebelumnya. Selain itu, pada tahun kelima ini diharapkan target pembangunan Aceh Barat Daya diberbagai sector/bidang pembangunan sudah dapat dicapai secara menyeluruh, terutama yang berkaitan langsung dengan program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana publik.



BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Visi dan Misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya perlu dijabarkan ke dalam kebijakan umum dan program prioritas disertai kebutuhan pendanaan yang merupakan program unggulan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Berdasarkan analisis strategi dan arah kebijakan pembangunan pada BAB VI maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya menyusun 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
2. Syariat Islam, Sosial dan Budaya
3. Pendidikan
4. Kesehatan
5. Pembukaan Lapangan Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan
6. Pemanfaatan Potensi Daerah dan Sumber Daya Lokal
7. Sarana dan Prasarana Infrastruktur
8. Penataan dan Pengembangan Kawasan

Selanjutnya kebijakan umum yang disusun berdasarkan 8 (delapan) prioritas pembangunan tersebut mengacu kepada arah kebijakan pembangunan setiap tahunnya yang telah diuraikan pada BAB VI.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan acuan untuk menyusun program unggulan dengan target indikator kinerja. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya ini hanya yang bersifat prioritas dan yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat Daya. Selanjutnya operasional dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Selanjutnya, penjelasan kebijakan umum dan program unggulan berdasarkan 8 (delapan) prioritas pembangunan Aceh Barat Daya dijelaskan secara rinci pada Tabel 7.1 dan Tabel 7.1.a.



Tabel 7.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013-2016

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal RPJMK (2012)	Kondisi s/d Tahun 2016			
MISI 1 : Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)								
1 Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Kabupaten	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap anggota organisasi / Adanya PNS yang berprestasi	67 orang	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Anggota Organisasi	Pemerintah an Umum	Sekretariat Korpri	
			Meningkatnya pelayanan pemerintah / Tertaksananya pengembangan ekonomi	9 Dokumen	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemerintah an Umum	Setdakab	
		2 Peningkatan kapasitas Lembaga legislatif	Meningkatnya Pelayanan Lembaga DPRK Kepada Masyarakat / Adanya diklat tentang kelembagaan DPRK	2 kali	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten	Pemerintah an Umum	Sekretariat DPRK	
		3 Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah	Tertaksananya Program Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota / Lancarnya program antar Pemerintah Daerah	2 Kerja sama	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintah an Umum	Setdakab	
			Meningkatnya Pelayanan KDH/HWKDH / Adanya koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pemerintah	70 kegiatan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemerintah an Umum	Setdakab	
		4 Pengembangan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government, e-procurement dan e-development	Tertaksananya Program SKPK dengan Lebih Efisien / Adanya sistem informasi pada SKPK	9 SKPK	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintah an Umum	Setdakab / Ditshubkominfo	
	2 Penyediaan regulasi / produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal.	1 Penyempurnaan data base kelembagaan dan aparatur	Terpeliharanya Dokumen dan Arsip Daerah / Adanya Gudang Arsip	1 Unit	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pemerintah an Umum	Kantor Perpustakaan dan Kearsipan	
		2 Peningkatan peran Ulama dalam penyusunan rencana pembangunan	Adanya SDM para Ulama	3 Sosialisasi	Program Peningkatan Peran Ulama	Pemerintah an Umum	Sekretariat MPU	
	3 Peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian	1 Sinergi dan koordinasi perencanaan daerah	Tertaksananya Pembangunan di Daerah / Adanya kesempatan perencanaan pembangunan wilayah pantai barat	2 Dokumen	Program Kerjasama Pembangunan	Pemerintah an Umum	Setdakab / Bappeda	
		2 Pembentukan Forum Koordinasi Program Pembangunan lintas sektoral (Forum Koordinasi)	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Tersedianya diklat perencanaan	7 Diklat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda	
			Tertaksananya Koordinasi Lintas Sektoral dan Regional / Tertaksananya koordinasi antar daerah dan instansi	5 Pertemuan	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Pemerintah an Umum	Bappeda	
		3 Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif	Tertaksananya Perencanaan yang Baik / Tertaksananya berbagai kegiatan Pembangunan	17 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda	
				Tertaksananya Pembangunan di Daerah / Adanya renstra pembangunan ekonomi dan kebijakan ekonomi	2 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pemerintah an Umum	Bappeda
				Tertaksananya Pembangunan di Daerah / Adanya renstra pembangunan sosial budaya dan kebijakan budaya	1 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Pemerintah an Umum	Bappeda
	4 Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung	4 Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung	Tersedianya Dokumen Potensi Daerah / Tersedianya penyelenggaraan rencana pengembangan	1 Dokumen	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda	
		5 Pengembangan data dan statistik pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	5 Dokumen	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Pemerintah an Umum	Bappeda	
			Adanya Updating Data setiap Tahun	3 Dokumen	Program pengembangan data / Informasi Statistik Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda	
	6 Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	6 Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Tertaksananya Sistem Evaluasi Pembangunan SKPK / Adanya monitoring yang berkelanjutan	3 Dokumen	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Pemerintah an Umum	Bappeda / Setdakab	
		4 Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif	1 Intensifikasi pembinaan dalam rangka pengendalian internal	Tertaksananya Kegiatan Pelaporan	10 Kegiatan	Program Pembinaan dan Pelaporan	Pemerintah an Umum	Seluruh SKPK
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7 Laporan	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemerintah an Umum	Inspektorat / Setdakab	
	5 Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah	1 Pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja keuangan daerah / Adanya tenaga pengelolaan keuangan berbasis kinerja	Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Adanya tenaga pengelolaan keuangan	8 orang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah an Umum	DPKKK	
		2 Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai pertanggungjawaban penyelenggaraan / Adanya sosialisasi	Tertaksananya Sosialisasi dan bimbingan teknis pertanggungjawaban penyelenggaraan / Adanya sosialisasi	44 orang	Program Penyuluhan Pertanggung jawaban penyelenggaraan keuangan daerah	Pemerintah an Umum	DPKKK / Inspektorat	
			Adanya data base aset daerah	1 Dokumen	Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemerintah an Umum	DPKKK	
	6 Peningkatan pendapatan daerah	1 Peningkatan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah	Terpenuhinya target PAD	80 Milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah an Umum	Dispenda	
		2 Pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah	Tertaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Keuangan	500 orang	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Pemerintah an Umum	Dispenda	
	7 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1 Penyusunan analisis jabatan dan kebutuhan aparatur	Tersedianya Kebutuhan Kedinasan aparatur / Adanya analisis jabatan dan kebutuhan aparatur	2 Dokumen	Program Penataan Kebutuhan dan Kelengkapan Aparatur	Pemerintah an Umum	BKPP	
	8 Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	1 Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	300 orang	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Sosial	Disbudparpora	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				Kondisi Awal RPJMK (2012)	Kondisi s/d Tahun 2016					
2 Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik	1 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai	Meningkatnya Administrasi Kependudukan / Terciptanya sistem administrasi kependudukan online	9 Kecamatan		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pemerintah an Umum	Disdukcapil		
	2 Peningkatan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	1 Peningkatan cakupan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam kesiapalagaan pengendalian	Adanya sosialisasi tentang bencana dan penanggulangannya	9 Kecamatan		Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko	Pekerjaan Umum	BPBK		
	3 Peningkatan ketertarikan dan ketertiban masyarakat	1 Peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat (Linmas) 2 Peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan)	Terpeiharanya Kanrantribmas dan Tercegahnya Tindak Kriminal / Terpeliharanya kanrantribmas dan tercegahnya Terciptanya Ketertiban dan Keamanan dalam Masyarakat		40 Gampong 9 Kecamatan		Program Pemeliharaan Kanrantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemerintah an Umum Pemerintah an Umum	Kesbangpol / Satpol PP dan WH Kesbangpol / Satpol PP dan WH	
	4 Peningkatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga	Terlaksananya Program Keluarga Berencana		9 Kecamatan		Program Keluarga Berencana	Kesehatan	Dinkes / BPMPPKS	
3 Terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean)	1 Perwujudan kepastian hukum dan dipercayadalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Optimalisasi pengkajian produk hukum daerah dan data hukum	Tersedianya Qanun Daerah / Tercipta sistem regulasi pelaksanaan pemerintahan	35 Regulasi		Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Pemerintah an Umum	Setdakab		
		2 Penyebarluasan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tersedianya kepastian hukum aparatur	100 orang		Program Peningkatan Pelayanan Organisasi Kepada Anggota Yang Tercangkuat Masalah	Pemerintah an Umum	Setdakab		
		3 Optimalisasi penyelesaian persoalan hukum	Terselesaikannya Permasalahan Sengketa / Tersedianya pendamping sengketa aparatur	2 Kasus		Program Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pemerintah an Umum	Setdakab		
			Terselesaikannya Konflik Pertanahan / Terhindarnya konflik sosial kamasyarakat	2 Kasus		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Pemerintah an Umum	Setdakab		
		2 Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara	1 Pemantapan kebijakan pengawasan	Meningkatnya sistem Pengawasan di Daerah / Tersedianya perangkat pengawasan internal		43 SKPK		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemerintah an Umum	Inspektorat
			2 Peningkatan efektivitas sistem pengawasa	Terbentuknya Satgas SPIP		1 Satgas		Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemerintah an Umum	Inspektorat
	3 Peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan Kabupaten		Terlaksananya SPIP dan Laporan keuangan Daerah sesuai Peraturan dan Perundang - undangan		6 Instansi		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintah an Umum	Inspektorat	
	4 Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman		Terlaksananya SPIP dan Laporan keuangan Daerah sesuai Peraturan dan Perundang - undangan		5 Dokumen		Program Inventarisasi Hasil Pengawasan Secara Berkala	Pemerintah an Umum	Inspektorat	
	5 Pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik,		Tersedianya Auditor yang profesional / Tersedianya auditor yang profesional		4 orang		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemerintah an Umum	Inspektorat	
	6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik		Terlaksananya Pelatihan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Terbentuknya ULP / Terbentuknya ULP dan		135 orang		Program Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah an Umum	Setdakab	
	3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	1 Peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi dan mengadakan penyalahgunaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan		152 gampong		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah an Umum	BPMPPKS	
		2 Perbantuan pemerintah dalam membenahan tata kelola pemerintahan.	Meningkatnya Pembangunan di Gampong / Terselenggaranya pemerintahan desa secara efektif dan		1 Pelatihan		Program Pemerintahan Mukim dan Gampong	Pemerintah an Umum	Setdakab / BPMPPKS	
MISI 2 : Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam										
1 Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam	1 Peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat rawan sosial dan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama	1 Implementasi Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Terlaksananya Kehidupan Beragama / Terwujudnya a masyarakat yang berakwa dan beriman	152 Gampong		Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam		
		2 Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan	Terlaksananya Syiar Agama	17 Kegiatan		Program pengembangan dakwah dan peribadatan	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam		
			Tersedianya Wadah Pembelajaran / Meningkatnya Nilai-nilai Islami di Masyarakat	4 Kegiatan		Program Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam		
	2 Peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis Dayah/Pesantren	1 Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan serta kesadaran		Meningkatnya Pendidikan Agama Masyarakat / Terwujudnya wadah pembelajaran masyarakat	40 Kelompok		Program Pendidikan Agama Masyarakat	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam	
			3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terlantar	Terlaksananya Pembinaan Umat / Terwujudnya masyarakat yang islami	2 Sosialisasi		Program Pembinaan dan Kemashlahatan Umat	Syariat Islam	Sekretariat MPU	
				Terlaksananya Tempat Peribadatan / Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan	150 Mesjid		Program penataan sarana dan prasarana peribadatan	Syariat Islam	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah	
				Adanya Lembaga Sosial dan Keagamaan / Meningkatnya ketaqwaan masyarakat	40 Kelompok		Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam / BPPD	
2 Meningkatkan ketaqwaan dalam beragama	2 Peningkatan pemahaman tentang ajaran agama		Adanya Tempat Pengajian / Tersedianya sarana dan prasarana dayah	82 Dayah		Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Syariat Islam	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah		
			Terlaksananya Hari-hari Besar Islam	5 Kegiatan		Program memperingati/ merayakan Hari besar Islam	Pemerintah an Umum	Dinas Syariat Islam		
			Terlaksananya Penyuluhan Agama / Meningkatnya ketaqwaan masyarakat	320 Kitab		Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama	Pemerintah an Umum	Dinas Syariat Islam		
		3 Pengikutsertaan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional	Terciptanya SDM Bidang Agama / Meningkatnya Kegiatan keagamaan di Masyarakat	4%		Program Sumber Daya Keagamaan	Syariat Islam	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal RPJMK (2012)	Kondisi s/d Tahun 2016			
	3 Pemerataan Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan							
3 Meningkatnya kesadaran dan nilai-nilai keagamaan masyarakat sesuai dengan Syariah	1 Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah	1 Peningkatan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pelaksana Syariah Islam seperti 2 Penataan lembaga keuangan syariah	Terciptanya peran ulama dalam masyarakat / Meningkatnya SDM Ulama	22 orang		Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Ulama/Cendekiawan	Syariat Islam	Sekretariat MPU
		2 Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran						
	2 Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariah Islam	1						
	3 Penegakan syariah Islam secara kaffah	1						
MISI 3 : Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan								
1 Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	1 Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan, perkebunan dan kehutanan dan perikanan dan kelautan	1 Peningkatan produktivitas dan nilai tambah hasil produksi 2 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam	terlaksananya mutu SDM / Tersedianya kebun kelapa sawit dan karet rakyat dan rehabilitasi perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan tersedianya lahan pertanian / Meningkatnya produktivitas dan lahan budidaya pertanian/perkeb	2 Klp/Tahun 7 Ton/Ha		Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Kehutanan Kehutanan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan Distannak/ Dishutbun
	2 Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1 Peningkatan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama 2 Penumbuhan kewirausahaan dan enterpreneurship di masyarakat 3 Peningkatan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro	Monitoring pengelolaan dana pemerintah bagi Usaha mikro kecil menengah Meningkatnya SDM UKM Peningkatan peran UKM Terciptanya koperasi berprestasi dan pengurus koperasi yang handal / Terciptanya koperasi yang berprestasi	50 UKM 100 Orang 10 UKM 30 Koperasi		Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Program Penciptaan UMKM Yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperas	Pemerintah an Umum Pemerintah an Umum Pemerintah an Umum	Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM Disperindagkop dan UKM
2 Tersedianya lapangan kerja baru	1 Penciptaan tumbuhnya investasi, khususnya investasi padat karya agar tercipta kesempatan	1 Perluasan kesempatan kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru 2 Pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktivitas	Tersedianya lapangan pekerjaan / Terciptanya lapangan kerja yang layak tersedianya kwalitas kerja / Adanya peningkatan SDM melalui BLK Tersedianya tempat pelatihan tenaga kerja / Terlaksananya Pemagangan Tenaga Kerja tersedianya perundang undangan tentang kesejahteraan pekerja / Terlaksananya Kegiatan oleh lembaga	151 Orang 135 Orang 36 Orang 1 Kegiatan		Program peningkatan Kesempatan Kerja Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Pemerintah an Umum Pemerintah an Umum Pemerintah an Umum	Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans Dinsosnakertrans
	2 Pengembangan potensi industri kecil dan kerajinan rakyat	1 Optimalisasi sektor UMKM	Meningkatnya SDM UKM	100 Orang		Program Penciptaan UMKM Yang Kondusif	Pemerintah an Umum	Disperindagkop dan UKM
	3 Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan pelaku bisnis							
3 Menurunnya tingkat pengangguran	1 Pembukaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada pengembangan UMKM 2 Penyelenggaraan diklat dalam usaha meningkatkan kreatifitas masyarakat 3 Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariah Islam	1 Peningkatan angkatan kerja yang produktif dan terampil dalam berwirausaha 1 1	Tersedianya tempat pelatihan tenaga kerja / Terlaksananya Pemagangan Tenaga Kerja	36 Orang		Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas dan Pemagangan Tenaga Kerja	Pemerintah an Umum	Dinsosnakertrans
4 Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin	1 Pemberian modal usaha dan santunan kepada masyarakat miskin 2 Penyelenggaraan diklat keterampilan kerja 3 Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk miskin	1 Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 2 Peningkatan jumlah penduduk dalam cluster menengah 1 1	terciptanya UKM yang berkerakyatan / Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Operasional perekonomian LKM, Panglima Laot, HSNi dan pemupuan pesisir / Terciptanya	1 Dokumen 12.600 KK		Program Perencanaan Pembiayaan Ekonomi Kerakyatan Program Pembedayaan ekonomi masyarakat	Pemerintah an Umum Pemerintah an Umum	Bappeda Disperindagkop

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB		
				Kondisi Awal RPJMK (2012)	Kondisi s/d Tahun 2016					
5 Meningkatnya pendapatan masyarakat	1 Pemberdayaan sektor usaha masyarakat yang berbasis industri rumah tangga	1 Penciptaan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Operasional perekonomian LKM, Panglima Laot, HSNi dan perempuan pebisnis / Terciptanya		12.600 KK	Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pemerintah an Umum	Disperindagkop		
	2 Pengelolaan komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi									
MISI 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)										
1 Meningkatnya kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1 Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas	1 Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dengan mengefektifkan penyelenggaraan diklat	Terwujudnya SDM Aparatur Pemerintah		20 Orang	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPP		
	2 Pemberian Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi aparatur daerah	1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur		30 Orang	Program Pendidikan Kedinasan	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPP		
2 Tersedianya prasarana pendukung peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	1 Peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan SKPK yang masyangkut	Tersusunnya analisis jabatan dan kebutuhan aparatur		2 Dokumen	Program Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPP		
	3 Meningkatnya kinerja SDM aparatur pemerintah	1 Penerapan reward dan punishment bagi aparatur	1 Peningkatan kesejahteraan pegawai	Tertaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPK		4000 Pegawai	Program Belanja Dinas dan Atributnya	Pemerintah an Umum	Seluruh SKPK	
Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat			Terwujudnya aparatur yang berkualitas		100 Orang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Aparatur	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPP		
4 Meningkatnya wawasan pengetahuan masyarakat	1 Pengelolaan manajemen kepegawaian yang pada kebutuhan pelayanan prima	1 Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel	Terciptanya Pelayanan ADM Kepegawaian		30 Orang	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pemerintah an Umum	BKPP		
MISI 5 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan										
1 Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan	1 Peningkatan mutu dan pemerataan akses kesempatan belajar pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan	1 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Adanya Pendidikan bagi anak-anak		500 Orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan		
		2 Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan	Terwujudnya tenaga pendidikan yang berkualitas		50 Guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan		
		3 Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah	Adanya minat baca bagi siswa		200 Siswa	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan	Pendidikan	Dinas Pendidikan		
	2 Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas	1 Peningkatan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	Adanya Standarisasi tentang pelayanan Kesehatan			3 Unit	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP	
		2 Pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan	Adanya Oanun tentang Pengelolaan pelayanan Rumah Sakit			5 Dokumen	Program regulasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUTP	
		3 Peningkatan sumber daya manusia kesehatan	Terciptanya standar mutu pelayanan di RSUD			150 Orang	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Kesehatan	RSUTP	
	2 Terpenuhinya kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan	1 Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal	1							
			2 Penurunan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada	1 Peningkatan pelayanan kesehatan terutama Ibu dan Anak	Adanya mutu sumber daya kesehatan yang terlatih		100 Orang	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP
			2 Peningkatan Keluarga Sadar Gizi	Tertaksananya Kegiatan penanganan buruk			30 Kasus	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	1 Penataan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta mewujudkan	1 Pengembangan sistem kesehatan	Adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk pelayanan kesehatan			7 Kerjasama	Program Kemiraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP	
		2 Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular	Meningkatnya antisipasi masyarakat dalam penanggulangan naskoba, PMS dan HIV/AIDS			15 Kegiatan	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP	
		3 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Adanya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar Nasional			1 Dokumen	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kesehatan	RSUTP	
		4 Pengembangan pelayanan puskesmas 24 jam	Tersedianya Fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup di Puskesmas			9 Puskesmas	Program Peningkatan Layanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
3 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	1 Penataan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta mewujudkan	1 Peningkatan kualitas siswa dalam persaingan global	Tercapainya standar mutu pendidikan bagi masyarakat			5 Dokumen	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		2 Penerapan penggunaan sistim teknologi dalam proses belajar mengajar	Tercapainya standar mutu pendidikan bagi masyarakat			5 Dokumen	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		3 Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak dalam kegiatan pembelajaran	Tercapainya standarisasi pendidikan			10 Dokumen	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB	
				Kondisi Awal RPJMK (2012)	Kondisi s/d Tahun 2016				
	2 Peningkatan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK	1							
4 Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat	1 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Terciptanya standar mutu pelayanan di RSUD		5 Dokumen	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Kesehatan	RSUTP	
		2 Peningkatan kecukupan obat dan perbekalan kesehatan	Adanya ketersediaan obat di RS dan Puskesmas		10 Kesehatan	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Kesehatan	Puskesmas / RSUTP	
	2 Peningkatan upaya preventif dan promosi kesehatan	1 Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju Desa Siaga Aktif dan keluarga	Terciptanya sosialisasi desa siaga		20 Desa	Program Desa Siaga	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
MISI 6 : Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan									
1 Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang berdaya saing secara optimal	1 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian	1 Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis	tersedianya lahan budidaya ikan		20 Kegiatan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2 Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang	1						
2 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	1 Peningkatan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan.	1 Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya	tersedianya lahan budidaya ikan		17 Kegiatan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan	
		2 Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan perikanan.	Terciptanya produktivitas pertanian/perkebunan		20 Kegiatan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian / Kehutanan	Distanak / Dishutbun	
3 Mampu bersaing dengan daerah lain	1 Pengembangan potensi ekonomi daerah	1 Pengembangan industri kreatif	Adanya Industri Kecil dan Menengah		50 UKM	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pemerintah an Umum	Disperindagkop dan UKM	
		2 Peningkatan revitalisasi pasar tradisional	Terselenggaranya modal usaha bag pedagang kaki lima dan asongan		20 Kegiatan	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pemerintah an Umum	Disperindagkop dan UKM	
		3 Peningkatanfasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang /usaha informal	Adanya SDM yang handal		150 Orang	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pemerintah an Umum	Disperindagkop dan UKM	
		2 Pengembangan pariwisata berbasis budaya	1 Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Meningkatnya Pendapatan daerah dari sektor wisata		30%	Program pengembangan gerakan sadar wisata	Program Pengembangan Pariwisata	Parwisata
		2 Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata	Terwujudnya usaha kreatif pariwisata		30 Unit	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Disbudparpora	
		3 Pengembangan gerakan sadar wisata	Meningkatnya Pendapatan daerah dari sektor wisata		30%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Disbudparpora	
		4 Pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya wadah seni dan budaya		10 Sanggar	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disbudparpora	
			Terpeliharanya adat istiadat		4 Adat	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disbudparpora	
4 Terpeliharanya kualitas lingkungan	1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya lingkungan yang bebas dari polusi		40%	Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	PU / Penataan	Dinas PU / BLHKP	
		2 Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana umum		50 Sarana Prasarana	Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum	PU	Dinas PU	
		3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Adanya penghijauan di wilayah aliran sungai dan sumber air		17 Kegiatan	Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem	PU / Penataan	Dinas PU / BLHKP	
	2 Peningkatan kinerja pengelolaan Persampahan	1 Peningkatan penanganan persampahan	Terwujudnya pengolahan persampahan yang ramah lingkungan		15 Kegiatan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PU / Penataan	Dinas PU / BLHKP	
5 Meningkatnya pendapatan daerah	1 Penuntasan Oanun PAD	1							
		2 Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	1 Optimalisasi jenis- jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.	Terpenuhinya target PAD		80 Milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah an Umum	Dispenda
		3 Pembentukan BUMD sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah	1 Pendayagunaan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat	Adanya data base aset daerah		3 Dokumen	Program Pengelolaan Aset Daerah	Pemerintah an Umum	DPKDK
		2 Pembinaan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan	Tercapainya peningkatan PAD		2 BUMD	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	Pemerintah an Umum	Setdakab	
MISI 7 : Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif									
1 Berkembangnya kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di daerah	1 Penyusunan master plan kawasan strategis	1 Penetapan wilayah strategis berdasarkan pada struktur ruang untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah.	terprogramnya kawasan strategis dan cepat tumbuh		3 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemerintah an Umum	Bappeda	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi Awal RPJMK (2012)	Kondisi s/d Tahun 2016			
		2 Pengembangan wilayah pegunungan dan pesisir	Tersedianya DED Kota Kecamatan		1 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Penataan Ruang	Bappeda / PU
		3 Sosialisasi RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya RTRW Abdy		1 Doumen	Program Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah	Penataan Ruang	Bappeda
	2 Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan	Tersedianya perumahan murah masyarakat		250 Unit	Program pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dinas PU
2 Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi (darat,	1 Pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian	1 Peningkatan jaringan transportasi	Terbangunnya akses jalan dan jembatan baik / Adanya akses jalan dan jembatan untuk daerah terisolir		3 Kegiatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		2 Peningkatan infrastruktur dasar dalam pelayanan publik	Terwujudnya pembagunan sarana dan prasarana kabinamarhaan		3 Unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamarhaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		3 Pematapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang,	Terpeliharanya fasilitas perhungan darat / Terciptanya rasa aman dijalan raya		20 Rambu	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pekerjaan Umum	Dishubkominfo
	2 Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 1. Penyediaan Energi Listrik di Daerah Terpencil	Adanya listrik melalui sumber tenaga alternatif dipedesaan		20 KW	Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan SDM	Distamben
	3 Kerjasama pembangunan infrastruktur dasar dengan pihak swasta	1						
	4 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Terbangunnya jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya		20 D.I	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	PU / Penataan Ruang	Dinas PU
3 Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan (growth center) ekonomi	1 Penyusunan master plan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1 Pengembangan mutu dan Produksi Pertanian di kawasan baru	Meningkatnya kemandirian Petani dalam Operasional dan Pemeliharaan Irigasi		9 Kecamatan	Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif	PU / Penataan Ruang	Uinas PU
	2 Pembangunan sarana dan prasarana kawasan cepat tumbuh	1 Pengembangan kawasan permukiman di wilayah yang memiliki potensi keunggulan daerah	Tersedianya Drainase yang baik dan terintegrasi		9 Kecamatan	Program Pengembangan Sanitasi Permukiman	Perumahan Rakyat	Dinas PU
4 Meningkatnya jumlah investor dan investasi di daerah	1 Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	1 Peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi	Terciptanya promosi dan kerjasama investasi		3 Dokumen	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Ekonomi	KP2T
		2 Penciptaan ketenteraman dan ketertiban yang kondusif	Terciptanya Ketertiban dan Keamanan dalam Masyarakat		9 Kecamatan	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemerintah an Umum	Kesbangpol / Satpol PP dan WH
		3 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mendukung investasi	Terwujudnya investasi yang berdaya saing		2 Kegiatan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Ekonomi	Setdakab
	2 Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan	Tersedianya bahanbaku mineral dan batu bara		3 Kegiatan	Program Eksplorasi Mineral, Batuan dan Batu Bara	Energi dan SDM	Distamben
	3 Pengembangan pengolahan hasil-hasil komoditi unggulan daerah	1 Peningkatan nilai tambah dari komoditi unggulan daerah	Adanya Peningkatan PAD Daerah		3 Kegiatan	Program Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Energi dan SDM	Distamben

Tabel 7.1.a
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB	
				Kondisi 2016	Kondisi 2017				
MISI 1 : Melakukan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean government) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)									
1 Perbaikan tatakelola pemerintahan yang efektif dan efisien	1 Peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Kabupaten	1 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	Meningkatnya pelayanan terhadap anggota organisasi / Adanya PNS yang berprestasi	67 orang	80 orang	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Anggota Organisasi	Pemerintah an Umum	Sekretariat Korpri	
			Meningkatnya pelayanan pemerintah / Terlaksananya pengembangan ekonomi	9 Dokumen	11 Dokumen	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Pemerintah an Umum	Setdakab	
		2 Peningkatan kapasitas Lembaga legislatif	Meningkatnya Pelayanan Lembaga DPRK Kepada Masyarakat / Adanya diklat terintegrasi kelembagaan DPRK	2 kali	3 kali	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten	Pemerintah an Umum	Sekretariat OPRK	
		3 Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah dan pemerintah daerah	Terlaksananya Program Terintegrasi Antar Kabupaten/Kota / Lancarnya program antar Pemerintah Daerah	2 Kerja sama	3 Kerja sama	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Pemerintah an Umum	Setdakab	
			Meningkatnya Pelayanan KDHWKDH / Adanya koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pemerintah	70 kegiatan	75 kegiatan	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Pemerintah an Umum	Setdakab	
		4 Pengembangan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-government, e-procurement dan e-development	Terlaksananya Program SKPK dengan Lebih Efisien / Adanya sistem informasi pada SKPK	9 SKPK	11 SKPK	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemerintah an Umum	Setdakab / Diskominfo	
		2 Penyediaan regulasi / produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal.	1 Penyempurnaan data base kelembagaan dan aparatur	Terpeliharanya Dokumen dan Arsip Daerah / Adanya Gudang Arsip	1 Unit	2 Unit	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pemerintah an Umum	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			2 Peningkatan peran Ulama dalam penyusunan rencana pembangunan	Adanya SDM para Ulama	3 Sosialisasi	4 Sosialisasi	Program Peningkatan Peran Ulama	Pemerintah an Umum	Sekretariat MPU
		3 Peningkatan kualitas dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian	1 Sinergi dan koordinasi perencanaan daerah	Terlaksananya Pembangunan di Daerah / Adanya kesepatan perencanaan pembangunan wilayah pantai barat	2 Dokumen	3 Dokumen	Program Kerjasama Pembangunan	Pemerintah an Umum	Setdakab / Bappeda
			2 Pembentukan Forum Koordinasi Program Pembangunan lintas sektoral (Forum Koordinasi	Meningkatnya Pelayanan Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah / Tersedianya diklat perencanaan	7 Diklat	7 Diklat	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda
	3 Peningkatan konsistensi perencanaan pembangunan yang partisipatif	Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektoral dan Regional / Terlaksananya koordinasi antar daerah dan instansi	5 Pertemuan	5 Pertemuan	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kabupaten	Pemerintah an Umum	Bappeda		
		Terlaksananya Perencanaan yang Baik / Terlaksananya berbagai kegiatan Pembangunan	17 Dokumen	18 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda		
		Terlaksananya Pembangunan di Daerah / Adanya renstra pembangunan ekonomi dan kebijakan ekonomi	2 Dokumen	3 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Pemerintah an Umum	Bappeda		
		Terlaksananya Pembangunan di Daerah / Adanya renstra pembangunan sosial budaya dan kebijakan budaya	1 Dokumen	2 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Pemerintah an Umum	Bappeda		
	4 Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka mendukung	Tersedianya Dokumen Potensi Daerah / Tersedianya penyelenggaraan rencana pengembangan	1 Dokumen	2 Dokumen	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda		
	5 Pengembangan data dan statistik pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi	5 Dokumen	6 Dokumen	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Pemerintah an Umum	Bappeda		
		Adanya Updating Data setiap Tahun	3 Dokumen	4 Dokumen	Program pengembangan data / informasi / Statistik Daerah	Pemerintah an Umum	Bappeda		
	6 Efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan	Terlaksananya Sistem Evaluasi Pembangunan SKPK / Adanya monitoring yang berkelanjutan	3 Dokumen	4 Dokumen	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Pemerintah an Umum	Bappeda / Setdakab		
4 Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif		1 Intensifikasi pembinaan dalam rangka pengendalian internal	Terlaksananya Kegiatan Pelaporan	10 Kegiatan	11 Kegiatan	Program Pembinaan dan Pelaporan	Pemerintah an Umum	Seluruh SKPK	
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	7 Laporan	9 Laporan	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemerintah an Umum	Inspektorat / Setdakab	
5 Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja daerah		1 Pelaksanaan perencanaan penganggaran belanja berbasis kinerja	Terciptanya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah / Adanya tenaga pengelola keuangan	8 orang	11 orang	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah an Umum	DPIKKK	
		2 Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran	Terlaksananya Sosialisasi dan bimbingan teknis pertanggungjawaban penyelenggaraan / Adanya sosialisasi	44 orang	47 orang	Program Penyuluhan Pertanggungjawaban penyelenggaraan keuangan daerah	Pemerintah an Umum	Badan Keuangan / Inspektorat	
			Adanya data base aset daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	Program Pengelolaan Asset Daerah	Pemerintah an Umum	Badan Keuangan	
6 Peningkatan pendapatan daerah		1 Peningkatan kualitas kebijakan pengembangan pendapatan daerah	Terpenuhinya target PAD	80 Milyar	90 Milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah an Umum	Badan Keuangan	
		2 Pelaksanaan intensifikasi pendapatan asli daerah	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Keuangan	500 orang	520 orang	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Pemerintah an Umum	Badan Keuangan	
7 Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah	1 Penyusunan analisis jabatan dan kebutuhan aparatur	Tersedianya Kebutuhan Kedinasan aparatur / Adanya analisis jabatan dan kebutuhan aparatur	2 Dokumen	3 Dokumen	Program Penataan Kebutuhan dan Kelainan Aparatur	Pemerintah an Umum	BKPSDM		
8 Peningkatan kapasitas pemuda, prestasi dan sarana olahraga	1 Peningkatan aktifitas dan partisipasi pemuda dalam pembangunan dan pembinaan	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	300 orang	320 orang	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Sosial	Disbudpora		

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi 2016	Kondisi 2017			
2 Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat	1 Peningkatan kualitas pelayanan administrasi publik	1 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai	Meningkatnya Administrasi Kependudukan / Terciptanya sistem administrasi kependudukan online	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pemerintah an Umum	Disudkapi
	2 Peningkatan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran	1 Peningkatan cakupan pelayanan dan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan pengendalian	Adanya sosialisasi tentang bencana dan penanggulangannya	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko	Pekerjaan Umum	BPKB
	3 Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	1 Peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat (Linmas)	Terpeliharanya Kantrantibmas dan Tercegahnya Tindak Kriminal / Terpeliharanya kantrantibmas dan tercegahnya	40 Gampong	50 Gampong	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Pemerintah an Umum	Kesbangpol / Satpol PP dan WH
	2 Peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	2 Peningkatan penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Terciptanya Ketertiban dan Keamanan dalam Masyarakat	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Kemanan	Pemerintah an Umum	Kesbangpol / Satpol PP dan WH
4 Peningkatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	1 Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga	1 Peningkatan Pelayanan Komunikasi Informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga	Terlaksananya Program Keluarga Berencana	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Keluarga Berencana	Kesehatan	Dinkes / DPMP4
3 Terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), bersih dan berwibawa (clean)	1 Perwujudan kepastian hukum dan dipercayadalam penyelenggaraan pemerintahan	1 Optimalisasi pengkajian produk hukum daerah dan data hukum	Tersedianya Qanun Daerah / Tercipta sistem regulasi pelaksanaan pemerintahan	35 Regulasi	37 Regulasi	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Pemerintah an Umum	Setdakab
		2 Penyebarluasan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum daerah	Tersedianya kepastian hukum aparatur	100 orang	120 orang	Program Peningkatan Pelayanan Organisasi Kepada Anggota Yang Tersangkut Masalah	Pemerintah an Umum	Setdakab
		3 Optimalisasi penyelesaian persoalan hukum	Terselesainya Permasafahan Sengketa / Tersedianya pendamping sengketa aparatur	2 Kasus	3 Kasus	Program Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pemerintah an Umum	Setdakab
	2 Pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparatur negara	1 Pemantapan kebijakan pengawasan	Meningkatnya sistem Pengawasan di Daerah / Tersedianya perangkat pengawasan internal	43 SKPK	43 SKPK	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemerintah an Umum	Inspektorat
		2 Peningkatan efektivitas sistem pengawasan	Terbentuknya Satgas SPIP	1 Satgas	2 Satgas	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pemerintah an Umum	Inspektorat
		3 Peningkatan kuantitas dan kualitas internal auditor dan pengelola keuangan Kabupaten	Terlaksananya SPIP dan Laporan keuangan Daerah sesuai Peraturan dan Perundang - undangan	6 Instansi	6 Instansi	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Pemerintah an Umum	Inspektorat
3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	4 Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah melalui penyusunan pedoman	Terlaksananya SPIP dan Laporan keuangan Daerah sesuai Peraturan dan Perundang - undangan	5 Dokumen	6 Dokumen	Program Inventarisasi Hasil Pengawasan Secara Berkala	Pemerintah an Umum	Inspektorat	
	5 Pengembangan kebijakan dan penerapan disiplin pegawai, netralitas PNS, penerapan kode etik.	Tersedianya Auditor yang profesional / Tersedianya auditor yang profesional	4 orang	6 orang	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Pemerintah an Umum	Inspektorat	
	6 Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik	Terlaksananya Pelatihan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Terbentuknya ULP / Terbentuknya ULP dan	139 orang	139 orang	Program Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemerintah an Umum	Setdakab	
3 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan	1 Peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi dan mengadakan penyalahgunaan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	152 gampong	152 gampong	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Pemerintah an Umum	DPMP4	
	2 Perbantuan pemerintah dalam membenah tata kelola pemerintahan.	Meningkatnya Pembangunan di Gampong / Terselenggaranya pemerintahan desa secara efektif dan	1 Pelatihan	2 Pelatihan	Program Pemerintahan Mukim dan Gampong	Pemerintah an Umum	Setdakab / DPMP4	
MISI 2 : Menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam								
1 Terciptanya sosial budaya masyarakat berdasarkan Syariat Islam	1 Peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat rawan sosial dan meningkatkan kerukunan kehidupan beragama	1 Implementasi Syariat Islam dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan budaya	Terlaksananya Kehidupan Beragama / Terwujudnya a masyarakat yang bertakwa dan beriman	152 Gampong	152 Gampong	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam
		2 Peningkatan pemahaman nilai-nilai agama dan kebangsaan	Terlaksananya Syiar Agama	17 Kegiatan	19 Kegiatan	Program pengembangan dakwah dan peribadatan	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam
			Tersedianya Wadah Pembelajaran / Meningkatnya Nilai-nilai Islami di Masyarakat	4 Kegiatan	6 Kegiatan	Program Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam
	2 Peningkatan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat berbasis Dayah/Pesantren	1 Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha di Dayah/Pesantren	Meningkatnya Pendidikan Agama Masyarakat / Terwujudnya wadah pembelajaran masyarakat	40 Kelompok	45 Kelompok	Program Pendidikan Agama Masyarakat	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam
			3 Peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin dan anak terantir	Terlaksananya Pembinaan Umat / Terwujudnya masyarakat yang Islami	2 Sosialisasi	4 Sosialisasi	Program Pembinaan dan Kemaslahatan Umat	Syariat Islam
2 Meningkatnya ketaqwaan dalam beragama	1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana lembaga keagamaan serta kesadaran	1 Peningkatan swadaya masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha di Dayah/Pesantren	Terlaksananya Tempat Peribadatan / Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan	150 Mesjid	1670 Mesjid	Program penataan sarana dan prasarana peribadatan	Syariat Islam	Dinas Pendidikan Dayah
		1 Peningkatan kebijakan pemerintah terhadap pembangunan sarana dan prasarana lembaga	Adanya Lembaga Sosial dan Keagamaan / Meningkatnya ketaqwaan masyarakat	40 Kelompok	43 Kelompok	Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan	Syariat Islam	Dinas Syariat Islam / DPD
			Adanya Tempat Pengajian / Tersedianya sarana dan prasarana dayah	82 Dayah	85 Dayah	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Syariat Islam	Dinas Pendidikan Dayah
	2 Peningkatan pemahaman tentang ajaran agama	1 Penyelenggaraan peringatan hari-hari besar keagamaan	Terlaksananya Hari-hari Besar Islam	5 Kegiatan	7 Kegiatan	Program memperingati/ merayakan Hari besar Islam	Pemerintah an Umum	Dinas Syariat Islam
		2 Penataan Penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji	Terlaksananya Penyuluhan Agama / Meningkatnya ketaqwaan masyarakat	320 Kitab	330 Kitab	Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama	Pemerintah an Umum	Dinas Syariat Islam
		3 Pengikutsertaan kafilah ketingkat Provinsi dan Nasional	Terciptanya SDM Bidang Agama / Meningkatnya Kegiatan keagamaan di Masyarakat	4%	7%	Program Sumber Daya Keagamaan	Syariat Islam	Dinas Pendidikan Dayah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi 2016	Kondisi 2017			
	3 Pemerataan Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan							
3 Meningkatnya kesadaran dan nilai-nilai keagamaan masyarakat sesuai dengan Syariat	1 Peningkatan kesadaran masyarakat dan pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah	1 Peningkatan kapasitas dan peran lembaga-lembaga pelaksana Syariat Islam seperti 2 Penataan lembaga keuangan syariah	Terciptanya peran ulama dalam masyarakat / Meningkatnya SDM Ulama	22 orang	29 orang	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Ulama/Cendekiawan	Syariat Islam	Sekretariat MPU
		2 Pelaksanaan pengendalian belanja sesuai dengan dokumen anggaran						
	2 Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariat Islam	1						
	3 Penegakan syariat Islam secara kaffah	1						
MISI 3 : Memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan								
1 Meningkatnya produktivitas perekonomian rakyat	1 Peningkatan produktivitas sektor pertanian dan peternakan, perkebunan dan kehutanan dan penkunan dan kelautan	1 Peningkatan produktifitas dan nilai lamban hasil produksi 2 Peningkatan pengelolaan sumber daya alam	terlaksananya mutu SDM / Tersedianya kebun kelapa sawit dan karet rakyat dan rehabilitasi perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan tersedianya lahan pertanian / Meningkatnya produktifitas dan lahan budidaya pertanian/perkeb	2 Klp/Tahun	3 Klp/Tahun	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan/peternakan	Kehutanan	Dinas Pertanian dan Pangan
			Monitoring pengelolaan dana pemerintah bagi Usaha mikro kecil menengah	7 Tor/Ha	8 Tor/Ha	Program Peningkatan Kelahanan Pangan	Kehutanan	Dinas Pertanian dan Pangan
	2 Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan	1 Peningkatan kualitas sumber daya pelaku UMKM melalui fasilitasi permodalan, promosi, kerjasama	Meningkatnya SDM UKM	50 UKM	55 UKM	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
		2 Penumbuhan kewirausahaan dan entrepreneurship di masyarakat	Peningkatan peran UKM	100 Orang	120 Orang	Program Penciptaan UMKM Yang Kondusif	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
		3 Peningkatan pembinaan koperasi dan lembaga keuangan mikro	Terciptanya koperasi berprestasi dan pengurus koperasi yang handal / Terciptanya koperasi yang berprestasi	10 UKM	12 UKM	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
				30 Koperasi	33 Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperas	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
2 Tersedianya lapangan kerja baru	1 Penciptaan tumbuhnya investasi, khususnya investasi padat karya agar tercipta kesempatan	1 Perluasan kesempatan kerja dan Penciptaan lapangan kerja baru	Tersedianya lapangan pekerjaan / Terciptanya lapangan kerja yang layak	151 Orang	161 Orang	Program peningkatan Kesempatan Kerja	Pemerintah an Umum	Disnakertrans
			tersedianya kwallitas kerja / Adanya peningkatan SDM melalui BLK	135 Orang	145 Orang	Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Pemerintah an Umum	Disnakertrans
			Tersedianya tempat pelatihan tenaga kerja / Terlaksananya Pemagangan Tenaga Kerja	36 Orang	46 Orang	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Pemagangan Tenaga Kerja	Pemerintah an Umum	Disnakertrans
		2 Pembinaan iklim bagi perluasan lapangan kerja, peningkatan efisiensi dan produktifitas	tersedianya perundang undangan tentang kesejahteraan pekerja / Terlaksananya Kegiatan oleh lembaga	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenaga kerjaan	Pemerintah an Umum	Disnakertrans
	2 Pengembangan potensi industri kecil dan kerajinan rakyat	1 Optimalisasi sektor UMKM	Meningkatnya SDM UKM	100 Orang	120 Orang	Program Penciptaan UMKM Yang Kondusif	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
	3 Fasilitasi penumbuhan wirausaha baru dan wirausaha yang berdaya saing dan pengembangan inkubator bisnis KUMKM yang dilaksanakan bersama perguruan tinggi dan petaku bisnis							
3 Menurunnya tingkat pengangguran	1 Pembukaan lapangan kerja baru yang berorientasi pada pengembangan UMKM	1 Peningkatan angkatan kerja yang produktif dan terampil dalam berwirausaha	Tersedianya tempat pelatihan tenaga kerja / Terlaksananya Pemagangan Tenaga Kerja	36 Orang	46 Orang	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Pemagangan Tenaga Kerja	Pemerintah an Umum	Disnakertrans
	2 Penyelenggaraan diklat dalam usaha meningkatkan kredifitas masyarakat	1						
	3 Penyusunan qanun penegakkan nilai-nilai syariat Islam	1						
4 Menurunnya jumlah dan persentase penduduk miskin	1 Pemberian modal usaha dan santunan kepada masyarakat miskin	1 Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 2 Peningkatan jumlah penduduk dalam cluster menengah	terciptanya UKM yang berkerakyatan / Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Meningkatnya Operasional perekonomian LKM, Panglima Laot, HSNi dan perempuan pesisir / Terciptanya	1 Dokumen	2 Dokumen	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Pemerintah an Umum	Bappeda
				12.600 KK	12.700 KK	Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
	2 Penyelenggaraan diklat keterampilan kerja	1						
	3 Pemberian beasiswa pendidikan bagi penduduk miskin	1						

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB	
				Kondisi 2016	Kondisi 2017				
5 Meningkatkan pendapatan masyarakat	1 Pemberdayaan sektor usaha masyarakat yang berbasis industri rumah tangga	1 Penciptaan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Operasional perekonomian LKM, Panglima Laot, HSNi dan perempuan pesisir / Terciptanya	12.600 KK	12.700 KK	Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Pemerintah an Umum	Diskoperindag	
	2 Pengelolaan komoditas unggulan daerah yang bernilai ekonomi								
MISI 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)									
1 Meningkatkan kualitas dan keahlian SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1 Penyelenggaraan Diklat aparatur dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur yang terencana sesuai dengan prioritas	1 Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa dengan mengefektifkan penyelenggaraan diklat	Terwujudnya SDM Aparatur Pemerintah	20 Orang	30 Orang	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPSDM	
	2 Penyerahan Beasiswa S1, S2 dan S3 bagi aparatur daerah	1	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	30 Orang	35 Orang	Program Pendidikan Kedinasan	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPSDM	
2 Tersedianya prasarana pendukung peningkatan kinerja SDM aparatur pemerintah dan masyarakat	1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	1 Peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan SKPK yang menyelenggarakan	Tersusunnya analisis jabatan dan kebutuhan aparatur	2 Dokumen	3 Dokumen	Program Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPSDM	
	3 Penerapan reward dan punishment bagi aparatur	1 Peningkatan kesejahteraan pegawai	Terfaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran SKPK	4000 Pegawai	4030 Pegawai	Program Belanja Dinas dan Atributnya	Pemerintah an Umum	Sekuruh SKPK	
3 Meningkatkan kinerja SDM aparatur pemerintah		Penataan SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Terwujudnya aparatur yang berkualitas	100 Orang	120 Orang	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Aparatur	Pemerintah an Umum	Setdakab/ BKPSDM	
	4 Meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat	1 Pengelolaan manajemen kepegawaian yang pada kebutuhan pelayanan prima	1 Peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat, tepat dan akuntabel	Terciptanya Pelayanan ADM Kepegawaian	30 Orang	40 Orang	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pemerintah an Umum	BKPSDM
MISI 5 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan									
1 Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan	1 Peningkatan mutu dan pemerataan akses kesempatan belajar (Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan)	1 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah	Adanya Pendidikan bagi anak-anak	500 Orang	520 Orang	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		2 Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Guru serta Tenaga Kependidikan	Terwujudnya tenaga pendidikan yang berkualitas	80 Guru	80 Guru	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		3 Peningkatan kemampuan dan budaya baca masyarakat khususnya pada usia sekolah	Adanya minat baca bagi siswa	200 Siswa	230 Siswa	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
	2 Peningkatan kuantitas, kualitas dan fungsi sarana prasarana pelayanan kesehatan di Puskesmas	1 Peningkatan kualitas ketersediaan sarana prasarana kesehatan dan kefarmasian	Adanya Standarisasi tentang pelayanan Kesehatan	3 Unit	4 Unit	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP	
		2 Pembinaan dan pelaksanaan regulasi pelayanan kesehatan	Adanya Qanun tentang Pengelolaan pelayanan Rumah Sakit	5 Dokumen	6 Dokumen	Program regulasi pelayanan kesehatan	Kesehatan	RSUTP	
		3 Peningkatan sumber daya manusia kesehatan	Terciptanya standar mutu pelayanan di RSUD	150 Orang	160 Orang	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Kesehatan	RSUTP	
2 Terpenuhiya kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan	1 Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal	1							
		2 Penurunan angka kematian ibu dan anak, membiasakan pemeriksaan kehamilan pada	1 Peningkatan pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak	Adanya mutu sumber daya kesehatan yang terlatih	100 Orang	120 Orang	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP
		2 Peningkatan Keluarga Sadar Gizi	Terfaksananya Kegiatan penanganan buruk	30 Kasus	33 Kasus	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	3 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	1 Pengembangan sistem kesehatan	Adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk pelayanan kesehatan	7 Kerjasama	8 Kerjasama	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP	
		2 Peningkatan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular serta tidak menular	Meningkatnya antisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba, PMS dan HIV/AIDS	15 Kegiatan	17 Kegiatan	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kesehatan	Dinas Kesehatan / RSUTP	
		3 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Adanya sarana dan prasarana Rumah Sakit yang sesuai standar Nasional	1 Dokumen	2 Dokumen	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kesehatan	RSUTP	
		4 Pengembangan pelayanan puskesmas 24 jam	Tersedianya Fasilitas dan tenaga kesehatan yang cukup di Puskesmas	9 Puskesmas	9 Puskesmas	Program Peningkatan Layanan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan	
3 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1 Penataan Rintisan Sekolah Beraraf Internasional (RSBI) SMP, SMA, SMK serta mewujudkan	1 Peningkatan kualitas siswa dalam persaingan global	Tercapainya standar mutu pendidikan bagi masyarakat	5 Dokumen	6 Dokumen	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		2 Penerapan penggunaan sistim teknologi dalam proses belajar mengajar	Tercapainya standar mutu pendidikan bagi masyarakat	5 Dokumen	7 Dokumen	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
		3 Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak dalam kegiatan pembelajaran	Tercapainya standarisasi pendidikan	10 Dokumen	12 Dokumen	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi 2016	Kondisi 2017			
	2 Peningkatan jumlah daya tampung SMP/MTs dan SMA/SMK	1						
4 Meningkatnya kualitas pelayanan dan derajat kesehatan masyarakat	1 Peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit	1 Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	Terciptanya standar mutu pelayanan di RSUD	5 Dokumen	7 Dokumen	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Kesehatan	RSUTP
		2 Peningkatan kecukupan obat dan persediaan kesehatan	Adanya ketersediaan obat di RS dan Puskesmas	10 Unit Kesehatan	10 Unit Kesehatan	Program Obat dan Persediaan Kesehatan	Kesehatan	Puskesmas / RSUTP
	2 Peningkatan upaya preventif dan promosi kesehatan	1 Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kesehatan menuju Desa Siaga Aktif dan keluarga	Terciptanya sosialisasi desa siaga	20 Desa	22 Desa	Program Desa Siaga	Kesehatan	Dinas Kesehatan
MISI 6 : Menggali dan mengembangkan potensi daerah secara optimal yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan								
1 Menggali dan mengembangkan potensi daerah yang berdaya saing secara optimal	1 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk pertanian	1 Peningkatan pengelolaan potensi pertanian dan perikanan seoptimal mungkin dengan prinsip-prinsip agribisnis	tersedianya lahan budidaya ikan	20 Kegiatan	22 Kegiatan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan
	2 Fasilitas Pelaksanaan inovasi dan teknologi pertanian, perkebunan, dan peternakan yang	1						
2 Meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah	1 Peningkatan nilai tambah, sarana serta pengolahan hasil pertanian, perkebunan.	1 Peningkatan produktivitas lahan budidaya pertanian dan perikanan melalui upaya	tersedianya lahan budidaya ikan	17 Kegiatan	19 Kegiatan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertanian	Dinas Kelautan dan Pangan
		2 Percepatan pemanfaatan mekanisasi di sektor industri kerajinan, pertanian dan perikanan.	Terciptanya produktivitas pertanian/perkebunan	20 Kegiatan	23 Kegiatan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Pertanian / Kehutanan	Dinas Pertanian dan Pangan
3 Mampu bersaing dengan daerah lain	1 Pengembangan potensi ekonomi daerah	1 Pengembangan industri kreatif	Adanya Industri Kecil dan Menengah	50 UKM	55 UKM	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
		2 Peningkatan revitalisasi pasar tradisional	Terfasilitasinya modal usaha bag pedagang kaki lima dan asongan	20 Kegiatan	22 Kegiatan	Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
		3 Peningkatanfasilitasi pengembangan usaha bagi pedagang usaha informal	Adanya SDM yang handal	150 Orang	160 Orang	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pemerintah an Umum	Diskopperindag
	2 Pengembangan pariwisata berbasis budaya	1 Peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat	Meningkatnya Pendapatan daerah dari sektor wisata	30%	35%	Pengembangan gerakan sadar wisata	Pariwisata	Disbudpora
		2 Peningkatan promosi dan kerjasama pariwisata	Terwujudnya usaha kreatif pariwisata	30 Unit	33 Unit	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Disbudpora
		3 Pengembangan gerakan sadar wisata	Meningkatnya Pendapatan daerah dari sektor wisata	30%	33%	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Disbudpora
		4 Pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya wadah seni dan budaya	10 Sanggar	12 Sanggar	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan	Disbudpora
			Terpeliharanya adat istiadat	4 Adat	5 Adat	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Disbudpora
4 Terpeliharanya kualitas lingkungan	1 Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1 Peningkatan pelestarian lingkungan hidup	Terwujudnya lingkungan yang bebas dari polusi	40%	43%	Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	PU / Penataan	Dinas PRKPLH
		2 Peningkatan upaya pemulihan dan konservasi sumberdaya air, udara hutan dan lahan	Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana umum	50 Sarana Prasarana	52 Sarana Prasarana	Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum	PU	Dinas PUPR
		3 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Adanya penghijauan di wilayah aliran sungai dan sumber air	17 Kegiatan	19 Kegiatan	Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem	PU / Penataan	Dinas PRKPLH
	2 Peningkatan kinerja pengelolaan Persampahan	1 Peningkatan penanganan persampahan	Terwujudnya pengolahan persampahan yang ramah lingkungan	15 Kegiatan	16 Kegiatan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	PU / Penataan	Dinas PRKPLH
5 Meningkatnya pendapatan daerah	1 Penuntasan Qanun PAD	1						
	2 Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah	1 Optimalisasi jenis- jenis pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.	Terpenuhnya target PAD	80 Milyar	90 Milyar	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemerintah an Umum	Badan Keuangan
	3 Pembentukan BUMD sebagai salah satu alternatif pembiayaan daerah	1 Pendayagunaan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat	Adanya data base aset daerah	3 Dokumen	4 Dokumen	Program Pengelolaan Asset Daerah	Pemerintah an Umum	Badan Keuangan
		2 Pembinaan BUMD untuk dapat berbisnis secara terfokus dan terspesialisasi dengan pengelolaan	Tercapeainya peningkatan PAD	2 BUMD	3 BUMD	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	Pemerintah an Umum	Setdakab
MISI 7 : Mengembangkan kawasan strategis melalui peningkatan prasarana dan sarana untuk mempercepat tumbuhnya iklim investasi yang kondusif								
1 Berkembangnya kawasan strategis untuk mempercepat pertumbuhan investasi di daerah	1 Penyusunan master plan kawasan strategis	1 Penetapan wilayah strategis berdasarkan pada struktur ruang untuk meningkatkan kemajuan perekonomian daerah.	terprogramnya kawasan strategis dan cepat tumbuh	3 Dokumen	4 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Pemerintah an Umum	Bappeda

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (Outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPK PENANGGUNG JAWAB
				Kondisi 2016	Kondisi 2017			
		2 Pengembangan wilayah pegunungan dan pesisir	Tersedianya DED Kota Kecamatan	1 Dokumen	2 Dokumen	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Penataan Ruang	Bappeda / Dinas PUPR
		3 Sosialisasi RTRW Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya RTRW Abdaya	1 Doumen	2 Doumen	Program Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah	Penataan Ruang	Bappeda
	2 Penyediaan Rumah Layak Huni dan Terjangkau	1 Pengembangan perlindungan dan pemenuhan hak dasar warga miskin dalam hal ketersediaan	Tersedianya perumahan murah masyarakat	250 Unit	255 Unit	Program pengembangan Perumahan	Perumahan Rakyat	Dinas PRKPLH
2 Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pembangunan untuk mendukung investasi (darat).	1 Pembangunan jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian	1 Peningkatan jaringan transportasi	Terbangunnya akses jalan dan jembatan baik / Adanya akses jalan dan jembatan untuk daerah terisolir	3 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Bappeda / Dinas PUPR
		2 Peningkatan infrastruktur dasar dalam pelayanan publik	Terwujudnya pembagunan sarana dan prasarana kebinamargaan	3 Unit	4 Unit	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Bappeda / Dinas PUPR
		3 Pemantapan kondisi transportasi jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang,	Terpeliharanya fasilitas perhungan darat / Terciptanya rasa aman dijalan raya	20 Rambu	22 Rambu	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Pekerjaan Umum	Dishub
	2 Peningkatan Pembangunan Daerah Tertinggal	1 1. Penyediaan Energi Listrik di Daerah Terpencil	Adanya listrik melalui sumber tenaga alternatif dipedesaan	20 KW	22 KW	Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Energi dan SDM	DPMPTSP
	3 Kerjasama pembangunan infrastruktur dasar dengan pihak swasta	1						
	4 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	1 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Terbangunnya jaringan irigasi,rawa dan jaringan pengairan lainnya	20 D.I	20 D.I	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	PU / Penataan Ruang	Bappeda / Dinas PUPR
3 Terciptanya pusat-pusat pertumbuhan (growth center) ekonomi	1 Penyusunan master plan Pusat Pertumbuhan Ekonomi	1 Pengembangan mutu dan Produksi Pertanian di kawasan baru	Meningkatnya kemandirian Petani dalam Operasional dan Pemeliharaan Irigasi	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif	PU / Penataan	Bappeda / Dinas PUPR
	2 Pembangunan sarana dan prasarana kawasan capat tumbuh	1 Pengembangan kawasan permukiman di wilayah yang memiliki potensi keunggulan daerah	Tersedianya Drainase yang baik dan terintegrasi.	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Pengembangan Sanitasi Permukiman	Perumahan Rakyat	Dinas PRKPLH
4 Meningkatnya jumlah investor dan investasi di daerah	1 Pengembangan lingkungan yang kondusif bagi dunia usaha	1 Peningkatan pelayanan perizinan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu yang pro investasi	Terciptanya promosi dan kerjasama investasi	3 Dokumen	4 Dokumen	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Ekonomi	DPMPTSP
		2 Penciptaan ketenteraman dan keteriban yang kondusif	Terciptanya Keteriban dan Keamanan dalam Masyarakat	9 Kecamatan	9 Kecamatan	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Keteriban dan Keamanan	Pemerintahan Umum	Kesbangpol / Saipol PP dan WH
		3 Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk mendukung investasi	Terwujudnya investasi yang berdaya saing	2 Kegiatan	3 Kegiatan	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Ekonomi	Setdakab
	2 Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan	Tersedianya bahanbaku mineral dan batu bara	3 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Eksplorasi Mineral, Batuan dan Batu Bara	Energi dan SDM	DPMPTSP
	3 Pengembangan pengolahan hasil-hasil komoditi unggulan daerah	1 Peningkatan nilai tambah dari komoditi unggulan daerah	Adanya Peningkatan PAD Daerah	3 Kegiatan	4 Kegiatan	Program Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Energi dan SDM	DPMPTSP

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, ditetapkan rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan sesuai dengan bidang pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya. Penetapan rencana program prioritas ini bertujuan untuk memudahkan penetapan kebutuhan pendanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

Untuk lebih rinci rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan sesuai dengan bidang pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017, dapat dilihat pada tabel 8.1 dan Tabel 8.1a.



Tabel 8.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 - 2016

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja s/d 2016	SKPK Penanggung Jawab		
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Target			Relisasi	Rp
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Relisasi	Rp					
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)	
						22,776			25,933			29,890			32,867			111,467		
1	Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya mutu pendidikan pra dasar anak		85 Org	85 Org	200	85 Org	85 Org	320	85 Org	85 Org	400	85 Org	85 Org	500	340 Org	340 Org	1,420	Dinas Pendidikan	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Tercapainya program pendidikan pemerintah pendidikan 9 tahun		534 Org	534 Org	500	534 Org	534 Org	650	534 Org	534 Org	840	534 Org	534 Org	1,250	2670 Org		3,240	Dinas Pendidikan	
3	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya mutu dan pengetahuan siswa		140 Org	140 Org	450	140 Org	140 Org	670	140 Org	140 Org	750	140 Org	140 Org	750	700 Org		2,620	Dinas Pendidikan	
4	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat		60%	60%	120	70%	70%	170	80%	80%	200	90%	90%	230	400%		720	Dinas Pendidikan	
5	Program Pendidikan Non Formal	Bertambahnya pengetahuan masyarakat putus sekolah		60%	60%	100	70%	70%	154	80%	80%	171	90%	90%	200	400%		625	Dinas Pendidikan	
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu tenaga pendidikan		400 Org	400 Org	20,000	500 Org	500 Org	22,000	550 Org	550 Org	25,000	600 Org	600 Org	27,000	2650 Org		94,000	Dinas Pendidikan	
7	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Tercapainya standarisasi pendidikan		75%	75%	100	75%	75%	163	75%	75%	173	48%	48%	191	373%		627	Sekretariat MPD	
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Tercapainya mutu pendidikan		60%	60%	150	70%	70%	200	80%	80%	400	90%	90%	440	400%		1,190	Dinas Pendidikan/ Sekretariat MPD	
9	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Terwujudnya minat baca		14.611 Org	14.611 Org	200	11.578 Org	11.578 Org	350	24.050 Org	24.050 Org	450	30.000 Org	30.000 Org	500	120.239 Org		1,500	Kantor Perpustakaan	
10	Program Pendidikan Tinggi	Tercapainya peningkatan SDM		0%	0%	-	50%	50%	250	75%	75%	300	90%	90%	300	315%		850	Dinas Pendidikan	
11	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Terwujudnya kreatifitas pemuda		500 Org	500 Org	750	600 org	600 org	800	700 org	700 org	1,000	800 org	800 org	1,300	3.400 orang		3,850	Disbudparpora	
12	Program peningkatan SMK Bisa	Tercapainya standar mutu pendidikan		50%	50%	206	70%	70%	206	80%	80%	206	90%	90%	206	390%		825	Dinas Pendidikan	
						45,380			50,745			60,970			68,586			225,854		
2	Kesehatan					45,380			50,745			60,970			68,586			225,854		
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat		586 jiwa	586 jiwa	100	534 jiwa	534 jiwa	150	506 jiwa	506 jiwa	250	506 jiwa	506 jiwa	500	2.638 jiwa		1,000	Dinas Kesehatan	
2	Program Pengadaan/Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya	Adanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu		6 Unit	6 Unit	6,000	9 Unit	9 Unit	8,245	9 Unit	9 Unit	10,721	12 Unit	12 Unit	12,127	48 Unit		37,093	Dinas Kesehatan	
3	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit		7 Unit	7 Unit	1,500	21 Unit	21 Unit	1,800	14 Unit	14 Unit	3,750	25 Unit	25 Unit	5,250	125 Unit		12,300	RSUD	
4	Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya pemeliharaan rumah sakit		15 Unit	15 Unit	2,325	15 Unit	15 Unit	2,325	16 Unit	16 Unit	2,325	19 Unit	19 Unit	2,325	85 Unit		9,300	RSUD	
5	Program regulasi pelayanan kesehatan	Adanya anan tentang pengelolaan rumah sakit		1 Dokumen	1 Dokumen	675	1 Dokumen	1 Dokumen	675	1 Dokumen	1 Dokumen	675	1 Dokumen	1 Dokumen	675	5 dokumen		2,700	Dinas Kesehatan	
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	Adanya tenaga kesehatan yang disekolahkan dijenjang yang lebih tinggi		20 orang	20 orang	750	22 orang	22 orang	1,000	26 orang	26 orang	1,300	28 orang	28 orang	1,550	124 orang		4,600	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPK Penanggung Jawab	
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Relisasi		Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
7	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Adanya posyandu disetiap desa		209 pos	209 pos	1,000	209 pos	209 pos	1,300	213 pos	213 pos	2,800	213 pos	213 pos	2,820	1057 pos		7,920	Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Adanya sosialisasi untuk ibu melahirkan dan tenaga medis		12 Kali Pertemuan	12 Kali Pertemuan	1,000	12 Kali Pertemuan	12 Kali Pertemuan	1,000	12 Kali Pertemuan	12 Kali Pertemuan	2,000	12 Kali Pertemuan	12 Kali Pertemuan	2,500	60 Kali Pertemuan		6,500	Dinas Kesehatan
9	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	500	1 Kegiatan	1 Kegiatan	750	1 Kegiatan	1 Kegiatan	827	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,020	5 Kegiatan		3,097	Dinas Kesehatan
10	Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan	Adanya kerjasama dibidang kesehatan		5 Lembaga	5 Lembaga	150	10 Lembaga	10 Lembaga	300	12 Lembaga	12 Lembaga	500	15 Lembaga	15 Lembaga	750	57 Lembaga		1,700	RSUD/Dinas Kesehatan
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Adanya tenaga terlatih untuk penyakit menular		2 orang	2 orang	350	2 orang	2 orang	500	2 orang	2 orang	630	2 orang	2 orang	800	10 orang		2,280	Dinas Kesehatan
12	Program kesehatan Reproduksi Remaja	Adanya sosialisasi kesehatan reproduksi remaja		40 orang	40 orang	300	50 orang	50 orang	500	100 orang	100 orang	700	200 orang	200 orang	1,000	640 orang		2,500	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Adanya sosialisasi secara rutin tentang bahaya narkoba dan PMS		210 siswa	210 siswa	63	210 siswa	210 siswa	63	210 siswa	210 siswa	63	210 siswa	210 siswa	63	1.050 siswa		250	Dinas Kesehatan/ Kesbangpol/ Disbudparpora
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Adanya bantuan sosial kesehatan masyarakat		100.111 jiwa	100.111 jiwa	2,776	105861 jiwa	105861 jiwa	2,776	113.377 jiwa	113.377 jiwa	2,776	123.679 jiwa	123.679 jiwa	2,776	567.997 jiwa		11,104	Dinas Kesehatan
15	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terpenuhinya standar dokter spesialis		80.00%	80.00%	26,641	80%	80%	26,641	85%	85%	28,298	90%	90%	30,350	100%		111,930	RSUD
16	Program Peningkatan Layanan Kesehatan	Tersedianya fasilitas tenaga kesehatan yang cukup		2 Kec	2 Kec	50	2 Kec	2 Kec	50	2 Kec	2 Kec	50	2 Kec	2 Kec	60	9 Kec		220	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tersedianya tenaga terlatih untuk pelayanan kesehatan lansia		13 puskesmas	13 puskesmas	125	13 puskesmas	13 puskesmas	125	13 puskesmas	13 puskesmas	125	13 puskesmas	13 puskesmas	125	13 puskesmas		500	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Adanya diklat dan penerimaan tenaga kesehatan		80%	80%	250	85%	85%	250	90%	90%	300	92%	92%	300	95%		1,100	Dinas Kesehatan
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan		100%	100%	250	100%	100%	450	100%	100%	780	100%	100%	1,200	100%		2,680	RSUD
20	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya pengawasan rutin obat dan makanan		2 Kali pertemuan	2 Kali pertemuan	150	2 Kali pertemuan	2 Kali pertemuan	325	2 Kali pertemuan	2 Kali pertemuan	325	2 Kali pertemuan	2 Kali pertemuan	325	10 kali setiap kecamatan		1,300	Dinas Kesehatan/ Disperindagkop
21	Program perbaikan gizi masyarakat	Adanya sosialisasi tentang gizi masyarakat secara rutin		1 Kali pertemuan	1 Kali pertemuan	150	1 Kali pertemuan	1 Kali pertemuan	170	1 Kali pertemuan	1 Kali pertemuan	220	1 Kali pertemuan	1 Kali pertemuan	250	5 kali pertemuan		790	Dinas Kesehatan
22	Program Desa Siaga	Adanya sosialisasi desa siaga		1 Gampong	1 Gampong	75	1 Gampong	1 Gampong	75	1 Gampong	1 Gampong	75	1 Gampong	1 Gampong	75	5 Gampong		300	Dinas Kesehatan/BPPMKS
23	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Tersosialisasinya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat		2 Kali Sosialisasi	2 Kali Sosialisasi	150	3 Kali Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	275	3 Kali Sosialisasi	3 Kali Sosialisasi	300	4 Kali Sosialisasi	4 Kali Sosialisasi	450	17 Kali Sosialisasi		1,175	Dinas Kesehatan/BPPMKS
24	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersosialisasinya lingkungan sehat		50 Peserta	50 Peserta	50	50 Peserta	50 Peserta	50	50 Peserta	50 Peserta	50	50 Peserta	50 Peserta	50	250 Peserta		200	Dinas Kesehatan/BLHQP
25	Program Penyelenggaraan Kesehatan Dasar	Terlaksananya program kesehatan dasar		13 puskesmas	13 puskesmas	-	13 puskesmas	13 puskesmas	300	13 puskesmas	13 puskesmas	380	13 puskesmas	13 puskesmas	420	13 puskesmas		1,100	Dinas Kesehatan
26	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pelayanan kesehatan yang berkualitas		13 puskesmas	13 puskesmas	-	13 puskesmas	13 puskesmas	250	13 puskesmas	13 puskesmas	280	13 puskesmas	13 puskesmas	300	13 puskesmas		830	Dinas Kesehatan
27	Program Penyelidikan Epidermiologi dan Penanggulangan KLB	Tertanggulanginya Permasalahan Kesehatan		13 puskesmas	13 puskesmas	-	13 puskesmas	13 puskesmas	200	13 puskesmas	13 puskesmas	250	13 puskesmas	13 puskesmas	270	13 puskesmas		720	Dinas Kesehatan
28	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersosialisasinya kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan		40 orang	40 orang	-	50 orang	50 orang	150	65 orang	65 orang	150	65 orang	65 orang	180	290 orang		480	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPK Penanggung Jawab	
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Relisasi		Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
14	Program peningkatan peran perempuan dipedesaan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun desa		153 Gampong		875	153 Gampong		900	153 Gampong		900	153 Gampong		900	153 Gampong		3,575	BPMPPKS
15	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Terwujudnya keberdayaan masyarakat desa		154 Gampong		900	154 Gampong		850	154 Gampong		850	154 Gampong		950	154 Gampong		3,550	BPMPPKS
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Adanya Sosialisasi tentang gender dan anak		0			2 Kali sosialisasi		50	2 Kali sosialisasi		55	2 Kali sosialisasi		62	8 Kali sosialisasi		167	BPMPPKS
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Adanya koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pemerintah lain		55 Kegiatan Koordinasi		1,500	60 Kegiatan Koordinasi		1,870	65 Kegiatan Koordinasi		2,000	70 Kegiatan Koordinasi		2,250	325 Kegiatan Koordinasi		7,620	Setdakab
18	Program pembuatan tapal batas pemerintahan	Adanya tapal batas dengan baik		1 Unit		150	1 Unit		150	1 Unit		150	1 Unit		150	5 Unit		600	Setdakab
19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Adanya sistem informasi pada SKPK		9 SKPK		69	9 SKPK		69	9 SKPK		69	9 SKPK		69	47 SKPK		276	Setdakab /Dishubkominfo
20	Program Penyediaan Jaringan Informasi/internet di pedesaan	Tersedianya internet dipedesaan		30 desa		200	30 desa		200	30 desa		250	30 desa		250	152 desa		900	BPMPPKS/ Dishubkominfo
21	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Adanya sistem kearsipan berbasis elektronik		1 Unit		700	1 Unit		1,000	1 Unit		1,000	1 Unit		1,300	5 Unit		4,000	Kantor Perpustakaan
22	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Adanya gudang arsip yang tandar		1 Unit		90	1 Unit		90	1 Unit		90	1 Unit		90	5 Unit		360	Kantor Perpustakaan
23	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terlaksananya pemeliharaan sarana kearsipan		1 Paket		40	1 Paket		40	1 Paket		40	1 Paket		40	5 Paket		160	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
24	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Adanya pelayanan kearsipan		20 Org		40	40 Org		40	80 Org		40	1.050 Org		40	2.290 Org		160	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
25	Program bidang komunikasi dan Informatika	Terlaksananya komunikasi antar SKPK		9 SKPK		200	9 SKPK		250	9 SKPK		300	9 SKPK		300	45 SKPK		1,050	Dishubkominfo
26	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Adanya Udating data setiap tahun		3 Dokumen		150	3 Dokumen		250	3 Dokumen		250	3 Dokumen		300	15 Dokumen		950	Bappeda
27	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Adanya diklat wawasan kebangsaan		2 Diklat		150	2 Diklat		200	2 Diklat		200	3 Diklat		250	12 Diklat		800	Kesbangpol
28	Program Pengembangan Data/Informasi	Adanya sistem informasi yang baik pada setiap SKPK		100%		800	100%		1,000	100%		1,300	100%		1,500	100%		4,600	Seluruh SKPK
29	Program Kerjasama Pembangunan	Adanya kesempatan perencanaan pembangunan wilayah pantai barat selatan		1 Dokumen		250	1 Dokumen		350	2 Dokumen		500	2 Dokumen		500	8 Dokumen		1,600	SETDAKAB/BAPPEDA
30	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya pembangunan di wilayah perbatasan		1 Dokumen		550	1 Dokumen		800	1 Dokumen		1,000	1 Dokumen		1,200	5 Dokumen		3,550	Bappeda/Dinas PU
31	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya DED Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		1 Dokumen		100	2 Dokumen		150	2 Dokumen		185	3 Dokumen		200	11 Dokumen		635	Bappeda
32	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tersedianya DED kota kecamatan		0			1 Dokumen		120	1 Dokumen		150	1 Dokumen		200	5 Dokumen		470	Bappeda/Dinas PU
33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya diklat perencanaan		7 diklat		140	7 diklat		140	7 diklat		140	7 diklat		140	35 diklat		560	Bappeda

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016				Kondisi Kinerja s/d 2016		
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp		Target	Relisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
34	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya berbagai kegiatan Pembangunan		17 Dokumen		800	10 Dokumen		900	10 Dokumen		1,000	17 Dokumen		1,200	64 Dokumen		3,900	Bappeda
35	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Adanya renstra pembangunan ekonomi dan kebijakan ekonomi		2 Dokumen		200	2 Dokumen		200	2 Dokumen		300	2 Dokumen		300	10 Dokumen		1,000	Bappeda/Setdakab
36	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Adanya renstra pembangunan sosial budaya dan kebijakan budaya		1 Dokumen		150	1 Dokumen		330	1 Dokumen		500	1 Dokumen		750	6 Dokumen		1,730	Bappeda
37	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya master plan Wilayah SDA		1 dok		100	1 dok		100	1 dok		100	1 dok		100	5 dok		400	Bappeda/Dinas PU
38	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Ada peta rawan bencana dan DED Infrastruktur pasca bencana		3 Dokumen		450	3 Dokumen		670	3 Dokumen		850	3 Dokumen		1,000	16 Dokumen		2,970	Bappeda/BPBK
39	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terealisasinya kesejahteraan aparatur		152 Gampg		500	152 Gampg		500	152 Gampg		500	152 Gampg		500	152 Gampg		2,000	BPMPPKS/Setcam
40	Program koordinasi lintas sektoral dan pemantapan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban	Tersosialisasinya pendataan perizinan dan monitoring		100 Org		160	100 Org		160	100 Org		160	100 Org		160	500 Org		640	KP2T/Setdakab
41	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tersedianya penyelenggaraan rencana pengembangan		1 Dokumen		200	1 Dokumen		300	2 Dokumen		500	1 Dokumen		500	6 Dokumen		1,500	Bappeda
42	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Adanya monitoring yang berkelanjutan		3 Dokumen		200	3 Dokumen		200	3 Dokumen		200	3 Dokumen		200	15 Dokumen		800	Bappeda/Setdakab
43	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah		2 Laporan		300	3 Laporan		500	5 Laporan		700	7 Laporan		800	26 Laporan		2,300	Inspektorat/Setdakab /Bappeda
44	Program Penyuluhan Pertanggung jawaban penyelenggaraan keuangan daerah	Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan daerah		44 orang		100	44 orang		100	44 orang		100	44 orang		100	220 orang		400	DPKKD/Inspektorat
45	Program Inventarisasi Hasil Pengawasan Secara Berkala	Adanya Data Inventarisasi Aset dan Kekayaan Daerah					4 Dokumen		60	4 Dokumen		65	5 Dokumen		70	15 Dokumen		195	Inspektorat
46	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi antar daerah dan instansi		4 Pertemuan		850	5 Pertemuan		1,200	5 Pertemuan		1,550	5 Pertemuan		1,850	25 Pertemuan		5,450	Bappeda
47	Program Peningkatan Fasilitas Perencanaan	Tersedianya fasilitas perencanaan		1 Aplikasi		250	2 Aplikasi		500	2 Aplikasi		750	2 Aplikasi		895	8 Aplikasi		2,395	Bappeda
48	Program Pengembangan Sistem Berbasis Web	Tersedianya Fasilitas/Jaringan Internet		1 Aplikasi		500	1 Aplikasi		530	2 Aplikasi		550	2 Aplikasi		570	8 Aplikasi		2,150	Bappeda
49	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Adanya tenaga pengelolaan keuangan yang terlatih		2 orang		3,850	4 orang		4,000	6 orang		4,300	8 orang		4,550	30 orang		16,700	DPKKD/Dispenda
50	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Terlaksana intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD BPHTB dan PBB		500 orang		1,000	500 orang		1,000	500 orang		1,000	500 orang		1,000	2500 orang		4,000	DPKKD/Dispenda
51	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Adanya indentifikasi sumber PAD		25 objek pajak		200	25 objek pajak		200	25 objek pajak		200	25 objek pajak		200	125 objek pajak		800	DPKKD/Dispenda
52	Program Penataan Kebutuhan dan Kelainan Aparatur	Adanya analisis jabatan dan kebutuhan aparatur		1 dok		150	1 dok		200	2 dok		250	2 dok		300	8 dok		900	BKPP
53	Program Pengembangan dan Kérésasian Kebijakan Pemuda	Terlaksananya pengembangan jati diri pemuda		2 Klpk terorganisir		100	2 Klpk terorganisir		100	2 Klpk terorganisir		100	2 Klpk terorganisir		100	10 Klpk terorganisir		400	Disbudparpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016				
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Relisasi	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)	
54	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan		100 org		300	100 org		300	100 org		300	100 org		300	500 orang			1,200	Disbudparpora
55	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terciptanya lapangan kerja bagi pemuda		20 unt ush		400	20 unt ush		400	20 unt ush		400	20 unt ush		400	100 unit			1,600	Disperindagkop/Disbudparpora
56	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terhindarnya penyalahgunaan narkoba		6 Sekolah/Instansi		200	6 Sekolah/Instansi		200	6 Sekolah/Instansi		200	6 Sekolah/Instansi		200	30 Sekolah/Instansi			800	Kesbangpol
57	Program Penciptaan dan Pengembangan Sistem Kadernisasi Pemimpin Organisasi Pemuda	Terciptanya kaderisasi kepemudaan		5 OKP		300	7 OKP		400	9 OKP		500	15 OKP		800	56 OKP			2,000	Disbudparpora/Kesbangpol
58	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Tersedianya program olah raga		30 Klub binaan		269	30 Klub binaan		269	30 Klub binaan		269	30 Klub binaan		269	150 Klub binaan			1,076	Disbudparpora
59	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Terciptanya struktur pembinaan olah raga		30 Klub binaan		570	50 Klub binaan		865	60 Klub binaan		1,000	80 Klub binaan		1,200	320 Klub binaan			3,635	Disbudparpora
60	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya fasilitas pendukung olah raga		1 Unit		500	1 Unit		750	1 Unit		890	1 Unit		1,300	5 Unit			3,440	Disbudparpora
61	Program Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan		9 Kec		300	9 Kec		500	9 Kec		728	9 Kec		728	9 Kec			2,256	Disbudparpora
62	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan					2 rehap gdg seni		100	2 rehap gdg seni		150	2 rehap gdg seni		200	8 rehap gdg seni			450	Disbudparpora
63	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terciptanya sistem administrasi kependudukan online		9 Kec		1,000	9 Kec		1,300	9 Kec		1,700	9 Kec		2,000	45 Kec			6,000	Disdukcapil
64	Program Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja	Meningkatnya Kualitas SDM dan Etos Kerja Aparatur				50	15 org		70	25 org		85	28 org		90	98 org			295	Disdukcapil
65	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tersosialisasinya Kesiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran		9 Kali		350	9 Kali		500	9 Kali		500	9 Kali		550	45 Kali			1,900	BPBK
66	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Tersedianya fasilitas untuk pemadam kebakaran		2 Unit		367	2 Unit		367	3 Unit		367	3 Unit		367	13 Unit			1,469	BPBK/Dishtbun
67	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Adanya sosialisasi tentang bencana dan penanggulangannya		9 Dokumen		300	11 Dokumen		367	11 Dokumen		367	8 Dokumen		367	47 dokumen			1,401	BPBK
68	Program pengembangan daerah rawan bencana	Adanya infrastruktur mengantisififikasi rawan bencana		3 Paket		308	3 Paket		308	2 Paket		308	3 Paket		308	13 Paket			1,230	BPBK
69	Program Pengembangan Data dan Informasi kebencanaan	Tersedianya data rawan bencana		3 Dokumen		200	4 Dokumen		243	4 Dokumen		243	4 Dokumen		243	19 Dokumen			928	BPBK
70	Program Tanggap darurat Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana penangan masa tanggap darurat		2 Unit		650	4 Unit		800	3 Unit		921	4 Unit		921	13 Unit			3,292	BPBK
71	Program pengendalian banjir	Adanya sosialisasi penyebab banjir dan pembanguna pengendali banjir		1 Keg		100	1 Keg		350	1 Keg		500	1 Keg		875	5 Keg			1,825	BPBK/Dinas PU
72	Program Pendekatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan SDM Aparatur		5 Org		150	6 Org		200	10 Org		300	12 Org		350	48 Org			1,000	BPBK
73	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat					9 Kec		175	9 Kec		280	9 Kec		320	9 Kec			775	BPBK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016				Kondisi Kinerja s/d 2016		
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Relisasi	Rp		Target	Relisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
74	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat				-	9 Kec		120	9 Kec		200	9 Kec		250	9 Kec		570	BPBK
75	Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemarusiaan	Tersalurkannya bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana				-	700 Org		180	1200 Org		200	1800 Org		230	5700 Org		610	BPBK
76	Program Penanggulangan Bencana Kabupaten	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat		12 Bulan		75	12 Bulan		100	12 Bulan		170	12 Bulan		200	12 Bulan		545	BPBK
77	Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat				-	1 Tahun		130	1 Tahun		180	1 Tahun		210	4 Tahun		520	BPBK
78	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya kenyamanan lingkungan		300 Pemuda		208	300 Pemuda		208	300 Pemuda		208	300 Pemuda		208	1.500 Pemuda		832	SATPOL PP dan WH/Kesbangpol
79	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan tercegahnya tindak kriminal		15 Gampong		200	25 Gampong		300	32 Gampong		450	40 Gampong		505	152 Gampong		1,455	Kesbangpol/Satpol PP dan WH
80	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Adanya koordinasi fungsi intelijen		24 Diskusi/Evaluasi		215	26 Diskusi/Evaluasi		240	35 Diskusi/Evaluasi		300	35 Diskusi/Evaluasi		300	160 Diskusi/Evaluasi		1,055	SATPOL PP dan WH/Kesbangpol
81	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terlaksananya fungsi pemberantasan penyakit masyarakat		6 Penyuluh an		300	6 Penyuluh an		300	6 Penyuluh an		300	6 Penyuluh an		300	30 Penyuluhan		1,200	Kesbangpol
82	Program Peningkatan Keluarga Berencana	Suksesnya program KB		9 Kec		1,000	9 Kec		870	9 Kec		1,000	9 Kec		1,200	9 Kec		4,070	BPMPPKS
83	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi		1 Sekolah		40	1 Sekolah		40	1 Sekolah		40	1 Sekolah		40	5 Sekolah		160	BPMPPKS
84	Program Pelayanan Kontrasepsi	Mengertinya masyarakat tentang alat kontrasepsi		1 Sekolah		40	1 Sekolah		40	1 Sekolah		40	1 Sekolah		40	5 Sekolah		160	BPMPPKS
85	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatpartisipasi masyarakat tentang KB		2 Kali		114	2 Kali		114	2 Kali		114	2 Kali		114	10 Kali		456	BPMPPKS
86	Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Terlaksananya kesehatan ibu dan anak		1 Kali sosialisasi		30	1 Kali sosialisasi		30	1 Kali sosialisasi		30	1 Kali sosialisasi		30	5 Kali sosialisasi		120	BPMPPKS
87	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KBR	Adanya pelayanan lembaga konseling		1 Sekolah		30	1 Sekolah		30	1 Sekolah		30	1 Sekolah		30	5 Sekolah		120	BPMPPKS
88	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan PMS HIV		1 Kali sosialisasi		30	1 Kali sosialisasi		30	1 Kali sosialisasi		30	1 Kali sosialisasi		30	5 Kali sosialisasi		120	BPMPPKS/Dinas Kesehatan/RSUD
89	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya informasi tentang anak		1 Kali sosialisasi		20	1 Kali sosialisasi		20	1 Kali sosialisasi		20	1 Kali sosialisasi		20	5 Kali sosialisasi		80	BPMPPKS
90	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Tersedianya pendamping kelompok bina keluarga		1 Kelompok		20	1 Kelompok		20	1 Kelompok		20	1 Kelompok		20	5 Kelompok		80	BPMPPKS
91	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Tersedianya BKB Posyandu dan PADU		1 Posyandu		20	1 Posyandu		20	1 Posyandu		20	1 Posyandu		20	5 Posyandu		80	BPMPPKS/Dinas Kesehatan
92	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Tercipta sistem regulasi pelaksanaan pemerintahan		20 Regulasi		150	30 Regulasi		170	35 Regulasi		180	35 Regulasi		180	155 Regulasi		680	Setdakab
93	Program Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tersedianya pendamping sengketa aparatur		2 Kasus		163	2 Kasus		163	2 Kasus		163	2 Kasus		163	10 Kasus		650	Setdakab
94	Program Peningkatan Pelayanan Organisasi Kepada Anggota Yang Tersangkut Masalah Hukum	Tersedianya kepastian hukum aparatur		1 orang		100	1 orang		100	1 orang		100	1 orang		100	5 orang		400	Sekretariat Korpri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab		
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
95	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terhindarnya konflik sosial kemasyarakatan		2 Kasus		200	2 Kasus		300	2 Kasus		300	2 Kasus		400	10 Kasus		1,200	Setdakab
96	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya auditor yang profesional		4 Org		125	4 Org		125	4 Org		125	4 Org		125	20 Org		500	Inspektorat
97	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya SPIP dan sesuai peraturan perundang undangan		6 Instansi		20	6 Instansi		20	6 Instansi		20	6 Instansi		20	24 Instansi		80	Inspektorat
98	Program Pemerintahan Mukim dan Gampong	Terselenggaranya pemerintahan desa secara efektif dan efisien		1 Pelatihan		20	1 Pelatihan		20	1 Pelatihan		20	1 Pelatihan		20	5 Pelatihan		80	Setdakab/BPMPPKS
99	Program Peningkatan Peran Serta Organisasi Dalam Pengawasan Perilaku Anegota	Terwujudnya kesadaran aparaturnya dalam melaksanakan tugas		16 orang		40	16 orang		40	16 orang		40	16 orang		40	80 orang		160	Sekretariat Korpri
100	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri	Terpenuhinya Kebutuhan Organisasi Korpri		1 Lbg		80	1 Lbg		100	1 Lbg		120	1 Lbg		120	5 Lembaga		420	Sekretariat Korpri
101	Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Yang Aktif dan Memasuki Purna Tugas	Meningkatnya Motivasi dan Kesejahteraan Anggota Korpri		30 orang		30	33 orang		40	35 orang		45	57 orang		50	224 orang		165	Sekretariat Korpri
102	Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya Korpri	Terlaksananya Kegiatan Olahraga, seni dan budaya bagi anggota Korpri		45 orang		40	48 orang		50	50 orang		55	55 orang		60	258 orang		205	Sekretariat Korpri
103	Program Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Anggota Korpri	Terlaksananya Kegiatan Rohani Bagi anggota Korpri		25 orang		50	25 orang		50	28 orang		55	30 orang		60	143 orang		215	Sekretariat Korpri
104	Program Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa	Terbentuknya ULP dan pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa		80 orang		150	100 orang		200	120 orang		250	135 orang		320	585 orang		920	Setdakab/ULP
105	Program Pemeriksaan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terbentuknya aparaturnya desa yang berkualitas		9 Kec		200	9 Kec		200	9 Kec		200	9 Kec		200	9 Kec		800	Inspektorat
106	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terbentuknya satgas SPIP		1 Satgas		50	1 Satgas		50	1 Satgas		50	1 Satgas		50	5 Satgas		200	Inspektorat
107	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Terwujudnya masyarakat yang bertakwa dan beriman		152 Gampg		100	152 Gampg		100	152 Gampg		100	152 Gampg		100	760 Gampg		400	Dinas Syariat Islam
108	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Adanya peran perempuan dalam pembangunan		3 Pelatihan		150	3 Pelatihan		200	3 Pelatihan		240	3 Pelatihan		240	15 Pelatihan		830	BPMPPKS
109	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Tersedia lembaga ekonomi pedesaan		5 Kali sosialisasi		258	5 Kali sosialisasi		258	5 Kali sosialisasi		258	5 Kali sosialisasi		258	25 Kali sosialisasi		1,032	BPMPPKS
110	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat		2 Sosialisasi		150	2 Sosialisasi		200	2 Sosialisasi		200	2 Sosialisasi		250	10 Sosialisasi		800	Kesbangpol
111	Program peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya kesadaran nasionalisme		2 Seminar		150	2 Seminar		150	2 Seminar		200	3 Seminar		250	12 Seminar		750	Seluruh SKPK
5	Infrastruktur					80,479			110,947			133,608		170,363		495,398			
1	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	Adanya pembangunan infrastruktur pedesaan		12 Unit		750	15 Unit		1,050	32 Unit		3,500	48 Unit		5,470	162 Unit		10,770	Dinas PU
2	Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun desa	Adanya pelatihan terhadap masyarakat dibidang Pembangunan		6 Pelatihan		518	6 Pelatihan		518	6 Pelatihan		518	6 Pelatihan		518	30 Pelatihan		2,070	BPMPPKS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab		
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
3	Program Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah	Adanya diklat perencanaan tentang RTRW		0			3 Diklat		120	3 Diklat		185	3 Diklat		200	12 Diklat		505	Bappeda
4	Program Pemanfaatan Ruang	Adanya RTRW Abdy		0 dok			1 dok		135	1 dok		350	1 dok		540	4 dok		1,025	Bappeda/Dinas PU
5	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersosialisasinya Qanun RTRW		3 Kec		530	2 Kec		350	2 Kec		150	1 Kec		100	9 Kec		1,130	Bappeda
6	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni	Adanya rumah masyarakat yang direhab sehingga layak huni		115 Unit		1,500	200 Unit		2,000	165 Unit		3,300	126 Unit		4,000	732 Unit		10,800	Dinas PU
7	Program pengembangan Perumahan	Tersedianya perumahan murah masyarakat		0 Unit		0	200 Unit		5,000	170 Unit		3,000	250 Unit		6,000	870 Unit		14,000	Dinas PU
8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersosialisasi perumahan sehat		0 Keg/ 0		0	1 Keg/ 2		1,500	1 Keg/ 3		2,000	1 Keg/ 2		2,000	4 Kegiatan/ 11		5,500	Dinas PU/BLHKP
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana kebinamargaan		1 Unit		20,000	1 Unit		21,500	1 Unit		21,500	1 Unit		23,000	5 Unit		86,000	Dinas PU
10	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Adanya akses jalan dan jembatan untuk daerah terisolir		1 Keg		11,200	1 Keg		13,550	2 Keg		20,000	3 Keg		30,000	10 Kegiatan		74,750	Dinas PU
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan		40 Lokasi		20,000	50 Lokasi		25,000	50 Lokasi		25,000	30 Lokasi		30,000	205 Lokasi		100,000	Dinas PU
12	Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data base jalan jembatan		1 dok		150	1 dok		150	1 dok		150	1 dok		150	5 Lokasi		600	Dinas PU
13	Program pembangunan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya jaringan irigasi, rawa dan pengairan lainnya		20 D.I.		4,000	20 D.I.		4,700	20 D.I.		7,320	20 D.I.		9,550	100 D.I.		25,570	Dinas PU
14	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Adanya saluran drainase dan gorong untuk pengendalian banjir		1 keg		2,200	1 keg		2,750	2 Keg		5,500	3 Keg		7,000	11 Keg		17,450	Dinas PU
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase	Tersedianya drainase yang baik		100 Unit		2,000	150 Unit		3,250	200 Unit		4,000	200 Unit		4,000	850 Unit		13,250	Dinas PU
16	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana air Minum	Adanya Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Layak		1 Tahun		730	1 Tahun		1,000	1 Tahun		2,550	1 Tahun		4,460	5 Tahun		8,740	Dinas PU
17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya Fasilitas Air Minum dan Air Limbah		1 Unit		350	1 Unit		400	1 Unit		500	1 Unit		500	5 Unit		1,750	Dinas PU
18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya Pembangunan di Wilayah Terpencil		1 Paket		500	1 Paket		550	1 Paket		580	1 Paket		650	5 Paket		2,280	Dinas PU
19	Program Pengembangan Sanitasi Permukiman	Adanya sanitasi permukiman yang baik		1 Paket		1,000	1 Paket		2,000	1 Paket		2,800	1 Paket		3,000	5 Paket		8,800	Dinas PU
20	Program Pembangunan Turap/Talud/Brniong	Tersedianya pengaman sungai		1000 m		500	1600 m		830	2800 m		1,759	4000 m		2,000	13400 m		5,089	Dinas PU
21	Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif	Meningkatnya kemandirian petani		1 Paket/2 Klpk tani		1,000	1 Paket/ 2 Klpk tani		1,000	1 Paket/ 2 Klpk tani		1,300	1 Paket/ 2 kKlpk tani		1,300	5 Paket/ 10 Klpk tani		4,600	Bappeda/Dinas PU /Distan
22	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya pelayanan angkutan		1 Buah Gedung		647	1 Buah Gedung		647	1 Buah Gedung		647	1 Buah Gedung		647	5 Buah bangunan		2,590	Dishubkominfo
23	Program Pmbangunan Fasilitas Perhubungan Laut	Adanya dermaga yang memadai		2 dermaga		290	2 dermaga		290	2 dermaga		290	2 dermaga		290	10 dermaga		1,160	Dishubkominfo
24	Program Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terpenuhinya pelayanan angkutan laut		2 rute		1,000	2 rute		1,700	2 rute		2,500	2 rute		4,720	11 rute		9,920	Dishubkominfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab		
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
25	Program Keselamatan Transportasi Darat	Tersedianya sarana pendukung transportasi darat		45 rambu		450	46 rambu		480	47 rambu		500	47 rambu		500	550 rambu		1,930	Dishubkominfo
26	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAL	Terciptanya rasa aman di jalan raya		15 rambu		320	20 rambu		420	20 rambu		420	20 rambu		420	95 rambu		1,580	Dishubkominfo
27	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Adanya Pelayanan Terbaik dalam Transportasi		1 tim		108	1 tim		108	1 tim		108	1 tim		108	5 tim		434	Dishubkominfo
28	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhinya pelayanan transportasi		1 Unit		696	1 Unit		696	1 Unit		696	1 Unit		696	5 transportasi		2,784	Dishubkominfo
29	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Terpenuhinya pelayanan transportasi		1.800 m		100	2.000 m marka		120	6.457 m marka		150	2.450 m marka		175	15.157 m		545	Dishubkominfo
30	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya fasilitas perhubungan		1 gedung		520	1 gedung		700	1 gedung		885	1 gedung pkb		1,100	5 gedung		3,205	Dishubkominfo
31	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Udara	Terpenuhinya pelayanan angkutan udara		2 rute		650	2 rute		770	2 rute		850	2 rute		1,000	10 rute		3,270	Dishubkominfo
32	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	Tersosialisasinya informasi kepada masyarakat		5 spanduk		100	8 spanduk		150	10 spanduk		250	20 spanduk		300	63 spanduk		800	Dishubkominfo
33	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Adanya Kerjasama Informasi dengan Media Masa		1 buah website		50	1 buah website		80	1 buah website		110	15 buah website		180	53 buah website		420	Dishubkominfo
34	Program Eksplorasi Mineral, Batuan dan Batu Bara	Adanya sumber pendapatan bagi daerah		0,5 M		100	1 M		300	1 M		450	1,25 M		500	5 M		1,350	Distamben
35	Program Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Adanya Peningkatan PAD Daerah		100 jt		200	150 jt		350	200 jt		470	250 jt		490	1.000 jt		1,510	Distamben
36	Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat		2 unit		2,000	2 unit		2,300	3 unit		2,500	2 unit		2,800	13 unit		9,600	Dinas PU
37	Program pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Adanya sosialisasi ketenagalistrikan alternatif				150	20 kw		150	30 kw		150	50 kw		150	160 kw		600	Distamben
38	Program Industri Mineral	Terciptanya sistem pengelolaan air minum				-	3 keg		617	3 keg		700	4 keg		800	5 keg		2,117	Distamben
39	Program Pemanfaatan Energi Listrik Terbarukan	Adanya listrik melalui sumber tenaga alternatif dipedesaan				-	15 kw		675	20 kw		1,100	20 kw		1,480	75 Kw		3,255	Distamben
40	Program Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Terpeliharanya turap/talud dan bronjong		5000 m		5,670	8000 m		8,050	7000 m		7,150	10.000 m		10,500	40.000 m		31,370	Dinas PU/BPBK
41	Program Pengembangan dan pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Lainnya	Adanya penghijauan di wilayah sumber air				0	1 pkt		3,000	1 pkt		4,000	1 pkt		4,200	4 pkt		11,200	Dinas PU
42	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Adanya rehabilitasi pasca bencana				-	1000 Meter		1,000	1000 Meter		2,000	2800 Meter		2,800	9500 Meter		5,800	BPBK
43	Program pengeboran Air Bawah Tanah	Tersedianya pengeboran bawah tanah		1 Sumur		250	2 Sumur		375	4 Sumur		560	6 Sumur		649	19 Sumur		1,834	Distamben
44	Program Hidrologi dan Hidrogeologi	Adanya informasi tentang hidrologi dan hidrogeologi		1 dok		100	1 dok		320	2 dok		600	2 dok		850	9 dok		1,870	Distamben
45	Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Adanya sistem air minum yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku		1 pkt		150	1 pkt		295	1 pkt		560	1 pkt		570	5 pkt		1,575	Dinas PU/Bappeda
46	Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya DED Pengembangan Wilayah Perkotaan		1 dok		200	1 dok		250	1 dok		250	1 dok		300	5 dok		1,000	Dinas PU
47	Program pengendalian dan Pengamanan Bandara	Tersedianya Fasilitas pengamanan bandara		1 Unit		150	1 Unit		200	1 Unit		300	2 Unit		320	7 Unit		970	Dishubkominfo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016				
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Relisasi	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14 +15	(20)=7+9+11+13+15	(21)	
48	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi	Tersedianya Sumber Energi Baru Yang Ramah Lingkungan		1 sumber energi		120	1 sumber energi		150	1 sumber energi		200	1 sumber energi		230	5 sumber energi		700		
49	Program Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Umum	Terlaksananya Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Umum		100%		200	100%		250	100%		275	100%		300	100%		1,025		
6	Pertanian					44,948			50,146			56,154			61,293			212,541		
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kesejahteraan dan ketrampilan penyuluh		10 org		447	11 org		492	12 org		541	13 org		595	60 orang		2,075		BP4K
2	Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	Peningkanya produktifitas pada dan palawija		8 Ton/h		1,600	8 Ton/h		1,600	8 Ton/h		1,600	8 Ton/h		1,600	40 Ton/h		6,400		Distannak
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	Tersedianya sarana dan prasaran Jitit, Jides dan JUT		8000 m		5,000	8000 m		4,500	8000 m		4,700	8000 m		5,000	8 Demplt/ 40.000 m		19,200		BP4K/Distannak/ Dishutbun
4	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya operasional perekonomian LKM, panglima laot HSN dan perempuan pesisir		10 Klpk		500	10 Klpk		500	10 Klpk		500	10 Klpk		500	50 Klpk		2,000		DKF
5	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan				200			200			200			200			800		BP4K
6	Program perencanaan pembangunan dan pengembangan kelautan	Tersedianya koordinasi DED dan Monev pengembangan kelautan		6 dok		320	7 dok		350	10 dok		450	12 dok		500	45 dok		1,620		DKP
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya pasar ternak		500 ekor		600	500 ekor		600	500 ekor		600	500 ekor		600	2.500 ekor		2,400		Distannak
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana hasil produksi peternakan		10 %/thn		560	10 %/thn		560	10 %/thn		560	10 %/thn		560	50 %/thn		2,240		Distannak
9	Program peningkatan ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas dan lahan budidaya pertanian/perkebunan		6 Ton/ha		355	6,6 Ton/ha		390	7 Ton/ha		429	7 Ton/ha		472	34 Ton/ha		1,646		BP4K
10	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Tersedianya sarana dan prasaran pertanian tepat guna		40 H/hari/		1,000	40 H/hari		1,000	40 H/hari		1,500	40 H/hari		800	20 H/hari		4,300		Distannak/BP4K
11	Program peningkatan produksi pertanian	Meningkatnya produksi dan mutu pertanian		7 Ton/ Ha		300	7 Ton/ Ha		300	7 Ton/ Ha		350	7 Ton/ Ha		300	35 Ton/ Ha		1,250		Distannak/BP4K
12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terpeliharanya ternak dan pencegahan penyakit menular ternak		0 %/ thn		514	0 %/ thn		514	0 %/ thn		514	0 %/ thn		514	0 %/ thn		2,056		Distannak
13	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi dan mutu peternakan		15 %/ thn		1,000	15 %/ thn		1,000	15 %/ thn		1,000	15 %/ thn		1,000	75%		4,000		Distannak/BP4K
14	Program pengembangan budidaya perikanan	Tersedianya pengembangan sarana dan prasaran budidaya perikanan		30 Kolam		3,000	32 Kolam		3,500	32 Kolam		3,500	33 Kolam		3,800	162 Kolam		13,800		DKP
15	Program pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan air tawar	Tersedianya lahan untuk budidaya dan pengembangan rehabilitas tambak kolam rakyat		18 Tambak		1,800	20 Tambak		2,000	20 Tambak		2,000	13 Tambak		1,300	86 Tambak		7,100		DKP
16	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Tersedianya etalase pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan perkebunan		500m2/ 4 Unit TPI		1,000	500m2/ 4 Unit TPI		1,200	500m2/ 4 Unit TPI		1,200	500m2/ 4 Unit TPI		1,200	500m2/ 20 Unit TPI		4,600		Distannak/DKP/ Dishutbun
17	Program Penganekaragaman Konsumsi Pangan	terlaksananya sosialisasi diversifikasi ketahanan pangan		1 Jenis		150	2 Jenis		200	3 Jenis		300	4 Jenis		400	14 Jenis		1,050		BP4K

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016				
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Relisasi	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)	
18	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna		10 %/thn		560	10 %/thn		560	10 %/thn		560	10 %/thn		560	50 %/thn			2,240	Distannak
19	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dan pengembangan poskeswan dan illegal fishing		5 Klpk		1,200	5 Klpk		1,400	5 Klpk		1,440	5 Klpk		1,440	25 Klpk			5,480	DKP
20	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi hasil perikanan	meningkatnya hasil produksi perikanan		100 ton Ikan Olahan		500	120 ton Ikan Olahan		650	150 ton Ikan Olahan		960	150 ton Ikan Olahan		960	690 ton Ikan Olahan			3,070	DKP
21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Pendapatan Petani		10 org/ 2 klp/ thn		1,580	12 org/ 2 klp/ thn		2,000	14 org/ 2 klp/ thn		2,350	15 org/ 2 klp/ thn		2,800	67 org/ 10 klp/ thn			8,730	BP4K/Distanak
22	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/peternakan	Tersedianya kebun kelapa sawit dan karet rakyat dan rehabilitasi perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan		2 klp/ thn		12,250	2 klp/ thn		13,500	2 klp/ thn		15,000	2 klp/ thn		18,000	10 klp/ thn			58,750	BP4K/Distanak/ Dishutbun
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya hasil produksi		6 Ton/ha		1,000	6,6 Ton/ha		1,500	7 Ton/ha		2,200	7,5 Ton/ha		3,000	35 Ton/ha			7,700	BP4K
24	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Terjaganya hutan dari kegiatan illegal logging		9 Kec		200	9 Kec		200	9 Kec		200	9 Kec		200	9 Kec			800	Dishutbun
25	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan		1.000.000.000 Benih		2,700	1.200.000.000 Benih		3,000	1.500.000.000 Benih		3,500	1.700.000.000 Benih		3,742	7.200.000.000 Benih			12,942	DKP
26	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya budidaya produksi dan kelembagaan perikanan		15.000 Ton Ikan		1,300	17.000 Ton Ikan		1,800	18.000 Ton Ikan		2,250	19.000 Ton Ikan		3,000	89.000 Ton Ikan			8,350	DKP
27	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan		5000 M		3,112	5000 M		3,630	5000 M		4,000	5000 M		4,200	25000 M			14,942	Distannak/Dishutbun
28	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya pengembangan tanaman hutan		200 ha		480	200 ha		480	200 ha		480	200 ha		480	1.000 ha			1,920	Dishutbun
29	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tersedianya tanaman hutan		200 ha		450	200 ha		450	200 ha		450	200 ha		450	1.000 ha			1,800	Dishutbun
30	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan		0		0	3 Unit Bangsal Pengolahan		500	1.900 Unit Box Fiber		800	1.200 Unit Box Fiber		960	3 Unit Bangsal dan 4.300 Unit Fiber			2,260	DKP
31	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan	Meningkatnya peran masyarakat dalam pelestarian kelautan		5 Klpk		850	6 Klpk		1,000	8 Klpk		1,300	8 Klpk		1,440	35 Klpk			4,590	DKP
32	Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut	Terlaksananya survey zona rawan bencana dan pemantauan rambu rambu perkapalan		2 dok		220	2 dok		220	2 dok		220	2 dok		220	10 Dokumen			880	DKP/BPBK
33	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terwujudnya letak batas kawasan hutan		16.000 m		200	20.000 m		350	23.000 m		500	23.000 m		500	105.000 m			1,550	Dishutbun
34	Program Pengembangan dan Peningkatan Penulisan	Tersedianya Tenaga Penyuluh Handal		4 Org		50	5 Org		75	6 Org		100	7 Org		150	30 Orang			375	BP4K
35	Program Pengolahan Up Dating dan Analisa Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Data Kelautan dan Perikanan		0		0	5 dok		50	10 dok		100	15 dok		150	50 dokumen			300	DKP
36	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Tertibnya Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan		2 Klpk		70	2 Klpk		80	3 Klpk Pokmaswas		100	4 Klpk Pokmaswas		135	16 Klpk Pokmaswas			385	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab		
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Relisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
18	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Berkembangnya industri Kecil		9 Industri Kecil		367	9 Industri Kecil		367	3 Industri Kecil		367	3 Industri Kecil		367	27 Industri Kecil		1,467	Disperindagkop
19	Program peningkatan Kesempatan Kerja	Terciptanya lapangan kerja yang layak				-	151 org		1,000	151 org		1,200	151 org		1,400	604 org		3,600	Dinsosakertrans
20	Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Adanya peningkatan SDM melalui BLK		108 org		450	135 org		600	135 org		600	135 org		600	648 org		2,250	Dinsosakertrans
21	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Adanya peningkatan peran UKM		10 UKM		200	10 UKM		200	10 UKM		200	5 UKM		200	45 UKM		800	Disperindagkop
22	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terciptanya promosi dan kerjasama investasi		2 keg		200	2 keg		200	2 keg		200	2 keg		200	10 keg		800	Setdakab
23	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya prosedur penanaman modal		2 dok		200	2 dok		200	2 dok		200	2 dok		200	10 dok		800	KP2T
24	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya sarana dan prasarana promosi dan kerjasama investasi		1 unit		200	1 unit		200	1 unit		200	1 unit		200	5 unit		800	Setdakab
25	Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Adanya jaminan sosial masyarakat		600 jiwa		420	800 jiwa		575	1.200 jiwa		800	1.500 jiwa		1.000	5.800 jiwa		2,795	Setdakab
26	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Masyarakat		1 dokumen		150	1 dokumen		200	1 dokumen		250	1 dokumen		300	7 dokumen		900	Bappeda
27	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kawasan	Tersedianya DED Kawasan Ekonomi Daerah		0		-	1 dokumen		175	1 dokumen		200	1 dokumen		220	5 dokumen		595	Bappeda
28	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Diklat Pengembangan UKM				-	10 Diklat		100	10 Diklat		150	5 Diklat		175	30 Diklat		425	Disperindagkop
9						5,848			8,698			10,698			12,008			37,251	
1	Lingkungan Hidup Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Adanya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan		32 IUP		918	33 IUP		918	35 IUP		918	12 IUP		918	123 IUP		3,671	Distamben
2	Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Adanya pengawasan yang ketat terhadap pertambangan rakyat		12 Kasus		72	7 Kasus		72	5 Kasus		72	4 Kasus		72	31 Kasus Penertiban		288	Distamben
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedia dan terkelolanya lahan terbuka hijau		1 dok		50	1 dok		550	1 dok		1,100	1 dok		1,500	5 dok		3,200	Setdakab /BLHKP /Dinas PU
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Adanya fasilitas yang memadai pada sistem persampahan		2 Unit		1,000	3 Unit		1,300	10 Unit		2,200	8 Unit		2,000	35 Unit		6,500	BLHKP
5	Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya alat pendeteksi pencemaran dan tenaga terlatih untuk pengendalian lingkungan hidup		5 Unit		1,200	5 Unit		1,200	5 Unit		1,200	5 Unit		1,200	25 Unit		4,800	BLHKP
6	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertatanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang ramah lingkungan		100%		1,000	100%		1,500	100%		1,750	100%		2,000	100%		6,250	Seluruh SKPK
7	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Adanya sistem informasi petanahan yang baik		2 Dokumen		30	2 Dokumen		30	2 Dokumen		30	2 Dokumen		30	10 Dokumen		120	BLHKP
8	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut	Adanya sistem informasi dan fasilitas mitigasi bencana alam laut dan iklim laut		1 Unit		108	1 Unit		108	1 Unit		108	1 Unit		108	5 Unit		432	BPBK/DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016				
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target		Realisasi	Rp	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)	
9	Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Adanya sosialisasi bidang ketenaga listrikan		0			20 Kw			1,200	30 Kw		1,450	50 Kw		2,150	160 Kw		4,800	Distamben
10	Program pemanfaatan energi terbarukan	Tersosialisinya pemanfaatan energi terbarukan					1 sumber energi			350	1 sumber energi		400	1 sumber energi		560	4 sumber energi		1,310	Distamben
11	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terwujudnya masyarat yang melindungi hutan dan SDA		3 Lokasi		170	3 Lokasi		170	3 Lokasi		170	3 Lokasi		170	15 Lokasi			680	BLHKP
12	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terwujudnya kenyamanan lingkungan		3 Dokumen		300	3 Dokumen		300	3 Dokumen		300	3 Dokumen		300	15 Dokumen			1,200	BLHKP
13	Program dan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terwujudnya penghijauan hutan lindung yang rusak		5 Ha		300	5 Ha		300	5 Ha		300	5 Ha		300	25 Ha			1,200	Distamben
14	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup	Adanya sosialisasi dan perlindungan SDA dan LH		30 Sekolah		260	30 Sekolah		260	30 Sekolah		260	30 Sekolah		260	150 Sekolah			1,040	BLHKP
15	Program Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan dikawasan konservasi laut dan hutan	Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap wisata		5 Lokasi		140	5 Lokasi		140	5 Lokasi		140	5 Lokasi		140	25 Lokasi			560	BLHKP
16	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Terwujudnya keindahan laut yang asri		3 Km		300	3 Km		300	3 Km		300	3 Km		300	15 Km			1,200	BLHKP
17	Program Perlindungan Konservasi Hutan	Terlaksananya Perlindungan Hutan		1 Sosialisas		100	2 Sosialisas		200	3 Sosialisas		250	3 Sosialisas		250	13 Sosialisasi			800	BP4K
						8,236			9,846			10,978			11,699	52,764			40,759	
10	Agama																			
1	Program pengembangan dakwah dan peribadatan	Terlaksananya syiar agama		13 Keg		500	17 Keg		650	17 Keg		700	17 Keg		780	81 Kegiatan			2,630	Dinas Syariat Islam
2	Program Bina program dan pelaporan	Telaksananya kegiatan keagamaan		10 Keg		600	10 Keg		600	10 Keg		600	10 Keg		600	50 Kegiatan			2,400	Dinas Syariat Islam
3	Program peningkatan institusi kelembagaan Majelis Adat Aceh	Terwujudnya kapasitas kelembagaan adat aceh		1 Kegiatan		300	1 Kegiatan		300	1 Kegiatan		300	1 Kegiatan		300	5 Kegiatan			1,200	Sekretariat MAA
4	Program pembentukan lembaga Majelis Adat Aceh tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong	Tersedia lembaga adat aceh		9 Kec		380	9 Kec		380	9 Kec		380	9 Kec		380	9 Kec			1,520	Sekretariat MAA
5	Program Pengembangan Wawasan Adat Aceh	Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap budaya		9 Kec		65	9 Kec		125	9 Kec		132	9 Kec		138	9 Kec			460	Sekretariat MAA
6	Program Pendidikan Agama Masyarakat	Terwujudnya wadah pembelajaran masyarakat		40 Kelompo		80	40 Kelompo		80	40 Kelompo		80	40 Kelompo		80	200 Kelompok			320	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
7	Program Peningkatan Kualitas Mental Religius Anggota Korpri	Terhindarnya aparatur dari sikap tidak terpuji		536 orang		121	536 orang		121	536 orang		121	536 orang		121	2.680 orang			484	Sekretariat Korpri
8	Program Pengembangan Seni Budaya dan Wisata Islami	Terwujudnya Pemahan adat dan budaya lokal		2 Keg		500	4 Keg		1,000	5 Keg		1,300	5 Keg		1,300	21 Kegiatan			4,100	Dinas Syariat Islam
9	Program Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam	Meningkatnya Nilai-nilai Islami di Masyarakat		3 Keg		40	4 Keg		50	4 Keg		55	4 Keg		60	19 Kegiatan			205	Dinas Syariat Islam
10	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KDRT)	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan		2 Kali Sosialisas i		50	2 Kali Sosialisas i		50	2 Kali Sosialisas i		50	2 Kali Sosialisas i		50	10 Kali Sosialisasi			200	BPMPPKS
11	Program peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan		3 Kali Sosialisas i		300	3 Kali Sosialisas i		300	3 Kali Sosialisas i		300	3 Kali Sosialisas i		300	15 Kali Sosialisasi			1,200	BPMPPKS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPK Penanggung Jawab			
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016				Kondisi Kinerja s/d 2016		
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp		Target	Realisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
12	Program bina hukum syariat Islam	Tersedia regulasi bidang keagamaan		1 Qanun, 30 Mesjid		250	1 Qanun, 30 Mesjid		250	1 Qanun, 30 Mesjid		300	1 Qanun, 30 Mesjid		400	5 Qanun, 150 Mesjid		1,200	Dinas Syariat Islam
13	Program Penyelenggaraan Sidang MPU dan Pembinaan Umat	Terselesaikannya permasalahan keagamaan		12 Sidang		100	12 Sidang		100	12 Sidang		100	12 Sidang		100	60 Sidang		400	Sekretariat MPU
14	Program Kemitraan Pembangunan Wawasan	Terwujudnya ahklak yang berakhlakul karimah		150 Orang/1		150	200 orang/1		200	200 orang/1		200	300 orang/1		300	1.200 orang/ 5 Kec		850	Kesbangpol /MPU/Setcam
15	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Ulama/Cendekiawan	Meningkatnya SDM Ulama		22 Orang		475	22 Orang		475	22 Orang		475	22 Orang		475	110 orang		1,900	Sekretariat MPU
16	Program Peningkatan Peran Ulama	Meningkatnya SDM Ulama		1 kali Sosialisasi		75	1 kali Sosialisasi		75	1 kali Sosialisasi		75	1 kali Sosialisasi		75	5 kali Sosialisasi		300	Sekretariat MPU
17	Program Pembinaan dan Kernaslahatan Umat	Terwujudnya masyarakat yang Islami		2 kali Sosialisasi		80	2 kali Sosialisasi		80	2 kali Sosialisasi		80	2 kali Sosialisasi		80	10 kali Sosialisasi		320	Sekretariat MPU
18	Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama	Meningkatnya ketaqwaan masyarakat		320 Kitab		160	320 Kitab		160	320 Kitab		160	320 Kitab		160	1.600 Kitab		640	Dinas Syariat Islam
19	Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan	Meningkatnya ketaqwaan masyarakat		40 Kelompok		250	40 Kelompok		350	40 Kelompok		450	40 Kelompok		550	200 Kelompok		1,600	Dinas Syariat Islam/Badan Dayah
20	Program Pengembangan Pendidikan Dayah	Terwujudnya pembinaan manjeman dan kelembagaan dayah		3 Dayah		400	3 Dayah		400	3 Dayah		400	3 Dayah		400	15 Dayah		1,600	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
21	Program Perpustakaan Desa, Perpustakaan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya kitab/buku pendidikan dayah		2 Dayah		800	3 Dayah		1,000	3 Dayah		1,000	3 Dayah		1,000	14 Dayah		3,800	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
22	Program Agribisnis Dayah	Terciptanya dayah yang mandiri		5 Dayah		500	5 Dayah		500	5 Dayah		600	5 Dayah		600	25 Dayah		2,200	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
23	Program penataan sarana dan prasarana peribadatan	Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan		150 Mesjid		400	150 Mesjid		400	150 Mesjid		400	150 Mesjid		400	752 Mesjid		1,600	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
24	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Tersedianya sarana dan prasarana dayah		82 Dayah		500	82 Dayah		650	82 Dayah		750	82 Dayah		900	380 Dayah		2,800	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
25	Program Pemberdayaan Santri Dayah	Meningkatnya Kualitas Santri Dayah		25 Santri		80	25 Santri		90	30 Santri		100	30 Santri		150	120 santri		420	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
26	Program Sumber Daya Keagamaan	Meningkatnya Kegiatan keagamaan di Masyarakat		4%		50	4%		65	4%		70	4%		80	20%		265	Badan Pembinaan Pendidikan Dayah
27	Program Pengembangan Wawasan Zakat	Terciptanya Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat		9 Kec		30	9 Kec		45	9 Kec		50	9 Kec		50	9 Kec		175	Set.Baitul Mall
28	Program memperingati/ merayakan Hari besar Islam	Terlaksananya kegiatan keagamaan		5 Keg		500	5 Keg		800	5 Keg		1,000	5 Keg		1,000	25 Kegiatan		3,300	Dinas Syariat Islam
29	Program peningkatan kehidupan beragama	Terciptanya struktur bidang keagamaan		152 Gampg		500	152 Gampg		550	152 Gampg		750	152 Gampg		870	760 Gampg		2,670	Dinas Syariat Islam
																39108			
11	Sosial Budaya					5,433				7,138			8,018		8,998			29,587	
1	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Terwujudnya Pengembangan wilayah transmigrasi		30 KK		300	40 KK		400	50 KK		550	60KK		700	250 KK		1,950	Dinsosnakertrans
2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terbinanya masyarakat penyandang sosial dengan baik		50 org		313	50 org		313	50 org		313	50 org		313	250 orang		1,250	Dinsosnakertrans
3	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Terwujudnya perhatian pemerintah terhadap para lansia		4 panti		63	4 panti		63	4 panti		63	4 panti		63	20 panti		250	Dinsosnakertrans

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													SKPK Penanggung Jawab		
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Relisasi	Rp	Target		Relisasi	Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terciptanya wadah sosial dalam peningkatan psikologis penderita penyakit sosial		1 Lembaga		38	1 Lembaga		38	1 Lembaga		38	1 Lembaga		38	5 Lembaga		150	Dinsosnakertrans
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya bantuan usaha mikro untuk masyarakat miskin		10 Klip		75	10 Klip		75	10 Klip		75	10 Klip		75	50 Klip		300	Dinsosnakertrans
6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Kegiatan oleh lembaga ketenagakerjaan					1 Keg		65	1 Keg		75	1 Keg		80	4 Keg		220	Dinsosnakertrans
7	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi					20 KK		80	20 KK		90	20 KK		100	80 KK		270	Dinsosnakertrans
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Pembangunan di Kawasan Transmigrasi		2 Unit		100	3 Unit		150	5 Unit		250	8 unit		400	29 Unit		900	Dinsosnakertrans
9	Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas	Terciptanya masyarakat yang mandiri dan dinamis		2 Kali Sosialisasi		200	2 Kali Sosialisasi		200	2 Kali Sosialisasi		200	2 Kali Sosialisasi		200	10 Kali Sosialisasi		1,000	BPMPPKS
10	Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Terwujudnya keluarga yang mandiri		2 Kali Pelatihan		60	2 Kali Pelatihan		60	2 Kali Pelatihan		60	2 Kali Pelatihan		60	10 Kali Pelatihan		300	BPMPPKS
11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Desa	Tercukupinya kebutuhan pangan di pedesaan		0			3 Gampong		60	3 Gampong		75	4 Gampong		80	14 Gampong		215	BPMPPKS
12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tercapainya usaha kretifitas pariwisata		1 tmpt rekreasi		219	1 tmpt rekreasi		219	1 tmpt rekreasi		219	1 tmpt rekreasi		219	5 tmpt rekreasi		874	Disbudparpora
13	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor wisata		1 tmpt rekreasi		500	1 tmpt rekreasi		700	1 tmpt rekreasi		800	1 tmpt rekreasi		900	5 tmpt rekreasi		2,900	Disbudparpora
14	Program Pengembangan Kemitraan	Terwujudnya kerjasama bidang wisata		1 tmpt rekreasi		300	1 tmpt rekreasi		300	1 tmpt rekreasi		300	1 tmpt rekreasi		300	5 tmpt rekreasi		1,200	Disbudparpora
15	Program Pengembangan Seni Budaya dan Wisata	Tersedianya wadah seni dan budaya		30 binaan sanggar		500	30 binaan sanggar		500	30 binaan sanggar		500	30 binaan sanggar		500	150 binaan sanggar		2,000	Disbudparpora
16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Tersedianya wadah penyaluran bakat masyarakat		10 sanggar baru		226	10 sanggar baru		226	10 sanggar baru		226	10 sanggar baru		226	50 sanggar baru		904	Disbudparpora
17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpeliharanya adat istiadat		4 Adat yg dilestarikan		800	4 Adat yg dilestarikan		1,000	4 Adat yg dilestarikan		1,200	4 Adat yg dilestarikan		1,300	20 Adat yg dilestarikan		4,300	Disbudparpora
18	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya adat istiadat		11 Adat yg dilestarikan		350	11 Adat yg dilestarikan		500	11 Adat yg dilestarikan		500	11 Adat yg dilestarikan		700	55 Adat yg dilestarikan		2,050	Disbudparpora
19	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya kemitraan dalam pelestarian budaya		30 karya		281	30 karya		281	30 karya		281	30 karya		281	150 karya jual		1,124	Disbudparpora
20	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Terciptanya kesejahteraan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat		20 KK		300	20 KK		500	20 KK		500	20 KK		500	100 KK		1,800	Dinsosnakertrans
21	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Adanya kesejahteraan hidup yang layak		600 org		300	1600 org		800	2000 org		1,000	2400 org		1,200	9200 orang		3,300	Dinsosnakertrans
22	Program pembinaan anak yatim/terlantar	Meningkatnya sumber daya manusia bagi anak terlantar		1000 org		100	1000 org		100	1000 org		100	1000 org		100	5000 org		500	Dinsosnakertrans
23	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Pemagangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pemagangan Tenaga Kerja		27 org		120	27 org		120	36 org		150	36 org		165	162 orang		555	Dinsosnakertrans

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2012)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPK Penanggung Jawab	
				Tahun 2013			Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Kondisi Kinerja s/d 2016			
				Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Realisasi	Rp	Target	Relisasi		Rp
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18) =6+8+10+12+14	(19) =6+8+10+12+14	(20)=7+9+11+13+15	(21)
24	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya sumber daya tenaga kerja		100 org		50	100 org		70	100 org		75	100 org		90	500 org		285	Dinsosakertrans
25	Program Pemberdayaan, Santunan dan Jaminan Sosial	Tersedianya santunan dan jaminan sosial tenaga kerja		200 org		100	200 org		135	250 org		150	25 org		160	925 or		545	Dinsosakertrans
26	Program Peningkatan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas lembaga sosial		1 Orsos		40	2 Orsos		65	2 Orsos		85	3 Orsos		100	11 Orsos		290	Dinsosakertrans
27	Program Bantuan Masa Panik dan Pengumpulan Dana Sosial	Tersedianya Bantuan Sosial		12 bulan		100	12 bulan		120	12 bulan		145	12 bulan		150	60 Bulan		515	Dinsosakertrans

Tabel 8.1.a
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Urusan Wajib							
1	Pendidikan				36,792		148,097	
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Tercapainya mutu pendidikan pra dasar anak	org	85	550	425	1,970	Dinas Pendidikan
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Tercapainya program pendidikan pemerintah pendidikan 9 tahun	org	534	1,530	2670	4,770	Dinas Pendidikan
3	Program Pendidikan Menengah	Meningkatnya mutu dan pengetahuan siswa	org	140	850	700	3,470	Dinas Pendidikan
4	Program Pendidikan Luar Biasa	Meningkatnya pengetahuan masyarakat	%	1	300	4	1,020	Dinas Pendidikan
5	Program Pendidikan Non Formal	Bertambahnya pengetahuan masyarakat putus sekolah	%	1	197	4	822	Dinas Pendidikan
6	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya mutu tenaga pendidikan	org	600	30,000	2650	124,000	Dinas Pendidikan
7	Program Manajemen pelayanan Pendidikan	Tercapainya standarisasi pendidikan	%	1	210	3.73	840	Sekretariat MPD
8	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Manusia	Tercapainya mutu pendidikan	%	1	440	4	1,630	Dinas Pendidikan/ Sekretariat MPD
9	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Terwujutnya minat baca	org	40	500	120,239	2,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Program Pendidikan Tinggi	Tercapainya peningkatan SDM	%	1	350	3.15	1,200	Dinas Pendidikan
11	Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Terwujunya kreatifitas pemuda	org	800	1,700	3,400	5,550	Disbudpora
12	Program peningkatan SMK Bisa	Tercapainya standar mutu pendidikan	%	1	165	3.9	825	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan				95,361		316,182	
1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya kesehatan masyarakat	jiwa	506	500	2,638	1,500	Dinas Kesehatan
2	Program Pengadaan/Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu serta Jaringannya	Adanya Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu	unit	12	13,550	48	50,643	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/rumah sakit mata	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	unit	58	6,468	125	18,826	RSUTP
4	Program pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Tersedianya pemeliharaan rumah sakit	unit	20	1,860	85	9,300	RSUTP
5	Program regulasi pelayanan kesehatan	Adanya qanun tentang pengelolaan rumah sakit	dokumen	1	540	5	2,700	Dinas Kesehatan
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Tinggi	Adanya tenaga kesehatan yang disekolahkan dijenjang yang lebih tinggi	org	28	1,860	124	6,460	Dinas Kesehatan
7	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Adanya posyandu disetiap desa	pos	213	2,820	1057	10,740	Dinas Kesehatan
8	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Adanya sosialisasi untuk ibu melahirkan dan tenaga medis	kali pertemuan	12	2,680	60	9,180	Dinas Kesehatan
9	Program Standarnisasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya standarisasi pelayanan kesehatan	kegiatan	1	1,170	5	4,267	Dinas Kesehatan
10	Program Kemitraan Peningkatan pelayanan Kesehatan	Adanya kerjasama dibidang kesehatan	lembaga	15	1,000	57	2,700	RSUTP/Dinas Kesehatan
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Adanya tenaga terlatih untuk penyakit menular	org	2	900	10	3,180	Dinas Kesehatan
12	Program kesehatan Reproduksi Remaja	Adanya sosialisasi kesehatan reproduksi remaja	org	250	1,000	640	3,500	Dinas Kesehatan
13	Program peningkatan penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Adaya sosialisasi secara rutin tentang bahaya narkoba dan PMS	siswa	210	50	1,050	250	Dinas Kesehatan/ Kesbangpol/ Disbudpora
14	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Adanya bantuan sosial kesehatan masyarakat	jiwa	124,969	2,221	567,997	11,104	Dinas Kesehatan
15	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Terpenuhinya standar dokter spesialis	%	1	54,082	1	166,012	RSUD
16	Program Peningkatan Layanan Kesehatan	Tersedianya fasilitas tenaga kesehatan yang cukup	kec	1	60	9	280	Dinas Kesehatan
17	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Tersedianya tenaga terlatih untuk pelayanan kesehatan lansia	puskesmas	13	100	13	500	Dinas Kesehatan
18	Program Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	Adanya diklat dan penerimaan tenaga kesehatan	%	0.95	350	0.95	1,450	Dinas Kesehatan
19	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan	%	1	1,500	1	4,180	RSUD

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Adanya pengawasan rutin obat dan makanan	kali pertemuan	2	260	10	1,300	Dinas Kesehatan/ Diskopperindag
21	Program perbaikan gizi masyarakat	Adanya sosialisasi tentang gizi masyarakat secara rutin	kali pertemuan	1	300	5	1,090	Dinas Kesehatan
22	Program Desa Siaga	Adanya sosialisasi desa siaga	gampong	1	60	5	300	Dinas Kesehatan/DPMP4
23	Program Promosi Kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	Tersosialisanya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	kali sosialisasi	5	580	17	1,755	Dinas Kesehatan/DPMP4
24	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Tersosialisanya lingkungan sehat	peserta	50	50	250	250	Dinas Kesehatan/DPRKPLH
25	Program Penyelenggaraan Kesehatan Dasar	Terlaksananya program kesehatan dasar	puskesmas	13	450	13	1,550	Dinas Kesehatan
26	Program Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pelayanan kesehatan yang berkualitas	puskesmas	13	350	13	1,180	Dinas Kesehatan
27	Program Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Tertanggulangnya Permasalahan Kesehatan	puskesmas	13	300	13	1,020	Dinas Kesehatan
28	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersosialisasinya kegiatan pemberdayaan di bidang kesehatan	org	70	200	290	680	Dinas Kesehatan
29	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Tersedianya Obat-obatan Yang berasal dari Bahan Tradisional	macam	5	100	25	285	Dinas Kesehatan
3	Sumber Daya Manusia				13,678		56,655	
1	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya SDM aparatur	org	32	2,100	829	7,800	BKPSDM
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur	%	1	4,500	1	18,360	Seluruh SKPK
3	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya SDM aparatur	org	50	3,500	209	14,650	BKPSDM
4	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan	Adanya bantuan mikro untuk masyarakat miskin	kelompok	10	740	50	3,700	Dinakertrans
5	Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya aparatur yang berkualitas	%	0.2382	2,550	1	10,705	Setdakab
6	Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Kehumasan dan Protokol	Terlaksananya kegiatan yang sistematis	kegiatan	3	288	15	1,440	Setdakab
4	Pemerintahan				217,871		935,393	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran SKPK	%	1	86,750	1	382,480	Seluruh SKPK
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana kerja Aparatur	%	1	62,000	1	276,970	Seluruh SKPK
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	1	13,600	1	58,200	Seluruh SKPK
4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Pelayanan administrasi kepegawaian	org	1350	300	5500	1,000	BKPSDM
5	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya penyaluran zakat, infaq dan sadakah	kec	9	50	9	250	DPMP4/Baitulmal
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Anggota Organisasi	Adanya PNS yang berprestasi	org	67	200	301	900	Sekretariat Korpri
7	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya pengembangan ekonomi	dokumen	10	470	38	1,878	Setdakab
8	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Membaihnya laporan keuangan daerah	%	1	1,800	1	7,300	Seluruh SKPK
9	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Tersedianya perangkat pengawasan internal	SKPK	43	266	43	1,331	Inspektorat/Setdakab
10	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten	Adanya diklat tentang kelembagaan DPRK	kali	3	650	15	2,610	Sekretariat DPRK
11	Program Peningkatan kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Lancarnya Program antar Pemerintah Daerah	kerjasama	2	250	7	1,000	Setdakab
12	Program Belanja Dinas dan Atributnya	Tersedianya perlengkapan aparatur	org	180	49	900	243	Setdakab
13	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa	gampong	152	3,000	152	7,370	DPMP4
14	Program peningkatan peran perempuan dipedesaan	Meningkatnya partisipasi perempuan dalam membangun desa	gampong	153	900	153	4,475	DPMP4
15	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Terwujudnya keberdayaan masyarakat desa	gampong	154	1,000	154	4,550	DPMP4
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Adanya Sosialisasi tentang gender dan anak	kali sosialisasi	2	60	8	227	DPMP4
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Adanya koordinasi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pemerintah lain	kegiatan koordinasi	75	2,442	325	10,062	Setdakab
18	Program pembuatan tapal batas pemerintahan	Adanya tapal batas dengan baik	unit	1	150	5	750	Setdakab

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Adanya sistem informasi pada SKPK	SKPK	11	69	47	345	Setdakab /Diskominsan
20	Program Penyediaan Jaringan Informasi/internet di pedesaan	Tersedianya internet dipedesan	desa	32	300	152	1,200	DPMP4/ Diskominsan
21	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Adanya sistem kearsipan berbasis elektronik	unit	1	1,800	5	5,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
22	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Adanya gudang arsip yang tandar	unit	1	90	5	450	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Terlaksananya pemeliharaan sarana kearsipan	paket	1	40	5	200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Adanya pelayanan kearsipan	org	1,100	40	2290	200	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Program bidang komunikasi dan informatika	Terlaksananya komunikasi antar SKPK	SKPK	9	300	45	1,350	Diskominsan
26	Program pengembangan data/informasi/Statistik Daerah	Adanya Udating data setiap tahun	dokumen	3	350	15	1,300	Bappeda
27	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Adnya diklat wawasan kebangsaan	diklat	3	250	12	1,050	Kesbangpol
28	Program Pengembangan Data/Informasi	Adanya sistem informasi yang baik pada setiap SKPK	%	1	2,000	1	6,600	Seluruh SKPK
29	Program Kerjasama Pembangunan	Adanya kesepatan perencanaan pembangunan wilayah pantai barat selatan	dokumen	2	500	8	2,100	SETDAKAB/BAPPEDA
30	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Terlaksananya pembangunan di wilayah perbatasan	dokumen	1	1,300	5	4,850	Bappeda/Dinas PUPR
31	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Tersedianya DED Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	dokumen	3	245	11	880	Bappeda
32	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	Tersedianya DED kota kecamatan	dokumen	2	250	5	720	Bappeda/Dinas PUPR
33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya diklat perencanaan	diklat	7	140	35	700	Bappeda
34	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya berbagai kegiatan Pembangunan	dokumen	10	1,500	64	5,400	Bappeda
35	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Adanya renstra pembangunan ekonomi dan kebijakan ekonomi	dokumen	2	300	10	1,300	Bappeda/Setdakab

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
36	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Adanya renstra pembangunan sosial budaya dan kebijakan budaya	dokumen	2	750	6	2,480	Bappeda
37	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Tersedianya master plan Wilayah SDA	dokumen	1	100	5	500	Bappeda/Dinas PUPR
38	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Ada peta rawan bencana dan DED infrastruktur pasca bencana	dokumen	4	1,000	16	3,970	Bappeda/BPBK
39	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terealisasinya kesejahteraan aparatur	gampong	152	500	152	2,500	DPMP4/Setcam
40	Program koordinasi lintas sektoral dan pemantapan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban	Tersosialisasinya pendataan perizinan dan monitoring	org	100	160	500	800	DPMP4/Setdakab
41	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Tersedianya penyelenggaraan recana pengembangan	dokumen	1	500	6	2,000	Bappeda
42	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Adanya monitoring yang berkelanjutan	dokumen	3	200	15	1,000	Bappeda/Setdakab
43	Program Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah	laporan	9	800	26	3,100	Inspektorat/Setdakab/Bappeda
44	Program Penyuluhan Pertanggung jawaban penyelenggaraan keuangan daerah	Adanya sosialisasi dan bimbingan teknis penyelenggaraan keuangan daerah	org	44	100	220	500	Badan Keuangan/Inspektorat
45	Program Inventarisasi Hasil Pengawasan Secara Berkala	Adanya Data Inventarisasi Aset dan Kekayaan Daerah	dokumen	6	85	15	280	Inspektorat
46	Program Peningkatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya koordinasi antar daerah dan instansi	pertemuan	6	1,950	25	7,400	Bappeda
47	Program Peningkatan Fasilitas Perencanaan	Tersedianya fasilitas perencanaan	aplikasi	2	1,000	8	3,395	Bappeda
48	Program Pengembangan Sistem Berbasis Web	Tersedianya Fasilitas/Jaringan Internet	aplikasi	2	610	8	2,760	Bappeda
49	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Adanya tenaga pengelolaan keungan yang terlatih	org	10	4,700	30	21,400	Badan Keuangan
50	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Terlaksana intensifikasi dan ekstensifikasi sumber PAD BPHTB dan PBB	org	500	1,000	2500	5,000	Badan Keuangan
51	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Adanya indentifikasi sumber PAD	objek pajak	25	200	125	1,000	Badan Keuangan
52	Program Penataan Kebutuhan dan Kelaikan Aparatur	Adanya analisis jabatan dan kebutuhan aparatur	dokumen	2	300	8	1,200	BKPSDM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
53	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Terlaksananya pengembangan jati diri pemuda	kelompok terorganisir	2	100	10	500	Disbudpora
54	Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Pemuda	Terwujudnya peran serta pemuda dalam pembangunan	org	100	300	500	1,500	Disbudpora
55	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Terciptanya lapangan kerja bagi pemuda	unit	20	400	100	2,000	Diskopperindag/ Disbudpora
56	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Terhindarnya penyalahgunaan narkoba	sekolah/ instansi	6	200	30	1,000	Kesbangpol
57	Program Penciptaan dan Pengembangan Sistem Kadernisasi Pemimpin Organisasi Pemuda	Terciptanya kaderisasi kepemudaan	OKP	20	912	56	2,912	Disbudpora/ Kesbangpol
58	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Tersedianya program olah raga	klub binaan	30	269	150	1,345	Disbudpora
59	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Terciptanya struktur pembinaan olah raga	klub binaan	100	1,500	320	5,135	Disbudpora
60	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya fasilitas pendukung olah raga	unit	1	1,800	5	5,240	Disbudpora
61	Program Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Adanya partisipasi pemuda dalam pembangunan	kec	9	728	9	2,984	Disbudpora
62	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Tersedianya sarana dan prasarana kebudayaan	rehab gedung seni	2	300	8	750	Disbudpora
63	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Terciptanya sistem administrasi kependudukan online	kec	9	2,250	45	8,250	Disdukcapil
64	Program Pengembangan SDM dan Peningkatan Kinerja	Meningkatnya Kualitas SDM dan Etos Kerja Aparatur	org	30	100	98	395	Disdukcapil
65	Program Peningkatan Kesiagaan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Tersosialisasinya Kesiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran	kali	9	575	45	2,475	BPBK
66	Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Tersedianya fasilitas untuk pemadam kebakaran	unit	3	367	13	1,836	BPBK
67	Program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Adanya sosialisasi tentang bencana dan penanggulangannya	dokumen	8	367	47	1,768	BPBK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
68	Program pengembangan daerah rawan bencana	Adanya infrastruktur mengantisifkasi rawan bencana	paket	2	308	13	1,538	BPBK
69	Program Pengembangan Data dan Informasi kebencanaan	Tersedianya data rawan bencana	dokumen	4	243	19	1,170	BPBK
70	Program Tanggap darurat Sarana dan Prasarana	Tersedianya sarana penanganan masa tanggap darurat	unit	3	921	13	4,213	BPBK
71	Program pengendalian banjir	Adanya sosialisasi penyebab banjir dan pembanguna pengendali banjir	kegiatan	1	1,000	5	2,825	BPBK/Dinas PUPR
72	Program Pendekatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat	Terpenuhinya Kebutuhan SDM Aparatur	org	15	380	48	1,380	BPBK
73	Program Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam Pengurangan Resiko Bencana	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat	kec	9	400	9	1,175	BPBK
74	Program Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat	kec	9	300	9	870	BPBK
75	Program Pengelolaan Pemberian Bantuan Darurat Kemanusiaan	Tersalurkannya bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana	org	2000	280	5700	890	BPBK
76	Program Penanggulangan Bencana Kabupaten	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat	bulan	12	250	12	795	BPBK
77	Program peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bencana	Tertanggulangnya resiko bencana di Masyarakat	tahun	1	260	4	780	BPBK
78	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terwujudnya kenyamanan lingkungan	pemuda	300	208	1,500	1,040	SATPOL PP dan WH/Kesbangpol
79	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terpeliharanya kantrantibmas dan tercegahnya tindak kriminal	gampong	40	505	152	1,960	Kesbangpol/Satpol PP dan WH
80	Program Pemberdayaan masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Adanya koordinasidan fungsi intelijen	diskusi / evaluasi	40	320	160	1,375	SATPOL PP dan WH/Kesbangpol
81	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Terlaksananya fungsi pemeberantasan penyakit masyarakat	penyuluhan	6	300	30	1,500	Kesbangpol
82	Program Peningkatan Keluarga Berencana	Suksesnya program KB	kec	9	1,200	9	5,270	DPMP4

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi	sekolah	1	40	5	200	DPMP4
84	Program Pelayanan Kontrasepsi	Mengertinya masyarakat tentang alat kontrasepsi	sekolah	1	40	5	200	DPMP4
85	Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	meningkatkan partisipasi masyarakat tentang KB	kali	2	114	10	570	DPMP4
86	Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Terlaksananya kesehatan ibu dan anak	kali sosialisasi	1	30	5	150	DPMP4
87	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan konseling KRR	Adanya pelayanan lembaga konseling	sekolah	1	30	5	150	DPMP4
88	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan PMS HIV	kali sosialisasi	1	30	5	150	DPMP4/Dinas Kesehatan/RSUTP
89	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya informasi tentang anak	kali sosialisasi	1	20	5	100	DPMP4
90	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Tersedianya pendamping kelompok bina keluarga	kelompok	1	20	5	100	DPMP4
91	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Tersedianya BKB Posyandu dan PADU	posyandu	1	20	5	100	DPMP4/Dinas Kesehatan
92	Program Penataan Peraturan Perundang Undangan	Tercipta sistem regulasi pelaksanaan pemerintahan	regulasi	35	180	155	860	Setdakab
93	Program Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Tersedianya pendamping sengketa aparat	kasus	2	130	10	650	Setdakab
94	Program Peningkatan Pelayanan Organisasi Kepada Anggota Yang Tersangkut Masalah Hukum	Tersedianya kepastian hukum aparat	org	1	100	5	500	Sekretariat Korpri
95	Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terhindarnya konflik sosial kemasyarakatan	kasus	2	400	10	1,600	Setdakab
96	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya auditor yang profesional	org	4	125	20	625	Inspektorat
97	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Terlaksananya SPIP dan sesuai peraturan perundang undangan	instansi	6	20	24	100	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
98	Program Pemerintahan Mukim dan Gampong	Terselenggaranya pemerintahan desa secara efektif dan efisien	pelatihan	1	20	5	100	Setdakab/DPMP4
99	Program Peningkatan Peran Serta Organisasi Dalam Pengawasan Perilaku Anggota	Terwujudnya kesadaran aparatur dala melaksanakan tugas	org	16	40	80	200	Sekretariat Korpri
100	Program Peningkatan kapasitas Kelembagaan Organisasi Korpri	Terpenuhinya Kebutuhan Organisasi Korpri	lembaga	1	150	5	570	Sekretariat Korpri
101	Program Peningkatan Kesejahteraan Anggota Korpri Yang Aktif dan Memasuki Purna Tugas	Meningkatnya Motivasi dan Kesejahteraan Anggota Korpri	org	69	60	224	225	Sekretariat Korpri
102	Program Pembinaan Olahraga, Seni dan Budaya Korpri	Terlaksananya Kegiatan Olahraga, seni dan budaya bagi anggota Korpri	org	60	70	258	275	Sekretariat Korpri
103	Program Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Anggota Korpri	Terlaksanya Kegiatan Rohani Bagi anggota Korpri	org	35	75	143	290	Sekretariat Korpri
104	Program Pengembangan Pengadaan Barang dan Jasa	Terbentuknya ULP dan pelatihan sertifikasi pengadaan barang dan jasa	org	150	350	585	1,270	Setdakab/ULP
105	Program Pemeriksaan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Terbentuknya aparaturn desa yang berkualitas	kec	9	200	9	1,000	Inspektorat
106	Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Terbentuknya satgas SPIP	satgas	1	50	5	250	Inspektorat
107	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	Terwujudny a masyarakat yang bertaqwa dan beriman	gampong	152	100	760	500	Dinas Syariat Islam
108	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Adanya peran perempuan dalam pembangunan	pelatihan	3	240	15	1,070	DPMP4
109	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Tersedia lembaga ekonomi pedesaan	kali sosialisasi	5	258	25	1,290	DPMP4
110	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya pemahaman politik masyarakat	sosialisasi	2	250	10	1,050	Kesbangpol
111	Program peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya kesadaran nasionalisme	seminar	3	300	12	1,050	Seluruh SKPK

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Infrastruktur				196,624		692,022	
1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Adanya pembangunan infrastruktur pedesaan	unit	55	7,850	162	18,675	Dinas PUPR
2	Program peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun desa	Adanya pelatihan terhadap masyarakat dibidang Pembangunan	pelatihan	6	518	30	2,594	DPMP4
3	Program Perencanaan Tata Ruang dan Wilayah	Adanya diklat perencanaan tentang RTRW	diklat	3	220	12	728	Bappeda
4	Program Pemanfaatan Ruang	Adanya RTRW Abdy	dokumen	1	975	4	2,001	Bappeda/Dinas PUPR
5	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tersosialisasinya Qanun RTRW	kec	1	850	9	1,981	Bappeda
6	Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni	Adanya rumah masyarakat yang direhab sehingga layak huni	unit	126	4,000	732	14,926	Dinas PUPR
7	Program pengembangan Perumahan	Tersedianya perumahan murah masyarakat	unit	250	7,000	870	21,250	Dinas PUPR
8	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Tersosialisasi perumahan sehat	kegiatan	1 / 3	1,000	4	6,500	Dinas PUPR/DPRKPLH
9	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Terlaksananya pembanguan sarana dan prasarana kebinamargaan	unit	1	25,000	5	111,001	Dinas PUPR
10	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Adanya akses jalan dan jembatan untuk daerah terisolir	kegiatan	3	35,000	10	109,753	Dinas PUPR
11	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan dan jembatan	lokasi	35	35,000	205	135,035	Dinas PUPR
12	Program Pembangunan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya data base jalan jembatan	dokumen	1	150	5	751	Dinas PUPR
13	Program pembangunan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Terpeliharanya jaringan irigasi,rawa dan pengairan lainnya	D.I	20	11,000	100	36,590	Dinas PUPR
14	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Adanya saluran drainase dan gorong untuk pengendalian banjir	kegiatan	4	9,800	11	27,254	Dinas PUPR
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Drainase	Tersedianya drainase yang baik	unit	200	4,000	850	17,250	Dinas PUPR
16	Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana air Minum	Adanya Sarana dan Prasarana Air Minum Yang Layak	tahun	1	5,000	5	13,740	Dinas PUPR
17	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Tersedianya Fasilitas Air Minum dan Air Limbah	unit	1	670	5	2,420	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Terlaksananya Pembangunan di Wilayah Terpencil	paket	1	700	5	2,980	Dinas PUPR
19	Program Pengembangan Sanitasi Permukiman	Adanya sanitasi permukiman yang baik	paket	1	4,200	5	13,000	Dinas PUPR
20	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Tersedianya pengaman sungai	meter	4000	2,000	13400	7,089	Dinas PUPR
21	Program Pengembangan Sistem Irigasi Partisipatif	Meningkatnya kemandirian petani	Paket / Klpk tani	1/2	1,500	1/10	6,100	Bappeda/Dinas PUPR/DPP
22	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terpenuhinya pelayanan angkutan	buah gedung	1	647	5	3,238	Dishub
23	Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan Laut	Adanya dermaga yang memadai	dermaga	2	290	10	1,452	Dishub
24	Program Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Terpenuhinya pelayanan angkutan laut	rute	3	5,840	11	15,760	Dishub
25	Program Keselamatan Transportasi Darat	Tersedianya sarana pendukung transportasi darat	rambu	50	550	550	2,480	Dishub
26	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Terciptanya rasa aman di jalan raya	rambu	20	420	95	2,000	Dishub
27	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Adanya Pelayanan Terbaik dalam Transportasi	tim	1	108	5	543	Dishub
28	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Terpenuhinya pelayanan transportasi	unit	1	696	5	3,481	Dishub
29	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Terpenuhinya pelayanan transportasi	meter	2450	200	15,157	3,195	Dishub
30	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Terpenuhinya fasilitas perhubungan	gedung pkb	1	1,500	5	4,706	Dishub
31	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Udara	Terpenuhinya pelayanan angkutan udara	rute	2	1,200	10	4,472	Dishub
32	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa	Tersosialisasinya informasi kepada masyarakat	spanduk	20	380	63	1,200	Diskominsan
33	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa	Adanya Kerjasama Informasi dengan Media Masa	buah website	35	230	53	650	Diskominsan
34	Program Eksplorasi Mineral, Batuan dan Batu Bara	Adanya sumber pendapatan bagi daerah	meter	1.5	700	5	2,050	DPMPSTP
35	Program Peningkatan Nilai Tambah Sumber Daya Alam	Adanya Peningkatan PAD Daerah	juta	300	550	1,000	2,060	DPMPSTP
36	Program Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat	unit	4	3,000	13	12,600	Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
37	Program pembinaan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Adanya sosialisasi ketenagalistrikan alternatif	kw	60	150	160	810	DPMPTSP
38	Program Industri Mineral	Terciptanya sistem pengelolaan air minum	kegiatan	4	970	5	3,087	DPMPTSP
39	Program Pemanfaatan Energi Listrik Terbaharukan	Adanya listrik melalui sumber tenaga alternatif dipedesaan	kw	20	2,145	75	5,420	DPMPTSP
40	Program Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	Terpeliharanya turap/talud dan bronjong	meter	10000	10,000	40,000	41,370	Dinas PUPR/BPBK
41	Program Pengembangan dan pengolahan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Lainnya	Adanya penghijauan di wilayah sumber air	paket	1	5,000	4	16,200	Dinas PUPR
42	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Adanya rehabilitasi pasca bencana	meter	3700	3,700	9500	9,500	BPBK
43	Program Pengeboran Air Bawah Tanah	Tersedianya pengeboran bawah tanah	sumur	6	700	19	2,534	DPMPTSP
44	Program Hidrologi dan Hidrogeologi	Adanya informasi tentang hidrologi dan hidrogeologi	dokumen	3	790	9	2,660	DPMPTSP
45	Program Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Adanya sistem air minum yang sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku	paket	1	425	5	2,000	Dinas PUPR/ Bappeda
46	Program Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Tersedianya DED Pengembangan Wilayah Perkotaan	dokumen	1	300	5	1,300	Dinas PUPR
47	Program pengendalian dan Pengamanan Bandara	Tersedianya Fasilitas pengamanan bandara	unit	2	370	7	1,340	Dishub
48	Program Pengembangan Pemanfaatan Energi	Tersedianya Sumber Energi Baru Yang Ramah Lingkungan	sumber energi	1	270	5	970	DPMPTSP
49	Program Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Umum	Terlaksananya Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Umum	%	1	350	1	1,375	
6	Pertanian				65,020		277,566	
1	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Meningkatnya kesejahteraan dan ketrampilan penyuluh	org	14	655	60	2,733	DPP
2	Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian	Peningkanya produktifitas pada dan palawija	ton/h	8	1,600	40	8,000	DPP
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian /Perkebunan	Tersedianya sarana dan prasaran Jitut, Jides dan JUT	meter	8000	5,000	40,000	24,200	DPP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Meningkatnya operasional perekonomian LKM, panglima laut HSNI dan perempuan pesisir	kelompok	10	500	50	2,500	DKP
5	Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Meningkatnya SDM petugas teknis dan penyuluh perikanan	kelompok		200		1,000	DPP
6	Program perencanaan pembangunan dan pengembangan kelautan	Tersedianya koordinasi DED dan Monev pengembangan kelautan	dokumen	10	400	45	2,020	DKP
7	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Tersedianya pasar ternak	ekor	500	600	2,500	3,000	DPP
8	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Tersedianya sarana dan prasarana hasil produksi peternakan	%/thn	10	560	50	2,800	DPP
9	Program peningkatan ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produktifitas dan lahan budidaya pertanian/perkebunan	ton/h	7.5	519	34	2,167	DPP
10	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Tersedianya sarana dan prasaran pertanian tepat guna	hari	40	800	20	5,100	DPP
11	Program peningkatan produksi pertanian	Meningkatnya produksi dan mutu pertanian	ton/h	7	400	35	1,650	DPP
12	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terpeliharanya ternak dan pencegahan penyakit menular ternak	%/thn	0	514	0	2,570	DPP
13	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi dan mutu peternakan	%/thn	15	1,000	0.75	5,000	DPP
14	Program pengembangan budidaya perikanan	Tersedianya pengembangan sarana dan prasaran budidaya perikanan	kolam	35	4,000	162	17,800	DKP
15	Program pengembangan kawasan budidaya laut/air payau dan air tawar	Tersedianya lahan untuk budidaya dan pengembangan rehabilitas tambak kolam rakyat	tambak	15	1,500	86	8,600	DKP
16	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil	Tersedianya etalase pemasaran hasil produksi pertanian, peternakan perkebunan	unit TPI	500m2/ 4	1,200	500m2/20	5,800	DPP / DKP
17	Program Penganeekaragaman Konsumsi Pangan	terlaksannya sosialisasi diversifikasi ketahanan pangan	jenis	4	430	14	1,480	DPP
18	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	%/thn	10	560	50	2,800	DPP
19	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan dan pengembangan poskeswan dan ilegal fishing	kelompok	5	1,440	25	6,920	DKP
20	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran produksi hasil perikanan	meningkatnya hasil produksi perikanan	ton ikan olahan	170	1,000	690	4,070	DKP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Pendapatan Petani	klp / thn	16/2	3,200	67/10	11,930	DPP
22	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan/peternakan	Tersedianya kebun kelapa sawit dan karet rakyat dan rehabilitasi perkebunan rakyat berbasis komoditas unggulan	klp / thn	2	18,500	10	77,250	DPP
23	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Meningkatnya hasil produksi	ton/a	8	3,700	35	11,400	DPP
24	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Terjaganya hutan dari kegiatan ilegal logging	kec	9	200	9	1,000	DPP
25	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	benih	1.800.000.000	3,742	7.200.000.000	16,684	DKP
26	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya budidaya produksi dan kelembagaan perikanan	ton ikan	20,000	3,890	89.000 Ton Ikan	12,240	DKP
27	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi tanaman pangan dan tanaman perkebunan	meter	5000	4,800	25000	19,742	DPP
28	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Terlaksananya pengembangan tanaman hutan	ha	200	480	1,000	2,400	DPP
29	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tersedianya tanaman hutan	ha	200	450	1,000	2,250	DPP
30	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan mutu dan pemasaran hasil perikanan	unit box fiber	1,200	960	3 / 4.300	3,220	DKP
31	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan pengendalian sumberdaya Kelautan	Meningkatnya peran masyarakat dalam pelestarian kelautan	kelompok	8	1,500	35	6,090	DKP
32	Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Perkiraan Iklim Laut	Terlaksananya survey zona rawan bencana dan pemantauan rambu rambu perkapalan	dokumen	2	220	10	1,100	DKP/BPBK
33	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Terwujudnya letak batas kawasan hutan	meter	23,000	500	105,000	2,050	DPP
34	Program Pengembangan dan Peningkatan Penyuluhan	Tersedianya Tenaga Penyuluh Handal	org	8	170	30	545	DPP
35	Program Pengolahan Up Dating dan Analisa Data Statistik Kelautan dan Perikanan	Tersedianya Data Kelautan dan Perikanan	dokumen	20	200	50	500	DKP
36	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	Tertibnya Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan	kelp posmaswas	5	150	16	535	DKP
7	Industri				810		3,345	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program peningkatan Kapasitas IPTEK dan Sistem Produksi Industri	Meningkatnya SD industri berbasis produksi industri	org	15	175	100	1,100	Diskopperindag
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi industri industri kecil dan menengah	Tersedianya pengembangan industri kecil dan UKM	home industri	40	635	130	2,245	Diskopperindag
						74556		
8	Ekonomi				18,561		75,386	
1	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Terwujudnya lapangan kerja baru	jenis usaha	15	350	69	1,495	Diskopperindag
2	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Kecil dan Menengah	Terbinanya kemampuan teknologi industri	IKM	70	635	340	2,315	Diskopperindag
3	Program Penataan Struktur Industri baru	Terlaksananya informasi kerajinan dan industri	even	4	399	26	1,996	Diskopperindag
4	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya target PAD	objek	25	200	125	1,025	Badan Keuangan
5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya target PAD	meter	90	2,500	355	9,500	Badan Keuangan
6	Program Pengelolaan Asset Daerah	Adanya data base aset daerah	dokumen	1	600	5	3,001	Badan Keuangan
7	Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan	Tercapainya peningkatan PAD	BUMD	1	200	5	1,001	Setdakab
8	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Adanya monitoring pengelolaan dan pemerintah bagi usaha mikro	UMKM	50	500	250	2,550	Diskopperindag
9	Program Penciptaan UMKM Yang Kondusif	Meningkatnya SDM dan lancarnya kegiatan Usaha	org	100	100	500	600	Diskopperindag
10	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Terlaksananya pengembangan kerjasama kemitraan	even	5	4,300	25	18,555	Diskopperindag
11	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Terhindarnya masyarakat dari makan yang kadaluarsa	lokasi pasar	7	220	33	1,107	Diskopperindag
12	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi	Adanya komunikasi yang memadai	kec	1	100	9	501	Setdakab/ Diskominsan
13	Program Kerjasama Informasi media masa	Terwujudnya expose daerah	kali	140	1,000	450	501	Setdakab

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Program Sosial Kemasyarakatan	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	bantuan	2,000	100	10000	12,500	Setdakab
15	Program Pemberdayaan ekonomi Masyarakat	Terciptanya kesejahteraan masyarakat	KK	12,600	800	63,000	16,600	Setdakab
16	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Terciptanya koperasi yang berprestasi	koperasi	30	260	150	1,330	Diskopperindag
17	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Peningkatan peran lembaga ekonomi pedesaan	koperasi	10	400	50	2,010	Diskopperindag
18	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Berkembangnya industri Kecil	industri kecil	3	367	27	1,837	Diskopperindag
19	Program peningkatan Kesempatan Kerja	Terciptanya lapangan kerja yang layak	org	151	1,930	604	5,681	Dinnakertrans
20	Program peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja	Adanya peningkatan SDM melalui BLK	org	135	750	648	3,135	Dinnakertrans
21	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Adanya peningkatan peran UKM	UKM	10	200	45	1,010	Diskopperindag
22	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Terciptanya promosi dan kerjasama investasi	kegiatan	2	200	10	1,002	Setdakab
23	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Tersedianya prosedur penanaman modal	dokumen	2	200	10	1,002	DPMPSTP
24	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya saran dan prasarana promosi dan kerjasama investasi	unit	1	200	5	1,001	Setdakab
25	Program Penyelenggaraan Jaminan Sosial	Adanya jaminan sosial masyarakat	jiwa	1,700	1,350	5800	5,845	Setdakab
26	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan	Tersedianya Master Plan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	dokumen	3	450	7	1,353	Bappeda
27	Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi Kawasan	Tersedianya DED Kawasan Ekonomi Daerah	dokumen	2	250	5	847	Bappeda
28	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	Terlaksananya Diklat Pengembangan UKM	diklat	5	200	30	625	Diskopperindag
9	Lingkungan Hidup				14,408		51,659	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Adanya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	IUP	12	918	123	4,589	DPMPTSP
2	Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Adanya pengawasan yang ketat terhadap pertambangan rakyat	kasus	3	72	31	363	DPMPTSP
3	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Tersedia dan terkelolanya lahan terbuka hijau	dokumen	1	1,600	5	4,800	Setdakab /DPRKPLH /Dinas PUPR
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Adanya fasilitas yang memadai pada sistem persampahan	unit	12	3,000	35	9,500	DPRKPLH
5	Program Pengendalian, Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersedianya alat pendeteksi pencemaran dan tenaga terlatih untuk pengendalian lingkungan hidup	unit	5	1,200	25	6,005	DPRKPLH
6	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertatanya penguasaan dan pemanfaatan tanah yang ramah lingkungan	%	1	2,500	1	8,750	Seluruh SKPK
7	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan	Adanya sistem informasi petanahan yang baik	dokumen	2	30	10	152	DPRKPLH
8	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan perkiraan iklim laut	Adanya sistem informasi dan fasilitas mitigasi bencana alam laut dan iklim laut	unit	1	108	5	541	BPBK/DKP
9	Program Pembinaan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Adanya sosialisasi bidang ketenaga listrikan	kw	60	2,620	160	7,420	DPMPTSP
10	Program pemanfaatan energi terbarukan	Tersosialisinya pemanfaatan energi terbarukan	sumber energi	1	890	4	2,200	DPMPTSP
11	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Terwujudnya masyarakat yang melindungi hutan dan SDA	lokasi	3	170	15	853	DPRKPLH
12	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Terwujudnya kenyamanan lingkungan	dokku	3	300	15	1,503	DPRKPLH
13	Program dan rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam	Terwujudnya penghijauan hutan lindung yang rusak	Ha	5	300	25	1,505	DPMPTSP
14	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan Lingkungan hidup	Adanya sosialisasi dan perlindungan SDA dan LH	sekolah	30	260	150	1,330	DPRKPLH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	Program Pengembangan Ekowisata dan jasa Lingkungan dikawasan konservasi laut dan hutan	Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap wisata	lokasi	5	140	25	705	DPRKPLH
16	Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut	Terwujudnya keindahan laut yang asri	Km	3	300	15	1,503	DPRKPLH
17	Program Perlindungan Konservasi Hutan	Terlaksananya Perlindungan Hutan	sosialisasi	4	275	13	1,079	DPP
						52764		
10	Agama				12,362		53,832	
1	Program pengembangan dakwah dan peribadatan	Terlaksananya syiar agama	kegiatan	17	800	81	3,430	Dinas Syariat Islam
2	Program Bina program dan pelaporan	Telaksananya kegiatan keagamaan	kegiatan	10	600	50	3,000	Dinas Syariat Islam
3	Program peningkatan institusi kelembagaan Majelis Adat Aceh	Terwujudnya kapasitas kelembagaan adat aceh	kegiatan	1	300	5	1,501	Sekretariat MAA
4	Program pembentukan lembaga Majelis Adat Aceh tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong	Tersedia lembaga adat aceh	kec	9	380	9	1,909	Sekretariat MAA
5	Program Pengembangan Wawasan Adat Aceh	Tercapainya kesadaran masyarakat terhadap budaya	kec	9	121	9	590	Sekretariat MAA
6	Program Pendidikan Agama Masyarakat	Terwujudnya wadah pembelajaran masyarakat	kelompok	40	80	200	440	Dinas Pendidikan Dayah
7	Program Peningkatan Kualitas Mental Religius Anggota Korpri	Terhindarnya aparatur dari sikap tidak terpuji	org	536	121	2680	1,141	Sekretariat Korpri
8	Program Pengembangan Seni Budaya dan Wisata Islami	Terwujudnya Pemahan adat dan budaya lokal	kegiatan	5	1,300	21	5,400	Dinas Syariat Islam
9	Program Pengembangan Sumber Daya Syariat Islam	Meningkatnya Nilai-nilai Islami di Masyarakat	kegiatan	4	70	19	279	Dinas Syariat Islam
10	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan (KDRT)	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan	kali sosialisasi	2	50	10	252	DPMP4
11	Program peningkatan peran serta perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya kesetaraan gender dalam pembangunan	kali sosialisasi	3	300	15	1,500	DPMP4
12	Program bina hukum syariat islam	Tersedia regulasi bidang keagamaan	qanun / masjid	1 / 30	400	5 / 150	1,600	Dinas Syariat Islam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13	Program Penyelenggaraan Sidang MPU dan Pembinaan Umat	Terselesaikannya permasalahan keagamaan	sidang	12	100	60	512	Sekretariat MPU
14	Program Kemitraan Pembangunan Wawasan	Terwujudnya ahklak yang berakhlakul karimah	orang / kec	350 / 1	350	1200	1,200	Kesbangpol /MPU/Setcam
15	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Ulama/Cendekiawan	Meningkatnya SDM Ulama	org	22	380	110	1,900	Sekretariat MPU
16	Program Peningkatan Peran Ulama	Meningkatnya SDM Ulama	kali sosialisasi	1	75	5	376	Sekretariat MPU
17	Program Pembinaan dan Kemaslahatan Umat	Terwujudnya masyarakat yang islami	kali sosialisasi	2	80	10	402	Sekretariat MPU
18	Program peningkatan pemahaman dan pengamalan agama	Meningkatnya ketaqwaan masyarakat	kitab	320	160	1600	1,120	Dinas Syariat Islam
19	Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan	Meningkatnya ketaqwaan masyarakat	kelompok	40	750	200	2,350	Dinas Syariat Islam/ Dinas Pendidikan Dayah
20	Program Pengembangan Pendidikan Dayah	Terwujudnya pembinaan manajemen dan kelembagaan dayah	dayah	3	400	15	2,003	Dinas Pendidikan Dayah
21	Program Perpustakaan Desa, Perpustakaan Dayah Kabupaten Aceh Barat Daya	Tersedianya kitab/buku pendidikan dayah	dayah	3	1,000	14	4,800	Dinas Pendidikan Dayah
22	Program Agribisnis Dayah	Terciptanya dayah yang mandiri	dayah	5	800	25	3,000	Dinas Pendidikan Dayah
23	Program penataan sarana dan prasarana peribadatan	Tersedianya sarana dan prasarana peribadatan	masjid	152	400	752	2,152	Dinas Pendidikan Dayah
24	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Tersedianya sarana dan prasarana dayah	dayah	52	1,000	280	3,800	Dinas Pendidikan Dayah
25	Program Pemberdayaan Santri Dayah	Meningkatnya Kualitas Santri Dayah	santri	40	200	120	620	Dinas Pendidikan Dayah
26	Program Sumber Daya Keagamaan	Meningkatnya Kegiatan keagamaan di Masyarakat	%	0.04	85	0.2	350	Dinas Pendidikan Dayah
27	Program Pengembangan Wawasan Zakat	Terciptanya Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat	kec	9	60	9	235	Set.Baitul Mall

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
28	Program memperingati/ merayakan Hari besar Islam	Terlaksananya kegiatan keagamaan	kegiatan	5	1,000	25	4,300	Dinas Syariat Islam
29	Program peningkatan kehidupan beragama	Terciptanya struktur bidang keagamaan	gampong	152	1,000	760	3,670	Dinas Syariat Islam
						39108		
11	Sosial Budaya				9,911		39,108	
1	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Terwujudnya Pengembangan wilayah transmigrasi	KK	70	750	250	2,700	Dinnakertrans
2	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Terbinanya masyarakat penyandang sosial dengan baik	org	50	250	250	1,250	Dinas Sosial
3	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Terwujudnya perhatian pemerintah terhadap para lansia	panti	4	50	20	250	Dinas Sosial
4	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Terciptanya wadah sosial dalam peningkatan psikologis penderita penyakit sosial	lembaga	1	30	5	150	Dinas Sosial
5	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya bantuan usaha mikro untuk masyarakat miskin	kelompok	10	60	50	300	Dinas Sosial
6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Terlaksananya Kegiatan oleh lembaga ketenagakerjaan	kegiatan	1	90	4	310	Dinnakertrans
7	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya Taraf hidup masyarakat di kawasan transmigrasi	KK	20	130	80	400	Dinnakertrans
8	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Terlaksana Pembangunan di Kawasan Transmigrasi	unit	11	550	29	1,450	Dinnakertrans
9	Program penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas	Terciptanya masyarakat yang mandiri dan dinamis	kali sosialisasi	2	200	10	1,000	DPMP4
10	Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga	Terwujudnya keluarga yang mandiri	kali pelatihan	2	60	10	300	DPMP4
11	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Desa	Tercukupinya kebutuhan pangan di pedesaan	gampong	4	90	14	305	DPMP4
12	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tercapainya usaha kreatifitas pariwisata	tempat rekreasi	1	219	5	1,093	Disbudpora
13	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor wisata	tempat rekreasi	1	1,000	5	3,900	Disbudpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2017)		SKPK Penanggung Jawab
				Tahun 2017		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	Program Pengembangan Kemitraan	Terwujudnya kerjasama bidang wisata	tempat rekreasi	1	300	5	1,500	Disbudpora
15	Program Pengembangan Seni Budaya dan Wisata	Tersedianya wadah seni dan budaya	binaan sanggar	30	500	150	2,500	Disbudpora
16	Program Pengembangan Nilai Budaya	Tersedianya wadah penyaluran bakat masyarakat	sanggar baru	10	226	50	1,130	Disbudpora
17	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terpeliharanya adat istiadat	Adat yg dilestarikan	4	1,500	20	5,800	Disbudpora
18	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Terpeliharanya adat istiadat	Adat yg dilestarikan	11	900	55	2,950	Disbudpora
19	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terwujudnya kemitraan dalam pelestarian budaya	karya	30	281	150	1,405	Disbudpora
20	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Terciptanya kesejahteraan sosial dan peningkatan pendapatan masyarakat	KK	20	600	100	2,400	Dinas Sosial
21	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Adanya kesejahteraan hidup yang layak	org	2600	1,300	9200	4,600	Dinas Sosial
22	Program pembinaan anak yatim/terlantar	Meningkatnya sumber daya manusia bagi anak terlantar	org	1000	100	5000	500	Dinas Sosial
23	Program Peningkatan Kualitas, Produktifitas dan Pemagangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Pemagangan Tenaga Kerja	org	36	170	162	725	Dinnakertrans
24	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan	Meningkatnya sumber daya tenaga kerja	org	100	100	500	385	Dinnakertrans
25	Program Pemberdayaan, Santunan dan Jaminan Sosial	Tersedianya santunan dan jaminan sosial tenaga kerja	org	250	180	925	725	Dinas Sosial
26	Program Peningkatan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Meningkatnya kualitas lembaga sosial	orsos	3	110	11	400	Dinas Sosial
27	Program Bantuan Masa Panik dan Pengumpulan Dana Sosial	Tersedianya Bantuan Sosial	bulan	12	165	60	680	Dinas Sosial

**BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi								
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
1.1	Pertumbuhan PDRB	%	109	123	108	154	136*	3,38**	138
1.2	PDRB per kapita (ADHK)	Juta	400.493,91	559.420,49	572.527,97	570.000,00*	570.000,00*	5.760.000,00**	570.000,00
1.3	Persentase penduduk miskin	%	18,51	18,92	17,99	18,26	18,02*	18*	18,00
1.4	Angka kriminalitas yang tertangani	Kasus	67	47	59	74	80*	85**	85
B	Fokus Kesejahteraan Sosial								
1.	Pendidikan								
1.1	Angka melek huruf								
15 - 44			93,83	94,47	96,39	96,19	96,5*	96,85**	96,85
1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	3,25	3,27*	3,29*	3,31*	3,33*	3,35**	3,35
1.3	Angka partisipasi kasar								
SD/MI/Paket A			108,10	108,50	111,70	111,8*	111,9*	111,95**	111,95
SMP/MTs/Paket B			101,40	103,10	95,60	102*	103*	104**	104
SM/MA/Paket C			78,10	67,10	84,20	90*	102*	104**	104
1.5	Angka partisipasi murni								
1.5.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A		90,9	85,70	97,00	96,80	97,01*	97,5**	97,5
1.5.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		78,2	87,10	87,00	98,90	98,95*	90**	90
1.5.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C		60,80	63,90	72,10	69,30	69,5*	69,7**	69,70
2.	Kesehatan								
2.1	Angka usia harapan hidup	%	63,63	63,69	63,72	64,20	65*	65,5**	65,50
C	Fokus Seni Budaya dan Olahraga								
1.	Kebudayaan								
1.1	Jumlah grup kesenian	15	27	28*	29*	30*	31*	32**	32
1.2	Jumlah gedung	2	1	1	1	1	2*	3**	3
2.	Pemuda dan Olahraga								
2.1	Jumlah klub olahraga	239	239	239	239	240*	241**	241	
2.2	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	1	2*	3**	3	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	Fokus Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan								
1.1.	Pendidikan dasar								
1.1.1.	Angka partisipasi sekolah	%	99,10	99,20	99,50	99,30	99,6*	99,85**	99,85
1.1.2.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah	%	0,775	0,78	0,76	0,71	0,70*	0,68**	0,68
1.1.3.	Rasio guru terhadap murid	%	13,87	9,48	7,89	7,58	7,20*	6,89**	6,89
1.1.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	%	0,24	0,14	0,11	0,11	0,9*	0,8**	0,8
1.2	Pendidikan menengah								
1.2.1	Angka partisipasi sekolah	%	83,75	84,70	89,00	86,75	87*	87,5**	87,5
1.2.2	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	%	0,36	0,35	0,35	0,35	0,34*	0,33**	0,33
1.2.3	Rasio guru terhadap murid	%	10,89	12,82	16,05	10,34	10,00*	9,89**	9,89

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.3	Facilitas Pendidikan								
1.3.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Ruang	528						
1.3.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Ruang	104						
1.4	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):								
1.4.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	1863						
1.5	Angka Putus Sekolah								
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	10,10						
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	10,05						
1.5.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	10,36						
1.6	Angka Kelulusan								
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	17,18	64,79	6,00	16,58	18,75*	18,95**	18,95
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	23,66	25,93	26,03	32,24	35,9*	36,1**	36,1
1.6.3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	%	22,75	27,08	28,11	36,81	40,7*	47,2**	47,2
1.6.4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	102,61						
1.6.5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	112,98						
2.	Kesehatan								
2.1	Rasio posyandu per satuan balita	/ 1000 balita	117,4						
2.2	Rasio puskesmas, poliklinik, pusat per satuan penduduk	/100.000 pddk	7,2						
2.3	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/100.000 pddk	1,1						
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	/100.000 pddk	1,9	1,5	1,4*	1,5*	1,5*	1,6**	1,6
2.5	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	/100.000 pddk	25	25	25	130*	130*	140**	140
2.6	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	29,1						
2.7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	37,9						
2.8	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	51,3						
2.9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	7,8						
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	35,8	7,72	3,28	12,23	285*	330**	330
2.11	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	/100.000 pddk	10	11	14	19	6*	4**	
2.12	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	0,2						
2.13	Cakupan kunjungan bayi	%	100,1	167	208	3.301*	3.413*	3.459**	3.459
2.14	Cakupan puskesmas	unit	13	15	13	13	14*	15**	15
2.15	Cakupan pembantu puskesmas	unit	23	23	23	24	25*	26**	26
3	Perumahan								
3.1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	15,08	15,13	15,71	1.583*	1.589*	1.592**	1.592
3.2	Rumah tangga pengguna listrik	KK	28.167	29.47	30.696	31.212*	31.576*	31.798**	31.798
4	Penataan Ruang								
4.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Ha	27,42	27,42	27,42	27,42	27,52*	27,62**	27,62
5	Perencanaan Pembangunan								
5.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	0	0	0	0	0*	0*	0*
5.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Dokumen	0	0	0	0	0*	0*	0*
5.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Dokumen	0	0	0	0	1*	1*	1*
5.4	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPd	Dokumen	0	0	0	0	0*	0*	0*
5.5	Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yg telah ditetapkan dgn PERDA	Dokumen	0	0	0	0	0*	0**	0**



Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Perhubungan								
6.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang/tahun	16.200						
6.2	Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	750						
6.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	2						
6.4	Angkutan darat	%	65						
6.5	Kepemilikan KIR angkutan umum	%	35						
6.6	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Hari	310						
6.7	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Rp.	15.000.000						
6.8	Pemasangan Rambu-rambu	%	25						
7	Kependudukan dan Catatan Sipil								
7.1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk								
7.2	Rasio bayi berakte kelahiran		5.865	5.266	4.035	6.539	7.213*	7.756**	7.756*
7.3	Rasio pasangan berakte nikah								
7.4	Kepemilikan KTP								
7.5	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk								
7.6	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi								
7.7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK								
8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera								
8.1	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Orang/Tahun	3,07/kk						
8.2	Rasio akseptor KB	Orang/Tahun	3.492	3.317	3.869	4.315	4.671*	5.338**	5.338*
8.3	Cakupan peserta KB aktif	Orang/Tahun	21.549	21.940	21.062	15.548*	16.702**	16.702**	16.702**
8.4	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	Orang/Tahun	12.994	17.849	17.849	17.952*	17.997**	17.997**	17.997**
9	Ketenagakerjaan								
9.1	Angka partisipasi angkatan kerja	Orang	50.014	54.851	53.620	61.642	61.891*	61.989**	61.989**
9.2	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	54,25	58,14	55,30	62,26	63,56*	64,32**	64,32**
9.3	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	10,97	10,20	10,80	11,67	11,03*	10,11**	10,11**
9.4	Peningkatan Tenaga Kerja yang berkerja di sektor Pertanian	Orang	44.026	49.204	49.977	54.453	54.981*	55.102**	55.102**
10	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah								
10.1	Populasi Koperasi	Unit	28					10*	10**
10.2	Persentase koperasi aktif	Persen	10,52						
10.3	Jumlah Anggota Koperasi	Orang	19.387	18.611	14.942	15.115*	15.157*	5.258**	5.258**
10.4	Jumlah Penyebaran BPR/LKM	Unit							
10.5	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	UNIT	731						
10.6	Jumlah Penyaluran kredit untuk UMKM	Triliun							
11	Kepemudaan dan Olahraga								
11.1	Jumlah organisasi pemuda	33	33	33	33	25	26*	27**	27**
11.2	Jumlah organisasi olahraga	239	239	239	239	240*	241**	241**	241**
11.3	Lapangan olahraga	158	158	158	158	158*	159**	160**	160**
12	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								
12.1	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Kali							
13	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
13.1	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	orang	9,53						
13.2	Penegakan PERDA	%	75						
13.3	Cakupan patroli petugas Satpol PP	Kecamatan	10						

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13.4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	5						
13.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	Kecamatan	9						
13.6	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Menit	20						
14	Ketahanan Pangan								
14.1	Daerah Rawan Pangan	Klp/Desa							
14.2	Kelembagaan Pangan Masyarakat								
	- Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	GAPOKTAN							
	- Lumbung Pangan Masyarakat	Klp							
	- Desa Mandiri Pangan	Desa							
14.3	Jumlah tenaga Penyuluh								
	- Tenaga Penyuluh Pertanian, Perkebunan & Peternakan + THL-TBPP	Org	98						
15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
15.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Klp	132						
15.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Klp	132						
15.3	LPM Berprestasi	Desa	132						
15.4	PKK aktif	Desa	132						
15.5	Posyandu aktif	Desa	205	200	254	213	215	220	220
15.6	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	Desa	132						
15.7	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	Desa	132						
16	Statistik								
16.1	Buku "kabupaten dalam angka"	buah	100	100	100	100	110	120	120
16.2	Buku "PDRB kabupaten"	buah	50	55	68	80	90	100	100
17	Komunikasi dan Informatika								
17.1	Web site milik pemerintah daerah	buah							
18	Perpustakaan								
18.1	Jumlah perpustakaan (Kab, Desa, Mesjid, Pesantren, Keliling)	UNIT						4	
18.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	16.025	13.621	10.578	12.954	13.454	14.545	14.545
18.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Judul	32820	43227	43038	43800	44200	44600	44600
B	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	Pertanian								
1.1	Produksi padi atau bahan pangan lokal lainnya pertahun								
1.1.1	Padi	Ton	30150	172651	770793	159406	160358	162336	162336
1.1.2	Jagung	Ton	244200	85221	344283	52650	53079	53590	53590
1.1.3	Kedelai	Ton	10370	2958	82840	82975	83125	83153	83153
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar								
1.2.1	Padi	Ku/Ha	2395	235	1137	216	2196	2221	2221
1.2.2	Jagung	Ku/Ha	5100	210	15	16700	199	210	210
1.2.3	Kedelai	Ku/Ha	20300	310	1600	450	5125	5195	5195
1.3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	30,20						
1.4	Kontribusi sub sektor pertanian pangan terhadap PDRB	persen	14,75						
1.5	Kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB	persen	3,05						
1.6	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB								
1.7	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	persen	3,69						
1.8	Perluasan areal luas baku lahan sawah	Hektar	1807	2173	1565	1178	11280	11317	11317
1.9	Produksi Daging per tahun								
	- Sapi	kg	27121	46371	35710	37283	37318	37320	37320
	- Kerbau	kg	16250	17352	74130	51359	31397	31401	31401
	- Kambing	kg	1710	1572	15600	15382	15673	15797	15797

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(0)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	- Domba	kq	3.070	34.239	42.601	57.555	2.875*	2.985**	2.985**
	- Ayam Buras	kq	280.606	33.942	100.815	100.782	101.235*	101.289**	101.289**
	- Ayam Ras Pedaging	kq	268.558	140.869	139.725	138.783	138.879*	138.987**	138.987**
	- Itik	kq	56.295	25.498	30.951	30.074	31.627*	31.969**	31.969**
	1.10 Produksi telur pertahun								
	- Ayam Buras	kq	166.219	32.600	99.277.281	99.368.885	99.567.273*	99.773.895**	99.773.895**
	- Ayam Ras Petelur	kq	16.255	13.554	52.740.000	54.868.000	54.976.201*	55.001.000**	55.001.000**
	- Itik	kq	202.665	570.987	414.498.635	382.343.953	383.427.000*	383.678.000**	383.678.000**
	1.11 Populasi ternak pertahun								
	- Sapi Perah	ekor							
	- Sapi Potong	ekor	2.010	2.186	1.967	1.999	2.015*	2.020**	2.020**
	- Kerbau	ekor	6.375	5.143	4.522	4.200	4.230*	4.250**	4.250**
	- Kambing	ekor	12.913	13.923	14.400	10.598	10.675*	10.820**	10.820**
	- Domba	ekor	4.470	3.848	3.804	3.847	3.897*	3.969**	3.969**
	- Ayam Buras	ekor	243.590	217.767	233.470	202.941	203.110*	203.576**	203.576**
	- Ayam Ras Pedaging	ekor	69.995	13.150	28.418	11.733	12.543*	13.200**	13.200**
	- Itik	ekor	71.170	123.072	89.342	77.260	78.100*	78.968**	78.968**
2	Kehutanan								
	2.1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Ha	500						
	2.2 Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	500						
3	Energi dan Sumber Daya Mineral								
	3.1 Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%	3,44	3,62	4,28	1,59	1,65*	1,87**	1,87**
4	Pariwisata								
5	Kelautan dan Perikanan								
	5.1 Produksi perikanan	Ton	16.093.423	21.234.866	21.647.531	21.914.166	21.928.733*	21.959.844**	21.959.844**
	5.2 Konsumsi ikan	Kg / Kap/Thn	2.742.855						
	5.3 Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB	persen	23,501						
	5.4 Cakupan bina kelompok nelayan	Kelp	3.815						
	5.5 Produksi perikanan kelompok nelayan	Ton	200.000						
	5.6 Nilai Tukar Nelayan	NTN	106,553						
6	Perdagangan								
	6.1 Ekspor Bersih Perdagangan	US\$							
	6.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	UNIT							
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur								
1	Perhubungan								
	1.1 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Km/unit							
	1.2 Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	orang/tahun	16.200						
	1.3 Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	orang/tahun							
2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	2.1 Jenis dan jumlah bank dan cabang	buah	7	7	8	9	9	10**	10**
	2.2 Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang	buah	2	2	2	2	2	3**	3**
	2.3 Jenis, kelas, dan jumlah restoran	buah	5	5	10	15	12*	13**	13**
	2.4 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	buah	3	10	13	13	14*	15**	15**

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, Tahun 2012-2017

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2012	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD (2017)
				2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B	Fokus Iklim Berinvestasi								
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian								
	1.1 Angka kriminalitas	kasus	102	91	195	190	193*	195**	195

- NB :
- Angka Realisasi (telah berjalan)
 - Angka Rencana (sedang berjalan)
 - Angka Proyeksi (akan berjalan)
 - Kondisi kinerja pada akhir periode RPJM
 - Angka kondisi kinerja awal periode RPJM
 - Tidak ditemukannya data
 - * Angka sementara
 - ** Angka sangat sementara



BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAEDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan selama periode 2012-2017. Pencapaian tujuan dan sasaran ini sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, yaitu:

**“KABUPATEN ACEH BARAT DAYA YANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI
MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH YANG
BERBASIS KEARIFAN LOKAL”.**

RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Barat Daya setiap tahunnya. Acuan yang digunakan dalam penyusunan RPJM ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*. Dalam penyusunan RPJM ini juga mempertimbangkan kesinambungannya dengan RPJM Aceh dan RPJM Nasional. Atas dasar ini, maka RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 ini menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat Daya selama periode 2012-2017.

10.1. Pedoman Transisi

Program transisi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya pada masa berakhirnya jabatan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya tahun 2017. Tujuannya agar tidak terjadi kevakuman RKPK dan APBK tahun pertama setelah terpilihnya Kepala dan Wakil Kepala Daerah Aceh Barat Daya. Hal ini diperlukan karena belum adanya dasar dokumen perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Atas dasar ini, maka RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 ini tetap dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pembangunan Aceh Barat Daya pada tahun setelah berakhirnya



periode RPJM 2012-2017, terutama permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum selesai sampai dengan akhir periode RPJM tahun 2017, dan permasalahan-permasalahan tahun pertama yang akan dihadapi oleh Kepala dan Wakil Kepala Daerah Aceh Barat Daya yang baru. Di samping itu, RKPK yang disusun pada masa transisi (setelah berakhirnya RPJM 2012-2017), merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya yang baru pada periode berikutnya.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Dengan terjadinya Perubahan terhadap RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 maka dalam pelaksanaannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 ini dibagi dalam 2 (dua) kaidah pelaksanaan yaitu untuk tahun 2012-2016 yang tetap menampung kaidah pelaksanaan sesuai dengan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 sesuai dengan Qanun Nomor 2 Tahun 2014 dan untuk 2017 disesuaikan dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPK. RPJM ini juga menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) setiap tahunnya, serta menjadi pedoman bagi masyarakat dan dunia swasta dalam proses pembangunan.

Atas dasar tersebut diatas maka kaidah-kaidah pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2016 di tetapkan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat Daya berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPK yang berpedoman kepada RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017. Seluruh program dalam Renstra SKPK harus berpedoman dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017. Implementasi program dan kegiatan prioritas dalam Renstra seluruh SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya harus sepenuhnya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan selama periode 2012-2017.
2. RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 merupakan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPK yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPK.



3. Seluruh SKPK di lingkungan Kabupaten Aceh Barat Daya, masyarakat dan pihak swasta berkewajiban menjalankan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan program-program yang tertera dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017.
4. Dalam pelaksanaan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017, dilakukan evaluasi setiap tahunnya terhadap capaian program dan kegiatan serta target yang telah ditetapkan. Apabila rencana pembangunan tidak sesuai atau tidak mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan, maka dapat dilakukan evaluasi untuk penyesuaian atau revisi terhadap program dan kegiatan maupun target-target RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 yang telah ditetapkan. Hasil revisi RPJM tersebut akan dijadikan sebagai pedoman bagi SKPK untuk menyesuaikan kembali Renstra SKPK.
5. Apabila terjadi revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA), 2012-2017, maka Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 dengan melakukan revisi pada tahun berjalan.
6. RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 merupakan dasar penilaian terhadap kinerja tahunan dan lima tahunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Aceh Barat Daya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah ini menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya selama periode 2012-2017 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sedangkan untuk Tahun 2017 maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Aceh Barat Daya sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPK yang berpedoman kepada Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017. Seluruh program dalam Renstra SKPK harus berpedoman dan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017. Implementasi program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan Renstra seluruh SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat



Daya harus tetap sepenuhnya mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan selama periode 2012-2017.

2. Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 merupakan acuan dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPK Tahun 2017 yang tertuang dalam Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) SKPK.

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya, 2012-2017 merupakan dasar penilaian terhadap kinerja tahunan dan lima tahunan Kepala dan Wakil Kepala Daerah Aceh Barat Daya dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah ini menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan Kabupaten Aceh Barat Daya selama periode 2012-2017 sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

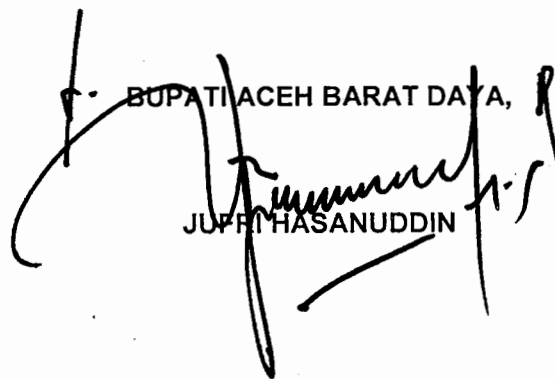


BAB XI PENUTUP

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012-2017 memuat maksud dan tujuan, landasan penyusunan, kondisi umum Aceh Barat Daya, isu-isu strategis, visi dan misi pembangunan, arah kebijakan, program prioritas/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. RPJM Aceh Barat Daya disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJM Kabupaten Aceh Barat Daya ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun serta menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renstra-SKPK), Rencana Kerja Pemerintahan Kabupaten (RKPK) Aceh Barat Daya.

Keberhasilan Pemerintah kabupaten Aceh Barat Daya periode 2012-2017 dalam mewujudkan Visi **“KABUPATEN ACEH BARAT DAYAYANG ISLAMI, SEJAHTERA, DAN MANDIRI MELALUI PEMBERDAYAAN POTENSI DAERAH YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL”** perlu dukungan dan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya.


BUPATI ACEH BARAT DAYA,
JUPRI HASANUDDIN

